



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki tahun kedua dalam pencapaian Visi Pemerintah Daerah Tahun 2014 – 2019 “**Maluku Utara CINTA 2019**”, Provinsi Maluku Utara secara bertahap terus melakukan penataan dan pembangunan di segala bidang. Dilandasi slogan dari laut membangun Maluku Utara, pemerintah dan masyarakatnya berkomitmen membawa daerah ini untuk maju, yang tentunya termanifestasi melalui deskripsi teknokratiknya cerdas, indah, nikmat, taqwa dan aman.

Sebagai provinsi yang perekonomiannya berbasis pada kegiatan pertanian-perikanan, Maluku Utara kemudian telah memulai upaya transformasi guna menjelma menjadi provinsi dengan proporsi industri dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ini telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan perkapita, bagian dari indikator ekonomi, akan tetapi juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial-budaya dan lingkungan fisik prasarana lainnya.

Namun demikian, pencapaian saat ini bukanlah jaminan bagi kemajuan daerah ini di masa depan. Hal ini disebabkan kebutuhan dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah ini akan semakin kompleks, sementara disisi lain, belum diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya pembangunan yang cenderung terbatas. Untuk itu pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan investasi dan kemampuan mendanainya, sehingga perencanaan yang disusun menjadi realistis.

Penyusunan perencanaan dimaksud tentunya melalui sebuah mekanisme dialogis yang mampu mengakomodasi beragam kepentingan, yang dalam pendekatannya menganut isyarat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni politik, teknokratik, partisipatif, serta top-down dan bottom-up.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 (RKPD 2016) adalah dokumen resmi tahunan yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD 2016 diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Penyusunan RKPD 2016 dilakukan melalui beberapa tahapan yakni : (1) persiapan penyusunan RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD; (5) perumusan rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD. Tahapan-tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, substansi RKPD 2016 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat, program Kabupaten/Kota maupun program-program hasil penjangkaran aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang. Dengan demikian RKPD 2016 mempunyai fungsi pokok di antaranya sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
4. Sebagai dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD;
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah;
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kinerja pelayanan SKPD;
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan RKPD 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 15. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 16. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2).

29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019. (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 2).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD 2016 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karenanya, substansi RKPD 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD 2016

RKPD 2016 yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 2016
- 1.5. Maksud dan Tujuan
- 1.6. Proses Penyusunan

Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu
2.4.	Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis
Bab III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
3.2.	Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2016
3.3.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.4.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016
4.1.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016
4.2.	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Bab VI	Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD 2016 adalah :

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk satuan kerjanya masing-masing, dan merupakan pedoman dalam penyusunan APBD tahun 2016 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dan menjadi satu kesatuan dengan APBD tahun 2016;

3. Menjamin kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016;
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.6 Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKPD melibatkan partisipasi masyarakat (*public participation*) melalui forum-forum perencanaan yang dilaksanakan secara partisipatif dan berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Untuk itu RKPD 2016 disusun melalui proses sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD;
3. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD;
4. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang;
5. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan;
6. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD;
7. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang;
8. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Luas Wilayah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km², terdiri dari luas lautan 113.796,53 km² atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km² atau 30,92 persen. Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033, terdapat perubahan luas wilayah laut dan luas wilayah darat dari penetapan sebelumnya sesuai hasil pengukuran dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi melalui persetujuan substantif Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Provinsi Maluku Utara secara administratif memiliki batas wilayah :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Kota dijabarkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 : Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Provinsi, Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)		
	Darat	Laut	Jumlah
Provinsi Maluku Utara	32.004,57	113.796,53	145.801,10
Halmahera Barat	1.704,20	11.623,42	13.327,62
Halmahera Tengah	2.653,76	6.104,65	8.758,41
Halmahera Utara	3.896,90	19.536,02	23.432,92
Halmahera Selatan	8.148,90	31.484,40	39.633,30
Halmahera Timur	6.571,37	7.695,82	14.267,19
Kepulauan Sula	1.791,84	6.647,17	8.439,01
Ternate	111,39	5.544,55	5.655,94
Tidore Kepulauan	1.645,73	4.293,20	5.938,93
Pulau Morotai	2.476,00	13.170,01	15.646,01

Pulau Taliabu	3.004,48	7.697,29	10.701,77
---------------	----------	----------	-----------

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah kecamatan berdasarkan data Podes BPS Provinsi Maluku Utara (2014) sebanyak 115 Kecamatan dengan 1.066 desa, 117 kelurahan dan 13 UPT.

Tabel 2.2: Jumlah Desa/Kelurahan/UPT Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah				
		Kecamatan	Desa/Kelurahan/UPT			
			Desa	Kelurahan	UPT	Total
1.	Halmahera Barat	8	169	-	1	170
2.	Halmahera Selatan	30	250	-	6	256
3.	Halmahera Tengah	10	61	-	1	62
4.	Halmahera Timur	10	102	-	2	104
5.	Halmahera Utara	17	198	-	1	199
6.	Kepulauan Sula	12	78	-	-	78
7.	Pulau Morotai	5	88	-	-	88
8.	Kota Ternate	7	-	77	-	77
9.	Kota Tidore Kepulauan	8	49	40	2	91
10.	Pulau Taliabu	8	71	-	-	71
Provinsi Maluku Utara		115	1.066	117	13	1.196

Sumber : Statistik PODES 2014, BPS Prov. Maluku Utara Tahun 2015.

Letak dan Kondisi Geografis

1) Posisi Astronomis

Ditinjau dari posisi astronomis, secara geografis Provinsi Maluku Utara berada diantara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° – 129° Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni, yaitu:

Tabel 2.3: Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Pulau Berpenghuni	Pulau Tidak Berpenghuni	Jumlah Pulau
1	Tidore Kepulauan	4	7	11
2	Halmahera Utara	8	74	82
3	Kepulauan Sula	7	79	86
4	Halmahera Selatan	35	336	371
5	Halmahera Barat	2	123	125
6	Halmahera Timur	12	29	41
7	Ternate	5	4	9
8	Halmahera Tengah	2	40	42
9	Pulau Morotai	6	26	32
9	Pulau Bermasalah	0	4	4
10	Pulau Provinsi	1	1	2

No.	Kabupaten/Kota	Pulau Berpenghuni	Pulau Tidak Berpenghuni	Jumlah Pulau
Jumlah Total		82	723	805

Sumber : Hasil Rapat Verifikasi ke II, Pembinaan dan Pembakuan Nama Pulau di Provinsi Maluku Utara, DKP Prov. Maluku Utara Tahun 2012.

2) Posisi Geostrategik

Dalam peta geostrategis, Provinsi Maluku Utara terletak pada posisi perbatasan negara Indonesia dengan perairan internasional, yakni terhadap Laut Pasifik (Negara Palau) dan pada perairan yang relatif tidak jauh dengan perairan negara Filipina. Pada posisi yang merupakan perbatasan laut yang demikian maka sistem pertahanan dan keamanan di wilayah ini harus mendapat perhatian serius karena menjadi gerbang perbatasan internasional. Berbagai risiko penyusupan atau *infiltrasi*, *illegal fishing*, bajak laut dan sebagainya mengancam Provinsi Maluku Utara karena posisinya yang berhadapan langsung dengan laut bebas Internasional. Di bagian sisi barat wilayah Provinsi Maluku Utara, dilalui ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia III), yang merupakan jalur lintasan utama pelayaran Internasional dari Pasifik melewati Indonesia.



Sumber : Dokumen MP3EI Provinsi Maluku Utara 2012

Gambar 1: Peta Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Dengan adanya ALKI III ini, maka wilayah Provinsi Maluku Utara khususnya di kawasan perairannya menjadi suatu kawasan lintasan Internasional yang memerlukan perhatian ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan nasional. Adanya pangkalan Angkatan Laut (LANAL) di Ternate serta sebaran sejumlah Pos Angkatan Laut (POSAL) dan fasilitas Angkatan Udara di Morotai, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan yang secara militer mendapat pengawasan ketat. Dengan demikian, maka jelas bahwa ditinjau dari segi geopolitik maupun keberadaan berbagai fasilitas militer, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Andalan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional RI.

1) Kondisi/Kawasan

a. Kawasan Pesisir dan Pedalaman

Salah satu problem pembangunan provinsi Maluku Utara adalah masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan. Kawasan Pedalaman merupakan daerah yang secara geografis letaknya jauh dari pesisir pantai. Kondisi geografis yang demikian membuat kawasan pedalaman sangat tertinggal dari kawasan pesisir. Dalam konteks ini, BPS telah menetapkan letak desa terhadap laut dan hutan. Dimana berdasarkan letaknya, desa dibedakan menjadi desa di sekitar hutan, desa di dalam hutan dan desa di luar hutan.

Tabel 2.4 : Desa/Kelurahan/UPT menurut lokasi terhadap laut dan hutan di Provinsi Maluku Utara, 2015

No.	Kabupaten/Kota	Letak Desa/Kelurahan/UPT di			Jumlah
		Dalam Hutan	Sekitar Hutan	Luar Hutan	
1	Halmahera Barat	1	23	146	170
2	Halmahera Tengah	4	27	31	62
3	Kepulauan Sula	1	71	6	78
4	Halmahera Selatan	3	223	30	256
5	Halmahera Utara	8	13	178	199
6	Halmahera Timur	0	68	36	104
7	Pulau Morotai	2	47	39	88
8	Pulau Taliabu	6	27	38	71
9	Ternate	0	18	59	77
10	Tidore Kepulauan	0	58	33	91
Total		25	575	596	1.196

Sumber : Statistik PODES 2014, BPS Prov. Maluku Utara Tahun 2015.

b. Kawasan Terpencil

Kawasan terpencil secara geografis merupakan kawasan yang terletak jauh dari kota dan kurang berhubungan dengan dunia luar. Untuk dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Daerah itu sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, dan
2. Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia, atau walaupun tersedia tetapi dalam keadaan yang sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan usahanya para penanam modal harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dimaksud.

Prasarana ekonomi yang dimaksud adalah pelabuhan, jalan dari pelabuhan menuju lokasi (access road), jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, dan prasarana lain di bidang ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan berjalannya suatu perusahaan. Jika berdasarkan kriteria daerah tertinggal di provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten dan Kota terdapat 7 Kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Dengan demikian kawasan terpencil di Provinsi Maluku Utara berada pada 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.

Topografi Wilayah

Sebagian besar wilayah Maluku Utara bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Kondisi topografi Maluku Utara beraneka ragam yaitu mulai dari datar, landai, curam dan sangat curam dengan bentuk wilayah mulai bentuk pantai, teras berbukit dan pegunungan. Topografi yang dominan adalah kelas lereng curam yaitu seluas $\pm 1.707.983,23$ Ha atau sebesar 52,39 persen dari luas keseluruhan.

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1982, jenis tanah yang ada di Provinsi Maluku Utara sebanyak 8 jenis tanah, yaitu jenis Andosol, Latosol, Kompleks, Mediteran Merah Kuning, Organosol,

Podsolik Merah Kuning, Regosol dan Rensina. Adapun cakupan jenis tanah Organosol mendominasi wilayah ini dengan luas 1.390.078,32 Ha atau 42, 64 persen.

Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dari Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas.

Geologi dan Sumberdaya Mineral

1) Struktur dan Karakteristik

Bagian tengah dan utara Provinsi Maluku Utara sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan bahan induk bervariasi. Di bagian utara dan timur laut Semenanjung Halmahera didominasi oleh pegunungan, sedangkan di Semenanjung Utara disusun oleh formasi Gunung Api (Andesit dan batuan beku Basaltik). Di semenanjung timur laut ditemukan batuan beku asam, basa, dan ultra basa serta batuan sedimen. Daerah pegunungan merupakan bentangan lahan dengan puncak tajam dan punggung curam tertoreh serta lereng yang curam (>40 persen).

Di Semenanjung Utara Halmahera terdapat gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Di daerah semenanjung utara Halmahera tersebut tidak ditemukan dataran alluvial. Kemudian, memasuki daerah Kao ditemukan dataran alluvial yang luas pada daerah pedalaman, dataran vulkanik yang berombak dan dataran alluvial berawa secara lokal. Pulau Morotai memiliki banyak kesamaan dengan Pulau Halmahera bagian utara dan timur, yakni dicirikan oleh gunung-gunung yang berkembang dari batuan sedimen dan batuan beku basa. Di semenanjung bagian selatan Halmahera lebih didominasi oleh daerah gunung yang terutama berkembang dari bahan-bahan sedimentasi naal dan batu gamping (Marl dan Limestone); pada bagian ini terbentang dataran sempit alluvial arah timur-barat.

Di kawasan sepanjang pantai barat Halmahera terbentang sejumlah pulau besar dan kecil, yaitu: Ternate di bagian utara sampai Obi di bagian selatan. Pulau-pulau kecil di bagian utara umumnya merupakan daerah vulkanik yang tersusun dari bahan andesit dan batuan beku basaltic, dengan kemiringan lereng curam (30-45 persen) sampai sangat curam (> 45 persen).

Kelompok Pulau Bacan merupakan bentangan lahan pegunungan yang sama dengan Halmahera Utara, yaitu batuan beku basa dan batuan metamorfik. Walaupun batuan metamorfik menyebar secara lokal, tetapi merupakan batuan induk dominan di daerah ini. Di sepanjang pesisir terdapat dataran pantai yang sempit dan di bagian tengah/pusat Pulau Bacan dibentuk oleh dataran alluvial. Bentang lahan Pulau Obi mengikuti pola yang sama, bagian tengah didominasi oleh daerah pegunungan dengan bahan penyusunnya batuan beku basa dan diapit oleh deretan perbukitan dan batuan sedimen. Kelompok Kepulauan Sulabesi mempunyai struktur yang sama, tetapi memiliki bahan induk yang berbeda. Sebagian besar daratan Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula merupakan daerah pegunungan dengan puncak tajam dan lereng curam, berkembang terutama dari batuan metamorfik. Di bagian barat Pulau Sanana juga ditemukan bahan induk granit.

Kondisi tanah di Provinsi Maluku Utara menunjukkan sifat yang berbeda di setiap bagian wilayahnya, mulai dari Morotai di bagian utara sampai Sulabesi di selatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor iklim, yaitu curah hujan dan suhu yang tinggi, serta struktur geologi di setiap wilayah. Penyebaran dan jenis tanah di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: (a) Jenis tanah Mediteran terdapat di Pulau Morotai bagian barat – timur - selatan; Pulau Doi, Kecamatan Loloda; (b) Jenis tanah Podsolik merah kuning Terdapat di Pulau Halmahera, dari utara ke selatan, Tobelo, Ibu, Obi bagian timur, Sanana, Pulau Taliabu, Wasile, Oba, Weda dan Maba; (c) Jenis tanah Kompleks terdapat di Pulau Morotai bagian barat dan timur, Obi bagian tengah, Pulau Halmahera bagian tengah sampai timur; (d) Jenis tanah Latosol terdapat di Loloda, Galela, Jailolo bagian selatan, Gane Timur, Gane Barat, Bacan Oba, Wasile, Weda dan Maba; (e) Jenis tanah Regosol terdapat di Loloda, Galela, Sahu, Kao, Pulau Ternate,

Pulau Makian, Pulau Obi di pesisir utara; dan (f) Jenis tanah Aluvial terdapat di Pulau Obi bagian barat dan Pulau Taliabu.

2) Potensi

Dalam sektor pertambangan didukung oleh ketersediaan potensi tambang, utamanya eksploitasi Emas dan Nikel serta 18 belas jenis bahan galian yang termasuk golongan A, B dan C yang belum diolah. Pulau Halmahera mempunyai potensi endapan bahan galian emas yang cukup prospektif, temuan endapan emas epitermal di daerah Gosowong dengan potensi yang terkandung dalam busur magnetik. Sumber endapan nikel laterit di daerah teluk Weda yang sampai saat ini belum dilakukan eksploitasi secara terinci yang berkisar 92.000.000 ton. Indikasi adanya hidro karbon di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan oleh gejala rembesan minyak seperti yang ditemukan di Pulau Halmahera yang dilakukan oleh Pertamina dan British Petroleum di Cekungan Halmahera Selatan dengan rembesan flour pada kedalaman 3000 meter, selain itu terdapat potensi panas bumi di Jailolo, energi panas bumi di Songa Bacan.

Dari berbagai potensi yang dimiliki tersebut, Provinsi Maluku Utara disebut sebagai laboratorium alam geologi dikarenakan kedudukannya berada pada tumbukan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Australia yang bergerak ke arah selatan, lempeng Eurasia yang bergerak dari arah barat dan Lempeng Pasifik dari arah barat. Beberapa sumber daya mineral atau bahan galian tambang yang ditemukan tersebar hampir di seluruh daerah Maluku Utara, seperti; Tembaga, Uranium, Emas, Nikel, Batu Bara, Alumanium/Bauksit, Magnesit, Pasir Besi, Titanium, Mangan, Asbes, Kaolin, Diatomit, Batu Permata, Kromit, Pasir Kuarsa, Batu Gamping, Batu Apung, Granit, Talk, Migas, Potensi Panas Bumi, dan Sumber Daya Air.

Tabel 2. 5: Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Tengah	Nikel	Weda, Gebe, Patani	Indikasi
	Pasir Besi	Tolippe, Kec. Weda	Cadangan 1.140
	Kromit	P. Gebe, Kec. Gebe	Indikasi

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Utara	Emas	Kapa-Kapa, Kec Galela	Urat Kuarsa @ 76,6 Gr/Ton
		Akelamo, Kec. Galela	Mineralisasi Epotermal @ 1,4 Gr/Ton
		Gamkehe, Loloda	Kadar 2,7 Gr/Ton
		Aha, Morotai Selatan	Indikasi
		Bere-Bere, Kec. Morotai Utara	Indikasi
	Mangan	Supu, Loloda Utara	Kadar MnO ₂ 57.05 persen
		P. Doi, P. Rau, P. Dugasuli	Indikasi
	Besi	Loloda Utara	Indikasi
	Pasir Besi	Dorume, Ngajam	Indikasi
	Kromit	Dodaga	Indikasi
Halmahera Selatan	Emas	Yaba, Kec. Bacan Barat	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,36-62 Gr/Ton
		Kaputusan, Bacan	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,03-0,4 Gr/Ton
		Raroang, Bacan	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,27-0,39 Gr/Ton
		Pigaraja, Bacan Timur	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,39-43 Gr/Ton
		Sawadae, Bacan	Cadangan= 12.000.000 Host Rock, Kadar 2,33 Gr/Ton
		Sambiki, Obi	Tahap Penelitian
		Anggai, Obi	Urat Kuarsa, 11.985 Ton Emas (Dikelola Rakyat)
		Kayoa	Indikasi
	Tembaga	Yaba, Bacan Barat	19 persen
		Sayoang, Bacan	Cadangan 6.000.000 Host Rock Kadar 200 Ppm
		Obi Selatan	Indikasi
		P. Kasiruta, Bacan	Indikasi
		Obilatu, Obi	Indikasi
		Bibinoi, Kec. Bacan Timur	Indikasi
	Pasir Besi	P. Obilatu, Obi	87.700.000 Ton Fe=20 persen
		Bobo, Obi Selatan	Indikasi
		Manatahan, Obi	Indikasi
		Akenia, Obi	Indikasi
Halmahera Timur	Nikel	Buli, Maba	Luas 39,040 Ha Pemboran Eksplorasi Sementara Cadangan 42.763.460 Ton
	Pasir Besi	Wayamli, Maba	Indikasi
		Tanjung Buli, Maba	Indikasi
Kepulauan Sula	Emas	Kuyu, Taliabu Barat	Cadangan 72.000.000 Ton, Kadar 0.12-0,15 Gr/Ton
		Tawate, Sanana	Indikasi
Ternate	-	-	-

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Tidore Kepulauan	Tembaga	Payahe, Oba	Indikasi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara

Tabel 2.6 : Potensi Mineral Industri di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Barat	Diatomit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Endapan tufa, tebal 2-5 m, luas 10 ha
	Kalsit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Pengisi batugamping, tembus cahaya
	Magnesit	Kp. Podol, Kec Ibu	Bongkahan-bongkahan di sungai
Halmahera Tengah	Perlit	Tabogo	Abu-abu pada satuan lava
Halmahera Utara	Batu Gamping	Daruba, Morotai Selatan	Batugamping Koral, umur kwarter
		Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat	Putih,koral,umur kwarter, CaO=53 persen
Halmahera Selatan	Batu Gamping	Marituso, Kec. Bacan Barat	Putih,kompak,sisipan pada napal penyebaran luas, CaO=54,56 persen
	Bentonit	Kopel Labuha, Kec. Bacan	Hasil pelapukan tufa
Halmahera Timur	Batu Gamping	Wasilei, Kec. Wasilei	Kompak,putih,umur pra tersier
	Talk	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	Pada batuan ultrabasa
	Magnesit	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	
Kepulauan Sula	Pasir Kuarsa	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi
	Talk	S.Lomot, Kec Taliabu Barat	Hasil alterasi hidrotermal
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	Kaolin	Akelana, Kec Oba	Endapan Tufa, bahan Keramik

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara

Tabel 2.7 : Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Barat	-	-	-
Halmahera Tengah	Batu Bara	Patani-Kec. Patani	Indikasi
Halmahera Utara	Batu Bara	Galela-Kec. Alela	Indikasi
		Gosoma-Kec. Kao	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Utara	Belum dibor

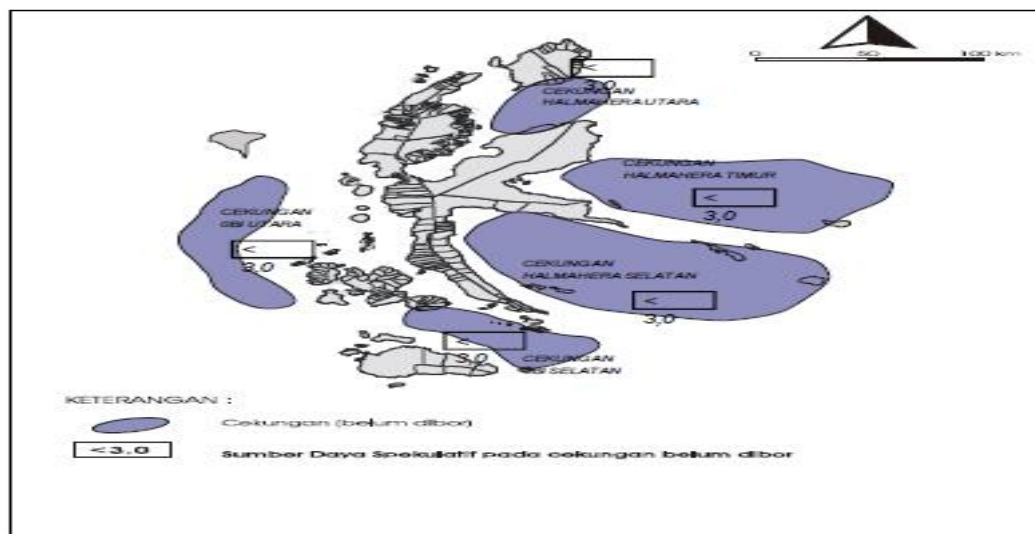
Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Selatan	Batu Bara	Sungai Huru-Kec Obi	Indikasi
		Desa Cap-Kec Obi	Indikasi
		Kelo, Obi	Indikasi
		Anggai, Obi	Indikasi
		Amasing, Bacan	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Obi Utara	Belum dibor
		Cekungan Obi Selatan	Belum dibor
		Cekungan Halmahera Selatan	Belum dibor
Halmahera Timur	Batu Bara	Bicoli - Maba Selatan	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Timur	Dibor
Kab. Kepulauan Sula	Batu Bara	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi
		Tawate, Sanana	Indikasi
	Minyak Bumi	Falabisahaya, Kec. Mangoli Barat	Pengeboran Eksplorasi
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	-	-	-

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara

Tabel 2.8 : Perkiraan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Maluku Utara

NO.	CEKUNGAN	MINYAK BUMI (Juta Barel)	GAS BUMI (TSCF)
1.	Halmahera Utara	0.0072	0.0018
2.	Halmahera Timur	0.0430	0.0108
3.	Halmahera Selatan	0.0950	0.0238
4.	Obi Utara	0.0135	0.0680
5.	Obi Selatan	0.0139	0.0972
Jumlah		0.1780	0.2016

Sumber : IAGI 1985



Sumber : Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Maluku Utara 2010-2030

Gambar 2: Peta Cekungan yang Terdapat di Maluku Utara

Pemegang izin usaha pertambangan Provinsi Maluku Utara sebanyak 248 IUP yang berlokasi di seluruh kabupaten kecuali Kota Ternate, sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.9 : Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Luas Areal Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

No.	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah IUP
1.	Provinsi Maluku Utara	5 IUP
2.	Kota Tidore	10 IUP
3.	Halmahera Barat	6 IUP
4.	Halmahera Utara	26 IUP
5.	Halmahera Tengah	36 IUP
6.	Halmahera Timur	22 IUP
7.	Halmahera Selatan	44 IUP
8.	Kepulauan Sula	91 IUP
9.	Pulau Morotai	8 IUP
Jumlah		248 IUP

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara 2015

Sampai tahun 2014, yang sudah Clean and Clear mencapai 157 IUP sedangkan yang belum Clean and Clear sebanyak 91 IUP. Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Provinsi Maluku Utara dilakukan oleh 13 Perusahaan dengan jenis bahan galian didominasi nikel dengan produksi pertahun dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.10: Produksi dan Penjualan Nikel Pertahun

No.	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Galian	Produksi Pertahun
1.	PT. Aneka Tambang Buli	Nikel	5.000.000 Ton
2.	PT. Nusa Halmahera Mineral	Emas	440.000 OZ
3.	PT. Gane Permai Sentosa	Nikel	2.500.000 Ton

No.	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Galian	Produksi Tahunan
4.	PT. Trimegah Bangun Persada	Nikel	2.000.000 Ton
5.	PT. Makmur Jaya Lestari	Nikel	2.000.000 Ton
6.	PT. Alam Raya Abadi	Nikel	1.000.000 Ton
7.	PT. Tekindo Energi	Nikel	2.000.000 Ton
8.	PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara	Nikel	2.000.000 Ton
9.	PT. Rimba Kurnia Alam	Nikel	2.000.000 Ton
10.	PT. Aditya Nikelindo	Nikel	2.000.000 Ton
11.	PT. Haltim Mining	Nikel	2.000.000 Ton
12.	PT. Wana Tiara Mineral	Nikel	1.000.000 Ton
13.	PT. Agnit Raya	Nikel	1.000.000 Ton

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara 2015

Hidrologi

Sumberdaya air di Provinsi Maluku Utara meliputi curah hujan, danau, sungai, air tanah dalam (mata air). Curah hujan di Provinsi Maluku Utara pada umumnya cukup untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti untuk irigasi, industri, air minum, dan untuk keperluan domestik lainnya.

DAS terluas ada di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara. Adapun DAS di Provinsi Maluku Utara berjumlah sebanyak 395 DAS.

Sungai-sungai yang ada di Provinsi Maluku Utara berikut cabang-cabang dan anak-anak cabangnya memiliki tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata melingkupi seluruh wilayah provinsi. Pada saat musim penghujan aliran air sungai-sungai berlimpah namun hanya berlangsung dalam waktu yang relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, namun di sisi lain dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah bagian hilir. Pada musim kemarau aliran sungai-sungai itu sangat kecil, atau bahkan kering. Dengan demikian penggunaan air perlu dan harus diatur sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dan menghindari terjadinya masalah baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Sungai yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku Utara yaitu sebanyak 98 buah sungai yang sebagian besar diantaranya bermata

air di daerah pegunungan, sedangkan lainnya berasal dari mata air di lereng-lereng yang letaknya lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. Sungai Ake Rica merupakan sungai terpanjang yaitu sepanjang 75 km yang merupakan aliran sungai Laiwui.

Provinsi Maluku Utara memiliki banyak sumber air seperti mata air, telaga, sungai dan sumber air lainnya. Beberapa sumber air tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air minum dan sebagai irigasi untuk lahan pertanian. Ketersediaan air tanah yang cukup melimpah di Provinsi Maluku Utara tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga manfaat yang dihasilkan dari sumber air tersebut dapat diperoleh secara berkelanjutan. Provinsi Maluku Utara setidaknya memiliki 12 danau yang tersebar di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate.

Luas kawasan hutan rawa di Provinsi Maluku Utara adalah 3.023 Ha yang tersebar di Kabupaten Halmahera Utara dengan luas 490 Ha, Halmahera Selatan dengan luas 262 Ha, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu sebesar 2.271 Ha.

Potensi sumber daya air di Provinsi Maluku Utara sangat bervariasi, dimana terdapat sejumlah potensi sumber air tanah dengan akuifer berskala kecil sampai tinggi. Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara 0.1 s/d 500 liter/detik.

Tabel 2.11 : Potensi Debit Mata Air Sumber Air Bersih di Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
1	Jebubu	Morotai Selatan	0,5	67	Maupo	Patani	5,0
2	Samson	Morotai Selatan	6,0	68	Bondi 1	Patani	5,0
3	Gaji	Morotai Selatan	0,1	69	Bondi 2	Patani	5,0
4	Tanjung Batu	Morotai Selatan	1,0	70	Yeisowo	Patani	5,0
5	Sangawo	Morotai Selatan	0,1	71	Giplun	Patani	0,5
6	Cocobubu	Morotai Selatan	70	72	Dodinga	Oba Utara	0,5
7	Akemahutu	Morotai Selatan	35,0	73	Air Bak	Oba Utara	0,1
8	Yao	Morotai Utara	35,0	74	A. Pancuran	Oba Utara	2,5
9	Air Jebubu	Morotai Utara	4,0	75	Air Sagu	Oba Utara	2,0

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
10	Bere Mahutu	Morotai Utara	4,0
11	Laoumaake	Morotai Utara	1,0
12	Aru	Morotai Utara	18,0
13	Lalum	Morotai Utara	25,0
14	Roringosa	Morotai Utara	30,0
15	Lepalamo	Morotai Utara	20,0
16	Cobubu	Morotai Utara	12,0
17	Lodo	Morotai Utara	15,0
18	Boku	Morotai Utara	20,0
19	Losua	Morotai Utara	5,0
20	Tatadi	Morotai Utara	20,0
21	Teto sokiki	Morotai Utara	4,0
22	Gogomu	Morotai Utara	10,0
23	Memeta 1	Morotai Utara	10,0
24	Memeta 2	Morotai Utara	20,0
25	Sagu	Morotai Utara	0,2
26	Cendana	Morotai Utara	2,0
27	Hapo 1	Morotai Utara	5,5
28	Hapo 2	Morotai Utara	2,0
29	Damar	Morotai Utara	10,0
30	Madola	Morotai Utara	0,2
31	Bola Waro	Morotai Utara	0,5
32	Maloko	Morotai Utara	15,0
33	Sosa iku 1	Ibu	100,0
34	Sosa iku 2	Ibu	500,0
35	Pancuran	Ibu	10,0
36	Akeboso	Ibu	300,0
37	Goiu	Ibu	0,5
38	Tuladi	Ibu	0,2
39	Kawao	Sahu	0,5
40	Gamkonora	Sahu	500,0
41	Duter	Jailolo	200,0
42	Gurutu	Jailolo	100,0
43	Golo	Jailolo	30,0
44	Aketola	Jailolo	500,0
45	Rugasi	Jailolo	1,0
46	Jailolo	Jailolo	300,0
47	Gurango	Jailolo	400,0
48	Sahu	Kao	5,0
49	Kupa-kupu	Tobelo	7,0
50	Akedewuwu 1	Tobelo	40,0
51	Akedewuwu 2	Tobelo	10,0
52	Ake Banten 1	Ternate	2,0
53	Ake Banten 2	Ternate	0,1
54	Ake Gale	Ternate	60,0
55	Ake Gale 2	Ternate	15,0
56	Ake Santoso	Ternate	1,8
57	Air Tefe-tege	Ternate	5,1
58	Akerica	Ternate	5,0
59	Ake Minta	Ternate	0,2
60	Tubo	Ternate	0,2
61	Ganefo	Ternate	5,0
62	Ake Sahu 1	Tidore	-

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
76	A. Durian	Oba Utara	0,1
77	A.P. Merah	Oba Utara	0,6
78	Toe	Oba Selatan	0,2
79	Akesafi	Oba Selatan	200,0
80	Besimeiho	Oba Selatan	0,5
81	Gosale	Oba Selatan	0,2
82	Ake Mafu	Oba Selatan	2,0
83	Ake Lelei	Oba Selatan	10,0
84	Ake Sangkole	Wasile	20,0
85	Air lelewi	Wasile	0,1
86	Lolobata	Wasile	100,0
87	Batu Lubang	Kobe	200,0
88	Babang	Bacan	0,1
89	Sayoang	Bacan	7,0
90	Penambung	Bacan	2,0
91	Gersia 1	Bacan	1,0
92	Gersia 2	Bacan	2,0
93	Kupal	Bacan	3,0
94	Arab	Bacan	10,0
95	Panas Kupal	Bacan	0,1
96	Kupal II	Bacan	2,0
97	Panas II	Bacan	5,0
98	Beringin I	Bacan	2,0
99	Waymika	Bacan	0,5
100	Air Jebubu 1	Bacan	15,0
101	Arumamamng	Bacan	0,1
102	Sengga 1	Bacan	0,2
103	Sengga 2	Bacan	0,1
104	Air Jejubu 2	Bacan	0,2
105	Air Rota	Bacan	0,1
106	Air Tumbuh 1	Bacan	3,0
107	Air Tumbuh 2	Bacan	0,4
108	Indari 1	Bacan	2,0
109	Indari 2	Bacan	0,1
110	Ahadao	Bacan	11,0
111	Air lelewi	Bacan	35,0
112	Telaga Biru	Bacan	40,0
113	Air Kubung	Bacan	2,0
114	Dolik 1	Gane Barat	1,0
115	Jebubu Dolik	Gane Barat	3,0
116	Bublo Saketa	Gane Barat	1,0
117	Hahal	Gane Barat	0,2
118	Lamo	Gane Barat	3,0
119	Cengo	Gane Barat	3,0
120	Jebubu Gumira	Gane Barat	3,0
121	Jebubu Batula	Gane Barat	2,0
122	Hafo	Gane Barat	1,0
123	Posi-posi	Gane Barat	0,5
124	Doro	Gane Timur	5,0
125	Lemo-lemo 1	Gane Timur	12,5
126	Lemo-lemo 2	Gane Timur	1,0
127	Usaha baru	Gane Barat	8,0
128	Bidomelaku	Gane Barat	10,0

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
63	Ake Sahu 2	Tidore	0,2	129	Tabmasa	Gane Barat	0,2
64	Seli	Tidore	3,0	130	Papaceda	Gane Barat	1,0
65	Oerabo	Patani	0,2	131	Oha 1	Gane Barat	2,0
66	Wailolo	Patani	1,0	132	Oha 2	Gane Barat	2,0

Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Provisi Maluku Utara

Salah satu penyebab menurunnya debit mata air dapat terjadi akibat adanya kerusakan lingkungan di wilayah tangkapan air di sekitar sumber mata air maupun terjadi alih fungsi lahan hutan kayu menjadi lahan pertanian tanaman pangan, permukiman dan aktivitas guna lahan lainnya. Konversi atau perubahan guna lahan di wilayah tangkapan air tersebut dapat menyebabkan kemampuan menyerap air hujan menjadi menurun. Air hujan merupakan salah satu sumber pasokan utama dari ketersediaan air tanah.

Konversi lahan hutan kayu dapat menyebabkan air hujan sulit terserap secara alami ke dalam tanah dan sebaliknya dapat meningkatkan debit limpasan air hujan (*run off*) yang berpotensi menimbulkan bencana. Penurunan debit mata air ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat kebutuhan air bersih akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Klimatologi

A. Tipe

Kondisi iklim di suatu daerah dipengaruhi oleh letak lintang dan bujur dari daerah tersebut dan elevasinya. Wilayah Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim sehingga iklimnya bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula. Pembagian daerah iklim di Provinsi Maluku Utara, meliputi:

- (1) Daerah iklim Halmahera Utara terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan pada Bulan Desember sampai dengan Februari dan musim kemarau pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember yang diselingi musim pancaroba pada Bulan November sampai dengan Bulan Desember;

- (2) Daerah iklim Halmahera Tengah/Barat dipengaruhi oleh dua musim, yaitu: Musim Utara pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret yang diselingi musim pancaroba pada Bulan April serta dipengaruhi musim Selatan pada Bulan April sampai dengan Bulan September yang diselingi angin timur dan pancaroba pada Bulan September;
- (3) Daerah iklim Bacan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu: Musim Utara pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret yang diselingi Angin Barat dan pancaroba pada Bulan April serta dipengaruhi Musim Selatan pada Bulan September diselingi Angin Timur dan pancaroba pada Bulan September;
- (4) Daerah iklim Kepulauan Sula yang terdiri dari dua musim, yaitu: Musim Utara pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret diselingi angin Barat dan pancaroba Bulan April serta dipengaruhi Musim Selatan.

Pola pasang surut air laut di perairan Maluku Utara termasuk tipe pasang surut yang mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut pada interval waktu yang sama. Pergerakan arus yang berlangsung menurut skala waktu dapat dibedakan menjadi arus musiman akibat perubahan musim, yaitu musim Barat dan musim Timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut.

B. Curah Hujan

Distribusi hujan menurut wilayah sangat dipengaruhi oleh orografi dan topografi. Berdasarkan data tahun 2013 dapat dilihat jumlah hari hujan dan curah hujan tertinggi terjadi pada waktu yang tidak sama. Pada tahun 2013, curah hujan tertinggi berada pada bulan Juli yaitu 478 mm³ dan banyaknya hari hujan pada bulan Juli sebanyak 23. Sedangkan pada saat musim kemarau terjadi pada Bulan Juli s/d Bulan September.

C. Suhu dan Kelembaban

Selama tahun 2013, Stasiun Meteorologi dan Geofisika Babullah Ternate mencatat suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Juni yakni sekitar 32^o C dan terendah pada bulan November yaitu 23^o C. Kelembaban Udara rata-rata mencapai 84 persen. Hari hujan sepanjang tahun dengan intensitas beragam.

Penyinaran matahari terbesar sekitar 84 persen terjadi di bulan Maret. Kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 38 knot, terjadi dalam bulan Januari.

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya berdasarkan kabupaten dan kota dijabarkan melalui kawasan hutan produksi terbatas, tetap dan dapat dikonversi yang digambarkan sebagaimana Tabel berikut.

Kawasan Budidaya

Tabel 2.12 : Luas Kawasan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2014

No	Kab/Kota	K a w a s a n H u t a n			
		HPT	HP	HPK	Jml
1	Halmahera Barat	23,194.86	2,726.44	56,057.48	81,978.78
2	Halmahera Selatan	178,267.63	187,439.43	127,665.81	493,372.87
3	Halmahera Tengah	63,258.20	27,029.89	44,637.23	134,925.32
4	Halmahera Timur	208,558.95	77,190.36	67,748.79	353,498.10
5	Halmahera Utara	70,079.04	22,050.42	77,210.29	169,339.75
6	Kepulauan Sula	35,401.66	32,082.79	36,803.17	104,287.62
7	Pulau Morotai	56,481.03	-	42,810.77	99,291.80
8	Pulau Taliabu	10,512.41	136,274.81	64,363.09	211,150.31
9	Ternate	-	462.86	5,424.23	5,887.09
10	Tidore Kepulauan	29,953.51	-	31,653.29	61,606.80
Jumlah		2014*	675,707.29	485,257.00	554,374.15
		2013**	667,192.65	482,284.32	567,614.18

Sumber : *) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2015

**) BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Kawasan Lindung

Kawasan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Namun demikian, kawasan lindung juga membatasi peluang pemanfaatan lahan secara lebih leluasa bagi kegiatan budidaya, tetapi juga berfungsi dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Luas kawasan lindung di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.13: Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2014

No	Kab/Kota	K a w a s a n H u t a n			
		Taman Nasional	Cagar Alam	Hutan Lindung	Jml
1	Halmahera Barat	67.42	-	72,929.38	72,996.80

2	Halmahera Selatan	-	42,348.50	133,905.13	176,253.63
3	Halmahera Tengah	16,071.27	-	33,631.94	49,703.21
4	Halmahera Timur	94,388.56	-	88,568.03	182,956.59
5	Halmahera Utara	-	-	79,181.55	79,181.55
6	Kepulauan Sula	-	2,080.44	29,895.92	31,976.36
7	Pulau Morotai	-	-	93,232.48	93,232.48
8	Pulau Taliabu	-	11,093.01	22,018.64	33,111.65
9	Ternate	-	-	4,403.83	4,403.83
10	Tidore Kepulauan	52,930.38	-	20,746.03	73,676.41
Jumlah		2014	163,457.63	55,521.95	578,512.93
		2013	218,557.48	583,975.28	802,532.76

Sumber : *) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2015

**) BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (yang dalam hal ini terdiri dari hutan lindung), tersebar di hampir seluruh pulau dengan luasan di tahun 2014 sebesar \pm 578.512,93 Ha dari total kawasan hutan Provinsi Maluku Utara yang luasnya mencapai 2,512,830.95 Ha. Adapun kawasan suaka alam yang terdiri atas beberapa jenis, baik di daratan maupun di wilayah perairan laut. Lokasinya adalah, sebagai berikut:

- Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur;
- Cagar Alam Pulau Seho (Halmahera Utara);
- Cagar Alam Wayabula di Pulau Morotai;
- Suaka Margasatwa Gamkonora terdapat di Kecamatan Sahu/Ibu;
- Cagar Alam Saketa di Pulau Halmahera bagian Selatan;
- Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan;
- Cagar Alam Pulau Obi;
- Cagar Alam Lifamatola (Kota Tidore Kepulauan);
- Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu;
- Cagar Alam Pulau Seho di Pulau Seho, Taliabu Barat;
- Cagar Alam Taman Laut di Tobelo;
- Cagar Alam Taman Laut di Gane Timur.

Lahan Kritis

Tabel 2.14: Luas Lahan Kritis Provinsi Maluku Utara Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Dalam Kawasan Hutan	Luar Kawasan Hutan	Jumlah
1	Halmahera Barat	18,643.18	28,288.66	46,931.84
2	Halmahera Selatan	84,359.13	32,595.89	116,955.02
3	Halmahera Tengah	15,248.57	10,076.14	25,324.71
4	Halmahera Timur	31,117.54	28,483.77	59,601.31
5	Halmahera Utara	22,491.19	30,444.20	52,935.39
6	Kepulauan Sula	30,829.76	21,194.23	52,023.99
7	Ternate	2,585.84	1,045.23	3,631.07
8	Tidore Kepulauan	9,205.15	8,769.00	17,974.15
9	Pulau Morotai	23,361.33	7,221.52	30,582.85
10	Pulau Taliabu	33,179.82	25,947.23	59,127.05
	J u m l a h	271,021.51	194,065.87	465,087.38

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2015

Lahan Kritis menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara dan untuk mengurangi luas lahan kritis pemerintah melakukan rehabilitasi di lahan kritis. Pada tahun 2014 pemerintah melakukan rehabilitasi di lahan kritis seluas 329 Ha dan tahun 2015 seluas 750 Ha yang terdiri dari 620 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat, Rehabilitasi di Areal KPHP Model Gunung Sinopa 100 Ha dan Rehabilitasi Mangrove 30 Ha.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Provinsi Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan sebagai kawasan strategis. Kawasan strategis Provinsi Maluku Utara dalam RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 – 2033, meliputi:

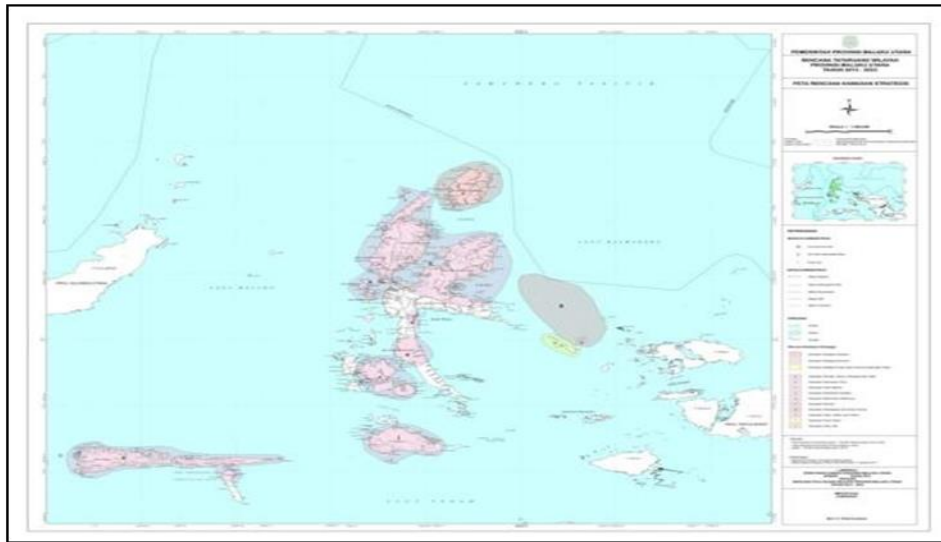
- Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya;
- Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
- kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dimaksud terdiri dari:

- (a). Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian, dengan pengembangan pemerintahan pada sektor pendidikan dan industri, meliputi :
- (1). Peningkatan pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan ekspor;
 - (2). Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat provinsi di kota Sofifi;
 - (3). Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten di Tidore (Kota Soasio);
 - (4). Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai ibu kota provinsi;
 - (5). Peningkatan bandar udara di Ternate;
 - (6). Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan;
 - (7). Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut, bandar udara, rumah sakit dan lain-lain di Ternate dan Sofifi;
 - (8). Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi luapan penumpukan peti kemas di Ternate;
 - (9). Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-masuk" yang menghubungkan dari/ke daratan Pulau Halmahera;
 - (10). Peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di Kota Ternate, dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar;
 - (11). Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore;
 - (12). Pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta pengembangan sumber-sumber air bersih;
 - (13). Pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai strategi penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore;
 - (14). Pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.

- (b). Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu dikembangkan sektor perkebunan dan kehutanan yang diarahkan pada:
- (1). Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
 - (2). Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
 - (3). Pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di industri perkayuan;
 - (4). Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- (c). Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan yang arah pengembangannya pada:
- (1). Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;
 - (2). Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
 - (3). Pengembangan pusat pemerintahan;
 - (4). Pengembangan sumber daya manusia;
 - (5). Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
 - (6). Pengembangan pariwisata sejarah, terutama situs Kerajaan Bacan.
- (d). Kawasan Halmahera Selatan meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
- (1). Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
 - (2). Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
 - (3). Meningkatkan produktivitas perkebunan.
- (e). Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel yang

- diarahkan pada:
- (1). Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - (2). Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*;
 - (3). Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- (f). Kawasan Strategis Morotai dikembangkan untuk Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
- (1). Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - (2). Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan;
 - (3). Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
 - (4). Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
 - (5). Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain, seperti ke Galela (Pulau Halmahera);
 - (6). Pengembangan pariwisata.
- (g). Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera, Halmeng dan Pulau Jiu diarahkan pada pengembangan Pariwisata dan Hankam.
- (h). Kawasan Strategis Halut, Halbar dan Halmeng diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.
- (i). Kawasan Pulau Gebe diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan pasca penambangan Nikel oleh PT. Aneka Tambang.
- (j). Kawasan Pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan.



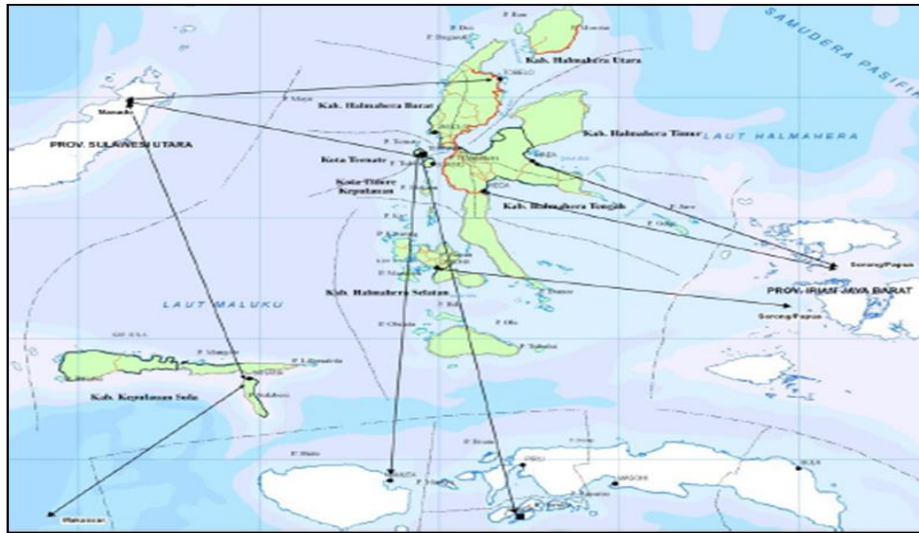
Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Gambar 3: Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara

Pengembangan Kawasan Maluku Utara

Untuk mengembangkan suatu daerah dengan bentuk wilayah kepulauan diperlukan konsep yang mempunyai tujuan utama mewujudkan keseimbangan wilayah daratan dan perairan (laut) antara daerah dan pulau terutama dalam hal tingkat pertumbuhannya. Selain untuk memenuhi tuntutan keadilan sosial ini memungkinkan berlangsungnya pembangunan dan perdagangan antar daerah (pulau) yang berimbang. Hal ini mendorong terwujudnya "spesialisasi daerah", yang berarti pula membuka kesempatan yang lebih besar bagi masing – masing daerah untuk berkembang dan bertumbuh lebih maju. Kedua, terwujudnya keseimbangan antar daerah (pulau) berarti pula bahwa kesatuan ekonomi dari wilayah daratan kepulauan dan perairan menjadi lebih kokoh.

Gambar berikut menjelaskan keterkaitan konektivitas perdagangan Maluku Utara secara eksternal. Maluku Utara menjadi penghubung antara koridor Sulawesi dengan koridor Papua. Selain itu, Maluku Utara juga menjadi penghubung untuk konektivitas ke Provinsi Maluku.



Sumber : Dokumen MP3EI Provinsi Maluku Utara, 2012

**Gambar 4: Peta Keterkaitan Eksternal Provinsi Maluku Utara
dengan Provinsi Sekitar
Identifikasi Sektor Unggulan Per Kabupaten/ Kota Di Maluku Utara**

Pengembangan ekonomi kabupaten/kota di Maluku Utara mengacu pada sektor yang memiliki kriteria unggulan. Penentuan potensi unggulan menggunakan analisis SLQ dan DLQ yang menghasilkan komoditas unggulan di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut (dokumen MP3EI Provinsi Maluku Utara) :

1. Halmahera Barat memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian, terutama tanaman pangan yaitu ubi jalar, ubi kayu dan jagung. Komoditas unggulan subsektor perkebunan meliputi kakao, kelapa dan cengkeh.
2. Halmahera Selatan memiliki komoditas unggulan di sektor industri pengolahan dan perdagangan-hotel-restoran. Subsektor yang menjadi unggulan adalah industri pengolahan tanpa migas berupa industri pengolahan kayu dan industri pengolahan hasil perikanan tuna dan cakalang. Untuk subsektor perdagangan-hotel-restoran yang unggul terutama restoran.
3. Halmahera Tengah memiliki sektor unggulan di sektor pertanian, bangunan dan jasa. Komoditas unggulan subsektor perkebunan adalah kakao, kopi dan cengkeh.
4. Halmahera Timur memiliki subsektor unggulan di sektor pertambangan. Komoditas unggulannya terutama adalah nikel.

5. Halmahera Utara memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian dan perdagangan-hotel-restoran. Komoditas unggulan subsektor tanaman pangan dan perkebunan masing-masing meliputi ubi kayu, jagung, kedelai, kelapa, kakao, lada dan pala.
6. Sula memiliki unggulan di sektor pertanian, perdagangan dan listrik. Komoditas subsektor perikanan yang menjadi unggulan adalah ikan tuna dan cakalang. Sedangkan komoditas unggulan subsektor perkebunan meliputi kopra dan cengkeh.
7. Morotai memiliki sektor unggulan terutama pertanian dan perdagangan, dengan subsektor unggulan perikanan dan restoran. Komoditas unggulan di subsektor perikanan, yaitu jenis ikan pelagis (tuna, cakalang, teri, kembung) dan ikan demersal (kakap, baronang).
8. Ternate memiliki unggulan di sektor bangunan dan pengangkutan-komunikasi. Subsektor yang menjadi unggulan adalah bangunan dan angkutan jalan raya.
9. Tidore memiliki unggulan di sektor perdagangan-hotel-restoran. Produk subsektor yang menjadi unggulannya adalah produk perdagangan besar dan eceran.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah kepulauan Maluku Utara berada pada interaksi 3 (tiga) lempeng besar dunia, yakni: lempeng Eurasia, Hindia-Australia dan Pasifik. Zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung dengan kedalaman sekitar 4.500 – 7.000 meter, yang terkenal dengan nama zona tumbukan/subduksi. Di samping itu daerah ini merupakan daerah yang dilewati *Pacific Ring of Fire* (rangkaian gunung berapi aktif di dunia). Kondisi ini menyebabkan wilayah Provinsi Maluku Utara rawan terhadap bencana gempa tektonik, gempa vulkanik, dan tsunami. Provinsi Maluku Utara memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- (1) Wilayah Kepulauan Maluku Utara merupakan interaksi 3 (tiga) lempeng besar dunia, sehingga mengakibatkan terbentuknya tatanan geologi yang

rumit. Wilayah Kepulauan Maluku Utara sebagian merupakan bagian dari Lempeng Eurasia yang berinteraksi dengan Lempeng Hindia – Australia yang bergerak relatif ke arah Utara dengan kecepatan 6 cm/tahun dan Lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah Barat dengan kecepatan 12 cm/tahun. Zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk Palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500 – 7.000 meter, yang dikenal dengan nama zona tumbukan atau zona subduksi;

- (2) Sistem tektonik daerah Maluku-Filipina terdiri dari Lempeng Maluku, Lempeng Filipina, Lempeng Asia Tenggara, Lempeng Pasifik meliputi daerah Mindanao Selatan, Sulawesi bagian Utara, Halmahera dan busur-busur kepulauan Sangihe dan Talaud, dengan palung-palungnya. Parit Maluku bersambung dengan Palung Filipina mengapit Pulau Halmahera, Palung Sangihe memanjang dari Sulawesi Utara sampai Mindanao Selatan dan Palung Cotabato di bagian Barat – Daya. Dua buah busur vulkanik dipisahkan oleh Laut Maluku sepanjang 250 Km, busur Sangihe di bagian Barat dan busur Halmahera di sebelah Timur. Pematang Talaud - Mayau, yang beberapa bagiannya muncul ke permukaan laut sebagai kepulauan Talaud – Mayau dan Tifure;
- (3) Busur sebelah Barat dan Utara dari Pulau Buru dikenal sebagai zona tumbukan Sulawesi – Maluku, ditandai dengan adanya lempeng kerak samudera dan mantel yang menganjak di atas permukaan. Pulau Banggai dan Pulau Buton yang berasal dari New Guinea dan Banda, menumbuk Sulawesi. Zona subduksi kecil (minor) terbentuk di sebelah Barat dari Halmahera dan Barat Laut dari Sulawesi, sebagai akibat dari tumbukan. Akibat lainnya adalah munculnya vulkanisme Kenozoikum Akhir – Resen di Indonesia Timur, yang mengikuti proses subduksi yang terakhir;
- (4) Provinsi Maluku Utara juga merupakan daerah yang dilewati *Pasific Ring of Fire* (cincin api Pasifik) artinya daerah ini dilewati jalur rangkaian gunung berapi aktif di dunia sehingga Provinsi Maluku Utara rawan terhadap gempa vulkanik.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Maluku Utara 2011, tingkat ancaman bencana di Provinsi Maluku Utara terdapat 12 jenis

bencana dengan indeks ancaman rendah terjadi pada 7(tujuh) jenis bencana yaitu Letusan Gunung Api, Gerakan Tanah/ Longsor, Abrasi, Angin Puting Beliung, Bahaya Kekeringan, Epidemii Penyakit, dan Konflik Sosial. Indeks ancaman sedang terjadi pada bencana Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sedangkan indeks ancaman tinggi terjadi pada bencana Tsunami, Banjir, dan Kegagalan Teknologi. Sementara itu untuk indeks penduduk terpapar, hanya Konflik Sosial yang memiliki indeks keterpaparan tinggi, sedangkan bencana lainnya memiliki indeks penduduk terpapar rendah.

Tabel 2.15: Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Maluku Utara

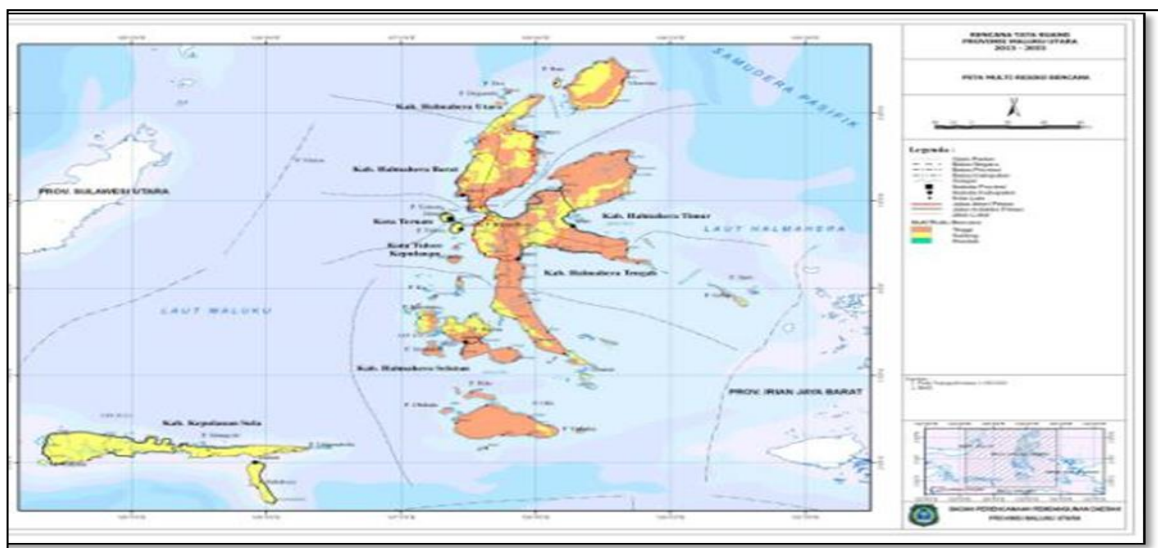
No	Jenis Bencana	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
1	Letusan Gunung Api	51.023	33.290	15.534	99.847	Rendah	105,03	Rendah
2	Gempa Bumi	-	2.827.916	272.818	3.100.734	Sedang	32,89	Rendah
3	Gerakan Tanah/ Longsor	2.136.339	964.395	-	3.100.734	Rendah	32,89	Rendah
4	Tsunami	-	74.392	2.695.139	2.769.531	Tinggi	6,84	Rendah
5	Banjir	-	54.399	617.427	671.826	Tinggi	15,04	Rendah
6	Abrasi	1.615.607	946.829	538.294	3.100.730	Rendah	3,29	Rendah
7	Angin Puting Beliung	1.603.997	-	200.051	1.804.048	Rendah	21,84	Rendah
8	Bahaya Kekeringan	2.520.834	338.294	241.606	3.100.734	Rendah	32,89	Rendah
9	Kebakaran Hutan & Lahan	790.441	1.707.184	603.102	3.100.727	Sedang	32,89	Rendah
10	Epidemi Penyakit	2.621.068	-	479.667	3.100.734	Rendah	32,89	Rendah
11	Kegagalan Teknologi	-	-	3.100.734	3.100.734	Tinggi	32,89	Rendah
12	Konflik Sosial	8.836	-	-	8.836	Rendah	1.665,00	Tinggi
MULTI HAZARD		11.348.143	6.946.701	8.764.374	27.059.218	Rendah	26,45	Rendah

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara, 2011

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Sebagian besar Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula merupakan daerah dengan potensi rawan gempa bumi. Sedangkan untuk Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan berpotensi sedang tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa daerah tersebut juga sebagian berpotensi rawan gempa tinggi.

Berdasarkan peta seismisitas Provinsi Maluku Utara terlihat bahwa distribusi titik-titik pusat gempa bumi kebanyakan terjadi di sebelah barat Pulau Halmahera. Adapun kawasan di Provinsi Maluku Utara yang rawan terhadap bencana adalah dapat dilihat pada gambar berikut. Penetapan analisis zona risiko gempa bumi menggunakan empat parameter utama. Keempat parameter tersebut adalah (a) tingkat kerawanan bencana gempa bumi (b) jenis penggunaan lahan, (c) jumlah penduduk per kabupaten/kotamadya, dan (d) distribusi obyek – obyek vital. Berdasarkan analisis risiko bencana gempa bumi tersebut maka secara garis besar di Provinsi Maluku Utara, merupakan daerah dengan potensi risiko gempa bumi tinggi.



Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Gambar 5: Peta Multi Resiko Bencana di Provinsi Maluku Utara

Tabel 2.16: Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gempa Bumi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1.	Halmahera Barat	0,00	1.376,51	1.235,73	2.612,24
2	Halmahera Tengah	0,00	342,41	1.934,42	2.276,83
3	Halmahera Utara	0,00	2.412,93	3.034,37	5.447,30
4	Halmahera Selatan	0,00	2.026,16	6.753,16	8.779,32
5	Halmahera Timur	0,00	1.592,61	4.913,59	6.506,20
6	Kepulauan Sula	1.835,49	6.140,16	1.657,26	9.632,92
7	Ternate	0,00	168,51	82,34	250,85
8	Tidore Kepulauan	0,00	4.814,59	4.749,41	956,00
9	Pulau Morotai*	-	-	-	-
10	Pulau Taliabu**	-	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		1.835,49	18.873,90	24.360,27	45.069,66

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

*) Data masih tergabung dengan Halmahera Utara

**) Data Masih tergabung dengan Kepulauan Sula

Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Secara umum, provinsi Maluku Utara dikategorikan sebagai wilayah provinsi yang memiliki kelas ancaman tsunami yang tinggi. Hanya beberapa kecamatan yang dikategorikan sedang yaitu Kecamatan Ibu Selatan, Jailolo, Loloda, Sahu, Wasile Tengah, dan Wasile Utara. Kendati demikian, hanya sebagai kecil saja dari luas wilayah keenam kecamatan tersebut yang dikategorikan sedang. Artinya keenam kecamatan tersebut juga memiliki daerah-daerah yang terkena tsunami dengan kelas ancaman tinggi juga. Kabupaten dengan luas wilayah ancaman terbesar yaitu Halmahera Selatan yakni seluas 700.339 hektar yang seluruh wilayahnya dikategorikan tinggi. Sedangkan untuk wilayah dengan luas ancaman tinggi terkecil yaitu di Kota Ternate yakni seluas 12.724 hektar.

Tabel 2.17: Luas Wilayah Ancaman Tsunami dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	-	27.820	189.809	217.629	Tinggi	9,49	Rendah
Halmahera Selatan	-	-	700.339	700.339	Tinggi	5,47	Rendah
Halmahera Tengah	-	-	21.649	21.649	Tinggi	8,39	Rendah
Halmahera Timur	-	46.572	598.595	645.168	Tinggi	2,16	Rendah

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Utara	-	-	289.866	289.866	Tinggi	9,79	Rendah
Kepulauan Sula	-	-	479.667	479.667	Tinggi	5,99	Rendah
Pulau Morotai	-	-	234.138	234.138	Tinggi	4,59	Rendah
Ternate	-	-	12.724	12.724	Tinggi	224,79	Rendah
Tidore Kepulauan	-	-	168.352	168.352	Tinggi	10,78	Rendah
MALUKU UTARA	-	74.392	2.695.139	2.769.531	Tinggi	6,84	Rendah

Sumber: Matriks Kajian Risiko Provinsi Maluku Utara, 2011

Indeks Ancaman Bencana Tsunami adalah Tinggi karena merujuk pada kelas ancaman dari luas wilayah ancaman dominan. Sedangkan Indeks Penduduk Terpapar dikategorikan Rendah karena kepadatan penduduk wilayah ancamannya yaitu 6,84 jiwa per kilometer persegi (< 500 jiwa/km²). Dari nilai kedua indeks pada diketahui bahwa Tingkat Ancaman Tsunami di Provinsi Maluku Utara adalah Sedang.

Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan tabulasi kawasan risiko bencana gerakan tanah/longsor di Provinsi Maluku Utara. Untuk kriteria rendah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki daerah yang terluas, sedangkan untuk kriteria sedang, daerah yang terluas adalah Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk kriteria tinggi yang terluas adalah Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 2.18: Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gerakan Tanah (Longsor) di Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1.	Halmahera Barat	0,00	2.568,29	43,95	2.612,24
2	Halmahera Tengah	0,00	2.215,61	61,22	2.276,83
3	Halmahera Utara	0,00	5.364,05	83,25	5.447,30
4	Halmahera Selatan	0,00	8.299,27	480,05	8.779,32
5	Halmahera Timur	0,00	6.359,79	146,41	6.506,20
6	Kepulauan Sula	2.882,28	5.106,87	1.643,77	9.632,92
7	Ternate	0,00	169,20	81,65	250,85
8	Tidore Kepulauan	0,00	4.959,02	4.604,98	956,00
9	Pulau Morotai*	-	-	-	-
10	Pulau Taliabu**	-	-	-	-

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
	Provinsi Maluku Utara	2.882,28	35.042,11	7.145,27	2.809,08

Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

**) Data masih tergabung dengan Halmahera Utara*

****) Data Masih tergabung dengan Kepulauan Sula*

Kawasan Rawan Bencana Banjir

Bencana banjir mengancam di berbagai wilayah Provinsi Maluku Utara kecuali Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate. Sebagian besar banjir dengan kelas ancaman tinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Total luas wilayah ancaman mencapai 671.826 hektar. Tabel berikut menunjukkan bahwa luas wilayah ancaman terbesar terdapat di Kelas Ancaman Tinggi (617.427 hektar), maka Indeks Ancamannya adalah Tinggi. Sementara itu Indeks Penduduk Terpapar bernilai Rendah karena kepadatan penduduk di wilayah ancaman sebesar 15,04 jiwa per kilometer persegi (<500 jiwa/km²). Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa Tingkat Ancaman Banjir di Maluku Utara adalah Sedang.

Hasil kajian potensi ancaman banjir di Maluku Utara sebagaimana Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa potensi jumlah penduduk terpapar akibat banjir mencapai 101.071 jiwa. Banjir dengan indeks ancaman tinggi terjadi di 26 kecamatan. Luas area ancaman mencapai 671.826 hektar. Sebagian besar banjir terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Kedua kecamatan tersebut sama-sama memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang mengalami banjir, baik yang berkategori sedang maupun tinggi. Banjir dengan indeks ancaman sedang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Weda Selatan, Gane Barat Utara, Gane Timur, Kao, Kao Barat, Wasile Utara, dan Oba Selatan dengan luas wilayah ancaman mencapai 54.399 hektar. Sementara itu, banjir dengan indeks ancaman tinggi banyak terjadi Kabupaten Sula yaitu di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, Mangoli Utara, Taliabu Barat, dan Taliabu Selatan, dengan potensi luas wilayah ancaman mencapai 140.183 hektar.

Tabel 2.19: Luas Wilayah Ancaman Banjir dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Selatan	-	15.221	147.473	162.695	Tinggi	11,96	Rendah
Halmahera Tengah	-	1.974	21.703	23.677	Tinggi	14,02	Rendah
Halmahera Timur	-	18.187	219.333	237.519	Tinggi	13,30	Rendah
Halmahera Utara	-	15.826	25.883	41.709	Tinggi	11,48	Rendah
Kepulauan Sula	-	-	140.183	140.183	Tinggi	21,95	Rendah
Pulau Morotai	-	-	48.948	48.948	Tinggi	12,60	Rendah
Ternate	-	-	-	-	-	-	-
Tidore Kepulauan	-	3.190	13.905	17.095	Tinggi	29,18	Rendah
MALUKU UTARA	-	54.399	617.427	671.826	Tinggi	15,04	Rendah

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara, 2011

Kawasan Rawan Gunung Berapi

Provinsi Maluku Utara memiliki 5 (lima) gunung api, yaitu Gunung Gamalama di Kota Ternate, Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora di Kabupaten Halmahera Barat, Gunung Dukono di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan Gunung Kie Besi di Halmahera Selatan.

Gunung Gamalama yang terletak di Pulau Ternate memiliki Ketinggian 1.572 meter dengan daerah bahaya adalah daerah lingkaran dengan jari-jari 3 Km sekeliling kawah puncak kecuali sebelah selatan. Daerah waspada adalah sepanjang lajur sungai kering hingga laut. Luas daerah waspada $\pm 33,1$ Km² dan terdapat penduduk di dalamnya. Letusan Gunung Gamalama terjadi pada tahun 1775, 1980, 1983, 1992, 1993 dan 2011.

Gunung Gamkonora Terletak di barat laut Halmahera, Kabupaten Halmahera Barat, ketinggian 1.653 meter. Daerah bahaya terpusat pada kawah utama di puncak dengan jari-jari 5 Km untuk bahaya eflata. Luas daerah bahaya adalah ± 110 Km² hingga meliputi pantai di sebelah baratlaut, dan terdapat penduduk di dalamnya. Riwayat aktifitas tinggi gunung api diantaranya ; pada tanggal 8 Juli 2007 letusan reflik debu setinggi 4.000 meter. Sedangkan Gunung Ibu juga terletak di Kabupaten Halmahera Barat, dengan ketinggian 1.325 meter. Riwayat letusan terjadi pada tanggal 31 Maret 2008, terjadi gempa vulkanik,

hembusan asap mencapai 300 meter. Pada 4 April 2008, terjadi gempa letusan dengann asap kelabu mencapai 700 meter.

Gunung Dukono Berada di bagian utara Pulau Halmahera, dengan ketinggian 1.275 meter, bergaris tengah 6 Km. Daerah yang dianggap berbahaya ialah lingkaran dengan jari-jari sekitar 4 Km dengan luas daerah bahaya $\pm 88,6$ Km² hingga ke laut.

Gunung Kie Besi terletak di Pulau Makian dengan daerah bahaya meliputi seluruh pulau. Daerah ini dapat dilanda awan panas, bom gunung api dan bahan lepas lainnya, lava dan lahar hujan. Luas daerah waspada adalah 153,04 Km² dan penduduk yang terdapat di dalamnya. Riwayat letusan terjadi pada tahun 1760 menewaskan 2.000 korban jiwa.

Tabel 2.20 : Luas Wilayah Ancaman (LWA) Letusan Gunung Api dan Kepadatan Penduduk di Wilayah Ancaman

Kabupaten/ Kota	LWA Kategori Rendah (ha)	LWA Kategori Sedang (ha)	LWA Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	37.724	22.843	9.173	69.741	Rendah	42,81	Rendah
Halmahera Selatan	3.210	1.932	3.298	8.440	Tinggi	140,32	Rendah
Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Timur	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Utara	8.051	6.622	1.832	16.505	Rendah	58,25	Rendah
Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-	-
Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	-
Ternate	2.037	1.894	1.231	5.162	Rendah	1.037,56	Tinggi
Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU UTARA	51.023	33.290	15.534	99.847	Rendah	105,03	Rendah

Sumber: Matriks Kajian Risiko Provinsi Maluku Utara, 2011

Luas wilayah ancaman bencana gunung berapi di Provinsi Maluku Utara yaitu 99.847 hektar dengan tingkat kepadatan penduduk wilayah ancaman mencapai 105,03 jiwa per kilometer persegi. Ancaman tertinggi letusan gunung api terjadi di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Makian Barat, Pulau Makian, Pulau Ternate, Ternate Utara, dan Tobelo Utara.

Indeks Ancaman Letusan Gunung Api di Provinsi Maluku Utara adalah Rendah karena luas wilayah ancaman dominan adalah Rendah yakni seluas 51.023 hektar. Sementara itu kepadatan penduduk wilayah ancaman di Maluku Utara yaitu 105,03 jiwa per kilometer persegi (<500 jiwa/km²), maka Indeks Penduduk Terpaparnya adalah Rendah.

Kawasan Rawan Bencana di Ibukota Provinsi (Sofifi)

Kawasan Sofifi adalah Ibukota Provinsi Maluku Utara yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sofifi dan wilayah pengembangannya rawan terhadap 4 (empat) tingkat bahaya erosi, yaitu:

- Tingkat bahaya erosi sangat ringan dengan nilai erosi 8,41 ton/ha/tahun;
- Tingkat bahaya erosi sedang dengan nilai erosi 114,02 ton/ha/tahun;
- Tingkat bahaya erosi berat dengan nilai erosi 403,82 ton/ha/tahun;
- Tingkat bahaya erosi sangat berat dengan nilai erosi 902,65 – 1140,19 ton/ha/tahun.

Tingkatan erosi sangat ringan umumnya terjadi pada wilayah datar, seperti di Desa Durian, Kayasa, Somahode, Guraping, dan Akekolano. Tingkat erosi sedang, berat, sampai dengan sangat berat umumnya terdapat di daerah yang curam dengan presentase kemiringan $> 15\%$, seperti di Kelurahan Guraping, sekitar Sungai Ake Oba. Selain itu bencana lain yang berpotensi terjadi yaitu berupa banjir terutama pada daerah hilir, gerakan tanah yang banyak terjadi di Halmahera dan gempa. Selengkapannya dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber : RDTR Kota Sofifi Tahun 2009-2029

Gambar 6: Peta Kawasan Rawan Bencana di Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi)

2.1.1.4. Kondisi Demografis

Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa dan sampai tahun 2014 berjumlah 1.138.667 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 581.264 jiwa dan penduduk perempuan 557.403 jiwa.

Tabel 2.21 : Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara 2009-2014

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	2014	581.264	557.403	1.138.667
2	2013	569.264	545.633	1.114.897
3	2012	557.235	533.840	1.091.075
4	2011	545.176	522.036	1.067.212
5	2010	533.101	510.235	1.043.336
6	2009	486.239	472.809	974.990

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Jika dibandingkan dengan luas wilayah maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 35,58 jiwa/km². Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi, yaitu Ternate (1.865,42 jiwa per km²), Halmahera Barat (63,82 jiwa per km²), Tidore Kepulauan (58,22 jiwa per km²), Kepulauan Sula (52,14 jiwa per km²) dan Halmahera Utara (45,31 jiwa per km²). Laju pertumbuhan rata-rata 2,24 persen pertahun pada periode 2010-2013. Mengenai kepadatan dan penyebaran penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Luas Daratan (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
		2013	2014		2013	2014
1	Halmahera Barat	106.791	108.769	1.704,20	62,66	63,82
2	Halmahera Tengah	47.079	48.414	2.653,76	17,74	18,24
3	Kepulauan Sula	91.406	93.435	1.791,84	51,01	52,14
4	Halmahera Selatan	211.682	215.791	8.148,90	25,98	26,48
5	Halmahera Utara	173.117	176.573	3.896,90	44,42	45,31
6	Halmahera Timur	80.526	82.914	6.571,37	12,25	12,62
7	Pulau Morotai	57.565	59.102	2.476,00	23,25	23,87
8	Pulau Taliabu	49.510	50.067	3.004,48	16,48	16,66
9	Ternate	202.728	207.789	111,39	1.819,98	1.865,42

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Luas Daratan (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
		2013	2014		2013	2014
10	Tidore Kepulauan	94.493	95.813	1.645,73	57,42	58,22
	Prov. Maluku Utara	1.114.897	1.138.667	32.004,57	34,84	35,58

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2015

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut umur, maka sampai tahun 2014 sebagian besar penduduk di Provinsi Maluku Utara termasuk ke dalam golongan usia muda (0 – 14 tahun) yaitu 390.821 jiwa dan porsi tersebut akan semakin menurun pada kelompok yang lebih tua. Dari jumlah itu yang laki-laki sebanyak 199.808 jiwa, perempuan sebanyak 191.013 jiwa. Lebih dari setengah jumlah penduduk adalah penduduk usia produktif (15-54 tahun), yaitu sebanyak 654.015 jiwa atau 57,44 persen dari total seluruh penduduk Maluku Utara.

Tabel 2.23 : Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
0 – 4	69.111	70.568	66.468	67.902	135.579	138.470
5 – 9	66.102	67.496	63.156	64.518	129.258	132.014
10 – 14	60.469	61.744	57.356	58.593	117.825	120.337
15 – 19	54.852	56.008	51.055	52.156	105.907	108.164
20 – 24	49.443	50.485	47.251	48.270	96.694	98.755
25 – 29	48.273	49.291	47.961	48.996	96.234	98.287
30 – 34	46.415	47.393	46.954	47.967	93.369	95.360
35 – 39	41.673	42.551	40.569	41.444	82.242	83.995
40 – 44	35.122	35.862	32.893	33.603	68.015	69.465
45 – 49	28.129	28.722	26.008	26.569	54.137	55.291
50 – 54	22.636	23.113	21.129	21.585	43.765	44.698
55 – 59	17.910	18.288	16.333	16.685	34.243	34.973
60 – 64	12.522	12.786	11.122	11.362	23.644	24.148
65 – 69	7.694	7.856	7.267	7.424	14.961	15.280
70 – 74	4.616	4.713	4.787	4.890	9.403	9.603
75 +	4.297	4.388	5.324	5.439	9.621	9.827
Jumlah	569.264	581.264	545.633	557.403	1.114.897	1.138.667

Sumber : BPS Maluku Utara 2015

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin per kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara saat ini, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pria lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita. Sex ratio di Provinsi Maluku Utara tahun 2013 adalah 104,3. Informasi selengkapnya mengenai hal ini seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.24: Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Halmahera Barat	54.561	52.230	106.791	104,46
Halmahera Tengah	24.115	22.964	47.079	105,01
Kepulauan Sula	46.286	45.120	91.406	102,58
Halmahera Selatan	107.901	103.781	211.682	103,97
Halmahera Utara	88.492	84.625	173.117	104,57
Halmahera Timur	42.327	38.199	80.526	110,81
Pulau Morotai	29.662	27.903	57.565	106,30
Pulau Taliabu	25.290	24.220	49.510	104,42
Ternate	103.031	99.697	202.728	103,34
Tidore Kepulauan	47.599	46.894	94.493	101,50
Jumlah Total	569.264	545.633	1.114.897	104,33

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2014

Penduduk Menurut Mata Pencarian

Struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2014 tidak mengalami perubahan, dimana Tiga sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara selama Februari 2012 s/d Februari 2014 adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, dan sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi yang secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara.

Pada rentang waktu Februari 2013 – Februari 2014 maupun Agustus 2013 – Agustus 2014, tiga dari sembilan sektor mengalami penurunan penyerapan lapangan kerja secara signifikan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian dan sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan Jasa Perusahaan.

Tabel 2.25: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Maluku Utara, Februari 2013– Februari 2014 (ribu orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2013		2014	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	226,8	249,4	222,6	239,5
Pertambangan & Penggalian	17,6	15,1	12,4	6,6
Industri	12,8	9,3	16,1	12,7
Listrik, Gas, dan Air	0,9	0,7	2,4	1,2
Konstruksi	22,5	16,4	24,9	22,7
Perdagangan	55,5	54,7	55,2	59,2
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	26,0	24,7	29,3	26,0
Keuangan	9,0	3,8	5,1	3,8
Jasa Kemasyarakatan	94,4	80,8	97,4	84,4
JUMLAH	465,6	455,0	465,5	456,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2014

Walaupun demikian, selama kedua periodisasi tersebut terlihat bahwa sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan menyerap tenaga kerja hampir separuh penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, yaitu tercatat sebesar 222,6 ribu atau 47,83 persen pada Februari (yoy) dan pada Agustus (yoy) sebesar 239,5 atau 52,5 persen dari total penduduk 15 tahun keatas yang bekerja.

Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Keadaan ketenagakerjaan di Maluku Utara sejak Februari 2013-2014 (yoy) maupun Agustus 2013-2014 (yoy) menunjukkan adanya peningkatan dari aspek jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Namun demikian, selama dua periode tersebut, persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan penurunan, sementara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus meningkat. Hingga Agustus 2014 TPAK sebesar 63,88 persen sedangkan TPT sebesar 5,29 persen atau masih terdapat pengangguran sebanyak 25,5 ribu orang.

Tabel 2.26: Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2013–2014 (ribu orang)

Jenis Kegiatan Utama	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	2013	2013	2014	2014
1. Penduduk Usia Kerja 15+	727,0	735,0	742,7	753,8

2. Angkatan Kerja	492,3	473,0	493,4	481,5
Bekerja	465,6	455,0	465,5	456,0
Penganggur	26,7	18,0	27,9	25,5
3. Bukan Angkatan Kerja	234,7	262,0	249,4	272,3
4. TPAK (%)	67,72	64,35	66,43	63,88
5. TPT (%)	5,43	3,80	5,65	5,29
6. Pekerja tidak penuh	202,7	193,2	180,9	185,4
Setengah penganggur	66,4	54,7	61,9	61,3
Paruh waktu	136,3	138,5	119,0	124,1

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2015

Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk yang bekerja hingga Agustus 2014 masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 189,7 ribu orang (41,60 persen) dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 100,6 ribu orang (22,06 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) hanya sebanyak 56,4 ribu orang atau 12,3 persen.

Dalam setahun terakhir atau selama periode Agustus 2013-Agustus 2014, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan, SMP mengalami peningkatan, pendidikan SMA Umum/SMA mengalami peningkatan, Kejuruan, Diploma dan Universitas mengalami penurunan.

Tabel 2.27: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012-2014 (ribu orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2012		2013		2014	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SD Ke Bawah	217,8	204,5	206,7	196,1	203,8	189,7
Sekolah Menengah Pertama	83,7	91,7	78,4	88,4	80,8	88,5
Sekolah Menengah Atas	88,2	91,5	102,2	96,5	99,2	100,6
Sekolah Menengah Kejuruan	20,6	19,8	26,1	22,5	17,8	20,8
Diploma I/II/III	15,9	16,9	17,5	15,9	17,2	14,7
Universitas	27,8	28,2	34,8	35,7	46,6	41,7
Jumlah	453,9	452,7	465,6	455,0	465,5	456,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2014

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan

Pada periode Agustus 2013-2014 (yoy), TPT menurut pendidikan yang mengalami peningkatan diantaranya pendidikan SD ke bawah, SMA Umum dan Kejuruan serta Diploma, sedangkan yang mengalami penurunan diantaranya SMP dan Universitas.

Tabel 2.28: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012-2014 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2012		2013		2014	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SD Ke Bawah	2,29	3,03	1,52	1,06	2,10	1,71
Sekolah Menengah Pertama	5,85	3,72	4,56	4,46	2,52	3,31
Sekolah Menengah Atas	9,33	8,10	11,67	6,18	10,80	9,85
Sekolah Menengah Kejuruan	7,77	9,79	7,89	6,35	2,62	12,16
Diploma I/II/III	4,12	3,99	7,60	2,75	10,07	9,0
Universitas	12,36	6,24	6,96	8,75	13,04	8,42
Jumlah	5,36	4,78	5,43	3,80	5,65	5,29

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2014

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara berdasarkan harga konstan tahun dasar 2000 dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami tren pertumbuhan positif. Di tahun 2009 tumbuh sebesar 6,07 persen, hingga terkondisi pada tahun 2013 sebesar 6,12 persen. Namun demikian, tren pertumbuhan ini pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,72 persen. Struktur ekonomi Tahun 2014 masih didominasi Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Industri Pengolahan, dengan total kontribusi ketiga sektor ini mencapai 73,88 persen terhadap total PDRB Maluku Utara. Sektor pertanian sebesar 33,16 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar

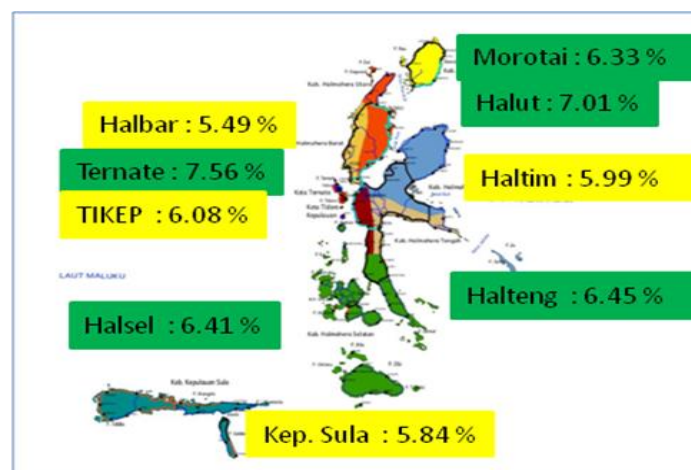
28,15 persen, sektor industri pengolahan sebesar 12,57 persen, pengangkutan dan komunikasi 7,65 persen, sektor jasa-jasa 7,11 persen, sedangkan kontribusi masing-masing sektor lainnya masih dibawah 7 persen.



**Tabel 2.29: Distribusi PDRB Maluku Utara menurut Lapangan Usaha
ADHB 2000 Tahun 2009-2014**

No	Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	37.35	36.35	35.83	34.91	33.77	33.16
1.1	Pertanian Tanaman Pangan	10.11	9.35	9.02	8.52	8.14	
1.2	Perkebunan	15.32	15.28	15.39	15.04	14.62	
1.3	Peternakan	1.7	1.63	1.6	1.55	1.54	
1.4	Kehutanan	3.30	3.09	2.97	2.93	2.75	
1.5	Perikanan	6.92	7.00	6.86	6.86	6.73	
2	Pertambangan & penggalian	5.09	5.16	5.01	4.65	4.39	3.43
3	Industri pengolahan	13.02	13.05	12.76	12.50	12.46	12.57
4	Listrik, gas & air bersih	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.58
5	Konstruksi	2.72	2.95	3.16	3.36	3.29	3.24
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	22.79	23.45	24.27	25.57	26.92	28.15
7	Pengangkutan & komunikasi	8	7.83	7.67	7.65	7.65	7.77
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	3.69	3.78	3.85	3.81	3.84	3.84
9	Jasa-jasa	6.74	6.87	6.87	7.00	7.11	7.25
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara beberapa tahun (Diolah)

Adapun kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 2013 adalah Kota Ternate, sebesar 7,56 persen diikuti oleh Kabupaten Halmahera Utara sebesar 7,01 persen, Halmahera Tengah sebesar 6,45 persen, Halmahera Selatan sebesar 6,41 persen, Pulau Morotai sebesar 6,33 persen, Kota Tidore Kepulauan sebesar 6,08 persen, Halmahera Timur sebesar 5,99 persen, Kepulauan Sula sebesar 5,84 persen dan terendah adalah Halmahera Barat yaitu 5,49 persen.



Ket :  Diatas rata-rata Nasional (5,78) dan Provinsi (6,12)
 Diatas rata-rata Nasional (5,78), namun dibawah rata-rata provinsi (6,12)

Gambar 7: Pertumbuhan Ekonomi Prov. Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

PDRB Maluku Utara atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 menurut lapangan usaha terus mengalami kenaikan, yaitu dari 2.812.039,15 juta rupiah di tahun 2009 meningkat menjadi 3.035.648,37 juta rupiah pada tahun 2010, tahun 2011 angkanya mencapai 3.230.050,34 juta rupiah, tahun 2012 sebesar 3.445.501,25 juta rupiah, pada 2013 sebesar 3.656.304,12 juta rupiah dan pada tahun 2014 sebesar 3.865.793 juta rupiah.

Tabel 2.30: Produk Domestik Regional Bruto Maluku Utara menurut Lapangan Usaha ADHK 2000 Tahun 2009-2014

No	Sektor	2009		2011		2013		2014	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	996,291.58	35.43	1,093,078.59	33.84	1,162,725.53	31.80	1,179,974	30.52
2	Pertambangan & penggalian	117,186.04	4.17	129,441.83	4.01	135,015.13	3.69	109,728	2.84
3	Industri pengolahan	352,601.54	12.54	384,016.68	11.89	413,646.77	11.31	440,842	11.40
4	Listrik, gas & air bersih	13,163.75	0.47	15,258.01	0.47	17,319.33	0.47	19,415	0.50
5	Konstruksi	50,798.65	1.81	60,391.70	1.87	71,305.32	1.95	74,702	1.93
6	Perdagangan, hotel & restoran	733,421.84	26.08	909,385.45	28.15	1,134,328.38	31.02	1,261,311	32.63
7	Pengangkutan & komunikasi	228,831.21	8.14	260,945.52	8.08	293,248.02	8.02	317,026	8.20
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	101,673.46	3.62	118,630.52	3.67	135,761.92	3.71	146,764	3.80
9	Jasa-jasa	218,071.07	7.75	258,902.05	8.02	292,953.74	8.01	316,033	8.18
	PDRB	2,812,039.15	100	3,230,050.34	100	3,656,304.12	100	3,865,793	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2015

Demikian halnya dengan PDRB Maluku Utara atas dasar harga konstan menurut pengeluaran yang juga terus mengalami kenaikan. pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur PDRB disamping pengeluaran konsumsi pemerintah. informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.31: PDRB Provinsi Maluku Utara menurut Penggunaan ADHK 2000 (juta Rp.)

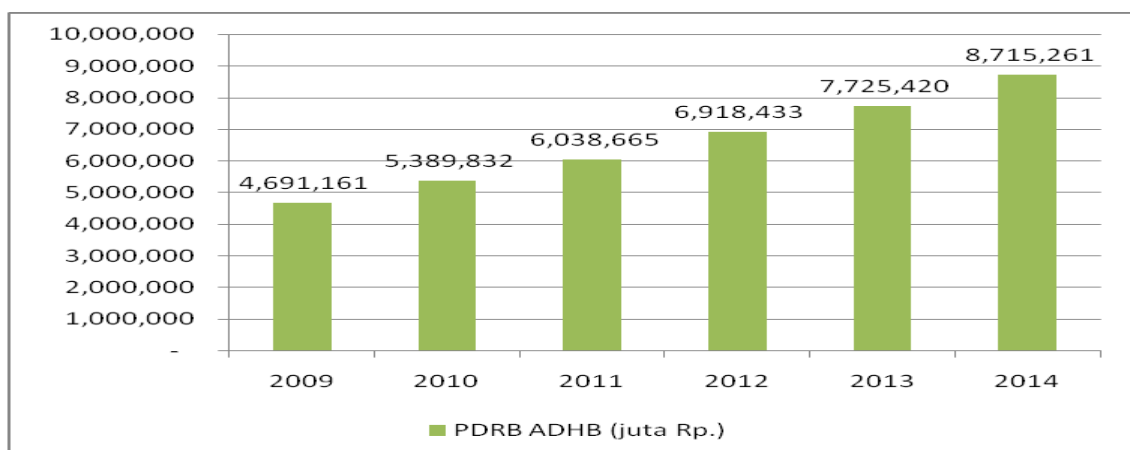
No.	Jenis Pengeluaran	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pengeluaran Konsumsi	2.213.566,72	2.419.115,73	2.611.560,97	2.834.587,3	3.043.960,88	3.275.177

No.	Jenis Pengeluaran	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Rumah Tangga						
2.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta	25.026,93	26.409,30	27.939,04	29.385,91	31.871,46	-
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	791.679,63	865.659,20	950.829,93	1.033.377,89	1.109.099,08	1.190.579
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	212.249,22	221.117,15	248.171,41	279.812,49	300.842,79	315.680
5.	Perubahan Inventori	-547.753,47	-587.021,81	-660.480,89	-733.280,66	-780.167,29	-626.269
6.	Ekspor Barang dan Jasa	797.747,65	854.168,30	867.164,50	892.309,99	920.603,78	0
7.	Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	680.447,51	763.799,51	815.134,61	890.691,64	969.906,58	0
Jumlah		2.812.039,15	3.035.648,37	3.230.050,34	3.445.501,25	3.656.304,12	3.865.793

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2010 - 2015

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Provinsi Maluku Utara ADHB baik secara nominal maupun secara riil dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, ditahun 2009 nilai PDRB sebesar 4.691,161 juta rupiah meningkat di tahun 2010 menjadi sebesar 5.389,832 juta rupiah, tahun 2011 sebesar 6.038,665 juta rupiah. Angka ini masih cenderung naik lagi pada tahun 2012 sebesar 6.918,586 juta rupiah, dan pada tahun 2013 naik menjadi 7.725,921 juta rupiah hingga di tahun 2014 menjadi sebesar 8.715.261 juta rupiah. Kecenderungan meningkatnya PDRB, terlihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun(diolah)

Gambar 8: PDRB Harga Berlaku 2009-2014

Adapun capaian PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2009-2013 menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.32 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013

No.	Kabupaten / Kota	PDRB									
		2009		2010		2011		2012		2013	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Halmahera Barat	304,798.62	6.78	343,521.17	6.62	386,761.51	6.58	431,946.60	6.48	477,641.97	6.34
2	Halmahera Tengah	375,344.11	8.35	439,732.88	8.48	499,651.08	8.50	560,001.69	8.40	620,945.08	8.25
3	Kepulauan Sula	515,830.44	11.48	586,065.88	11.30	664,114.77	11.30	742,686.41	11.14	828,629.40	11.00
4	Halmahera Selatan	804,314.63	17.90	899,193.81	17.34	1,005,314.90	17.11	1,139,121.05	17.09	1,280,636.01	17.00
5	Halmahera Utara	663,903.88	14.77	794,713.59	15.32	901,611.34	15.34	1,032,081.66	15.48	1,184,721.61	15.73
6	Halmahera Timur	415,084.38	9.24	481,079.90	9.28	541,532.16	9.22	613,048.39	9.20	692,646.77	9.20
7	Pulau Morotai	178,284.00	3.97	205,394.28	3.96	230,895.29	3.93	265,432.59	3.98	300,512.56	3.99
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ternate	845,365.56	18.81	991,795.08	19.12	1,145,713.58	19.50	1,312,246.82	19.69	1,504,829.24	19.98
10	Tidore Kepulauan	390,660.07	8.69	444,384.78	8.57	500,703.53	8.52	568,982.09	8.54	640,477.51	8.50
	Maluku Utara	4,691,161.69	00.00	5,389,832.37	100.00	6,038,665.16	100.00	6,918,433.30	100	7,725,420.01	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Demikian halnya dengan PDRB Maluku Utara atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran yang juga terus mengalami kenaikan. pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur PDRB disamping pengeluaran konsumsi pemerintah. informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.33 : PDRB Provinsi Maluku Utara menurut Penggunaan ADHB 2000 (juta Rp.)

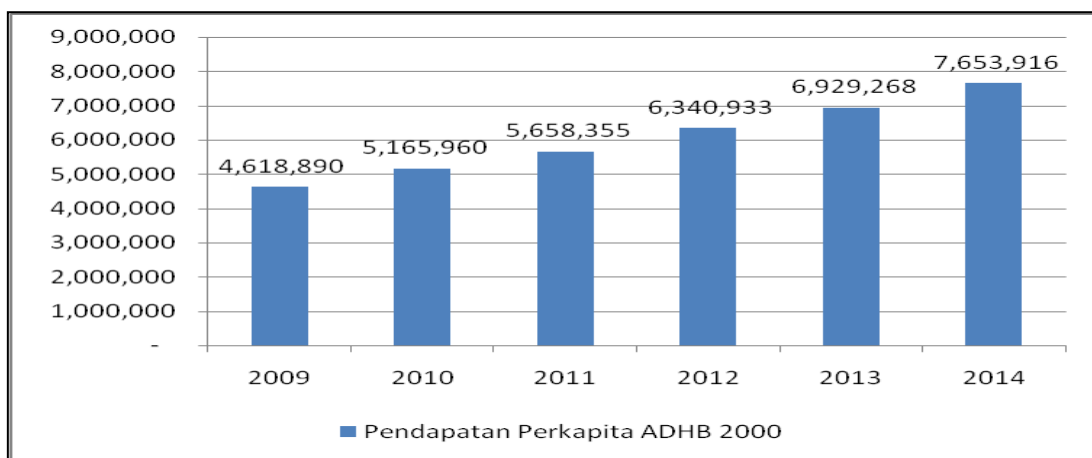
No.	Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.685.026	4.140.038	4.770.695	5.308.514	5.944.659
2.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit RT	39.162	0	0	0	0
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.700.780	1.922.291	2.149.271	2.428.334	2.793.836
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	507.019	592.832	679.330	788.003	885.007
5.	Perubahan Inventori	-707.950	-776.213	-733.349	-703.276	-407.540
6.	Ekspor Barang dan Jasa	1.559.669	0	0	0	0
7.	Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	1.354.717	0	0	0	0
	Jumlah	5.389.832	6.038.665	6.918.586	7.725.921	8.715.261

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2010 – 2013

PDRB Perkapita

1) PDRB Perkapita (ADHB)

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk Maluku Utara. Angka pendapatan perkapita setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Pendapatan perkapita penduduk (adhb) pada tahun 2009 sebesar Rp. 4.618.890,-, meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.165.960,- tahun 2011 sebesar Rp. 5.658.355,- pada tahun 2012 sebesar 6.340.933,-, pada tahun 2013 sebesar 6.929.268,- dan pada tahun 2014 sebesar 7.653.916,-.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun (diolah)

Gambar 9: Pendapatan Perkapita (ADHB)

2) PDRB Perkapita (ADHK)

PDRB perkapita atas harga konstan merupakan gambaran nilai tambahan bruto yang diciptakan penduduk Maluku Utara melalui aktifitas produksi yang mempertimbangkan angka inflasi dengan menggunakan tingkat harga tahun 2000. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dilihat dari grafik, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 2.768.717 pada tahun 2009 ke 2.909.560,- pada tahun 2010, dan sebesar 3.026.625 pada tahun 2011, pada tahun 2012 sebesar 3.157.896, sementara tahun 2013 sebesar 3.279.499 kemudian menjadi 3.395016 pada tahun 2014.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun (diolah)

Gambar 10: Pendapatan Perkapita (ADHK)

Laju Inflasi

Inflasi merupakan presentasi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan IHK inilah yang dikenal dengan Laju Inflasi. Laju Inflasi Provinsi Maluku Utara diwakili oleh Kota Ternate (Regional) tercatat pada tabel di bawah ini, dimana pada tahun 2010 adalah 5,32 persen, tahun 2011 turun menjadi 4,52 persen, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 3,29 persen, sedangkan tahun 2013 naik menjadi 9,78 persen dan kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 9,34 persen.

Tabel 2.34 : Laju Inflasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2014

INFLASI REGIONAL MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN						Andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi
KELOMPOK PENGELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Bahan Makanan	11,43	4,52	1,11	9,32	4,32	0,95
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,70	6,93	5,47	4,96	10,93	1,46
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,76	3,43	3,15	12,47	6,74	2,50
Sandang	5,31	8,72	6,38	6,31	16,20	0,80
Kesehatan	0,79	3,04	4,55	2,59	16,48	0,56
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	1,31	3,50	4,35	9,56	7,05	0,31
Transpor, Komunikasi dan Jasa keuangan	0,09	3,38	3,89	13,98	18,59	2,76
Laju Inflasi Regional (y-o-y)	5,32	4,52	3,29	9,78	9,34	9,34
Laju Inflasi Nasional (y-o-y)	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	
<i>Sumber Data : Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Maluku Utara, (data diolah)</i>						

Kenaikan Inflasi pada tahun 2014 dimotori oleh kenaikan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Gini Rasio

Koefisien Gini Provinsi Maluku Utara tahun 2009-2013, terlihat sebagaimana Tabel berikut, dimana koefisien gini provinsi pada tahun 2009 sebesar 0,3 disumbangkan oleh rata-rata kabupaten/kota, dengan kesenjangan tertinggi di Kabupaten Halmahera Utara yaitu sebesar 0.335. Tahun 2010 Gini rasio provinsi meningkat menjadi 0,31 persen dengan tingkat kesenjangan tertinggi berada di kabupaten Sula sebesar 0,326 persen disusul kabupaten morotai dan Halmahera timur sebesar 0,308 persen. Tahun 2011 gini rasio provinsi sebesar 0,33 meningkat dari tahun sebelumnya dengan kesenjangan tertinggi berada di kabupaten sula sebesar 0,316. Pada tahun 2012 dan 2013 gini rasio terus mengalami masing-masing sebesar 0,332 dan 0,315.

Secara umum angka ini belum menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang signifikan namun memperlihatkan adanya peningkatan ketimpangan pemerataan dalam 4 tahun terakhir, yang tentu saja membutuhkan intervensi pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah.

Tabel 2.35: Perkembangan Gini Rasio Provinsi Maluku utara 2009 – 2013

No	Kabupaten/kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	0.278	0.311	0.255	0.252	0,223
2	Halmahera Tengah	0.270	0.261	0.286	0.282	0,257
3	Kepulauan Sula*	0.270	0.326	0.316	0.317	0,267
4	Halmahera Selatan	0.265	0.285	0.248	0.266	0,274
5	Halmahera Utara	0.281	0.295	0.283	0.338	0.253
6	Halmahera Timur	0.226	0.308	0.297	0.261	0,248
7	Pulau Morotai	-	0.308	0.262	0.287	0,315
8	Kota Ternate	0.217	0.233	0.276	0.289	0,254
9	Kota Tidore Kepulauan	0.200	0.277	0.251	0.239	0,257
Provinsi Maluku Utara		0.304	0.319	0.335	0.332	0,315

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Kriteria Bank dunia di dalam menentukan tingkat ketimpangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan penduduk, maka penduduk dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

- a. 20% penduduk berpendapatan tinggi
- b. 40% penduduk berpendapatan sedang
- c. 40% penduduk berpendapatan rendah

Berdasarkan kriteria bank dunia tersebut tingkat pemerataan pendapatan versi bank dunia menunjukkan bahwa distribusi ketimpangan berdasarkan pengeluaran penduduk di kabupaten kota bervariasi. Pada tahun 2011 penduduk 20 % teratas yang mendominasi pengeluaran berada di Kabupaten Sula sebesar 41,37 persen diikuti Halmahera Timur dan Halmahera Tengah masing sebesar 39,20 persen dan 39,15 persen. Pada tahun 2012 kelompok 20 % teratas yang mendominasi pengeluaran beradan di kabupaten Sula, Kota Ternate dan Morotai masing-masing sebesar 40,73 persen, 39,70 persen dan 39,12 persen. Sementara pada tahun 2013 kelompok 20 % teratas yang mendominasi pengeluaran berada di kabupaten Morotai sebenar 40,67 persen diikuti Halmahera Selatan dan Sula. Sementara secara total provinsi Maluku Utara distribusi pengeluaran di dominasi oleh pengeluaran kelompok 40 persen menengah. Pada tahun 2011 kelompok 40 persen menengah menguasai 38,74 persen dan tahun 2013 kelompok ini menguasai sebesar 39,22 persen pengeluaran. Sementara kelompok 20 % teratas hanya mendominasi distribusi pengeluaran pada tahun 2012 atas dua kelompok lainnya sebesar 38,80 persen. Distribusi pengeluaran kabupaten dan kota di provinsi Maluku Utara dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 : Distribusi Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	2011			2012			2013		
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas
Halmahera Barat	24.52	39.04	36.44	24.46	40.22	35.32	26.07	40.47	33.46
Halmahera Tengah	23.53	37.32	39.15	23.65	37.83	38.52	24.36	39.24	36.40
Kepulauan Sula	21.95	36.68	41.37	21.32	37.95	40.73	23.50	39.32	37.18
Halmahera Selatan	25.22	38.78	36.00	23.90	38.95	37.16	23.56	38.04	38.40
Halmahera Utara	22.52	39.62	37.85	21.82	34.86	43.32	24.53	39.40	36.07

Halmahera Timur	22.13	38.67	39.20	24.81	38.16	37.03	24.48	40.57	34.96
Pulau Morotai	24.11	38.74	37.15	23.00	37.88	39.12	21.37	37.96	40.67
Ternate	23.35	39.34	37.31	23.23	37.08	39.70	24.36	39.45	36.19
Tidore Kepulauan	24.78	39.29	35.93	25.31	39.99	34.70	24.54	39.22	36.24
Maluku Utara	23.60	38.74	37.66	23.31	37.90	38.80	24.16	39.22	36.61

Sumber : Susenas Gabungan 2011-2013

Struktur distribusi pengeluaran versi bank dunia ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara kelompok masyarakat di Maluku Utara tidak menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam distribusi pembangunan ke kabupaten kota mampu mengurangi tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat. Namun demikian pembangunan daerah Maluku Utara tetap diarahkan pada terjaganya tingkat kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat yang semakin kecil.

Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks ketimpangan regional antar wilayah di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 2.37: Indeks Ketimpangan Wiliamson

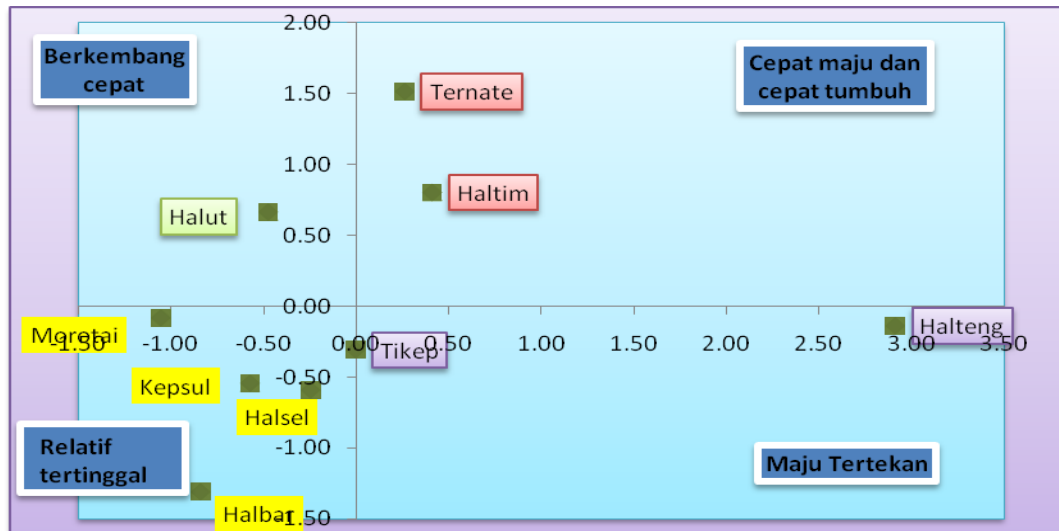
Provinsi	2010	2011	2012	2013
Maluku Utara	0,59	0,59	0,58	0,57

Sumber data: BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Tingkat kesenjangan regional provinsi Maluku Utara tahun 2010 dan 2011, berdasarkan hasil perhitungan dengan formula Indeks Williamson (IW) di Provinsi Maluku Utara, memiliki kesamaan nilai yakni untuk tahun 2010 indeks-nya sebesar 0,59 dan untuk tahun 2011 angka indeks-nya juga sebesar 0,59. Sementara pada tahun 2012 Indeks Williamson (IW) Provinsi Maluku Utara sebesar 0,58 dan tahun 2013 menjadi 0,57.

Berdasarkan data indeks Williamson tersebut diatas, terdapat penurunan angka indeks ketimpangan antar wilayah di Provinsi Maluku Utara ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar kabupaten ataupun kota.

Selain data indeks Williamson yang dipakai untuk melihat tingkat ketimpangan antar wilayah di provinsi Maluku Utara. Perkembangan pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara juga digunakan metode tipologi klassen untuk melihat secara utuh gambaran tingkat pertumbuhan wilayah dan tekanan di setiap kabupaten dan kota.



Gambar 11: Tingkat Kesenjangan Provinsi Maluku Utara

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

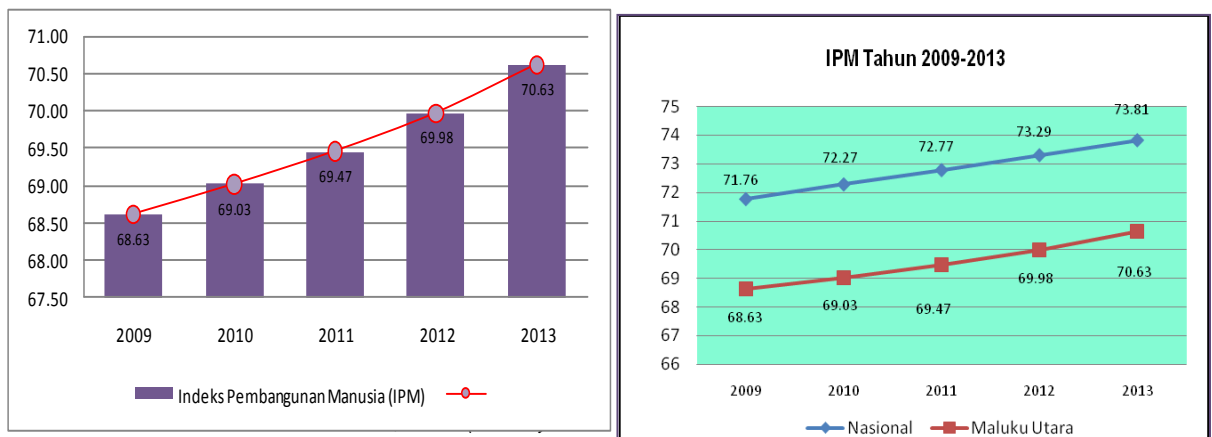
Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat capaian Pembangunan manusia, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan. IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan (Angka Melek Huruf (%)) dan Rata-rata Lama Sekolah (tahun), Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), dan Indeks Daya Beli (Konsumsi Rata/rata per Kapita). Bila dilihat dari masing-masing komponen maka Provinsi Maluku Utara tiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.38: IPM dan Komponen Pembentuknya, Provinsi Maluku utara 2009 – 2013

IPM dan Komponen	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Harapan Hidup (thn)	65,70	66,01	66,31	66,65	66,97
Angka Melek Huruf (%)	95,74	96,08	96,19	96,43	97,45
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	8,61	8,63	8,66	8,71	8,72
Konsumsi rata2 /kapita (Rp.)	598.450	600.200	603.204	606.220	609.260
IPM	68,63	69,03	69,47	69,98	70,63

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara beberapa tahun, diolah.

Pada Tahun 2009 IPM Maluku Utara adalah 68,63, naik sebesar 0,40 poin pada tahun 2010 menjadi 69,03. Pada tahun 2011 sebesar 69,47, tahun 2012 menjadi 69,98 dan tahun 2013 menjadi 70,63. Hingga tahun 2013, secara nasional posisi IPM Provinsi Maluku Utara berada di urutan 30 dari 34 provinsi. Perkembangan IPM Provinsi Maluku Utara dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 12: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013 dan Perbandingan secara Nasional

Tabel 2.39: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia /IPM (tahun)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	66.63	66.99	67.38	67.65	68,56
2	Halmahera Tengah	68.67	69.13	69.60	70.03	70,55
3	Kepulauan Sula	67.50	67.96	68.42	68.83	69,59
4	Halmahera Selatan	67.62	67.98	68.50	68.87	69,45
5	Halmahera Utara	67.57	67.98	68.87	69.84	70,36
6	Halmahera Timur	67.50	67.90	68.30	68.71	69,42
7	Pulau Morotai	64.15	64.61	65.09	66.08	67,03
8	Ternate	76.13	76.58	77.05	77.62	78,44
9	Tidore Kepulauan	69.28	69.62	69.97	70.45	70,80
10	Pulau Taliabu	*	*	*	*	64,99
Provinsi Maluku Utara		68.63	69.03	69.47	69.98	70,63

Sumber : BPS Prov. Malut Tahun 2010-2014

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2013 Kabupaten Pulau Taliabu memiliki IPM terendah, sedangkan yang tertinggi adalah Kota Ternate.

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan masih merupakan tantangan besar bagi proses pembangunan Indonesia. Karena sampai dengan akhir perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, kita belum mencapai angka kemiskinan yang ditargetkan di 8-10 persen. Demikian pula halnya dengan komitmen komunitas global melalui Tujuan Pembangunan Milenium (MDGS – *Millennium Development Goal's*) yang menempatkan performa ini pada level 7,55 persen di Tahun 2015 untuk Indonesia.

Perkembangan Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara menurut wilayah perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40: Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2014 menurut wilayah

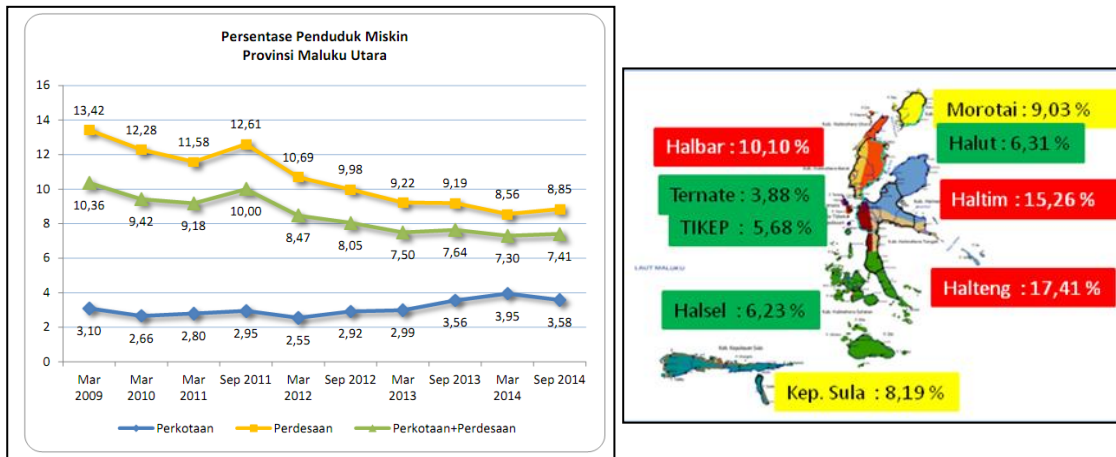
Tahun	Garis Kemiskinan Rp./Kapita/bulan		
	Kota	Desa	Kota/desa
2009	226,732	190,838	201,500
2010	238,533	202,185	212,982
2011	251,429	215,409	225,242
2012	268,729	232,109	242,112
2013	284,374	248,026	258,060
2014	321,231	286,242	295,787

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2015

Dengan menggunakan garis kemiskinan, Maluku Utara saat ini, telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dari 10,36 persen pada tahun 2009 menjadi 9,17 persen pada tahun 2011, kemudian menjadi 7,50 persen pada tahun 2013, hingga 7,30 persen pada tahun 2014. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2014 tersebut jumlah penduduk miskin di Maluku Utara turun sebanyak 15,36 ribu orang yakni dari 98,0 ribu orang di tahun 2009 menjadi 82,64 ribu orang di tahun 2014. Penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 89,27 ribu orang di tahun 2009 menjadi 70,45 ribu orang di tahun 2014, sedangkan perkotaan justru meningkat dari 8,72 ribu orang di tahun 2009 menjadi 12,19 ribu orang di tahun 2014.

Berdasarkan Kab./Kota pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) Kabupaten yakni Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Barat, yang masih berada di *red zone* atau diluar target RPJMN 2010-2014 (8-10 persen), bahkan dibutuhkan kerja keras bagi 3 (tiga) kabupaten tersebut ditambah Kabupaten

Kepulauan Sula dan Pulau Morotai, jika memperhatikan amanah Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs : 7,55 persen sebagai kondisi yang harus dicapai pada tahun 2015). Informasi lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014 (diolah)

Gambar 13: Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013 dan Per kabupaten/kota Tahun 2013

Tabel 2.41: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2011-2012

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)			persentase Penduduk Miskin (persen)		
		2011	2012	Perubahan	2011	2012	Perubahan
1	Halmahera Barat	13,4	11,1	-2,4	12,93	10,65	-2,28
2	Halmahera Tengah	10,0	8,3	-1,8	22,68	18,48	-4,20
3	Kepulauan Sula	14,2	11,7	-2,5	10,42	8,54	-1,88
4	Halmahera Selatan	16,6	13,7	-2,9	8,11	6,59	-1,52
5	Halmahera Utara	14,1	11,6	-2,5	8,46	6,75	-1,71
6	Halmahera Timur	15,6	12,9	-2,7	20,72	16,41	-4,31
7	Pulau Morotai	6,3	5,2	-1,1	11,61	9,49	-2,12
8	Ternate	9,9	8,2	-1,7	5,16	4,02	-1,14
9	Tidore Kepulauan	6,8	5,6	-1,2	7,34	6,02	-1,32
10	Pulau Taliabu	*	*	*	*	*	*

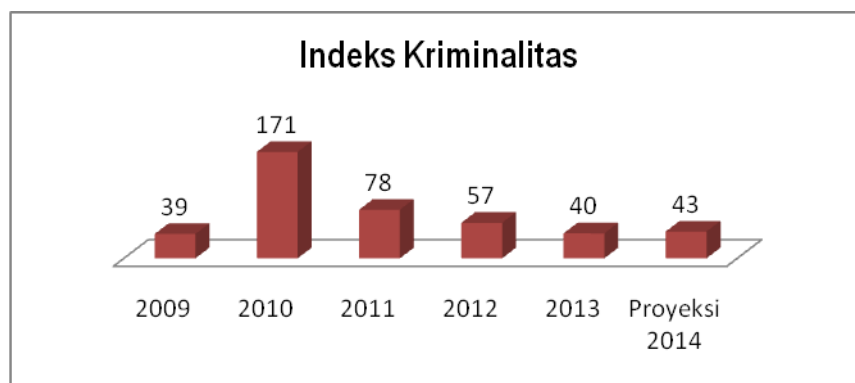
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Keterangan : *) : data masih tergabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Capaian indikator telah mampu menempatkan Maluku Utara, sementara pada *safety zone* sesuai target RPJMN 2010-2014 pada level 8-10 persen, sebagai situasi yang harus dicapai pada akhir tahun 2014.

Angka Kriminilitas yang Tertangani

Indeks kriminalitas di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 cenderung tinggi (171 persen) sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 78 persen, dan tahun 2012 menjadi 57 persen dan pada tahun 2013 turun menjadi 40 persen dan diproyeksikan pada tahun 2014 akan meningkat menjadi 45 persen.



Sumber : EKPD Provinsi Maluku Utara, 2014

Gambar 14: Indeks Kriminalitas

Naik turunnya indeks kriminalitas ini disebabkan pada tahun tertentu terdapat hajatan demokrasi baik pemilu kepala daerah (pilkada) maupun pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). Namun demikian data diatas lebih menunjukan penurunan indeks kriminalitas, hal ini dikarenakan ada upaya yang sistimatis dari aparat hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu perbandingan indeks kriminlitas Maluku Utara dan Nasional bisa dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : EKPD Provinsi Maluku Utara, 2014

Gambar 15: Indeks Kriminalitas Provinsi dan Nasional

Walaupun dengan kondisi geografis yang sulit serta jumlah aparat keamanan yang terbatas, namun indeks kriminal di Maluku Utara cenderung menurun, dimana tahun 2010 terdapat 171, pada tahun 2011 menjadi 78 dan turun menjadi 57 pada tahun 2012. Semakin menurun ini disebabkan karena jumlah aparat yang semakin bertambah (walaupun masih terbatas) juga disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan pada wilayahnya.

Fasilitas Perbankan di Maluku Utara

Jasa perbankan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan jasa ini. Jumlah kantor bank umum menurut status kepemilikan di Maluku Utara pada tahun 2010 sebanyak 45 unit, meningkat menjadi 89 unit pada tahun 2014.

Tabel 2.42 : Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Kepemilikan di Provinsi Maluku Utara, 2010-2014

No	Kantor Bank	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Pemerintah	26	34	39	41	41
2	Bank Pemerintah Daerah	11	12	17	17	17
3	Bank Swasta Nasional	8	20	21	25	31
4	Bank Asing dan Bank Campuran	0	0	0	0	0
Provinsi Maluku Utara		45	66	77	83	89

Sumber : Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, 2015

Indeks Kesulitan Geografis Desa

BPS telah menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) untuk seluruh wilayah pemerintahan desa (tidak termasuk kelurahan dan UPT) untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. IKG yang rendah menunjukkan bahwa desa tersebut telah memiliki fasilitas pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi serta kemudahan sarana transportasi. Sebaliknya, desa dengan IKG tinggi menunjukkan bahwa di desa tersebut belum tercukupi fasilitas pelayanan dasar dan infrastruktur ekonominya, serta masih memiliki kesulitan dalam sarana transportasi menuju ibukota kecamatan dan kabupaten/kota. IKG terendah di Provinsi Maluku Utara sebesar 14,33 sedangkan IKG tertinggi sebesar 85,20.

Tabel 2.43 : IKG Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2014

No	Kabupaten/kota	IKG Desa		
		terendah	Nilai tengah	Tertinggi
1	Halmahera Barat	23,74	48,56	82,75
2	Halmahera Tengah	26,98	44,81	72,44
3	Kepulauan Sula	22,01	51,08	81,92
4	Halmahera Selatan	19,71	61,21	84,79
5	Halmahera Utara	17,05	47,67	82,04
6	Halmahera Timur	14,33	48,81	78,43
7	Pulau Morotai	18,84	52,62	82,69
8	Pulau Taliabu	32,78	70,17	85,20
8	Kota Ternate	-	-	-
9	Kota Tidore Kepulauan	17,33	44,24	69,70
Provinsi Maluku Utara		14,33	51,69	85,20

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2015

2.1.2.2. Seni Budaya dan Olahraga

Provinsi Maluku Utara memiliki aneka ragam seni budaya yang tumbuh dan berkembang dari kultur masyarakat sehingga berbagai jenis kesenian terkait dengan kegiatan adat istiadat. Seni budaya tradisional tersebar merata diseluruh desa dengan kondisi ada yang tumbuh dengan baik karena pementasan setiap pelaksanaan even budaya dan ada yang kurang berkembang. Untuk saat ini pentas seni budaya dilaksanakan secara reguler setiap tahun. Pagelaran seni dan budaya dilakukan pada ivent budaya Legu Gam di Kota Ternate, Festival Teluk Jailolo (FTJ) di Halmahera Barat, Festival Kesenian dan Festival Maitara di Kota

Tidore, Festival Hibualamo di Halmahera Utara, Festival Caka Iba di Halmahera Tengah, Festival Gura Ici di Halmahera Selatan dan perayaan-parayaan Hari Ulang Tahun Provinsi maupun hari ulang tahun kabupaten/kota di Maluku Utara.

Untuk menjaga eksistensi seni budaya di Maluku Utara, pemerintah daerah terus mendorong perkembangan group-group kesenian di daerah. Pertumbuhan group-group kesenian daerah tak terpisahkan dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong humanisasi dan keharmonisasi social di level masyarakat. Gambaran group kesenian di Provinsi Maluku Utara tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.44: Jumlah Group Kesenian di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah group kesenian
1	Kota Ternate	4
2	Kota Tidore Kepulauan	3
3	Halmahera Barat	2
4	Halmahera Utara	2
5	Halmahera Selatan	1
6	Pulau Morotai	1
7	Kepulauan Sula	-
8	Halmahera Timur	1
9	Halmahera Tengah	1
10	Taliabu	-
Maluku Utara		16

Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maluku Utara 2014

Maluku Utara juga memiliki kekayaan seni budaya khususnya seni budaya pertunjukan dan tari-tarian, antara lain: Tari Soya-soya, Tide-tide, Cakalele, Dana-dana, Lalayon, Togal, Baramasuen (Bambu gila), Gala, Salai Jin, Tujuh Putri, Kabata, Tokuwela, Bobaso, Denge-denge, Lala, tarian Legu, tarian bidadari, tarian saro-saro, tarian kapita, Bambu tada dan Yangere. Untuk bahasa daerah/lokal terdapat sekitar 34 bahasa yang digunakan oleh 34 etnis/sub etnis di Maluku Utara.

Selain itu, ada beberapa budaya lokal masyarakat yang hingga kini masih terus dilestarikan, seperti Bari yaitu sistem gotong-royong yang dilaksanakan masyarakat di Halmahera Utara dan sekitarnya, Bari Fola di Tidore, Fagogoru di Halmahera Tengah, Saruma dan Hapolas di Halmahera Selatan, Lom Poa Do

Hoi di Kepulauan Sula, dan Leleyan yang dilaksanakan oleh hampir semua daerah di Provinsi Maluku Utara, juga terdapat beberapa ritual adat dan keagamaan seperti; Tahlil, Ratib, Dabus, Kololi Kie Ternate dan Tidore, Ela - ela dan Lufu Kie.

Indikator hasil pembangunan pemuda dan olahraga yang dilihat dari aspek kesejahteraan sosial yaitu peningkatan peran serta kepemudaan yang ditandai dengan adanya pertukaran pemuda antar Negara, pemuda kapal nusantara, jambore pemuda daerah, kirab remaja serta pemuda berprestasi, sedangkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga ditandai dengan adanya kejuaraan Nasional Sepak Bola antara PPLP/D, kejuaraan Liga Pendidikan Indonesia, Pekan Olahraga Nasional/Daerah (Popnas/Popda), Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pembinaan PPLP/D sepak bola Maluku Utara, gebyar olahraga masyarakat, serta pembangunan sarana prasarana olahraga.

Tabel 2.45: Jenis dan Sarana Olahraga di Kabupaten Kota

No	Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Olah Raga				
		Lapangan Bola Kaki	Bulu Tangkis	Tenis Lapangan	Lapangan Basket	Bola Volley
1	Kota Ternate	4	5	5	2	8
2	Kota Tidore Kepulauan	3	4	3	2	6
3	Halmahera Barat	3	3	2	2	4
4	Halmahera Utara	3	3	2	3	5
5	Halmahera Selatan	4	4	3	3	6
6	Pulau Morotai	2	3	2	2	4
7	Kepulauan Sula	3	2	3	2	4
8	Halmahera Timur	3	2	2	1	3
9	Halmahera Tengah	2	2	3	2	4
10	Pulau Taliabu	2	1	1	1	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga

Sarana prasarana olahraga masih terbatas meliputi lapangan bola kaki, bulutangkis, tenis lapangan, basket dan bola voly yang penyebaran di kabupaten/kota sebagaimana tabel di atas. Klub olahraga yang berkembang antara lain klub sepak bola, futsal, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, renang, basket, tinju, atletik, tenis lapangan, motor cross, menembak, anggar, dayung, menyelam, mancing, ski air, balap sepeda, pencinta alam, panjat tebing, sepak takraw, domino, catur, dan olahraga bela diri. Jumlah klub tersebut berkembang di seluruh kabupaten/kota karena ada even pertandingan yang dilaksanakan secara rutin baik tingkat lokal maupun nasional.

Dalam menggairahkan kegiatan olahraga di daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong pelaksanaan kejuaraan tingkat nasional seperti kejuaraan taekwondo tingkat nasional tahun 2012, kejuaraan tinju amatir tingkat nasional pada tahun 2014 dan Kejuaraan sepakbola di tingkat Regional dan Nasional pd tahun 2013 dan 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan olahraga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota serta partisipasi masyarakat. Namun hingga kini belum ada Gedung Olah Raga (GOR) di tingkat provinsi yang memadai.

2.1.2.3. Kesejahteraan Sosial

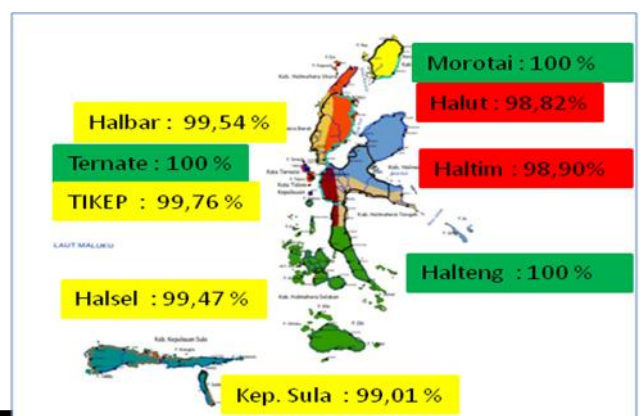
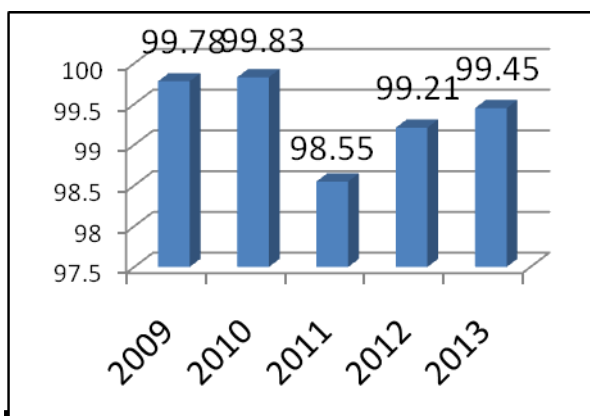
Analisis kinerja atas aspek kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Usia Harapan Hidup dan Presentase Balita Gizi Buruk.

Pendidikan

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf selama periode 2009-2013 cukup fluktuatif, dari 99,78 persen pada tahun 2009 turun pada tahun 2011 lalu naik menjadi menjadi 99,45 persen pada tahun 2013. Cakupan angka melek huruf ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Untuk kabupaten/kota yang tingkat Angka Melek Huruf terendah adalah Halmahera Utara, sebesar 98,82 persen dan Halmahera Barat 98,9 persen sedangkan yang tertinggi atau telah mencapai 100 persen adalah Halmahera Tengah, Pulau Morotai dan Ternate.

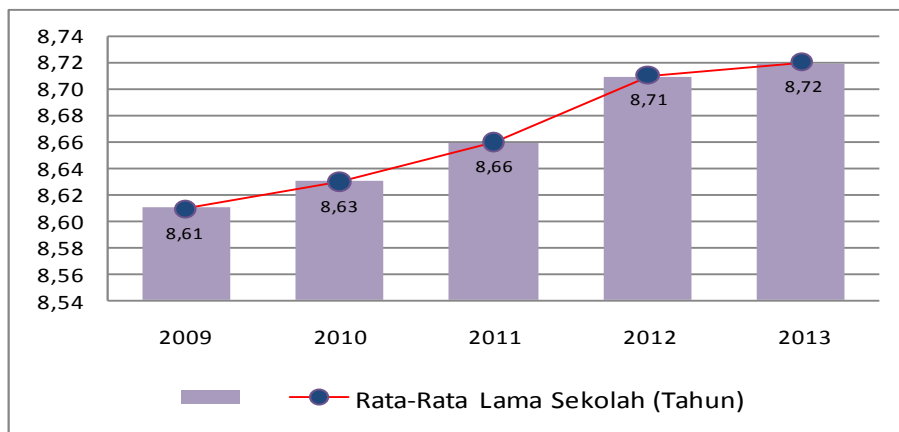


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014 (diolah)

Gambar 16: Trend Angka Melek Huruf Provinsi Maluku Utara dan Besarannya menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan, dari 8,61 persen pada tahun 2009 menjadi 8,72 persen pada tahun 2013. Kenaikan cakupan angka rata-rata lama sekolah ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Gambar 17: Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK juga bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Cakupan APK pada semua jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.46: Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 – 2013

Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (persen)				
	2009	2010	2011	2012	2013
SD/MI	113.65	116.74	118.25	108,24	110,70
SMP/MTs	81,75	80,52	90.04	86,96	81,98
SMA/MA	72.73	74.96	80.61	85,75	80,89

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2010 – 2014

Tabel di atas menjelaskan bahwa selama periode 2009-2013 APK pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK memiliki kecenderungan meningkat. Namun demikian, APK SD/MI telah menunjukkan capaian secara proporsional lebih dari 100 persen. Hal ini bisa terjadi karena adanya partisipasi anak diluar usia sekolah (7-12 tahun) pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh APM untuk tingkat SD merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun.

APM digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK, karena nilai APK menyangkut anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Cakupan APM pada semua jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.47: Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 – 2013

Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (persen)				
	2009	2010	2011	2012	2013
SD/MI	93.39	93.97	89.95	92,65	95,46
SMP/MTs	65.49	66.01	65.92	64,33	70,60

SMA/MA	51.74	52.68	51.88	56,82	59,21
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2010 - 2014

Tabel di atas menjelaskan bahwa APM pada semua jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK meningkat, namun belum menunjukkan capaian secara proporsional yakni masih kurang dari 100 persen. APM pada semua jenjang pendidikan memiliki kecenderungan yang fluktuatif selama perodesasi 2009 - 2013. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah nilai APM. Pada tahun 2013 nilai APM untuk jenjang SD sebesar 95,46, SMP sebesar 70,60 dan SMA sebesar 59,21.

Tabel 2.48 : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	2010			2011			2012			2013		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Halmahera Barat	94.16	69.59	53.53	90.39	69.77	45.87	95.77	63.10	57.17	98.07	70.08	51.89
Halmahera Tengah	95.51	73.71	44.68	92.17	72.28	55.78	91.65	64.56	55.38	97.18	65.12	68.02
Kepulauan Sula	95.52	76.26	80.65	88.32	65.87	55.81	92.24	68.85	55.33	95.89	74.07	71.85
Halmahera Selatan	99.06	74.61	60.92	93.32	70.42	48.27	95.32	60.39	55.16	95.41	69.47	49.47
Halmahera Utara	98.75	74.79	48.38	89.06	64.21	54.95	90.23	63.58	60.79	95.48	73.97	58.20
Halmahera Timur	94.9	70.23	54.44	87.74	61.11	45.86	96.60	66.87	41.00	96.86	69.30	57.69
Pulau Morotai	0	0	0	88.83	51.26	38.61	94.79	74.01	55.22	96.14	51.71	47.30
Ternate	95.58	76.53	57.7	87.23	59.21	50.90	88.33	58.43	58.25	90.41	76.89	64.33
Tidore Kepulauan	98.74	75.51	72.04	91.51	74.52	65.27	91.02	72.94	65.61	97.98	64.92	61.85
MALUKU UTARA				89.95	65.92	51.88	92,65	64,33	56,82	95.46	70.60	59.21

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Kesehatan

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) memiliki pengertian jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. AKB di Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2011-2013 cenderung meningkat, namun di tahun 2014 telah menunjukkan penurunan yang signifikan. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator sensitivitas yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.49: Angka Kematian Bayi Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2014

No	KABUPATEN/KOTA	Angka Kematian bayi			
		2011	2012	2013	2014
1	Halmahera Barat	6	21	43	10
2	Halmahera Utara	50	81	28	4
3	Halmahera Selatan	55	119	80	16
4	Halmahera Timur	15	20	16	3
5	Halmahera Tengah	18	34	11	8
6	Kepulauan Sula	8	14	35	3
7	Pulau Morotai	19	0	33	20
8	Pulau Taliabu	*	*	*	1
9	Ternate	12	14	22	9
10	Tidore Kepulauan	37	4	0	4
JUMLAH		220	326	258	78
angka kematian (dilaporkan)		11,5	15,8	62**	5

Sumber : Dinkes Provinsi Maluku Utara 2015

Keterangan : *) data masih gabung dengan kabupaten Kepulauan Sula

**) Riskesdas Provinsi Maluku Utara, Kemkes RI 2013

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBA kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Angka Kematian Balita dari tahun 2009-2014 kecenderungannya fluktuatif. Pada Tahun 2009 AKBA sebesar 2,31 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat di tahun 2011 menjadi 14,6 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun lagi menjadi 5,2 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2012, namun kembali mengalami peningkatan cakupan di tahun 2014, hingga menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.50: Angka Kematian Balita Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2014

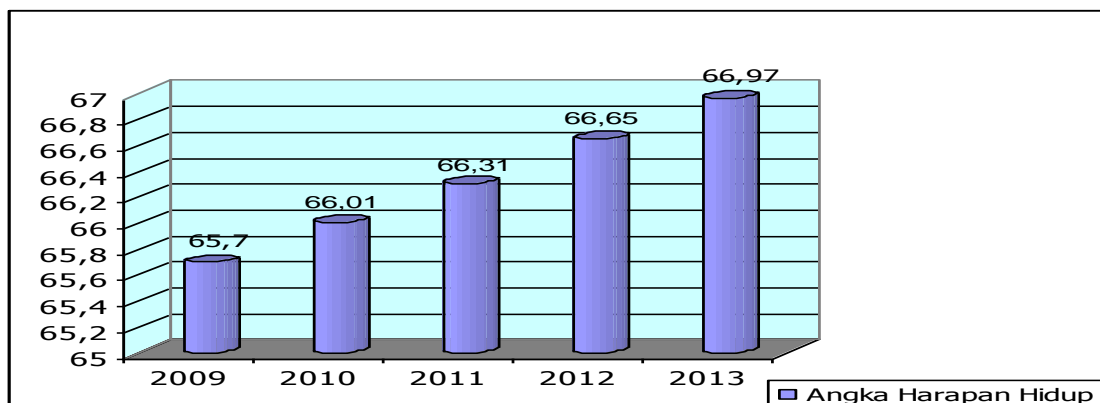
No.	KABUPATEN/KOTA	Angka Kematian Balita			
		2009	2011	2012	2014
1	Halmahera Barat	0	8	9	48
2	Halmahera Utara	30	79	12	35
3	Halmahera Selatan	0	55	0	96
4	Halmahera Timur	0	21	6	22
5	Halmahera Tengah	10	24	28	15
6	Ternate	0	12	0	28

7	Tidore Kepulauan	0	45	2	36
8	Kepulauan Sula	9	9	18	29
9	Pulau Morotai	*	26	0	40
JUMLAH		49	279	75	352
angka kematian (dilaporkan)		2,31	14,6	5,2	24

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 2015

Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan, dari 65,7 pada tahun 2009 menjadi 66,97 pada tahun 2013. Kenaikan cakupan angka harapan hidup dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : www.malutbps.go.id, 2014

Gambar 18: Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013

Persentase Balita Gizi Buruk

Keadaan gizi masyarakat Maluku Utara yang tercermin melalui prevalensi balita gizi buruk menunjukkan kecenderungan menurun sejak tahun 2010-2012, namun kecenderungan ini kembali meningkat di tahun 2014. Pada tahun 2010 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,98 persen, menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,40, namun meningkat hingga 0,71 pada tahun 2014. Adapun Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah yang tertinggi cakupan prevalensi gizi buruk dan Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah dengan cakupan terendah pada tahun 2014.

Tabel 2.51: Kondisi Gizi Balita di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Gizi Buruk (persen)				
		2010	2011	2012	2013**	2014
1	Halmahera Barat	2,49	1,67	0,93	9,6	1,13
2	Halmahera Utara	1,00	0,48	0,42	4,8	0,85
3	Halmahera Selatan	1,12	0,84	0,32	15,3	1,01
4	Halmahera Timur	1,40	0	1,88	5,5	0,18
5	Halmahera Tengah	0,19	0,33	0,36	9,2	0,67
6	Ternate	0,76	0,79	0,51	4,3	0,63
7	Tidore Kepulauan	0,57	0,29	0,22	7,5	0,16
8	Kepulauan Sula	1,27	0,11	0,10	14	0,84
9	Pulau Morotai	0,0	0,02	0,05	9,4	0,39
10	Pulau Taliabu	*	*	*	*	*
Provinsi Maluku Utara		0,98	0,58	0,40	9,2	0,71

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Dinkes, 2013

Keterangan : *) data masih gabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

**) Riskesdas Provinsi Maluku Utara, Kemkes RI, 2013

Ketenagakerjaan

Rasio Penduduk yang Bekerja

Berdasarkan data kependudukan tahun 2011-2013 sebagian besar penduduk Provinsi Maluku Utara yang berusia 15 Tahun keatas yang bekerja menurut kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2011-2013 cukup tinggi atau rata-rata 95 persen. Kecenderungan meningkatnya penduduk yang bekerja dibandingkan dengan penduduk yang tidak bekerja menunjukan bahwa penciptaan lapangan kerja baru terus meningkat sebagai akibat dari kinerja pembangunan daerah khususnya investasi yang terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.52: Perkembangan Penduduk berusia 15 tahun keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Selama Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	Penduduk yang Bekerja (persen)		
		2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	96.10	96.97	98.72
2	Halmahera Utara	94.68	98.53	97.67
3	Halmahera Selatan	95.49	94.89	95.86
4	Halmahera Timur	95.49	93.01	93.65
5	Halmahera Tengah	95.06	90.29	92.15
6	Kota Ternate	91.34	92.74	95.15
7	Kota Tidore Kepulauan	94.52	97.82	98.13
8	Kepulauan Sula	94.45	94.16	95.09
9	Pulau Morotai	95.17	96.08	95.73

10	Pulau Taliabu	*	*	*
Provinsi Maluku Utara		94	95	96

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Keterangan : *) data masih gabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pelayanan masyarakat. Aspek pelayanan umum akan diuraikan berdasarkan urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan.

Urusan Wajib – Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pendidikan

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap atas kebutuhan setempat. Pelayanan umum dalam bidang pendidikan tercermin dalam jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid dan rasio guru terhadap murid.

Tabel 2.53 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Maluku Utara

Kelompok Umur	2010	2013
7 - 12	97.23	97.97
13 - 15	90.76	93.28
16 - 18	64.12	68.67

Sumber : BPS Prov. Malut 2014

Dengan demikian APS tertinggi terdapat pada kelompok umur 7 – 12 tahun sedangkan yang terendah terdapat pada kelompok umur 16 – 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum bersekolah. Namun bila dilihat dari rasio ketersediaan sekolah dan anak usia sekolah sangat baik untuk tingkat SD dan SMP, hanya terjadi ketimpangan penyebaran antara kab/kota dan kecamatan.

Untuk rasio ketersediaan sekolah terhadap anak usia sekolah SD (6-12 Tahun) adalah 113,23; SMP (13-15 Tahun) adalah 159,45 dan SMA (16-18 Tahun) 63,502 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.54: Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Provinsi Maluku Utara, Tahun 2014

No	Tingkat	Rasio Sekolah/anak Usia Sekolah
1.	SD (6-12 Tahun)	113,23
2.	SMP (13-15 tahun)	159,45
3.	SMA (16-18 Tahun)	63,502

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, dan LPMP Provinsi Maluku Utara

Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah masih rendah terdapat pada kelompok tingkat usia 16 – 18 tahun (tingkat SMA) hal ini disebabkan karena ketersediaan sekolah SMA/MA/SMK masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkat tersebut. Selain itu ketersediaan sekolah SMA/MA/SMK masih didominasi pada wilayah ibukota kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk rasio guru murid per tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.55: Rasio Guru per Murid Provinsi Maluku Utara tahun 2009 – 2012

No	Uraian	Satuan	2009	2000	2011	2012
1	Rasio guru dan murid SD/ sederajat	Rasio	1:24	1 :23	1:22	1:22
2	Rasio guru dan murid SMP/ sederajat	Rasio	1:38	1:38	1:35	1:34
3	Rasio guru dan murid SMA/ sederajat	Rasio	1:36	1:34	1:34	1:32
4	Rasio guru dan murid SMK/ sederajat	Rasio	1:36	1:34	1:34	1:32

Sumber : EKPD Prov Malut 2013

Memperhatikan data di atas, rasio guru murid yang tertinggi terdapat pada tingkat SMP sederajat, kondisi ini disebabkan karena keterbatasan dan tidak meratanya distribusi guru, rendahnya guru pada mata pelajaran tertentu serta terbatasnya alokasi kuota rekrutmen dari pemerintah pusat. Sedangkan ketersediaan rasio murid terhadap ruang kelas sekolah, pada tahun 2012 tingkat SD sederajat 1 : 28, SMP sederajat 1 : 31, dan SMA sederajat 1 : 62. Lebih jelas rasio siswa terhadap ruang kelas dapat dilihat perkembangan tahun 2009 – 2012 sebagai berikut.

Tabel 2.56 : Rasio Kelas dan siswa Provinsi Maluku Utara tahun 2009 – 2012

No	Uraian	Satuan	2009	2000	2011	2012
1	Rasio kelas dan siswa SD/ sederajat	Rasio	1:27	1:27	1:28	1:28

2	Rasio kelas dan siswa SMP/ sederajat	Rasio	1:28	1:40	1:30	1:31
3	Rasio kelas dan siswa SMA/ sederajat	Rasio	1:56	1:58	1:69	1:62

Sumber : EKPD Prov Maluku 2013

Kondisi ketersediaan ruang belajar terhadap siswa di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa pada tingkat SMA sederajat masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan standar ruang minimal ruang kelas 1 : 32 untuk seluruh jenjang. Data ini menunjukkan bahwa rasio siswa dan ruang kelas yang memenuhi standar minimum hanya terdapat pada satuan pendidikan SD sederajat (1 : 28) sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA masih jauh dari standar minimal. Dengan demikian maka kecukupan ruang kelas untuk tingkat SMP dan SMA perlu dilakukan peningkatan dan penyebaran yang lebih merata pada semua kab/kota.

Selanjutnya kemajuan pendidikan juga sangat ditentukan oleh mutu pendidikan, salah satu indikator adalah akreditasi sekolah yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Secara keseluruhan baru 68,12 persen SD/MI yang diakreditasi, SMP 91,12 persen, sedangkan 72 persen. Dari presentasi tersebut terdapat status akreditasi B dan C lebih mendominasi.

Tabel 2.57 : Akreditasi Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA	
1	Halmahera Barat	15		49		17	
2	Halmahera Tengah	43		24		7	
3	Kepulauan Sula	160		59		27	
4	Halmahera Selatan	248		95		48	
5	Halmahera Utara	200		50		18	
6	Halmahera Timur	83		39		14	
7	Pulau Morotai	75		19		9	
8	Ternate	39		26		14	
9	Tidore Kepulauan	30		29		26	
Maluku Utara		893		390		180	
Total Sekolah		1,311	68.12 %	428	91.12%	250	72%

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Maluku 2013

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat SMP sederajat memiliki presentasi akreditasi tertinggi (91,12 persen) sedangkan terendah pada SD/MI (68,12 persen). Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan akreditasi disebabkan karena jumlah SD/MI yang banyak sedangkan alokasi anggaran dan tenaga asesor untuk pelaksanaan akreditasi masih terbatas. Selain itu masih rendahnya kesiapan sekolah untuk mengajukan akreditasi karena belum terpenuhinya standard dan syarat akreditasi.

Sedangkan untuk sertifikasi guru dan pengawas untuk semua tingkat pendidikan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 19,348 orang, yang telah tersertifikasi sebanyak 5.947 orang dan yang belum adalah 13,401 orang atau 69 persen.

Tabel 2.58: Data Akreditasi Guru per Tingkat Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	TK			SD			SMP			SLB		
		Sudah	Belum	Jml	Sudah	Belum	Jml	Sudah	Belum	Jml	Sudah	Belum	Jml
1	Halmahera Barat	22	110	132	361	1,107	1,468	154	253	407	-	-	-
2	Halmahera Tengah	11	108	119	134	437	571	74	115	189	-	-	-
3	Kepulauan Sula	7	210	217	211	742	953	131	98	229	-	-	-
4	Halmahera Selatan	6	427	433	505	1,364	1,869	277	211	488	-	-	-
5	Halmahera Utara	9	270	279	317	884	1,201	113	177	290	-	-	-
6	Halmahera Timur	11	55	66	107	700	807	67	177	244	-	-	-
7	Pulau Morotai	5	75	80	102	466	568	29	37	66	-	-	-
8	Pulau Taliabu	3	45	48	96	359	455	38	101	139	-	-	-
9	Kota Ternate	43	473	516	478	699	1,177	344	209	553	2	-	2
10	Kota Tidore Kepulauan	68	340	408	387	599	986	201	300	501	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		185	2,113	2,298	2698	7,357	10,055	1428	1,678	3,106	2	-	2

No.	Kabupaten/Kota	SMA			SMK			Pengawas	Total yang sudah Terakreditasi	Total yang Belum Terakreditasi	Persentasi yang belum terakreditasi
		Sudah	Belum	Jml	Sudah	Belum	Jml				
1	Halmahera Barat	106	89	195	28	37	65	50	721	1,596	0.69
2	Halmahera Tengah	45	45	90	17	54	71	-	281	759	0.73
3	Kepulauan Sula	89	77	166	39	173	212	12	489	1,300	0.73
4	Halmahera Selatan	185	304	489	31	145	176	-	1,004	2,451	0.71
5	Halmahera Utara	115	283	398	20	341	361	14	588	1,955	0.77
6	Halmahera Timur	36	63	99	11	33	44	17	249	1,028	0.81
7	Pulau Morotai	32	113	145	9	35	44	-	177	726	0.80
8	Pulau Taliabu	21	35	56	6	79	85	-	164	619	0.79
9	Kota Ternate	333	94	427	130	132	262	55	1,385	1,607	0.54
10	Kota Tidore Kepulauan	135	62	197	65	59	124	33	889	1,360	0.60
Provinsi Maluku Utara		1,097	1,165	2,262	356	1,088	1,444	181	5,947	13,401	0.69

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Malut, 2014

Rendahnya guru yang tersertifikasi sampai tahun 2013 masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi (69 %).

Hal ini disebabkan karena rendahnya kualifikasi guru yang menjadi syarat minimal sebagai peserta sertifikasi guru, rendahnya kelulusan Ujian kompetensi (UK) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Tabel 2.59 : Penduduk yang berusia diatas 15 Tahun melek huruf

No	Kabupaten / Kota	Angka Melek Huruf 15-24 Tahun Perempuan dan Laki-laki				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	100,00	99,67	98,47	99,33	99,54
2	Halmahera Tengah	99,31	100,00	98,75	97,66	100
3	Kepulauan Sula	99,71	100,00	97,45	98,52	99,01
4	Halmahera Selatan	99,74	99,76	98,85	99,11	99,47
5	Halmahera Utara	99,72	100,00	99,66	99,77	98,82
6	Halmahera Timur	100,00	100,00	98,94	97,64	98,90
7	Pulau Morotai	*	100,00	91,22	99,18	100,00
8	Ternate	99,75	99,73	99,62	100	100,00
9	Tidore Kepulauan	100,00	99,57	98,21	99,05	97,76
Provinsi Maluku Utara		99,78	99,83	98,55	99,21	97,45

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Data di atas menunjukkan bahwa ketuntasan melek huruf di atas 15-24 tahun baik Perempuan dan laki –laki di Provinsi Maluku Utara, terdapat 3 kabupaten yang telah mencapai 100 persen dan paling rendah di kota Tidore Kepulauan. Kondisi ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang belum baik serta belum didukung dengan ketersediaan media dan fasilitas pembelajaran. Untuk itu, ditingkatkan fasilitas serta pengembangan pola pembelajaran melalui Kelompok Belajar Masyarakat (KBM).

Untuk Jumlah sarana prasarana pendidikan di Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk TK jumlah di tahun 2009 sebanyak 295 unit dan di tahun 2012/2013 sebanyak 321 unit. SD/MI pada tahun 2009 sebanyak 1.208 unit meningkat di tahun 2012/2013 menjadi 1.311 unit. SMP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 384 Unit meningkat di tahun 2012/2013 menjadi 428 unit, SMA/MA pada tahun 2009 sebanyak 136 unit meningkat pada tahun 2012/2013 menjadi 250 unit yang tersebar di kabupaten/kota, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 10 unit, seperti terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2.60: Jumlah Sekolah di Provinsi Maluku Utara

Tahun	Jumlah Sekolah				
	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SLB
2009	295	1.208	384	136	10

2010	295	1.208	384	132	10
2011	291	1.208	384	132	10
2012/2013	321	1.311	428	250	14

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, dan LPMP Provinsi Maluku Utara.

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai dasar peletakan dan pembentukan kapasitas SDM sangat penting guna membentuk SDM yang berkualitas. Untuk itulah Lembaga PAUD harus dibentuk di setiap kabupaten/kota. Berikut data PAUD di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota.

Tabel 2.61 : Data Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara

No	Program PAUD	2012	2013	2014	Jumlah Gedung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
1.	TK	371	373	377	112	19553	19676	19868	5561	5595	5655
2.	Kelompok Belajar (KB)	456	477	491	78	10535	1148	12261			
3.	Taman Penitipan Anak (TPA)	-	10	15	2	-	153	215			

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, 2014

Selanjutnya untuk jumlah lembaga PAUD di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2013 sebagaimana data berikut:

Tabel 2.62: Jumlah Lembaga PAUD dan Guru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Lembaga PAUD	Jumlah Guru
1.	Halmahera Barat	67	191
2.	Halmahera Tengah	46	109
3.	Kepulauan Sula	69	223
4.	Halmahera Selatan	130	361
5.	Halmahera Utara	162	436
6.	Pulau Morotai	58	185
7.	Halmahera Timur	77	187
8.	Ternate	86	235
9.	Tidore Kepulauan	53	168
Provinsi Maluku Utara		748	2095

Sumber : HIMPAUDI Provinsi Maluku Utara, 2014

Bila dilihat dari cakupan pelayanan Lembaga PAUD di Provinsi Maluku Utara, maka dapat dikatakan 1 Lembaga PAUD melayani sekitar 64,72 anak usia 0-4 tahun yang ada di Provinsi Maluku Utara Kondisi ini disebabkan karena

rendahnya lembaga dan tenaga guru serta belum terbentuknya lembaga PAUD secara merata di seluruh Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Tabel di bawah ini menyajikan angka putus sekolah selama lima tahun terakhir pada masing-masing kelompok umur memperlihatkan fluktuasi.

Tabel 2.63: Persentase Angka Putus Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	2009				2010				2011			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Halmahera Barat	1.00	0.00	10.06	10.06	0.86	2.73	4.21	17.32	0.00	2.50	8.23	0.00
Halmahera Tengah	0.40	2.00	7.09	7.09	1.00	0.00	5.86	6.25	0.86	0.00	0.00	34.02
Kepulauan Sula	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	16.97	0.95	3.73	1.56	9.41
Halmahera Selatan	2.62	3.26	9.07	9.07	1.58	6.04	21.38	8.32	0.72	1.44	2.87	0.00
Halmahera Utara	1.48	3.16	0.00	0.00	2.10	1.89	14.01	45.95	0.88	2.93	5.51	10.85
Halmahera Timur	1.75	0.00	9.13	9.13	2.35	5.00	12.39	17.37	0.85	3.78	7.28	0.00
Pulau Morotai	*)	*)	*)	*)	2.55	2.44	4.72	31.30	1.10	2.63	6.25	0.00
Ternate	0.04	6.57	2.55	2.55	0.60	0.70	2.95	6.15	0.00	3.26	1.71	4.84
Tidore Kepulauan	0.00	2.69	0.00	0.00	0.53	1.21	8.59	45.49	0.00	2.60	2.85	4.71
Maluku Utara	1.27	2.59	5.10	3.08	1.28	2.50	9.83	15.49	0.60	2.58	3.51	5.45

Kabupaten/Kota	2012				2013			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
Halmahera Barat	0.00	0.95	7.19	0.00	0.00	1.89	6.36	2.87
Halmahera Tengah	1.92	7.05	12.47	0.00	0.00	4.75	6.83	19.92
Kepulauan Sula	0.00	0.00	5.34	12.92	0.26	4.69	4.69	2.05
Halmahera Selatan	0.21	1.83	7.28	0.00	1.51	5.23	9.44	7.09
Halmahera Utara	0.77	6.53	4.06	8.30	0.96	0.88	4.80	3.73
Halmahera Timur	0.35	0.00	11.99	6.86	0.07	1.94	6.98	4.3
Pulau Morotai	0.28	4.25	1.61	0.00	0.66	7.08	16.77	14.25
Ternate	0.61	0.00	2.91	5.13	0.00	0.63	1.83	3.01
Tidore Kepulauan	0.43	2.02	3.52	5.40	0.75	0.87	2.30	1.07
Maluku Utara	0.42	2.25	5.44	5.07	0.63	2.85	5.54	4.03

Angka putus sekolah tertinggi terdapat pada kelompok umur 16-18 tahun, sedangkan yang rendah pada kelompok umur 7-12 tahun. Penyebab tingginya angka putus sekolah disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi orang tua, sehingga lebih banyak anak untuk memilih bekerja membantu ekonomi

dibandingkan dengan melanjutkan studi. Penyebab lain adalah keterbatasan akses pada fasilitas pendidikan. Selanjutnya angka kelulusan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.64: Persentase Angka Lulus Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase kelulusan ujian nasional SD/SLB/MI/Paket A (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase kelulusan ujian nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)	84,73	0	99,43	99,65	99,99
3	Persentase kelulusan ujian nasional SMA/SMK/MA/Paket C (%)	75,97	0	98,75	98,59	98,34

Sumber : Dokumen EKPD Prov. Malut, 2014 .

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan sekolah berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pada SD/SLB/MI dan Paket A mencapai 100% dari tahun 2009-2013, sedangkan angka lulus sekolah dengan presentasi rendah terdapat pada kelulusan SMA/SMK/MA dan Paket C dengan presentasi 98,34%, dari tahun 2009-2013, Hal ini disebabkan Karena, sebagian siswa yang tidak lulus tidak mengikuti ujian pada tahun berikutnya dan belum memenuhi standard ketuntasan minimum.

Keberadaan Infrastruktur Pendidikan

Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa hampir semua desa (termasuk kelurahan dan UPT) di Provinsi Maluku Utara sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Hanya 8,70 persen (104 desa) yang tidak ada SD/MI. Pada jenjang pendidikan menengah pertama, seluruh wilayah kecamatan di Provinsi Maluku Utara telah memiliki SMP/MTs. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah atas, dari 115 kecamatan hanya 1 kecamatan yang tidak ada SMU/SMK/MA.

Tabel 2.65: Jumlah Desa yang ada SD/MI dan Jumlah Kecamatan yang ada SMP/MTs dan SMU/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Desa ada SD/MI	Kecamatan ada SMP/MTs	Kecamatan ada SMU/SMK/MA
Halmahera Barat	151	8	8
Halmahera Tengah	58	10	10
Kepulauan Sula	78	12	12

Halmahera Selatan	251	30	29
Halmahera Utara	170	17	17
Halmahera Timur	92	10	10
Pulau Morotai	75	5	5
Pulau Taliabu	65	8	8
Ternate	64	7	7
Tidore Kepulauan	88	8	8
MALUKU UTARA	1.092	115	114

Sumber : BPS Prov. Maluku 2015

Angka Melanjutkan Sekolah

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan pendidikan tingkat SD/MI yang paling rendah tahun 2013 di Kabupaten Halmahera Selatan dan tertinggi di Tidore Kepulauan, Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Sedangkan Mutu pendidikan juga sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan pendidik, berikut ini jumlah kualifikasi pendidikan guru di Provinsi Maluku Utara tahun 2014.

Tabel 2.66 : Proporsi murid kelas 1 berhasil menamatkan SD/MI di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Kelas 1 SD/MI ^{a)}			Jumlah Siswa Lulus ^{a)}			Proporsi murid kelas 1 berhasil menamatkan SD/MI (%)		
		2005	2006	2007	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	bad	3.112	3.734	2.382	1.827	2.392	76,5	48,9	64,06
2	Halmahera Tengah	Bad	1.302	1.431	977	864	985	75,0	60,4	68,8
3	Kepulauan Sula	Bad	7.823	8.675	3.587	2.671	3.688	45,9	30,8	42,5
4	Halmahera Selatan	Bad	13.068	14.309	5.304	4.019	5.489	40,6	28,1	38,4
5	Halmahera Utara	Bad	4.729	5.243	3.644	3.089	3.721	104,4	73,8	97,8
6	Pulau Morotai				1.291	782	1.408			
7	Halmahera Timur	Bad	2.162	2.368	1.504	1.200	1.672	69,6	50,7	70,6
8	Ternate	Bad	3.626	3.977	3.136	2.864	2.385	86,5	72,0	60
9	Tidore Kepulauan	Bad	1.732	1.994	1.806	1.837	1.945	104,3	92,1	97,5
Provinsi Maluku Utara		bad	37.554	41.731	23.631	19.153	23.685	62,9	45,9	56,8

Sumber : ^{a)} Diknas Provinsi Maluku Utara, 2013

Masih rendahnya tingkat pendidikan guru di Provinsi Maluku Utara, dari total jumlah guru sebanyak 18.042, yang telah memiliki kualifikasi sebagaimana UU guru sebanyak 10.401 atau sebanyak 57,65 persen, sedangkan yang belum memenuhi standar kualifikasi sebanyak 7641 atau 42,35 persen.

Tabel 2.67: Jumlah Kualifikasi Guru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

NO	KECAMATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									TOTAL
		D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	SMA	SMK	
1	Halmahera Barat	22	467	34	3	1117	50	0	242	25	1960
2	Halmahera Tengah	6	401	8	3	585	7	1	81	8	1100
3	Halmahera Utara	54	577	63	1	990	26	0	537	37	2285
4	Halmahera Selatan	26	776	39	9	1368	31	1	504	55	2809
5	Kepulauan Sula	31	559	32	4	906	7	0	243	27	1809
6	Halmahera Timur	7	444	22	1	699	15	239	23		1450
7	Morotai	15	264	9	3	381	5	0	250	34	961
8	Ternate	36	579	49	7	2112	143	0	257	28	3211
9	Tidore Kepulauan	7	615	14	2	1625	60	0	124	10	2457
	TOTAL	204	4682	270	33	9783	344	241	2261	224	18042

Sumber : LPMP Prov. Malut, 2014

Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya akses guru dan biaya untuk melanjutkan studi pada jenjang S1, sementara disisi lain guru harus tetap melaksanakan tugas pembelajaran. Dampak lain dengan rendahnya kualifikasi menyebabkan guru tidak dapat mengikuti pelaksanaan sertifikasi kecuali yang telah memiliki umur pengabdian yang memenuhi syarat undang-undang.

Selain itu masih rendah tenaga kependidikan dan tugas tambahan di provinsi Maluku Utara. Keberadaan tenaga pendidikan ini turut memberikan kontribusi rendahnya kualitas pelayanan pendidikan. Berikut ini uraian tenaga kependidikan dengan tugas tambahan di Provinsi Maluku Utara tahun 2014 sebagai berikut.

Tabel 2.68: Tenaga Kependidikan dengan Tugas Tambahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

N O	KABUPATEN	TUGAS TAMBAHAN												TOTAL
		Benda hara	Kepala Perpustakaan	Kepala Sekolah	Kepala Tata Usaha	Laboran	Penjaga Sekolah	Pustakawan	Staf Tata Usaha	Teknisi Laboratorium	Tenaga Kebersihan	Tidak Menjabat	Wakil Kepala Sekolah	
1	Halmahera Barat	7	5	1	36	0	31	4	113	1	2	2	2	204
2	Halmahera Tengah	2	1	0	15	0	7	3	43	0	0	1	0	72
3	Halmahera Utara	15	2	0	36	0	26	2	82	4	4	10	1	182
4	Halmahera Selatan	12	0	0	37	0	14	2	106	0	5	0	1	177
5	Kepulauan Sula	3	9	0	30	0	17	0	215	0	7	2	0	283
6	Halmahera Timur	4	7	26	0	1	15	19	126	0	1	7	1	207
7	Morotai	1	4	0	9	0	5	2	93	0	3	0	0	117
8	Ternate	21	8	1	45	2	59	14	262	2	1	14	2	431
9	Tidore Kepulauan	24			27		28	3	160	1	3	5	1	252
TOTAL		82	31	27	199	3	171	45	1087	7	24	39	6	1721

Sumber : LPMP Prov. Malut, 2014

Perguruan Tinggi di Provinsi Maluku Utara

Terdapat 21 (dua puluh satu) perguruan tinggi di Maluku Utara, baik negeri maupun swasta. Berdasarkan tabel dibawah belum semua kabupaten memiliki perguruan tinggi. Kota Ternate memiliki 7 (tujuh) perguruan tinggi, yang salah satunya adalah Perguruan Tinggi Negeri.

Tabel 2.69: Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

No	KABUPATEN/KOTA	Perguruan Tinggi
1	Halmahera Barat	Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo
2	Halmahera Utara	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Halmahera Tobelo
		Politeknik Pertanian Padamara Tobelo
		Universitas Halmahera
		Akbid Makariwo Tobelo
3	Halmahera Selatan	Sekolah Tinggi Alkhairat Labuha
		Politeknik Halmahera Labuha
		Sekolah Tinggi Pertanian Labuha
4	Halmahera Timur	-
5	Halmahera Tengah	-
6	Kepulauan Sula	Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Babussalam Sula
7	Pulau Morotai	Universitas Pasifik Morotai
8	Pulau Taliabu	
9	Ternate	Universitas Khairun
		IAIN Ternate
		Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
		STIKIP Kie Raha
		Politeknik Kemenkes Ternate
		Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Ternate
		AIKOM Ternate
10	Tidore Kepulauan	Universitas Nuku Tidore
		Universitas Bumi Hijrah
		Akbid Gatra Buana Gurabati
		STIMIK Mandiri Tidore

Sumber : Forum Rektor Provinsi Maluku Utara, 2014

Permasalahan yang dihadapi Perguruan tinggi antara lain keterbatasan biaya operasional, fasilitas, sarana perkuliahan dan laboratorium, rendahnya kualifikasi tenaga dosen dan tenaga kependidikan, dan disisi lain masih rendahnya biaya kuliah di perguruan tinggi di Maluku Utara. Akibatnya PT sulit untuk dapat mengembangkan sarana dan prasana yang dimiliki yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu lulusan.

Kesehatan

Ketersediaan Sarana Kesehatan

Hingga tahun 2014, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Maluku Utara meliputi 22 Rumah Sakit, yaitu 10 rumah sakit dikelola oleh pemerintah daerah, 3 unit Rumah Sakit Bergerak, 3 buah rumah sakit TNI/POLRI dan 6 buah RS swasta, namun demikian belum terdapat Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Maluku Utara. Selain itu untuk sarana pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya telah terdapat sebanyak 132 buah puskesmas, yang terdiri atas puskesmas perawatan sebanyak 31 unit dan puskesmas Non Perawatan sebanyak 101 unit, puskesmas keliling 84 unit, sedangkan Puskesmas Pembantu sebanyak 232 unit. Untuk UKBM antara lain terdapat sebanyak 488 Pos Kesehatan Desa serta Posyandu sebanyak 1.248 buah.

Dalam dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, terdapat sebanyak 10 instalasi farmasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, 83 apotik milik swasta, dan hanya 1 milik pemerintah berada di Kota Ternate. Toko obat juga merupakan pendukung penyediaan pelayanan masyarakat yang keberadaanya tersebar di Kab./kota dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 Toko Obat.

Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan sebagaimana di atas mempengaruhi keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013, keterjangkauan fasilitas kesehatan dapat dilihat dari moda transportasi yang digunakan masyarakat, waktu tempuh yang diperlukan serta biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam menjangkau fasilitas kesehatan sebagaimana kedua Tabel di bawah ini.

Tabel 2.70: Moda Transportasi Yang Digunakan Masyarakat menuju fasilitas kesehatan Tahun 2013

Moda Transportasi	Mobil Pribadi	Kendaraan Umum	Jalan Kaki	Sepeda Motor	Sepeda	Perahu	Lainnya	Lebih dari 1 moda
Menuju Rumah Sakit Pemerintah	2.80	44.30	0.20	25.20	0.10	3.80	6.00	17.50
Menuju Puskesmas dan Pustu	1.20	28.90	17.20	36.40	0.10	4.50	3.80	7.80

Sumber: Riskedas Kemkes RI 2013

Tabel 2.71: Waktu Tempuh dan Biaya Transportasi yang dikeluarkan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan Tahun 2013

Waktu Tempuh (menit)	< 16 menit	16-30 menit	31 - 60 menit	> 60 Menit
Menuju Rumah Sakit Pemerintah	18.30	30.50	14.10	37.00
Menuju Puskesmas dan Pustu	56.80	27.30	7.70	8.20
Menuju Posyandu	94.40	4.80	0.10	0.70
Menuju Polindes	96.00	2.60	0.70	0.70
Biaya Transportasi (Rp)	< 10.000	>10.000 sd 50.000.-	> 50.000	tidak menjawab
Menuju Ruma Sakit Pemerintah	39.70	33.20	26.70	0.40
Menuju Puskesmas dan Pustu	74.70	23.00	2.10	0.20
Menuju Posyandu	99.10	0.80	-	-
Menuju Polindes	97.70	2.30	-	-

Sumber: Riskesdas Kemkes RI 2013

Data di atas menunjukkan bahwa waktu tempuh dan biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Waktu yang di tempuh menuju rumah sakit pemerintah 37% masih menempuh dalam waktu lebih dari 1 jam. Jika menggunakan rata-rata kecepatan normal kendaraan bermotor, maka memperlihatkan jarak di atas 40 Km.

Ketersediaan Tenaga Medis

Ketersediaan tenaga medis di Provinsi Maluku Utara hingga tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. Keberadaan dokter spesialis di Provinsi Maluku Utara sebanyak 35 dokter, yaitu di Puskesmas sebanyak 4 orang, yang seluruhnya berada di Puskesmas Kota Ternate, sedangkan di Rumah Sakit tercatat sebanyak 31 orang, yang juga sebagian besar berada di Kota Ternate. Untuk Dokter Umum terdapat 274 dokter tersedia 203 orang di Puskesmas dan sebanyak 71 dokter bertugas di Rumah Sakit. Ketersediaan dokter umum, spesialis, dokter gigi dan spesialis gigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72: Ketersediaan Tenaga Dokter di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Total	Dokter Gigi	Dokter Spesialis Gigi	Jumlah
1	PUSKESMAS	4	203	207	29	1	30
	Halmahera Barat	-	29	32	0	-	3
	Halmahera Tengah	-	12	29	4	-	-
	Kepulauan Sula	-	20	29	0	-	-
	Halmahera Selatan	-	27	25	5	-	-
	Halmahera Utara	-	25	12	3	-	-
	Halmahera Timur	-	21	21	4	-	-
	Pulau Morotai	-	12	27	0	-	2
	Kota Ternate	4	28	20	11	1	9
	Kota Tidore Kepulauan		29	12	2	-	
2	RUMAH SAKIT	31	71	102		3	19
	RSUD Chasan Boesoirie	18	25	43	5	0	2
	BPRSD Tikep	8	14	22	1	-	-
	RSUD Jailolo	5	13	18	2	-	-
	RSUD Tobelo	5	12	17	1	1	3
	RSUD Weda	1	6	7	1	-	1
	RSUD Maba	-	4	4	2	-	-
	RSUD Labuha	1	4	5	1	-	-
	RSUD Sanana	1	5	6	1	1	4
	RSUD Morotai	4	8	12	1	-	-
	RSUD Chasan Boesoirie	18	25	43	5	-	-
	BPRSD Tikep	8	14	22	1	1	9
JUMLAH (KAB/KOTA)		33	116	149	29	4	33

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2015

Lebih lengkapnya, dibawah ini adalah tabel rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk di Maluku Utara.

Tabel 2.73 : Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

No	Tenaga Kesehatan	Rasio per 100.000 penduduk
1	Dokter Spesialis	4
2	Dokter Umum	26
3	Dokter Gigi	3,8
4	Perawat	241
5	Bidan	242,4
6	Farmasi	16,1
7	Kesehatan Masyarakat	46,5
8	Keteknisan Medis	11,2
9	Keterampilan Fisik	2,5

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Malut, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 masih sangat rendah. Hal ini

disebabkan karena keterbatasan tenaga medis yang tersedia, rendahnya tenaga medis terutama dokter spesialis, dokter umum dan kebidanan/perawatan yang berkeinginan bekerja diwilayah Maluku Utara terutama di wilayah terpencil dan terluar. Selain itu juga disebabkan karena masih rendahnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga medis yang diberikan oleh pemerintah kab/kota.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup

Kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Indikator ini secara tidak langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, juga berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, saat melahirkan dan masa nifas. Kematian ibu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh status kesehatan secara umum, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Pemeriksaan kesehatan selama hamil merupakan pelayanan kesehatan dasar yang penting bagi kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dikandung. Terdapat tiga penyebab utama kematian ibu yang dominan yaitu perdarahan, eklamsi dan infeksi. Dengan pemeriksaan kehamilan yang rutin dan memenuhi standar pelayanan minimal, dapat diketahui kehamilan risiko tinggi sehingga dapat dicegah kemungkinan kematian ibu dan bayi.

Angka Kematian Ibu di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Profil Kesehatan ternyata masih menunjukkan tren meningkat dari 230,08 pada tahun 2009 menjadi 330 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2014. Angka Kematian Ibu (AKI) diharapkan terus menurun dan tentunya diperlukan upaya dan kerja keras untuk mencapai target MDG sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Kinerja indikator AKI Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota seperti ditunjukkan Tabel berikut ini menjelaskan bahwa kontribusi terbesar AKI

sebagai akumulasi dari kematian ibu hamil, bersalin dan nifas, terutama untuk 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2011-2014 adalah Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Kabupaten Pulau Morotai memberi kontribusi terendah.

Tabel 2.74: Kondisi Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2014

No	Kabupaten/Kota	Kematian Ibu					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Halmahera Barat	10	4	9	5	6	5
2	Halmahera Utara	5	4	10	7	7	4
3	Halmahera Selatan	5	4	29	25	18	14
4	Halmahera Timur	4	5	18	9	3	1
5	Halmahera Tengah	7	5	4	9	2	2
6	Ternate	3	6	5	22	4	3
7	Tidore Kepulauan	6	16	7	3	3	4
8	Kepulauan Sula	5	5	2	6	4	4
9	Pulau Morotai	0	7	2	5	3	6
10	Pulai Taliabu	*	*	*	*	*	5
JUMLAH		45	56	86	91	50	48
AKI (DILAPORKAN)		230,08	345,66	449,18	439,4	242	330

Sumber : Profil Kesehatan. Dinkes Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Keterangan : *) data masih tergabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Kenyataan bahwa dalam kurun 2009-2014, jumlah kematian ibu di Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan. Terjadinya kenaikan jumlah kematian maternal ini juga menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pengelola program KIA baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Selain itu, kematian maternal merupakan hal kompleks yang melibatkan unsur-unsur lintas program dan sektor non kesehatan, sehingga perlu ditingkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan permasalahan kematian maternal.

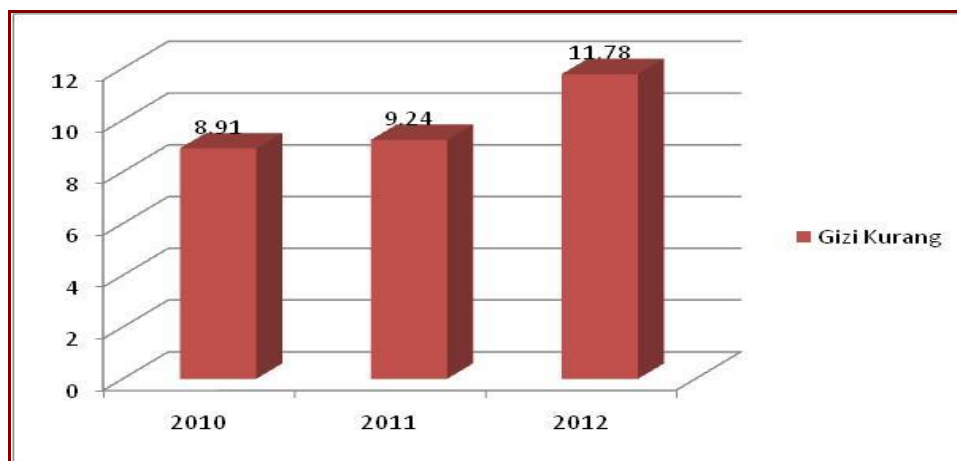
Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi

Status gizi sangat erat kaitannya dengan status kesehatan individu, karena selain merupakan faktor predisposisi yang dapat memperbesar resiko dan memperparah penyakit infeksi juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan lainnya. Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, antara

lain Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur kurang energi kronis (KEK) dan gangguan akibat kekurangan yodium.

Balita kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status ketahanan pangan dan kesehatan penduduk.

Secara umum capaian prevalensi gizi kurang di Provinsi Maluku Utara sejak Tahun 2010-2012 cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2010 sebesar 8,91 persen naik hingga menjadi 11,78 persen di tahun 2012. Trend meningkat cakupan indikator ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2013

Gambar 19: Cakupan Gizi Kurang Provinsi Maluku Utara sejak Tahun 2010-2012

Tabel 2.75: Kondisi Gizi Balita di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2012

No	Kabupaten/Kota	Gizi Kurang (persen)		
		2010	2011	2012
1	Halmahera Barat	14,93	9,36	8,78
2	Halmahera Utara	5,73	7,78	7,81
3	Halmahera Selatan	13,05	0,84	16,25
4	Halmahera Timur	11,34	0	13,01
5	Halmahera Tengah	2,06	12,39	13,38
6	Ternate	6,56	7,80	5,28
7	Tidore Kepulauan	8,89	6,63	6,13
8	Kepulauan Sula	13,73	22,07	7,47
9	Pulau Morotai	5,74	4,23	3,20
10	Pulau Taliabu	*	*	*
Provinsi Maluku Utara		8,91	9,24	11,78

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Dinkes

Keterangan : *) data masih gabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Perkembangan capaian indikator Prevalensi Balita gizi kurang berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa hingga di tahun 2012 Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah yang tertinggi prevalensi gizi kurang, sedangkan Kabupaten Pulau Morotai adalah yang terendah. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut upaya kerja keras kearah pencapaian yang lebih baik dimasa mendatang. Melalui prioritas program dan kegiatan yang semakin intensif utamanya pada kelompok rentan dan kekurangan gizi, diharapkan Maluku Utara mampu menurunkan kinerja indikator ini. Untuk tahun 2013, Balita Gizi Kurang berdasarkan data Dinas Kesehatan 2014 adalah 24,9 persen atau naik.

UCI (Universal Child Immunization)

Tujuan utama kegiatan imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). PD3I adalah penyakit-penyakit menular yang sangat potensial untuk menimbulkan wabah dan kematian terutama pada balita. Saat ini, persentase jumlah desa/kelurahan UCI baru mencapai 72,8 persen ditahun 2014 yang mana masih cukup jauh dari SPM yaitu 100 persen.

Tabel 2.76: Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Provinsi Maluku Utara 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Desa/Kel UCI (persen)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Halmahera Barat	74	85.7	52,7	89,7	97,2
2	Halmahera Utara	71	44.7	84,2	69,9	76,4
3	Halmahera Selatan	19	64.7	82,3	69,1	77,5
4	Halmahera Timur	40	76.6	51,9	76,6	83,3
5	Halmahera Tengah	35	57.1	60,7	72,1	90,2
6	Kota Ternate	100	100.0	92,2	87	85,7
7	Kota Tidore Kepulauan	58	75.0	81,9	87,8	94,1
8	Kepulauan Sula	21	32.3	41,4	53,0	23,1
9	Pulau Morotai	25	42.2	42,2	68,2	39,8
10	Pulau Taliabu	*	*	*	*	11,3
Jumlah		48	62.1	68,5	73,2	72,8

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Dinkes, 2012

Keterangan : *) data masih gabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Penyakit Menular dan Tidak menular

Tb Paru adalah salah satu penyakit menular yang prevalensinya masih cukup tinggi di Maluku Utara dan telah mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam upaya penanganannya. Indikator yang digunakan untuk program tuberculosis (Tb) antara lain adalah *case detection rate (CDR)* dan *case notification rate (CNR)*. *CDR* menggambarkan proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam suatu wilayah. WHO dan Kementerian Kesehatan menetapkan standar angka penemuan kasus (CDR) untuk Tb adalah sebesar 70 persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit TBC di Maluku Utara dapat terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.77: Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap Tb Paru Bta+ Serta Keberhasilan Provinsi Maluku Utara, 2014

NO	KABUPATEN	JUMLAH KASUS BARU BTA+	JUMLAH SELURUH KASUS TB	KASUS TB ANAK 0-14 TAHUN	
				JUMLAH	%
1	Halmahera Barat	106	169	15	8,88
2	Halmahera Tengah	28	35	1	2,86
3	Kepulauan Sula	45	77	4	5,19
4	Halmahera Selatan	244	120	15	12,5
5	Halmahera Utara	73	78	2	2,56
6	Halmahera Timur	87	103	2	1,94
7	Pulau Morotai	63	71	3	4,23
8	Ternate	266	540	27	5
9	Tidore Kepulauan	109	146	4	2,74
10	Pulau Taliabu	0	0	-	-
JUMLAH		1,065	1,573	73	5

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2014

Angka kesembuhan dan pengobatan lengkap Tb paru berdasarkan data menunjukkan masih rendah, serta dapat dilakukan kesembuhan dan pengobatan. Namun demikian, upaya pencegahan harus terus dilakukan guna menekan pertumbuhan kasus Tb Paru pada masyarakat. Untuk itu pengobatan penyakit Tb paru harus terus diupayakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada penderita diseluruh wilayah kab/kota.

Adapun cakupan penemuan penderita Penyakit HIV/AIDS, DBD, Diare dan Malaria pada tahun 2014 di Provinsi Maluku Utara diuraikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.78: Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, DIARE, TB, dan Malaria menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2014

Kabupaten / Kota	HIV/ AIDS	DBD	Diare	API MALARIA
Halmahera Barat		7	1506	2,3
Halmahera Tengah		65	1302	7,3
Kepulauan Sula		0	1155	5,1
Halmahera Selatan		5	6240	5,3
Halmahera Utara		18	1458	4,6
Halmahera Timur		0	3103	7,3
Pulau Morotai		0	1301	13,7
Pulau Taliabu		0	277	4,3
Ternate		51	3055	1,1
Tidore Kepulauan		2	2131	2,9
Provinsi Maluku Utara	123	148	21.528	4,3

Sumber : Dinkes Provinsi Maluku Utara, 2015

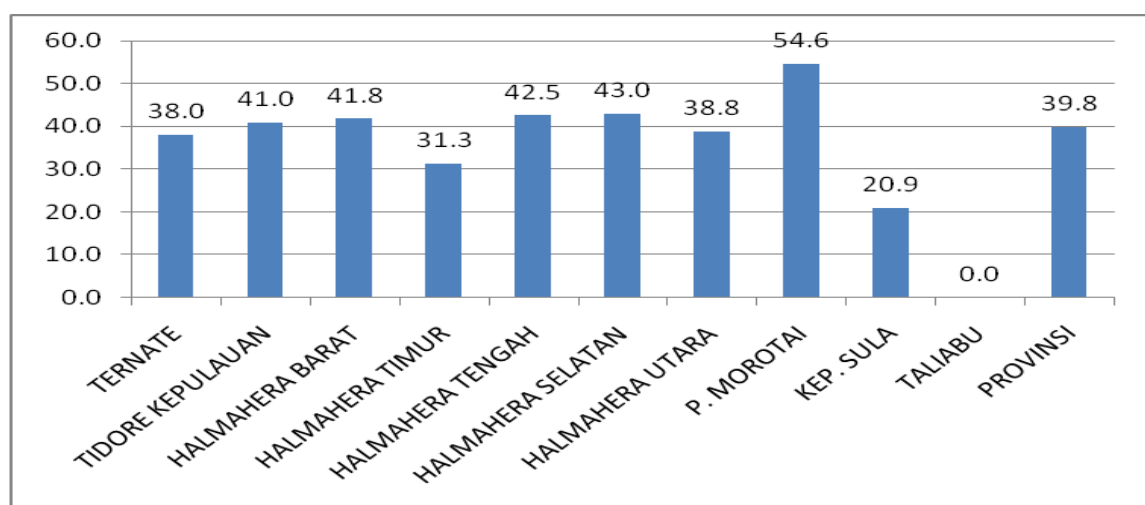
Maluku utara merupakan daerah dengan kategori sebagai daerah endemic penyakit malaria dengan API malaria 4,3 per 1.000 penduduk pada tahun 2014. API ini menunjukkan bahwa kasus malaria di provinsi Maluku Utara masih sangat tinggi, khususnya di Pulau Morotai. Begitu juga untuk Diare terdapat 21.528 kasus dengan wilayah tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu kasus HIV/AIDS yang terjadi sebanyak 123 kasus dan cenderung meningkat.

Penyebab utama di tingginya kasus malaria, DBD dan diare karena faktor rendahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara pencegahan penyakit tersebut.

Untuk cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dilaksanakan program Jaminan Kesehatan Semesta Maluku Utara sesuai Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2014 sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sejak Januari 2014. Program Jamkesta Maluku Utara merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan sasaran masyarakat miskin dan hampir miskin, serta mendorong percepatan integrasi Jamkesda kabupaten/kota ke program JKN. Melalui Program Jamkesta Maluku Utara, pemerintah provinsi Maluku Utara menyediakan dana sharing bagi peserta Jamkesda yang telah

diintegrasikan oleh kabupaten/kota dan termasuk pula untuk pembiayaan pelayanan rujukan dan transportasi rujukan. Pada tahun 2014, dari 10 kab/kota hanya Kota Ternate dan Kab. Halmahera Selatan yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN dengan total jiwa masing-masing 6.000 jiwa dan 10.000 jiwa. Pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan dana sharing integrasi untuk 4 kabupaten yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi terkendala oleh hambatan teknis pendataan kepesertaan sehingga Kabupaten Halmahera Timur belum dapat mengintegrasikan Jamkesdanya ke JKN.

Untuk cakupan penimbangan balita di Posyandu (D/S) merupakan indikator yang berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar di posyandu khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Pada tahun 2014, cakupan D/S baru mencapai 39,8 persen, berarti masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu 62 persen. Cakupan D/S tertinggi yaitu di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 54,6 persen sedangkan terendah di Kepulauan Sula yang hanya 20 persen. Masalah yang seringkali berkaitan dengan kunjungan balita ke Posyandu antara lain: masih terbatasnya dana operasional dan sarana prasarana untuk menggerakkan kegiatan posyandu, tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling, tingkat pemahaman keluarga tentang manfaat posyandu, serta pelaksanaan pembinaan kader posyandu.



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2014

Gambar 20: Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu

Selanjutnya cakupan pelayanan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas, Berdasarkan total Jumlah Puskesmas & PUSTU di Provinsi Maluku Utara sebanyak 435 unit bila dibandingkan dengan Jumlah Kecamatan yang ada yaitu 115, maka cakupan pelayanan Puskesmas dan PUSTU adalah sebesar 325 persen. Bila dilihat dari data tersebut, maka kecukupan ketersediaan fasilitas puskesmas dan PUSTU telah tercukupi pada setiap kecamatan, namun bila dilihat dari pelayanan masih rendah, disebabkan karena keterbatasan tenaga dokter, tenaga kesehatan dan fasilitas medis.

Untuk pembiayaan kesehatan, Riskesdas Provinsi Maluku Utara 2013 memberi informasi tentang sumber pembiayaan yang digunakan masyarakat untuk pengobatan baik pengobatan rawat inap maupun rawat jalan. Untuk pengobatan Rawat Jalan memperlihatkan bahwa sumber biaya yang dipakai untuk rawat jalan pada semua fasilitas kesehatan di Maluku Utara masih didominasi oleh biaya sendiri (*out of pocket*) yaitu sekitar 43,5 persen, pembiayaan dengan asuransi baik Askes/Asabri, jamsostek dan asuransi swasta sebesar 9,6 persen, Jamkesmas sebesar 21,5 persen, Jamkesda sebesar 0,5 persen, dibiayai perusahaan sebesar 9,9 persen, sumber lainnya 0,9 persen, sedangkan menggunakan lebih dari satu sumber pembiayaan sebesar 14,1 persen. Sementara itu, sumber biaya yang dipakai untuk pengobatan Rawat Inap pada semua fasilitas kesehatan juga memperlihatkan bahwa masih didominasi oleh biaya sendiri (*out of pocket*) yaitu sekitar 48 persen, pembiayaan dengan asuransi baik Askes/Asabri, jamsostek dan asuransi swasta sebesar 9,5 persen, Jamkesmas sebesar 10,7 persen, Jamkesda sebesar 3,3 persen, dibiayai perusahaan sebesar 12,2 persen, sumber lainnya 7,4 persen, sedangkan menggunakan lebih dari satu sumber pembiayaan sebesar 8,9 persen.

Sejak tahun 2014 ini seluruh masyarakat dapat memanfaatkan Sistem Penjaminan Kesehatan yang berlaku secara komprehensif melalui BPJS. Yang perlu dilakukan ke depan adalah meningkatkan koordinasi dan penguatan sistem penjaminan serta penyediaan jaminan bagi masyarakat tidak mampu.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sejak tahun 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan survey jenis perkerasan dan kondisi jalan provinsi yang termasuk didalamnya adalah ruas jalan strategis nasional. Survey tersebut baru menjangkau ruas jalan strategis nasional dan provinsi sepanjang 995,42 km dari total ruas jalan strategis nasional dan provinsi sepanjang 1.811,76 Km. Tabel berikut menggambarkan data kondisi jalan nasional dan jalan provinsi sampai Tahun 2013.

Tabel 2.79: Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Tahun 2013

No	Status	Jumlah Ruas	Panjang (Km)	Jenis Perkerasan (Km)					Kondisi (Km)				
				Aspal	Lapen	Urpil	Tanah	Belum disurvey	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Belum disurvey
1.	Nasional	30	511,89	511,89	-			-	511,89	-		-	-
2.	Strategis Nasional dan Provinsi	53	1811,76	429,12	145,10	96,80	324,40	816,34	403,52	154	75,85	362,05	816,34

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, Tahun 2014

Ruas jalan nasional, strategis nasional dan provinsi baru melayani 5 (lima)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu :

1. Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi;
2. Kawasan Pulau Bacan;
3. Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya;
4. Kawasan Strategis Morotai; dan
5. Kawasan Starategis Halut, Halbar dan Haltim.

Sedangkan 5 (lima) KSP lainnya yang belum terlayani Ruas jalan nasional, strategis nasional dan provinsi yaitu ;

1. Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu;
2. Kawasan Halmahera bagian Selatan meliputi Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur;
3. Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Haltim, Halteng dan Pulau Jiuw;
4. Kawasan Pulau Gebe; dan

5. Kawasan Pulau Obi

Pada Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengajukan usulan revisi fungsi dan status jalan nasional sepanjang 3.454,545 Km kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan usulan tersebut, pada awal tahun 2014 kementerian Pekerjaan Umum telah mengkaji dan terdapat beberapa poin penting sebagai berikut ;

- a. Ruas jalan yang telah memenuhi kriteria untuk direvisi fungsi dan status menjadi jalan nasional sepanjang 332,86 Km;
- b. Terdapat ruas jalan yang masih perlu usulan dan pembahasan lebih lanjut, yaitu :
 - Ruas jalan wilayah perbatasan negara di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah sepanjang 415,73 Km;
 - Ruas Jalan terkait Akses dan Pelayanan terhadap PKWp Jailolo, Weda dan Maba sepanjang 304,47 Km;
 - Ruas Jalan terkait akses dan pelayanan terhadap Bandara Kao, Pelabuhan Ferry, Potensi Panas Bumi serta usulan PKWp Bobong dan PKWp Laiwui sepanjang 582,186 Km.

Panjang jalan Kabupaten/Kota dan Panjang Jalan Provinsi yang melewati wilayah Kab./Kota dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.80: Panjang Jalan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2013

NO	KAB/KOTA	PANJANG JALAN KAB/KOTA (km)	PANJANG JALAN PROVINSI DI KAB/KOTA (Km)
1	Ternate	271,065	46.00
2	Tidore Kepulauan	281	45.2
3	Halmahera Barat	541.25	68.21
4	Halmahera Timur	631.5	259.28
5	Halmahera Tengah	224	234,8
6	Halmahera Utara	461.8	202
7	Halmahera Selatan	501.2	399
8	Pulau Morotai	10.8	265
9	Kepulauan Sula	532.5	122.23

Sumber : Perhubungan Dalam Angka 2012

Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang

pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa.

Berdasarkan sarana transportasi antar desa, sebanyak 152 desa (12,71%) hanya dapat menggunakan sarana transportasi air, 610 desa (51,00%) hanya menggunakan sarana transportasi darat serta 434 desa (36,29%) dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air. Dari 1.044 desa yang dapat menggunakan sarana transportasi darat tersebut, 736 desa (70,50%) di antaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebanyak 154 desa (14,75%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, akan tetapi lalu lintasnya masih tergantung pada kondisi jalan dan cuaca, yang terdiri dari 108 desa (10,34%) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu dan 46 desa (4,41%) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan. Selain itu, masih terdapat 154 desa² (14,75%) yang memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

Tabel 2.81: Jumlah Desa Menurut Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih , 2014

Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih				Total
	sepanjang tahun	sepanjang tahun kecuali saat tertentu	sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan	Tidak dapat dilalui sepanjang tahun	
Halmahera Barat	126	2	1	32	161
Halmahera Tengah	49	7	-	5	61
Kepulauan Sula	31	17	4	16	68
Halmahera Selatan	67	24	20	50	161
Halmahera Utara	152	22	4	13	191
Halmahera Timur	81	7	9	1	98
Pulau Morotai	58	13	1	9	80
Pulau Taliabu	20	14	6	20	60
Ternate	74	1	-	2	77
Tidore Kepulauan	79	1	1	6	87
Maluku Utara	736	108	46	154	1.044
sumber : Podes 2014, BPS Provinsi Maluku Utara, 2015					

Infrastruktur Pengairan

Di bidang infrastruktur pengairan, terdapat 54 Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Maluku Utara dengan luas areal potensial 62.276 Ha dengan luas areal fungsional baru mencapai 15.483 Ha atau baru 24,86 persen dari total luas areal potensial sehingga masih ada areal yang belum tertangani seluas 46.793 Ha.

Tabel 2.82: Luas Areal Irigasi Fungsional menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2013

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Sawah / <i>Wet Land</i>		Bukan Sawah	Alih Fungsi/ <i>Function Change</i>	
	Irigasi (Ha)	Belum Irigasi		Dari Sawah	Bukan Dari Sawah
Halmahera Barat	2246	7893	915
Halmahera Tengah	1705	1083	723
Kepulauan Sula	445	3000	735
Halmahera Selatan	1765	9600	940
Halmahera Utara	2950	10500	575
Halmahera Timur	9061	10564	1280
Pulau Morotai	1030	2322
Pulau Taliabu*
Ternate
Tidore Kepulauan	725	4675	120
Maluku Utara	2013	19927	49637	5288	...
	2012	19051	50513	5900	...

*)data Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu masih digabung

Sedangkan dibidang penataan ruang, Provinsi Maluku Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033, yang di dalamnya telah ditetapkan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Rinci KSP Provinsi Maluku Utara. Dari 9 kab/kota kecuali Kabupaten Pulau Taliabu telah menyelesaikan dan memiliki Perda RTRW kabupaten/kota. Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2014 ini sementara melakukan penyusunan RTRW melalui fasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun 2013 Provinsi Maluku Utara telah melakukan penyusunan rencana rinci 1 (satu) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari 10 (sepuluh) KSP. 1 KSP yang telah memiliki dokumen rencana rinci tersebut adalah KSP Ternate – Tidore – Sofifi – Sidangoli (T2S2). KSP T2S2 tersebut baru masih perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan konsultasi publik sebelum diajukan persetujuan substansi ke

Kementerian Pekerjaan Umum. Provinsi Maluku Utara juga perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten/kota. Provinsi Maluku Utara dan 9 (sembilan) kab/kota kecuali Kabupaten Pulau Taliabu telah memiliki Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Untuk mendukung fungsi pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang telah terdapat 6 (enam) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di beberapa Kabupaten / Kota. Hingga saat ini belum dilakukan identifikasi kajian ketaatan tata ruang di Provinsi Maluku Utara.

Pembinaan Jasa Konstruksi

Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian Maluku Utara. Sebagaimana data BPS (2013), jika pada tahun 2004 nilai konstruksi di Provinsi Maluku Utara baru mencapai Rp. 274 Milyar, maka pada tahun 2011 telah meningkat signifikan mencapai Rp. 1,085 Trilyun, atau meningkat hampir empat kali lipat. Pertumbuhan sektor konstruksi tidak hanya berpengaruh pada kuantitas tenaga kerja konstruksi yang harus dipenuhi, tapi juga segi kualitas pemenuhan terhadap tenaga kerja yang berdaya saing global. Data BPS menunjukkan kebutuhan tenaga kerja konstruksi meningkat setiap tahun dari 4,7 juta orang pada tahun 2006 menjadi 6,9 juta orang pada tahun 2013. Di sisi lain, pemberlakuan ASEAN Community 2015 membawa konsekuensi masuknya tenaga kerja asing di bidang konstruksi. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat tenaga kerja Indonesia yang telah bersertifikat baru sejumlah 400.000 orang yang terdiri dari 100.000 tenaga ahli dan 300.000 tenaga terampil (BPS, 2013). Sementara data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2014 baru terdaftar 63 tenaga ahli konstruksi. Pada saat yang sama terdapat 791 badan usaha jasa konstruksi di wilayah Maluku Utara yang meliputi badan usaha jasa pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan konstruksi, baik berkualifikasi besar, menengah maupun kecil. Dengan mengasumsikan setiap badan usaha mempunyai 3 (tiga) klasifikasi bidang usaha maka LPJK Provinsi Maluku Utara

memperkirakan kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi di Maluku Utara sekitar 2500 orang yang mencakup tenaga ahli maupun terampil.

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Hingga tahun 2014 dari total rumah 195.107 unit masih terdapat 13,25 persen rumah kumuh, baik yang terdapat di kota maupun di desa seluruh kabupaten kota. Total keseluruhan rumah kumuh di kabupaten/kota sebanyak 25.865 unit rumah yang dapat di kota sebanyak 8.779 atau 33,94 persen dan 17.086 unit atau 66,05 persen terletak di desa, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.83: Jumlah Rumah Kumuh menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2014

No	Kabupaten/Kota	Kota	Desa
1.	Ternate	1596	324
2.	Tidore Kepulauan	745	1737
3.	Halmahera Tengah	371	865
4.	Halmahera Barat	841	1963
5.	Halmahera Utara	1363	3181
6.	Halmahera Selatan	1667	3891
7.	Halmahera Timur	634	1479
8.	Kepulauan Sula (Taliabu)	1109	2589
9.	Pulau Morotai	453	1057
Provinsi Maluku Utara		8.779	17.086

Sumber : Dinas PU Provinsi Maluku Utara, 2014

Cakupan Pelayanan Air Minum pada Tahun 2013 adalah 79,6 persen rumah tangga di kota dan 39,79 persen rumah tangga di desa atau secara keseluruhan 57,4 persen rumah tangga kota dan desa yang sudah menikmati air minum bersih. Data BPS juga menggambarkan bahwa 70,35 persen rumah tangga di kota dan 10,32 persen rumah tangga di desa atau secara keseluruhan 26,86 persen rumah tangga kota dan desa telah menikmati layanan air minum ledeng, kemasan dan isi ulang.

Selanjutnya terdapat 57,35 persen rumah tangga telah menikmati akses terhadap sanitasi layak diantaranya adalah 71,46 persen rumah tangga di kota dan 42,95 persen rumah tangga di desa atau secara keseluruhan 50,81 persen

rumah tangga kota dan desa telah memiliki jamban sendiri. Data BPS juga menggambarkan bahwa 70,36 persen rumah tangga di kota dan 37 persen rumah tangga di desa atau secara keseluruhan 46,19 persen rumah tangga kota dan desa yang telah memiliki jamban sendiri dengan tangki septik. Berdasarkan jenis Kloset yang digunakan masih ada sekitar 1,42 persen di tahun 2012 dan 0.3 persen di tahun 2013 yang masih belum menggunakan kloset. Selengkapnya terlihat di Tabel berikut ini.

Tabel 2.84: Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2013

Kabupaten/Kota	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/ Cebluk	Tidak Pakai
Halmahera Barat	99.29	0	0.71	0
Halmahera Tengah	85.81	11.62	2.57	0
Kepulauan Sula	87.78	11.49	0.74	0
Halmahera Selatan	80.93	0.74	18.17	0
Halmahera Utara	95.04	2.27	1.9	0.79
Halmahera Timur	76.85	7.52	14.98	0.65
Pulau Morotai	93.04	3.23	3.73	0
Pulau Taliabu	*	*	*	*
Ternate	99.47	0.14	0	0.39
Tidore Kepulauan	98.09	1.91	0	0
Total 2013	92.14	2.95	4.61	0.3
2012	90.54	4.69	3.35	1.42

Sumber : BPS Prov. Malut 2014

Keterangan : *)data Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu masih digabung

Selain itu data rumah tangga menurut jenis lantai yang terdapat di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 sebagai berikut.

Tabel 2.85: Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2013

Kabupaten/Kota	Bukan Tanah	Tanah
Halmahera Barat	72.51	27.49
Halmahera Tengah	90.22	9.78
Kepulauan Sula	91.31	8.69
Halmahera Selatan	87.77	12.23
Halmahera Utara	91.19	8.81
Halmahera Timur	82.8	17.2
Pulau Morotai	69.27	30.73
Pulau Taliabu*		
Ternate	97.87	2.13
Tidore Kepulauan	95.73	4.27

Sumber : BPS Prov. Malut 2014

Masih terdapat rumah tangga dengan jenis lantai tanah tertinggi di Kabupaten Morotai sedangkan terendah di Kota Ternate. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah yang tidak layak huni di Maluku Utara yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi rumah kumuh dan tidak layak huni disebabkan karena rendahnya pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selanjutnya hingga Tahun 2013, jumlah Perumahan PNS di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yaitu di Kota Sofifi baru berjumlah 172 unit, yang mana bila dibandingkan dengan total PNS di Lingkup Provinsi yang berjumlah 3.716 orang, maka masih jauh dari ketercukupan. Hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya fungsi pelayanan publik.

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN), maka menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dan Masyarakat (dalam hal ini termasuk Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Forum Lintas Agama, serta berbagai organisasi lainnya) untuk menjaga kerukunan dan keamanan di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan media massa, cetak dan elektronik. Apalagi mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang berada pada perbatasan negara sehingga menjadi peluang dari berbagai potensi masalah seperti penyelundupan, *illegal fishing* dengan jumlah kasus sebanyak 125 kasus sejak tahun 2009 hingga 2013 (data DITPOLAIR dan PSDKP Malut), *illegal logging*, perdagangan orang (*human trafficking*), terorisme dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara dan Universitas Muhammadiyah Ternate, terdapat beberapa potensi keamanan, yaitu antara lain konflik operasional pertambangan dan perkelahian pemuda, konflik SARA, konflik sengketa tanah (konflik yang disebabkan dari anggapan penyerobotan tanah oleh pihak tertentu dan ketidak jelasan hak kepemilikan dan pengolahan lahan secara hukum. Lahan yang disengketakan ini adalah lahan yang bernilai ekonomis seperti untuk pertanian/ perkebunan dan tambang serta sengketa lahan yang memiliki nilai kepentingan antara beberapa kelompok

sehingga sengketa lahan ini dapat berpotensi Sara), konflik akibat miras, perkelahian kelompok, Konflik aliran kepercayaan, Konflik Pilkades, Konflik tapal batas.

Kondisi Demokrasi, produk hukum daerah, penyelesaian kasus dan rasio aparat keamanan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.86: IDI, Produk Hukum Daerah, penyelesaian Kasus dan Rasio Aparat Keamanan

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	IDI (Indeks Demokrasi Provinsi)	67,21	59,92	59,17	66,83	64,06
3.	Jumlah pergub-perda yang disahkan	Pergub : 57 Perda : 13	Pergub: 29 Perda : 4	Pergub: 23 Perda : 6	Pergub : 20 Perda : 18	Pergub : 57 Perda : 13
4.	Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional (%)	38	168	83	63	38
5.	Jumlah Aparat keamanan	3696	3833	3933	3958	
6.	Rasio aparat keamanan dengan jumlah penduduk	302	291	283	281	

Sumber : EKPD Prov. Maluku Utara, 2014

Indeks Demokrasi Indonesia provinsi Maluku Utara sejak tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif, dimana tahun 2009 mencapai 67,21 turun pada tahun 2010 menjadi 59,92 dan turun menjadi 59,17 pada tahun 2011 dan kembali naik pada tahun 2012 menjadi 66,83 persen, pada tahun 2013 0 dan pada tahun 2014 naik di 72,34.

Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, sebagaimana data pada tabel menunjukkan bahwa rata target penyelesaian kasus yang diselesaikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan mengalami peningkatan dimana pada triwulan II tahun 2012 sebanyak 29 kasus (79%), meningkat menjadi 63 kasus (97%) yang diselesaikan pada tahun 2012. Hal ini bila dilihat pada jumlah kasus yang terjadi, maka untuk kasus kejahatan konvensional di Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 sampai 2012 di Provinsi Maluku Utara belum terdapat momen politik. Namun pada tahun 2013 dan tahun 2014 (72,34) terjadi peningkatan kasus kejahatan konvensional karena pada tahun tersebut terdapat hajatan politik baik pemilukada Gubernur maupun pemilu legislatif. Untuk rasio aparat keamanan dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2012 sebesar

1 : 281 yang disebabkan karena semakin bertambahnya aparat akibat luas wilayah, kondisi geografis dan terjadinya pemekaran daerah di Maluku Utara.

Sosial

Berdasarkan pendataan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan bersama BPS terhadap 30 persen penduduk Maluku Utara dengan tingkat kesejahteraan terendah, terdapat sebanyak 314.059 jiwa atau 61.044 rumah tangga yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Tabel 2.87: Kondisi Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara

Kondisi Rumah Tangga Miskin	Kabupaten / Kota									Jumlah
	HALMAHERA BARAT	HALMAHERA TENGAH	KEPULAUAN SULA	HALMAHERA SELATAN	HALMAHERA UTARA	HALMAHERA TIMUR	PULAU MOROTAI	KOTA TERNATE	KOTA TIDORE KEPULAUAN	
Jumlah Rumah Tangga	10,367	4,371	5,356	6,852	13,361	6,056	3,518	4,879	6,284	61,044
Jumlah Individu	48,705	23,453	28,178	42,149	67,849	27,949	18,598	26,793	30,385	314,059
Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan	903	352	404	294	1,009	509	65	816	777	5,129
Jumlah Anak Yang Bersekolah	11,668	6,166	7,791	12,385	17,322	6,288	4,934	6,413	7,579	80,546
Jumlah Anak Yang Tidak Bersekolah	2,018	983	1,559	2,227	3,349	1,595	819	1,159	962	14,671
Jumlah individu yang menderita cacat	706	308	404	272	881	414	154	374	468	3,981
Individu dengan Penyakit Kronis	1,763	1,325	1,120	666	2,644	1,850	710	1,207	1,022	12,307

Sumber : TNP2K tahun 2012

Selain itu, situasi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pendataan yang dilakukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain balita terlantar, anak terlantar, anak dengan tindakan kekerasan lanjut usia sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.88: PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS), Tahun 2014

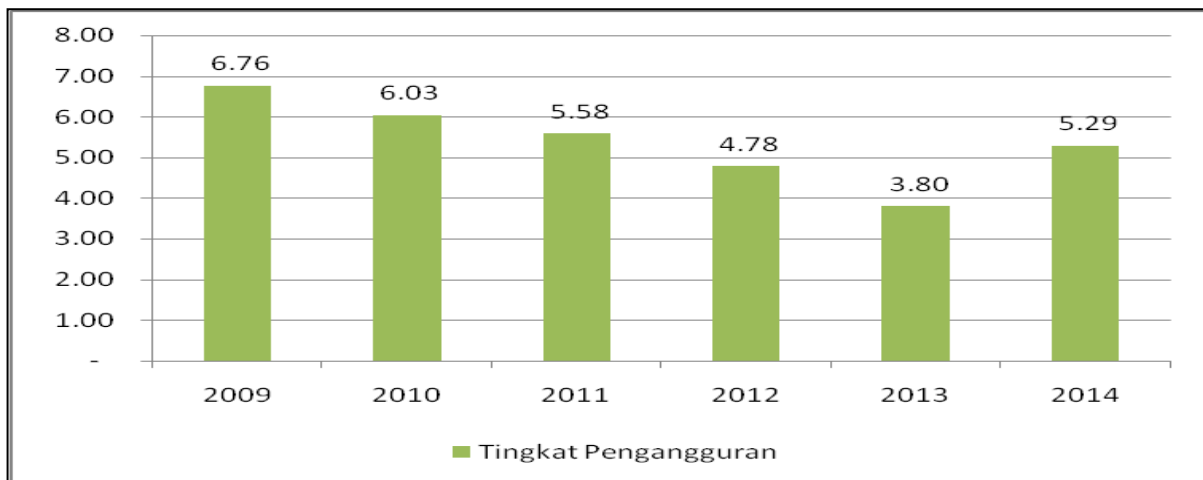
NO	JENIS PMKS	KABUPATEN/KOTA									JUMLAH
		Kota Ternate	Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Tengah	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Halmahera Selatan	Halmahera Timur	Kepulauan Sula	Pulau Morotai	
1	Balita Terlantar	-	167	96	-	5	-	-	-	-	268
2	Anak Terlantar	412	169	2,876	1485	1,299	256	582	3,085	339	10503
3	Anak Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	8	99	-	713	-	234	-	158	1212
4	Anak Nakal	53	27	372	422	1,432	55	144	100	140	2745
5	Anak Jalanan	253	112	60	0	1,835	241	80	145	140	2866
6	Anak Cacat	-	247	82	-	471	-	77	313	56	1246
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	534	663	540	1550	3,366	728	1019	4,998	297	13695
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	21	173	150	152	-	110	-	131	737
9	Lanjut Usia Terlantar	868	1316	578	1601	2,109	898	1487	1,440	440	10737
10	Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	87	-	95	-	-	-	18	200
11	Penyandang Cacat	377	591	316	1127	616	620	524	1,103	160	5434
12	Penyandang Cacat eks penderita penyakit kronis	-	-	41	-	97	37	-	-	17	192
13	Tuna Susila	44	-	-	-	-	-	855	135	-	1034
14	Pengemis	469	-	-	-	-	-	-	-	-	469
15	Gelandangan	30	64	-	-	-	-	-	-	-	94
16	Bekas Napi	42	-	33	82	52	42	22	867	37	1177
17	Korban Penyalahgunaan Napsa	110	-	525	122	53	-	-	126	71	1007
18	Keluarga Fakir Miskin	3,557	1525	4,740	11235	16,279	1,804	5253	10,142	2359	56894
19	Rumah Tak Layak Huni	149	1252	1,600	3430	20,593	2,320	2156	3,878	895	36273
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	98	-	-	-	-	66	-	164
21	Komunitas Adat Terpencil	-	18	40	578	4,349	279	374	779	424	6841
22	Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	-	-	1,200	3296	572	-	-	-	-	5068
23	Korban Bencana Alam	-	78	165	1191	854	-	-	95	71	2454
24	Korban Bencana Sosial/Pengungsi	-	268	3,511	360	7,538	26,068	-	-	204	37949
25	Pekerja Migran Terlantar	-	2	-	-	210	-	205	-	-	417
26	Penyandang HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Keluarga Rentan	-	3	360	596	-	-	-	-	-	959

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara

2.1.3.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran merupakan presentase penduduk yang tidak bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 - 2013 menunjukkan trend menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2014. Sejak terkondisi pada tahun 2009 sebesar 6,76 persen, menurun menjadi 3,80 persen pada tahun 2013 dan kemudian meningkat menjadi sebesar 5,29 persen.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009 - 2014

Gambar 21: Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2014

Tingkat pengangguran menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 tingkat pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan Halmahera Barat merupakan Kabupaten dengan capaian tingkat pengangguran terendah. Informasi lengkap menyangkut hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.89: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)		
		2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	3,90	3,03	1,28
2	Halmahera Utara	5,32	1,47	2,33
3	Halmahera Selatan	4,51	5,11	4,14
4	Halmahera Timur	4,51	6,99	6,35
5	Halmahera Tengah	4,94	9,71	7,85
6	Kota Ternate	8,66	7,26	4,85
7	Kota Tidore Kepulauan	5,48	2,18	1,87
8	Kepulauan Sula	5,55	5,84	4,91
9	Pulau Morotai	4,83	3,92	4,27
10	Pulau Taliabu	*	*	*
Provinsi Maluku Utara		5,58	4,78	3,80

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara,

Keterangan : *) data masih gabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Penduduk yang bekerja di Maluku Utara lebih didominasi mereka yang tingkat pendidikannya SD ke bawah, sementara yang menganggur lebih didominasi mereka yang tingkat pendidikannya universitas (sarjana). Penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMA dan Universitas trendnya meningkat dalam setahun terakhir (Agustus 2013- Agustus 2014). Selain Universitas, pengangguran di Maluku Utara juga didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SMK dan SMA.

Sengketa Perburuhan

Dalam hubungan antar Pekerja dan Perusahaan di Maluku Utara, juga terdapat beberapa sengketa yang diproses hingga ke pengadilan dan memperoleh Bantuan Hukum Tetap, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.90: Data Sengketa Perusahaan-Pekerja di Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2011	4	Bantuan Hukum Tetap (BHT)
2.	2012	5	Bantuan Hukum Tetap (BHT)
3.	2013	4	Bantuan Hukum Tetap (BHT)
Total		13	

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa Sengketa Perusahaan-Pekerja dari tahun 2011 dan 2013 berjumlah 8 kasus sedangkan di tahun 2012 jumlah kasusnya

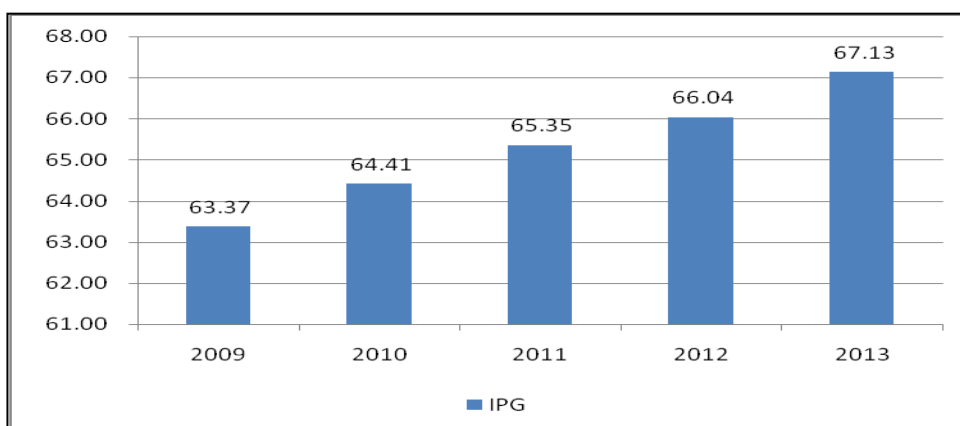
bertambah 5. Total sengketa perusahaan pekerja dengan kasus berjumlah 13 kasus. Hal ini berarti sengketa perusahaan pekerja mengalami peningkatan pada tahun 2012. Di sisi lain, masalah penempatan Tenaga kerja juga tidak sesuai dengan keahlian para pekerja, baik hak maupun kewajiban yang embannnya. Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah perselisihan perburuan antara perusahaan dengan pemerintah yang kaitannya dengan penetapan UMP dan tarif transportasi akibat kenaikan BBM. Sementara itu, biaya hidup di Provinsi Maluku Utara begitu tinggi dihadapi pekerja dengan UMP yang rendah.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menempatkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan.

Masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*, GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*, GEI), banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan atau peduli anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Kondisi GDI Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Diketahui, sejak tahun 2009 GDI ini telah sebesar 63,37 point dan terakhir pada tahun 2013 sebesar 67,13 point. Performa cakupan GDI yang meningkat ini dapatlah diinterpretasikan bahwa intervensi program/kegiatan pembangunan di daerah ini tidak bias gender. Namun demikian, kedepan diperlukan ikhtiar kerja keras kita kearah peningkatan indeks ini.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2015

Gambar 22: Peningkatan cakupan GDI/IPG Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013

Jika perspektif GDI ditinjau menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, maka nampak bahwa semua kabupaten/kota telah menunjukkan intervensi program/kegiatan yang juga tidak bias gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya kecenderungan pergerakan positif GDI kearah peningkatan cakupan dari tahun 2004 ke tahun 2012. Kota Ternate merupakan daerah yang cakupan GDI tertinggi, sedangkan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah dengan cakupan terendah. Informasi GDI menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.91: GDI/IPG menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2012

No	Kabupaten/Kota	GDI/IPG			
		2004	2010	2011	2012
1	Halmahera Barat	52,81	60,87	61,71	62,24
2	Halmahera Tengah	55,32	60,02	61,09	61,64
3	Kepulauan Sula	52,14	58,10	59,05	59,55
4	Halmahera Selatan	33,06	51,51	52,37	52,97
5	Halmahera Utara	49,48	57,73	58,92	59,75
6	Halmahera Timur	45,04	56,73	57,57	58,15
7	Pulau Morotai	*	54,59	55,78	56,49
8	Ternate	66,98	71,06	71,75	72,34
9	Tidore Kepulauan	56,69	62,44	63,49	64,22
10	Pulau Taliabu	**	**	**	**

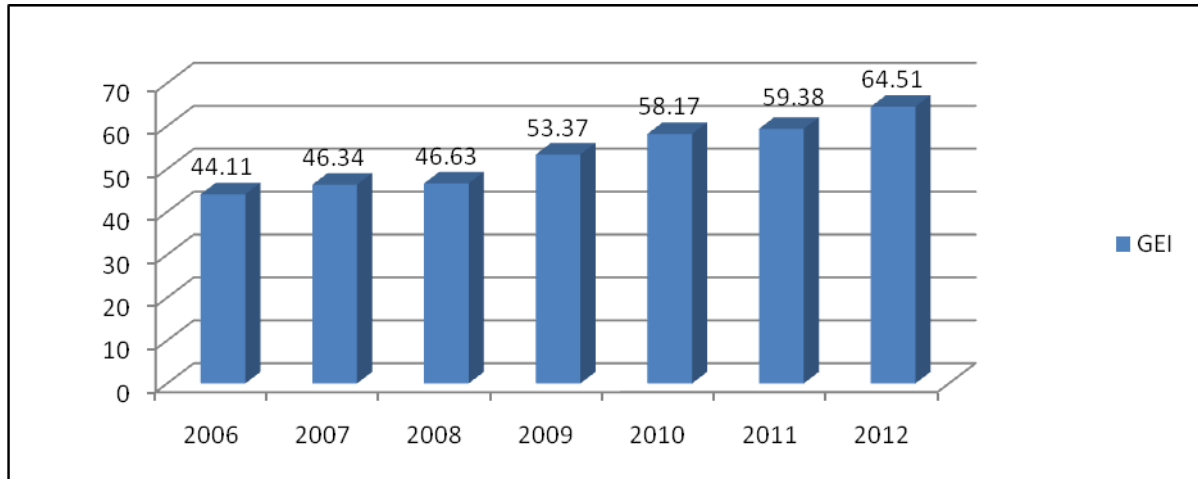
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Keterangan : *) : data masih tergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara

***) : data masih tergabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Sementara itu, Kondisi Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index, GEI) Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2009-2012 juga terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2009 GEI ini telah sebesar 53,37 point dan terakhir pada

tahun 2012 sebesar 64,51 point. Performa cakupan GEI yang meningkat ini dapatlah diinterpretasikan bahwa pembangunan dalam perspektif gender di daerah patut diberikan apresiasi.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Gambar 23: Peningkatan cakupan GEI Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2012

Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan daerah akan membawa keuntungan bagi pemerintah daerah, karena upaya ini akan membantu mempertajam kondisi daerah di mana kesenjangan situasi dan kondisi hidup masyarakat laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut terhadap pembangunan akan terpetakan melalui presentasi data terpilah berdasarkan jenis kelamin, statistik gender, maupun analisis gender. Selain itu, mengintegrasikan perspektif gender dapat membantu mempertajam target group/kelompok sasaran suatu program dan kegiatan, apakah kepada target group itu laki-laki saja, perempuan saja, atau perempuan dan laki-laki dengan rasio tertentu berdasarkan analisis gender yang dilakukan. Cakupan GEI Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada grafik di atas.

Jika perspektif GEI ditinjau menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, maka dapat dijelaskan bahwa semua kabupaten/kota telah mengintegrasikan pengarusutamaan gender melalui intervensi program/kegiatan pembangunannya atau juga tidak bias gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya kecenderungan pergerakan positif GEI kearah peningkatan cakupan dari tahun 2006 ke tahun 2012. Namun demikian, masih nampak Kabupaten Halmahera Timur yang masih menunjukkan

penurunan cakupan. Informasi GEI menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92 : GEI menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Selama Tahun 2009-2012

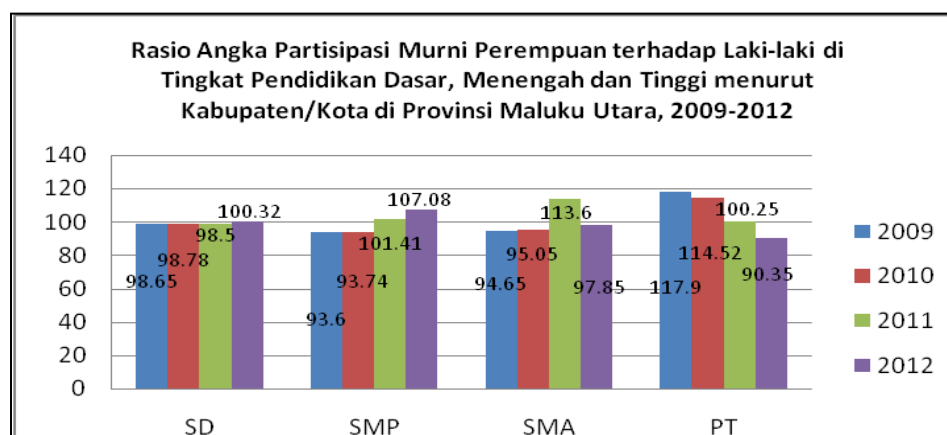
No	Kabupaten/Kota	GEI			
		2006	2010	2011	2012
1	Halmahera Barat	44,30	45,20	64,50	62,80
2	Halmahera Tengah	51,27	55,04	65,41	65,66
3	Kepulauan Sula	40,58	46,90	47,79	48,33
4	Halmahera Selatan	29,14	35,36	40,20	40,31
5	Halmahera Utara	49,34	62,30	63,97	64,09
6	Halmahera Timur	45,16	39,66	40,64	41,56
7	Pulau Morotai	*	38,91	58,72	53,16
8	Ternate	58,09	66,23	67,94	67,91
9	Tidore Kepulauan	44,10	57,16	58,96	58,66
10	Pulau Taliabu	**	**	**	

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Keterangan : *) data masih tergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara

***) data masih tergabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Data di atas menunjukkan bahwa Kondisi Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index, GEI). Yang rendah di tahun 2006, 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah kabupaten Halmahera selatan. Sedangkan pulau Morotai dan Pulau Taliabu dari tahun 2006, 2010, dan 2011 masih tergabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2013

Gambar 24: Cakupan IPG APM semua jenjang pendidikan Tahun 2009-2012

Indikator lain terkait pembangunan Gender adalah IPG APM pada semua jenjang pendidikan. IPG APM pada pendidikan dasar ditingkat provinsi terus mengalami peningkatan dari 98,65 di tahun 2009 menjadi 100,32 di tahun 2012.

Ditingkat SMP meningkat dari 93,6 di tahun 2009 menjadi 107,08 di tahun 2012, sedangkan pada pendidikan menengah meningkat dari angka 94,65 di tahun 2009 menjadi 97,85. Sementara itu, IPG APM untuk pendidikan tinggi berkecenderungan menurun dari 117,9 di tahun 2009 menjadi 90,35 di tahun 2012, sebagaimana tabel di bawah ini.

Indikator rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun selama Tahun 2009-2013, ternyata menunjukkan trend menurun. Setelah mencapai kondisi ON-TRACK di 2 (dua) tahun pertama capaian indikator ini mengalami penurunan hingga terkondisi di 99,62. Angka ini sedikit lebih rendah dari nasional 99,93 persen.

Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki untuk tingkat SD dari tahun 2011-2013 cukup fluktuatif, dari 98,5 persen di 2011 naik jadi 100,32 di 2012 dan kembali turun menjadi 99,82 persen ditahun 2013.

Tabel 2.93: Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki SD, SMP, dan SMA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013		
	Rasio APM SD Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SMP Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SMA Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SD Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SMP Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SMA Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SD Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SMP Perempuan/Laki-laki	Rasio APM SMA Perempuan/Laki-laki
MALUKU UTARA	98.5	101.41	113.6	100.32	107.8	97.85	99.82	93.85	105.37
Halmahera Barat	94.25	109.02	133.91	100.80	111.42	99.50	98.45	109.20	138.64
Halmahera Tengah	99.91	93.31	108.98	103.61	84.97	117.07	103.41	112.07	108.82
Kepulauan Sula	95.64	144.70	103.02	99.38	79.83	87.51	98.31	93.98	104.96
Halmahera Selatan	101.10	84.56	152.52	98.46	105.36	83.58	99.23	101.76	82.53
Halmahera Utara	100.16	92.27	114.12	104.48	135.07	126.26	102.35	80.73	106.51
Halmahera Timur	97.94	97.74	61.84	102.71	103.96	92.86	100.02	140.66	89.61
Pulau Morotai	96.66	120.51	66.49	98.73	100.30	68.92	99.98	144.48	139.25
Kota Ternate	96.30	109.78	120.29	97.61	113.36	101.34	96.92	73.36	106.52
Kota Tidore Kepulauan	99.69	94.69	95.88	101.00	109.92	98.74	102.05	86.14	110.56

Sumber : BPS Prov. Malut 2014

Gender di bidang ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Data BPS Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian mengalami peningkatan selama Tahun 2009-2013, dari sebesar 33,4 persen pada tahun 2009, menjadi sebesar 35,01 persen pada tahun 2012.

Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun telah terjadi penurunan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian sejak 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius, sehingga ruang bagi perempuan di sektor ini harus dibuka seluas-luasnya. Detail selengkapnya indikator ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.94: Kondisi Capaian Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013

No	Kabupaten / Kota	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Nonpertanian				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	34,14	41,4	37,9	42,06	38,25
2	Halmahera Tengah	29,67	28,78	32,43	27,49	21,04
3	Kepulauan Sula	31,27	45,06	37,6	41,1	42,78
4	Halmahera Selatan	37,78	46,58	39,93	36,45	37,14
5	Halmahera Utara	30,03	32,84	31,26	32,97	26,75
6	Halmahera Timur	26,26	26,62	27,99	26,47	26,37
7	Pulau Morotai	*	33,28	31,9	26,42	36,39
8	Ternate	35,49	36,68	39,03	34,76	34,92
9	Tidore Kepulauan	29,07	38,94	33,93	35,92	37,44
10	Pulau Taliabu	**	**	**	**	
Provinsi Maluku Utara		33,4	37,7	36,02	35,01	33,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Keterangan : *) data masih gabung dengan Kabupaten Halmahera Utara

**) data masih gabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Di bidang politik, amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengharuskan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik telah menjadi perhatian serius di tingkat daerah. Kondisi saat ini di Maluku Utara, keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif ditingkat provinsi telah terakomodasi sebesar 8,9 persen, dimana dari 45 anggota legislatif, terdapat 4 (empat) diantaranya keterwakilan perempuan. Secara agregatif dari 255 anggota legislatif (Provinsi dan Kab/Kota) , terdapat 28 (dua puluh delapan) diantaranya atau 11 persen adalah perempuan. Terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku Utara yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta TTPO di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

No	Tahun	Kasus Kekerasan terhadap		Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
		Perempuan	Anak	
1.	2010	7	1	1
2.	2011	11	7	-
3.	2012	11	3	-
4.	2013	11	3	8
5.	2014	4	3	2

Sumber : POLDA Maluku Utara, 2014

Data ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak Pidana Perdagangan Orang di tahun 2011- 2013 sebanyak 33 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dengan tambahan jumlah kasus setiap tahun bertambah 11 kasus kekerasan. Untuk kekerasan anak paling tinggi di tahun 2011. Sementara itu, perdagangan orang paling tinggi di tahun 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 8 kasus.

Pangan

Terkait ketahanan pangan di provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota maka dibentuk Lembaga Dewan Ketahanan Pangan yang memiliki peran besar dalam mendukung dan menjamin keterlaksanaan kemandirian pangan di suatu wilayah, melalui regulasi Kepala daerah. Selengkapnya terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.96: Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Provinsi/Kab/Kota	Lembaga	Dasar Hukum
1	Provinsi Maluku Utara	Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara	SK Gubernur Maluku Utara No. 37.1 / KEP-C-03/MU/2002
1	Halmahera Barat	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	SK Bupati Halmahera Barat No. 67 Tahun 2004
2	Halmahera Tengah	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Tengah	SK Bupati Halmahera Tengah No. 27 Tahun 2001
3	Halmahera Utara	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Utara	SK Bupati Halmahera Utara No. 07 Tahun 2004
4	Halmahera Selatan	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Selatan	SK Bupati Halmahera Selatan No. 27 Tahun 2003
5	Halmahera Timur	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Timur	SK Bupati Halmahera Timur No. ... Tahun 2008
6	Kepulauan Sula	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Sula	SK Bupati Kepulauan Sula No. 009/07/2003
7	Pulau Morotai	-	-
8	Ternate	Dewan Ketahanan Pangan Kota Ternate	SK Walikota Ternate No. 106 /3/Kota Ternate/2003
9	Tidore Kepulauan	Dewan Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan	SK Walikota Tidore Kepulauan No. 2 Tahun 2004

Pertanahan

Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan Ketenagakerjaan

Luas lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian secara rata-rata di Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2003-2013 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Gambaran perkembangan luas lahan tersebut mengindikasikan betapa masih luasnya potensi lahan produktif di Maluku Utara. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian harus berkompetisi dengan penggunaan lahan untuk kegiatan produktif lainnya seperti pertambangan. Namun demikian, perluasan lahan pertanian masih sangat mungkin dilakukan dan ditambah dengan mempertimbangkan kebijakan pertanian yang mampu mendorong peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi.

Walaupun menampilkan gambaran yang tidak terlalu menggembirakan dari sisi rata-rata produktivitas, tetapi hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2013) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan tumpuan harapan bagi sebagian besar tenaga kerja. Pada tahun 2008 terdapat sekitar 234 ribu tenaga kerja sektor pertanian (59,2 persen dari penduduk yang bekerja) dan menjadi sekitar 242 ribu pada Agustus 2013 (54,3 persen dari penduduk yang bekerja). Walaupun cenderung terus menurun dalam proporsinya, kedudukan sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja terbanyak masih belum tergantikan sampai saat ini.

Penduduk Provinsi Maluku Utara sebagian besar berada di daerah pedesaan yang pada umumnya berusaha dalam sektor pertanian dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah. Kegiatan pokok dan sumber pendapatan utama masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan, masih tergantung pada sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan data Sensus Pertanian Tahun 2013 yang menunjukkan bahwa rumah tangga di pedesaan sebagian besar menjadikan kegiatan usahatani sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan yang berbasis pertanian erat kaitannya dengan derajat ketidakmerataan struktur penguasaan lahan.

Berdasarkan hasil ST2013 menunjukan bahwa Usaha Pertanian di Maluku Utara didominasi oleh rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan uatau pelaku usaha lainnya selain rumah tangga dan perusahaan pertanian berbadan hukum.

Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Maluku Utara Tahun 2013 tercatat sebanyak 130.233 rumah tangga, meningkat sebesar 0,76 persen dari tahun 2003 yang tercatat sebanyak 129.246 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum Tahun 2013 tercatat sebanyak 20 perusahaan dan pelaku usaha lainnya sebanyak 57 unit.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun jumlah rumah tangga usaha pertanian di Maluku Utara bertambah sebanyak 987 rumah tangga atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,76 persen yaitu dari 129.246 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 130.233 pada tahun 2013. Dari 9 kabupaten/kota di Maluku Utara, 5 diantaranya mengalami peningkatan rumahtangga usaha tani dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur masing-masing yaitu 10,95 persen dan 10,99 persen. Peningkatan jumlah rumahtangga usaha pertanian pada kedua kabupaten tersebut diantaranya disebabkan adanya penambahan/intensifikasi perluasan areal transmigrasi oleh pemerintah Daerah yaitu di daerah Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah dan Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, jumlah rumahtangga usaha pertanian di Maluku Utara sebanyak 130.233 rumahtangga mengalami kenaikan 0,76 persen dibandingkan tahun 2003 yang sebesar 129.246 rumahtangga. Adapun karakteristik rumahtangga usaha tani di Maluku Utara sebagian besar adalah berusaha pada subsektor perkebunan yaitu mencapai 116.352 rumahtangga yang mengalami kenaikan sebesar 5,55 persen dibandingkan tahun 2003 yang sebesar 110.233 rumahtangga.

Luas kepemilikan lahan pertanian berpengaruh pada kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial pemiliknya. Bagi seorang petani, lahan pertanian sangat penting karena menjadi modal dan tempat bekerja. Status penguasaan lahan sangat erat hubungannya dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam menentukan bentuk usahatani. Rumah tangga pertanian pengguna lahan ternyata mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Maluku Utara di Tahun 2013. Dari sebanyak 130.233 rumah tangga usaha pertanian di Maluku Utara, sebesar 98,18 persen merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan (127.865 rumah tangga).

Sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan hanya sebesar 1,82 persen, atau sebanyak 2.368 rumah tangga.

Rumah tangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian yang menguasai kurang dari 5.000 m² lahan) dan rumah tangga petani non gurem (rumah tangga pertanian yang menguasai lebih dari atau sama dengan 5.000 m² lahan). Tahun 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan di Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh rumah tangga petani non gurem. Dari sebanyak 127.865 rumah tangga pertanian pengguna lahan di Maluku Utara, sebesar 82,91 persen (108.008 rumah tangga) merupakan rumah tangga petani non gurem. Sedangkan rumah tangga petani gurem tercatat sebesar 17,09 persen, atau sebanyak 21.857 rumah tangga.

Adapun komposisi antara rumahtangga tani dengan luas lahan yang dikuasai \geq 0,5 hektar dan petani gurem pada tahun 2003 maupun 2013 tidak terlalu jauh berbeda. Pada tahun 2003 rumahtangga usaha tani yang menguasai lahan \geq 0,5 Ha sebanyak 81,25 persen naik menjadi 81,50 persen pada tahun 2013. Sedangkan rumahtangga yang menguasai lahan lebih dari 5.000 m² atau petani gurem pada tahun 2003 sebesar 18,75 persen sedikit mengalami penurunan menjadi 18,50 persen di tahun 2013.

Secara umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah rumahtangga usaha tani di Maluku Utara pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar 0,76 persen dari tahun 2003. Namun apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, pada tahun 2003 terlihat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan antara 10.000- 19.999 m² mendominasi jumlah usaha pertanian di Provinsi Maluku Utara. Kondisi yang hampir serupa terjadi pada tahun 2013. Tercatat bahwa pada tahun 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan >30.000 m² adalah sebesar 22.000 rumah tangga, mengalami peningkatan sebesar 1,85 persen dibandingkan tahun 2003, yang tercatat sebanyak 21.600 rumah tangga.

Apabila rumahtangga usaha tani dilihat menurut golongan luas lahan yang dikuasai maka pada rumahtangga usaha tani yang menguasai lahan kurang dari 1.000 m² dan golongan 20.000 – 29.999 mengalami penurunan masing-masing sebesar

31,82 persen dan 9,95 persen. Sementara itu rumah tangga yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah RTUP dengan golongan luas lahan pertanian yang dikuasai antara 2.000 – 4.999 yaitu dari 7.947 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 11.426 rumah tangga pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 43,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara semakin banyak rumah tangga usaha pertanian yang memiliki luas lahan yang kecil/sempit, artinya bahwa masih ada rumah tangga usaha pertanian yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk menghasilkan tambahan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Luas lahan ditinjau dari Sertifikat Tanah dengan status Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang ada di Provinsi Maluku Utara, ternyata data yang tersedia baru meliputi 2 Kota, yaitu Ternate dan Tidore Kepulauan, sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak ada data, sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.97: Luas Lahan (M2) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013

KABUPATEN/KOTA	2009				2010				2011				2012				2013			
	HM	HGB	HGU	HPL	HM	HGB	HGU	HPL	HM	HGB	HGU	HPL	HM	HGB	HGU	HPL	HM	HGB	HGU	HPL
Ternate	1,965,458	38,760	-	-	468,889	1	-	-	434,475	16,924	-	-	615,937	42,678	-	-	1,005,365	37,268	-	-
Tidore Kepulauan	17,482,437	-	-	-	1,290,403	-	-	-	343,302	-	-	-	6,169,152	3,212	-	-	9,668,900	632	-	-
Halmahera Barat	437,807	760	-	-	97,974	49,735	-	-	269,498	1,729	-	-	2,006,704	127,289	-	-	2,380,345	-	-	-
Halmahera Tengah (**))																				
Halmahera Utara	*)	*)			*)	*)			459,103	83,957	-	-	378,248	8,842	-	-	1,285,906	54,773	-	-
Halmahera Selatan	198,431	-	-	-	234,173	-	-	-	457,021	6,500	-	-	7,166,095	65,000	-	-	9,574,945	19,207	-	-
Halmahera Timur(**))																				
Kepulauan Sula	301,650	-	-	-	133,402	1,679	-	-	569,708	-	-	-	1,835,074	921	-	-	1,814,269	4,093	-	-
Maluku Utara	20,385,783	39,520	-	-	2,224,841	51,415	-	-	2,533,107	109,110	-	-	18,171,210	247,942	-	-	25,729,730	115,973	-	-

Sumber data: Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku Utara 2014

Ket: HGU dan HPL tidak data

*) = Data gabung dengan BPN Kab. Halmahera Barat

**)) = Data tidak tersedia

Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau. Di samping itu juga peran Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dalam isu pemanasan global telah melakukan upaya dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca, serta melakukan upaya mencegah dan merehabilitasi kerusakan lingkungan hidup setempat. Berikut adalah indikator dan pencapaian Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.98 : Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012

Indikator	Tahun 2012
Persen Pengelolaan LH Kab/Kota berbentuk Badan	100 persen
Perda terkait LH	5
Pemegang sertifikasi Kompetensi Penyusunan Amdal (SKPA)	2
Total Diklat PPLH/D	41
PPLH/D	6
Laboratorium terakreditasi dan/ teregistrasi	0
Jumlah SLHD	3
Kualitas SLHD	
TPA Sanitary Landfill	0 persen
TPA Controller Landfill	0 persen
TPA Open Dumping / tidak teridentifikasi	100 persen
Adiwiyata	1
Kalpataru	0
PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan)	100 persen

Sumber : Bapedalda Provinsi Maluku Utara, Tahun 2014

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, 4 (empat) aspek kependudukan yang masih diperhadapkan pada kendala dan tantangan yang cukup berat yakni aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk serta administrasi kependudukan yang berkenaan dengan ketiga aspek tersebut.

Dari sisi kuantitas, penduduk Maluku Utara berjumlah sangat kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 2013, penduduk Provinsi Maluku Utara berjumlah sekitar 1.114.897 jiwa dengan angka laju

pertumbuhan penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yaitu sebesar 2,44 persen. Dari sisi kualitas, sesuai Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 masih sebesar 70,63 dan berada pada peringkat 30 diantara provinsi lain di Indonesia. Adapun dari aspek persebaran dan mobilitas penduduk, dijumpai ketimpangan persebaran penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi hanya di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini berimplikasi pada kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya dapat menurunkan derajat hidup dan permasalahan lingkungan hidup bagi penduduk.

Adapun dari sisi data/administrasi kependudukan hingga agustus 2014, wajib KTP sebanyak 621.439 jiwa. Yang telah melakukan perekaman elektronik sebanyak 468.557, sehingga sisa wajib KTP yang belum melakukan perekaman sebanyak 152.882, dengan rincian berdasarkan Kab./Kota dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.99: Kepemilikan E-KTP berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2014

No.	Kabupaten / Kota	Wajib KTP	Total Perekaman Terakhir Bulan Agustus 2014	Sisa Wajib KTP Yang Belum Merekam
1	Ternate	126.147	93.890	32.257
2	Tidore Kepulauan	58.286	48.436	9.850
3	Halmahera Barat	80.097	60.071	20.026
4	Halmahera Tengah	31.258	17.386	13.872
5	Halmahera Utara	116.689	51.168	65.531
6	Halmahera Selatan	78.667	51.769	26.898
7	Kepulauan Sula	47.854	47.013	841
8	Halmahera Timur	49.813	42.327	7.486
9	Pulau Morotai	32.628	22.864	9.764
10	Pulau Taliabu	*	*	*
TOTAL		621.439	468.557	152.882

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Malut, 2014

Keterangan : *) data masih gabung dengan Kabupaten Kepulauan Sula

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah desa di Provinsi Maluku Utara sebanyak 1.104. Upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan melalui pembinaan kelembagaan desa dan pemerintahan desa, peningkatan peran masyarakat, pemberdayaan keluarga sejahtera, serta pembinaan ekonomi masyarakat. Hingga tahun 2014 Jumlah pasar tradisional di provinsi Maluku Utara sebanyak 85 dengan jumlah pedagang sebanyak 6.852

pedagang yang tersebar di 9 Kab./Kota yang membutuhkan pembinaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, disamping pembinaan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumberdaya alam desa. Jumlah posyandu sebanyak 1.433. Jumlah kelembagaan desa secara rinci setiap kab./kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.100: Jumlah Kelembagaan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2013

No	NAMA KAB/KOTA	DESA/KEL	LPM/LKM	PKK	RT	KARANG TARUNA	KPMD/K
1	Halmahera Barat	170	170	170	120	41	152
2	Halmahera Tengah	61	61	61	402	15	56
3	Halmahera Utara	196	196	196	1568	40	198
4	Halmahera Selatan	249	249	249	2241	18	245
5	Kepulauan Sula	78	78	78	546	12	-
6	Halmahera Timur	102	102	102	918	41	135
7	Pulau Morotai	88	88	88	616	15	120
8	Kota Ternate	77	77	77	693	77	-
9	Kota Tidore Kepulauan	89	89	89	790	53	-
10	Pulau Taliabu	71	71	71	320	5	-

Sumber : BPMD Provinsi Maluku Utara, 2014

Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, LSM, dan lembaga lainnya di Maluku Utara tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.101 : Jumlah Organisasi/Lembaga

No	Organisasi	Jumlah
1.	Organisasi Masyarakat	21
2.	Organisasi Profesi	6
3.	Organisasi Kepemudaan	11
4.	LSM	124
Jumlah		162

Sumber : Kesbangpol Prov. Malut, 2014

Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi Keluarga Berencana (KB) dapat dilihat dari jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB aktif yang penyebarannya per kabupaten / kota dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.102: Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, 2013

Kab/Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	Jumlah
Halmahera Barat	23,113	441	93	15	88	1,505	3,545	1,344	7,031
Halmahera Tengah	9,192	38	10	-	632	1,972	2,346	1,425	6,423
Kepulauan Sula	28,226	18	17	10	92	287	1,269	531	2,224
Halmahera Selatan	38,708	2,301	915	151	5,044	7,025	4,674	14,725	44,835
Halmahera Utara	33,195	621	561	509	966	3,301	1,084	4,584	21,626
Halmahera Timur	16,974	101	41	48	703	2,721	8,810	4,796	17,220
Pulau Morotai	11,256	242	32	7	451	1,479	6,645	4,173	13,029
Pulau Taliabu									-
Ternate	31,405	213	161	2	626	2,466	5,185	1,450	10,103
Tidore Kepulauan	18,823	178	47	1	73	1,281	5,138	648	7,366
Maluku Utara 2013	210,892	4,153	1,877	743	8,675	22,037	8,696	33,676	129,857
Maluku Utara 2012	207,072	3,633	1,739	753	9,642	17,154	9,382	35,915	128,218

Sumber : BPS Prov. Maluku Utara 2014

Banyaknya keluarga pada tahun 2013 yaitu 280.999 KK. Jika dilihat menurut tahapan keluarga sejahtera maka terlihat bahwa keluarga sejahtera II mendominasi status keluarga sebesar 100.319 KK, disusul oleh keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.103: Banyaknya Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2013

Kab/Kota	Pra Sejahtera I	Keluarga Sejahtera				
		I	II	III	III Plus	Jumlah
Halmahera Barat	10,520	8,250	7,630	3,356	523	30,279
Halmahera Tengah	1,268	2,083	5,627	2,007	1,069	12,054
Kepulauan Sula	16,931	11,349	7,026	764	281	36,351
Halmahera Selatan	8,653	15,670	21,289	4,210	529	50,351
Halmahera Utara	9,630	10,641	18,808	3,583	1,136	43,798
Halmahera Timur	10,004	5,437	4,079	3,304	536	23,360
Pulau Morotai	10,175	3,130	1,619	630	98	15,652
Pulau Taliabu*	-	-	-	-	-	-
Ternate	586	5,080	28,198	10,914	610	45,388
Tidore Kepulauan	2,152	4,596	6,043	9,867	1,108	23,766
Maluku Utara 2013	69,919	66,236	100,319	38,635	5,890	280,999
Maluku Utara 2012	60,662	64,272	100,194	39,466	5,342	272,936

Sumber : BPS Prov. Maluku Utara 2014

Angka pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate-CPR*) telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian CPR semua cara di Provinsi Maluku Utara meningkat selama Tahun 2009-2012, dari 45,43 persen pada tahun 2009 menjadi 50,33 persen pada tahun 2012, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.104: Kondisi Cakupan Angka Pemakaian Kontrasepsi di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/kota	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 Tahun, Semua Cara					Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 Tahun, Cara Modern				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Halmahera Barat	55.82	63.49	60.69	63.38	62.78	55.16	63.23	60.26	63.38	62.64
2	Halmahera Tengah	35.68	39.58	36.64	45.49	51.92	34.67	38.75	36.28	45.49	51.92
3	Kepulauan Sula	35.42	43.5	33.84	38.79	42.27	29.5	38.48	31.77	36.91	40.96
4	Halmahera Selatan	41.6	47.24	46.86	45.1	50.47	41.37	47.24	46.86	44.64	50.20
5	Halmahera Utara	48.81	55.68	55.51	52.26	55.57	48.32	55.4	55.32	52.26	55.57
6	Halmahera Timur	52.13	63.86	57.57	63.2	65.82	52.13	62.01	57.57	63.2	65.82
7	Pulau Morotai	*	45.66	41.63	53.06	59.63	*	45.05	41.63	53.06	59.63
8	Kota Ternate	49.39	47.96	56.89	50.61	57.41	48.37	46.59	54.91	49.95	57.03
9	Kota Tidore Kepulauan	39.8	37.21	38.15	49.41	47.95	39.48	36.29	38.15	49.41	47.35
10	Provinsi Maluku Utara	45.43	49.98	49	50.33	54.86	44.19	48.8	48.3	49.88	54.65

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Keterangan : *) data masih gabung dengan kabupaten Halmahera Utara

Sementara itu, untuk CPR cara modern meningkat dari 44,19 persen pada tahun 2009 menjadi 54,65 persen pada tahun 2013. Angka pemakaian kontrasepsi bervariasi antar kabupaten/kota. Hingga tahun 2013 dilaporkan bahwa Kabupaten Sula merupakan daerah dengan kontribusi terendah, baik untuk Angka CPR semua cara maupun cara modern. Adapun Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah dengan Angka CPR tertinggi, baik untuk semua cara maupun cara modern. Masih tingginya disparitas CPR antardaerah tersebut mencerminkan cakupan program keluarga berencana yang belum merata di Kabupaten/kota.

Perhubungan

Dalam penyediaan prasarana transportasi jalan di Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2013 jumlah terminal adalah sebanyak 19 lokasi dengan rincian untuk terminal Tipe B sebanyak 6 lokasi, dan terminal Tipe C sebanyak 16 lokasi. Dalam RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033 direncanakan akan terdapat 63 terminal penumpang baik tipe B maupun tipe C. Untuk sarana transportasi jalan perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan pada masing-masing moda transportasi dengan total prosentase peningkatan di atas 11 persen dimana jumlah terbesar pada moda sepeda motor dengan prosentase peningkatan sebesar 13 persen. Mobil penumpang mencapai 4.505 unit, bus 734 unit, truk 788 unit dan sepeda motor mencapai 32.791 unit.

Untuk prasarana transportasi ASDP, jumlah pelabuhan penyeberangan di Provinsi Maluku Utara terdapat 17 pelabuhan penyeberangan yaitu Bastiong, Rum,

Sidangoli, Subaim, Tobelo, Juanga (Pulau Morotai), Sofifi, Babang (Pulau Bacan), Batang Dua, Gorua, Patani, Bobong (Pulau Taliabu), Jikotamo (Pulau Obi), Dowora, Pohea (Sanana), Kramat (Pulau Mangoli), Daruba dan beberapa pelabuhan penyeberangan yang sementara dibangun yaitu di Doro (Kao), Saketa, Gebe, Wayaloar (Pulau Obi), Fautkayon (Pulau Sulabesi) serta beberapa pelabuhan penyeberangan yang diusulkan di Weda, Sulabesi Timur dan Galela. Dari prasarana transportasi ASDP tersebut terdapat 3 simpul penyeberangan antar provinsi yaitu di Patani yang menjadi simpul ke Provinsi Papua Barat, Wayaloar (Pulau Obi) dan Fautkayon (Pulau Sulabesi) menjadi simpul ke Provinsi Maluku dan Bobong (Pulau Taliabu) menjadi simpul penyeberangan ke Banggai dan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sarana transportasi ASDP, jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi pada tahun 2013 sebanyak 7 kapal yang tersebar di 15 lintasan penyeberangan, yaitu Bastiong – Sofifi, Bastiong – Sindangoli, Bastiong – Rum, Tobelo – Daruba, Tobelo – Subaim, Bastiong – Batang Dua, Bastiong – Babang, Dowara – Sofifi, Babang – Bobong, Sanana – Obi, Babang – Obi, Sanana – Mangole, Mangoli - Bobong, P. Gebe – Patani dan Patani -Weda.

Pelabuhan laut berstatus nasional dalam RTRW Nasional terdapat di Ternate dan Babang. Kementerian perhubungan telah membangun pelabuhan laut di seluruh kabupaten/kota lainnya seperti pelabuhan Morotai, Sofifi, Tobelo, Gita, Jailolo, Buli, Weda, Laiwui, Sanana, Mangoli dan Taliabu. Data BPS menunjukkan bahwa terjadi kenaikan lalu lintas penumpang dan barang angkutan laut di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, tahun 2011 jumlah penumpang berangkat 379.462 orang, tahun 2012 jumlah penumpang berangkat 601.300 orang; tahun 2011 penumpang datang 386.821 orang, tahun 2012 penumpang datang 590.190 orang; Tahun 2011 barang bongkar 417.782 Kg, tahun 2011 barang muat hanya 19.984 Kg; Tahun 2012 barang bongkar 486.030 Kg, tahun 2012 barang muat hanya 23.736 Kg. Tapi dari total barang bongkar di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate tersebut, 60 persen akan dibawa ke Pulau Halmahera. Selain pada lokasi diatas terdapat juga Pulau-pulau kecil berpenduduk yang belum memiliki prasarana dan sarana perhubungan laut yang layak dan nyaman.

Prasarana bandar udara terdapat sejumlah 11 bandara di 10 kab/kota dengan status tertinggi adalah Bandara Baabullah Ternate yang juga merupakan pintu masuk

utama. Terminal penumpang Bandara Baabullah sampai sekarang masih dikelola oleh Perusahaan Daerah. Pengelolaan tersebut ternyata menimbulkan berbagai permasalahan yang mengurangi kenyamanan para pengguna bandara. Belum ada bandara yang secara langsung mendukung ibukota provinsi Sofifi. Kementerian Perhubungan telah memiliki rencana pengembangan Bandara Kao untuk mendukung Sofifi. Bandara di Pulau Morotai masih dalam pengelolaan TNI. Tahun 2014 sementara dibangun dan dikembangkan Bandara di Weda. Beberapa pulau sedang dan berpenduduk lebih dari 40 ribu jiwa seperti Pulau Obi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu belum memiliki fasilitas bandara komersial.

Lalu lintas penerbangan dalam negeri di Bandara Babullah mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sebanyak 4.544 keberangkatan dan kedatangan menjadi 5.705 keberangkatan dan kedatangan serta jumlah penumpang berangkat 266.132 orang dan 215.543 penumpang datang pada Tahun 2011 menjadi penumpang berangkat 270.319 orang dan 298.947 penumpang datang pada Tahun 2012.

Komunikasi dan Informatika

Untuk bidang telekomunikasi, masih terdapat 32,53 persen desa belum dapat menerima sinyal telepon seluler. Data BPS Tahun 2013 menggambarkan bahwa pengguna komputer dan internet di Provinsi Maluku Utara baru sebesar 40 persen. Pengembangan Maluku Cable System (MCS) merupakan bagian daripada program pembangunan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Sulawesi, Maluku dan Papua. Program ini juga merupakan bagian dari pembangunan mega proyek Palapa Ring untuk mewujudkan Indonesia Digital Network (IDN). Provinsi Maluku Utara juga memiliki base tranceiver station (BTS) sejumlah 111 menara.

Selengkapnya data terkait Rumah Tangga dengan akses terhadap telekomunikasi, media cetak/surat kabar dan media elektronik dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.105: Presentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Telekomunikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	Ruta Pemilik Telepon Rumah			Ruta Pemilik Telepon Seluler			Ruta Mengakses Internet			Ruta Memiliki Komputer		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Halmahera Barat	0.43	1.52	0.81	61.88	74.65	75.29	4.63	5.16	6.68	3.87	5.48	7.76
Halmahera Tengah	0.13	1.77	1.53	64.59	75.68	79.30	6.78	6.44	9.76	4.45	8.91	15.46
Kepulauan Sula	0.92	2.01	1.51	33.41	49.66	51.62	4.31	5.77	9.28	2.31	3.61	5.66
Halmahera Selatan	0.66	0.94	3.10	45.83	52.29	70.26	3.83	5.32	9.90	3.86	6.10	9.51
Halmahera Utara	5.50	6.15	3.84	57.82	72.29	78.18	5.29	6.45	11.42	6.18	8.89	10.44
Halmahera Timur	-	1.72	-	69.50	76.68	79.06	4.48	6.25	2.45	5.65	6.24	9.68
Pulau Morotai	2.07	0.02	0.32	37.89	46.01	56.69	2.25	0.72	11.03	4.37	2.95	7.77
Kota Ternate	9.54	7.21	3.80	92.18	95.99	99.18	43.22	48.58	47.34	28.49	33.64	40.69
Tidore Kepulauan	4.42	3.21	1.94	73.64	85.83	83.00	16.25	13.90	16.01	7.39	13.62	19.57
MALUKU UTARA	2.63	2.73	2.47	59.64	69.90	76.78	10.12	10.96	17.01	7.40	9.94	14.06

Sumber : BPS Prov. Maluku Utara 2014

Sedangkan sebaran media elektronik baik cetak maupun elektronik di Provinsi Maluku Utara belum merata, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106: Media Cetak/Surat Kabar dan Media Elektronik di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Media Cetak	Radio	Televisi
1.	Halmahera Barat			
2.	Halmahera Tengah			
3.	Kepulauan Sula			
4.	Halmahera Selatan			
5.	Halmahera Utara	Radar Halmahera	Radio Suara Paski Buana	
			Radio Salom	
6.	Halmahera Timur			
7.	Pulau Morotai	Morotai Post		
8.	Ternate	Malut Pos	RRI Ternate	Gamalama TV
		Posko Malut	Radio Istana	Madodoto TV
		Gamalama Post	Radio Diahi	
		Mata Publik	Radio Master	
		Suara Rakyat		
		Seputar Malut		
		Fajar Malut		
9.	Tidore Kepulauan			

Sumber : KPID Prov. Malut, 2014

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Maluku Utara pada tahun 2009 sebanyak 1.052 unit, sampai tahun 2013 sebanyak 1.388 koperasi, yang tersebar pada 10 Kabupaten /

Kota atau mengalami peningkatan sekitar 1 persen dari tahun sebelumnya (2012) yang sebanyak 1.374 unit.

Tabel 2.107: Jumlah UMKM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 2012

KABUPATEN / KOTA	J u m l a h	
	Unit	Tenaga kerja
Halmahera Barat	352	814
Halmahera Tengah	52	128
Halmahera Utara	2.708	4.578
Halmahera Selatan	817	2.352
Halmahera Timur	1000	2.302
Kepulauan Sula	3.697	9.339
Pulau Morotai	727	1.767
Ternate	4.801	9.423
Tidore Kepulauan	3.481	8737
J UMLAH	17.635	39.437

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2013

Jumlah UMKM sampai Tahun 2013 sebanyak 21.432 unit atau meningkat sebesar 17,7 persen dari tahun 2012 yang sebanyak 17.635 unit, dan jumlah tenaga kerja sebanyak 45.457 orang atau meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 39.437 orang, dengan unit usaha di bidang perdagangan, industry pertanian, non pertanian dan aneka jasa.

Tabel 2.108: Perkembangan Koperasi Aktif / Tidak Aktif

KABUPATEN / KOTA	KOPERASI			JUMLAH ANGGOTA	JMLH. PENGURUS
	AKTIF	TDK AKTIF	JML		
Halmahera Barat	123	8	131	6.722	91
Halmahera Tengah	60	19	79	6.627	119
Halmahera Utara	77	41	118	5.119	450
Halmahera Selatan	125	101	226	12.685	652
Halmahera Timur	62	24	86	3.561	97
Kepulauan Sula	127	30	157	7.201	429
Pulau Morotai	34	9	43	1.361	31
Ternate	72	202	274	23.597	322
Tidore Kepulauan	108	40	148	11.180	468
JUMLAH	788	474	1.262	78.053	2.659

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2013

Tabel 2.109: Jumlah BPR di Provinsi Maluku Utara, 2013

No	Status Kantor	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu
1.	BPR Malifut Danatama	1	0	0
2.	BPR Bpbato Lestari	1	2	0
3.	BPRS Bahari Berkesan	1	0	0
Total	2013	3	21	26
	2012	3	19	22

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Penanaman Modal (Investasi)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Investasi di Maluku Utara belum optimal dengan indikasi jumlah realisasi investasi yang belum terlalu signifikan. Data tentang nilai realisasi PMDN di Maluku Utara yang diperoleh dari BPKMD provinsi diketahui pada tahun 2009, realisasi Rp. 193,84 miliar dan tahun 2011 realisasi sebesar Rp.1,52 Triliun, sedangkan pada tahun 2012 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) realisasi sebesar Rp. 39,50 Miliar dan pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 212,17 miliar. Pada tahun 2013 untuk total investasi swasta nasional dan daerah sebesar Rp. 2,47 triliun. Untuk tahun 2010, belum tersedia data, ketiadaan data ini tidak berarti bahwa pada tahun tersebut tidak terjadi investasi oleh PMDN, tetapi pada umumnya disebabkan oleh tidak adanya laporan dari pihak-pihak pengusaha. Salah satu sebabnya adalah geografis Maluku Utara yang begitu terpencar dalam kepulauan-kepulauan kecil sehingga untuk dapat mengakses ke Dinas Provinsi memerlukan biaya dan waktu yang ekstra. Sehingga kalau proses administrasi pelaporan bukan merupakan sebuah komponen wajib dari kegiatan usaha akan diabaikan.

Pada akhir Tahun 2013 dan sampai tahun 2014, akibat berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mewajibkan ekspor bahan tambang dalam bentuk setengah jadi sehingga berdampak pada untuk sementara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan terutama Nikel masih menghentikan aktifitas pertambangan bahkan terjadi PHK terhadap tenaga kerja. Hal ini berdampak selain menurunnya nilai investasi, juga berdampak pada penambahan pengangguran dan berkurangnya pendapatan daerah.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Nilai realisasi PMA, pada Tahun 2009 sebesar US\$ 233,32 miliar, pada tahun 2010 sama dengan tahun 2009; pada tahun 2011 realisasi sebesar US\$ 51,96 miliar, tahun 2012 realisasi sebesar US\$ 29,10 miliar, dan pada tahun 2013 rencana investasi US\$ 59,60 terealisasi sebesar US\$ 85,62 miliar.

Dari data realisasi investasi tersebut di atas, nampak bahwa terjadi penurunan nilai realisasi pada tahun 2009/2010 dengan 2011 dan 2012. Padahal menurut keterangan dari pihak BPKMD Provinsi Maluku Utara bahwa telah dilakukan promosi yang cukup gencar dalam rangka memperkenalkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki kepada para investor, baik melalui brosur maupun melakukan kunjungan langsung ke negara-negara investor.

Izin investasi di Maluku Utara masih terlalu birokratis. Disaat para investor membutuhkan pelayanan dalam proses perizinan investasi, sistem birokrasi di Maluku Utara belum banyak mengalami penyesuaian. Padahal seperti yang diketahui, bahwa sebaran geografis yang menjadi kendala tersendiri dalam pelayanan, semestinya dapat dibantu dengan desain sistem yang lebih sederhana. Sehingga para investor tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hanya sekedar mendapatkan sebuah ijin. Untuk itu, perlu dilakukan pemenuhan terhadap mental para birokrasi yang terlalu banyak mangkir dari pelaksanaan tugas. Selain itu, adalah mendirikan pusat pelayanan terpadu dalam satu atap. Namun demikian, untuk mewujudkan hal ini sepertinya masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang sebab sampai pada tahun 2014 baru terdapat 22,22 persen kabupaten/kota yang telah memiliki perda pelayanan satu pintu. Akibatnya dari akumulasi iklim investasi dan iklim usaha yang seperti tersebut di atas, menyebabkan bukan hanya nilai realisasi investasi PMA yang belum maksimal, tetapi juga pada minat jumlah investor asing yang masih rendah. Pada tahun 2014 ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ke DPRD untuk dibahas dan disahkan.

Tabel 2.110: Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

Kab/Kota	PMA		PMDN		Swasta Nasional dan Daerah	
	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Rencana Investasi	Realisasi Investasi
Halmahera Utara	\$ 75 M	\$ 156,47 M	Rp. 30 M	Rp.27,75 M	Rp. 1,07 T	Rp. 297,77 M
Pulau Morotai	-	-	Rp.5 M	Rp. 4,2 M	Rp. 9,45 M	Rp.8,66 M
Halmahera Tengah	\$ 52,7 M	\$ 34,01 M	Rp. 623 M	Rp. 49,65 M	Rp. 23, 09 T	Rp. 822,78 M
Halmahera Barat	\$ 500.000	\$ 500.000	-	-	Rp.81 M	Rp.26,30 M
Halmahera Timur	\$ 23 M	\$ 23 M	-	-	Rp.633,75 M	Rp.86,48 M
Halmahera Selatan	\$ 14,05 Jt	\$ 4,27 Jt	-	-	-	-
Kepulauan Sula	-	-	-	-	Rp.55 M	Rp.48,48 M
Pulau Taliabu	-	-	Rp.823,8 M	Rp.30,50 M	Rp.17,34 M	Rp.13,09 M
Tidore Kepulauan	-	-	-	-	Rp.156,72 M	Rp.49,71 M
Ternate	\$ 6,7 M	\$ 6,7 M	Rp.9,6 M	Rp.9,6 M	Rp.272,34 M	Rp.68,23 M
Provinsi Maluku Utara	US\$ 59,60	US\$ 85,62	Rp. 1.491,4 M	Rp. 212,17 M	Rp. 24.815,6 M	Rp. 2.079,43 M

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi, 2014

Tabel 2.111: Perusahaan Yang Berinvestasi di Maluku Utara

No	Pemegang Izin	Lokasi	Ket
1	PT. Alam Raya Abadi	Haltim	Nikel DMP
2	PT. Aneka Tambang, Tbk.	Haltim	Nikel DMP
3	PT. Weda Bay Nickel	Halteng-Haltim	Nikel DMP
4	PT. Bakti Pertiwi Nusantara	Halteng	Nikel DMP
5	PT. Gane Permai Sentosa	Halsel	Nikel DMP
6	PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang	Haltim	Nikel DMP
7	PT. Nusa Halmahera Mineral	Halut	Emas DMP
8	PT. Nusa Halmahera Mineral	Halut	Emas DMP
9	PT. Nusa Halmahera Mineral	Halut	Emas DMP
10	PT. Rimba Kurnia Alam	Halsel	Nikel DMP
11	PT. Tekindo Energi (Blok II)	Halteng	Nikel DMP
12	PT. Trimegah Bangun Persada	Halsel	Nikel DMP
13	PT. Adidaya Tangguh (Tahap I)	Kep. Sula	Biji Besi
14	PT. Adidaya Tangguh (Tahap II)	Kep. Sula	Biji Besi
15	PT. Haltim Mining	Haltim	Nikel DMP
16	PT. Wana Tiara Persada (Tahap I)	Halsel	Nikel DMP
17	PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Halteng	Nikel DMP

Sumber : Buku Profil Kehutanan, Dinas Kehutanan, 2013

Permasalahan utama kurangnya investasi swasta adalah; keterbatasan infrastruktur, masalah kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan investor menyampaikan LKPM (Laporan Kinerja Penanaman Modal); data dan realisasi ada yang tidak sesuai fakta proyek; dan penyimpangan pengguna izin dan fasilitas investasi.

Statistik

Terkait dengan urusan statistik di Provinsi Maluku Utara, dilakukan oleh BPS dimana Pemerintah Provinsi bekerja sama dalam penyediaan data dan anggaran untuk menunjang proses penggandaan dan publikasi.

Perpustakaan

Pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Maluku Utara dilaksanakan melalui pembinaan kelembagaan. Hingga tahun 2013, dari 10 Kabupaten/Kota yang ada, telah terdapat 7 yang telah memiliki kelembagaan, sedangkan Kabupaten Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu yang belum memiliki. Jumlah perpustakaan keliling sebanyak 9 buah, yaitu 2 buah dikelola oleh Provinsi sedangkan masing-masing kabupaten/kota memiliki 1 unit.

Sejak tahun 2007 - 2013, telah dilakukan penyaluran buku ke desa/kelurahan sebanyak 545.500 ekslembar dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Rincian penerima bantuan hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.112: Penyaluran Buku ke Desa / Kelurahan sampai dengan Tahun 2014

NO	KABUPATEN / KOTA	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel.	Penerima Bantuan Buku	
				Sudah	Belum
1	Ternate	7	80	80	0
2	Tidore Kepulauan	8	73	73	0
3	Halmahera Tengah	8	48	46	2
4	Halmahera Timur	10	77	27	50
5	Halmahera Barat	9	146	72	74
6	Halmahera Selatan	30	257	55	202
7	Kepulauan Sula	12	77	56	21
8	Halmahera Utara	17	196	76	120
9	Kepulauan Morotai	5	66	11	55
10	Kepulauan Taliabu	7	51	2	49
JUMLAH		113	1071	498	573

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Sampai dengan akhir September 2014, koleksi yang dimiliki Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara berjumlah 5.418 atau sebanyak 18.141 eksamplar yang terdiri dari buku fiksi dan nonfiksi, koleksi deposit dan koleksi perpustakaan keliling. Untuk mengetahui tingkat baca masyarakat digunakan Indeks Baca masyarakat, namun hingga saat ini belum dilakukan penelitian terhadap aspek tersebut.

Kearsipan

Fungsi Kearsipan dilakukan melalui Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Kearsipan; Pelaksanaan Penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks; Pelaksanaan Pengadaan, Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Pelestarian arsip daerah; Pembinaan dan peningkatan SD kearsipan.

Kondisi saat ini pelaksanaan fungsi Kearsipan baru dilaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan produk hukum daerah untuk 5 tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.113: Perkembangan Arsip Dokumen Daerah

TAHUN	Peraturan Daerah	Peraturan Gubernur	Instruksi Gubernur	Keputusan Gubernur
2009	13	57	3	267
2010	4	29	3	230
2011	6	23	3	370
2012	18	20	3	443
2013	10	11	2	368
2014 (Jan-April)	-	9	-	183
Jumlah	48	132	14	1.655

Sumber : Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Maluku Utara

Pengarsipan yang telah dilakukan selama masa periode 2009 - 2013 dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) sebanyak 48 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 132 buah, Instruksi Gubernur 14 buah dan Keputusan Gubernur sebanyak 1.655 buah. Hingga saat ini jumlah Aparat pada Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara berjumlah 35 orang dan 2 (dua) orang pegawai kontrak dengan kualifikasi Menurut Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana (S2) 3 orang, Sarjana (S1) 20 orang, Sarjana Muda (D3) 3 orang, dan SLTA 9 orang.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, permasalahan yang dihadapi Kearsipan Provinsi Maluku Utara meliputi

1. Masih kurangnya penataan administrasi pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.
2. Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai.
3. Kurangnya SDM yang handal dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Rendahnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat.

5. Kurangnya Koordinasi Istansi-Istansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya dalam pengumpulan dan Pengelolaan Arsip Daerah.

Urusan Pilihan

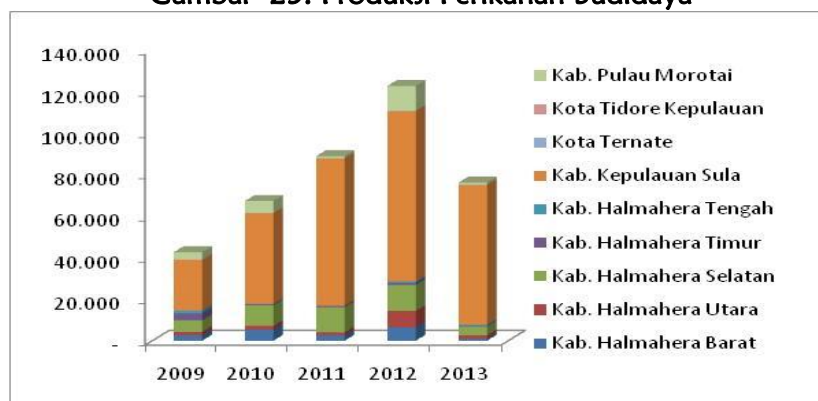
Kelautan dan Perikanan

Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah 145.801,10 Km² dimana 69,08 persen adalah wilayah laut yang membujur dari Utara ke Selatan dan dari Barat ke Timur. Berdasarkan Komisi Nasional *Stock Assasement* (2005) potensi sumber daya ikan (SDI) provinsi Maluku Utara terdistribusi pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 7 (Laut Maluku) dan 8 (Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Laut Halmahera/Samudera Pasifik) dengan jumlah potensi sebesar 1.035.230 ton/tahun. Dari seluruh potensi ikan tersebut jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 414.092,00 ton/tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari (MSY) sebesar 517.615 ton/thn.

Sampai tahun 2013 optimalisasi dan produktivitas perikanan budidaya di Provinsi Maluku Utara masih rendah, hal ini dapat dilihat dari luas areal budidaya yang sudah dikembangkan dan produksi yang dicapai. Berdasarkan perkembangan luas areal budidaya yang telah dimanfaatkan dengan potensi areal yang ada menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan potensi perikanan budidaya di Maluku Utara masih sangat rendah.

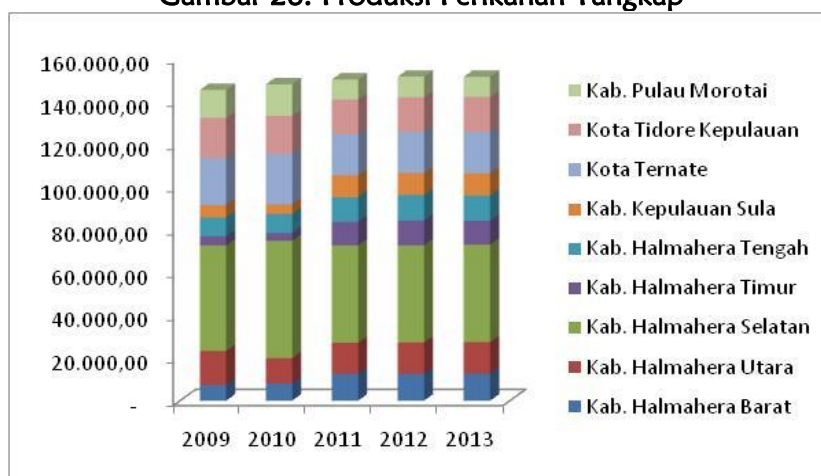
Potensi Luas Lahan Budidaya sebesar 81.315,01 Ha, sekitar 86 persen atau 70.577,29 Ha belum termanfaatkan. Komoditi unggulan budidaya adalah Rumput laut dan kerapu.

Gambar 25: Produksi Perikanan Budidaya



Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2014

Gambar 26: Produksi Perikanan Tangkap



Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2014

Pada Tahun 2013 jumlah armada jenis PTM (Perahu Tanpa Motor) sebanyak 709 unit, jenis MT (Motor Tempel) sebanyak 891 unit meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya berjumlah 826 unit, jenis KM (Kapal Motor) < 30 GT sebanyak 1.491 unit meningkat dibanding 2012 yang hanya 1.232 unit, sedangkan jenis KM > 30 GT sebanyak 52 unit.

Tabel 2.114: Jenis & jumlah armada penangkapan ikan di Provinsi Maluku Utara

Jenis Armada	Jumlah Armada (unit) Tahun		KET
	2011	2012	
PTM	918	821	Menurun
MT	835	826	Menurun
KM < 30 GT	1.198	1.232	Meningkat
KM > 30 GT	38	52	Meningkat
JUMLAH	2.984	2.931	

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2014

Tabel 2.115: Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (Pelabuhan perikanan & fasilitas pendukung)

PP/PPI/PPN	PP/PPI
PPN Ternate (Bastiong) (L=10,6Ha) F= Dermaga, ABF= 5 ton, pabrik es 5 ton, coldstorage 20 ton	PPP Bacan (Panamboang) (L=2 Ha) F= Dermaga, R.Sinpan Es 5 ton, Es Curah 2 ton, ABF 2 ton, Pabrik Es 10 ton,

listrik 89,100 Va	Colstorage 15 ton, listri 150 Kva
PPP Tobelo (L=2 Ha) F= Dermaga, R.Sinpan Es 5 ton, Es Curah 2 ton, ABF 2 ton, Pabrik Es 10 ton, Colstorage 10 ton, listri 6600 Kwh	PPI Goto Tidore (L.1 Ha) F= Dermaga,, Pabrik Es 5 ton, Colstoage 5 ton, listrik 7,900 watt
PPI Maba (L= 3 ha) F= Dermaga, Pabrik Es 5 ton, Colstorage 5 ton, listrik 100 kva,	PPI Weda (L. Ha) F= Dermaga, Pabrik es 5 ton, listrik 100Kva
PPI Sanana (L.3Ha) F= Dermaga, Pabrik Es 5 ton	PPI Gebe (L 2,5Ha) F= Dermaga, Pabrik Es 5 ton
PPI Dufa-dufa Ternate (L=1 Ha) F= Dermaga, R.Simpan Es 3 ton, ABF 6 ton, Pabrik es 10 ton, coldstorage 150 ton, listrik 82,5 kva	PPI Kedi Jailolo (L= 3ha) F= R.simpan Es 50 ton, ABF 10 ton, Pabrik Es 10 ton, Colstorage 100 ton, listrik 360.000 Kva
PPI Bacan (Sayoang) (L= 1,8Ha) F= Dermaga, Pabrik es 5 ton, colstorage 5 ton listrik 100 kva	PP Morotai (L=2 Ha) F= Dermaga, Pabrik Es 10 Ton, ColdStorage 200 ton, listrik 100 Kva
	PPI Tuada Jailolo (L=1 Ha) fasilitas Dermaga, TPI, Pabrik Es 5 ton, Colstorage 5 ton, listrik 13.000 kva

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2014

Akses permodalan bagi nelayan di Provinsi Maluku Utara tersedia dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM tersebut disalurkan melalui Program Pemberdayaan Usaha Masyarakat Perikanan (PUMP) baik Perikanan Budidaya (PB), Perikanan Tangkap (PT) maupun P2HP.

Tabel 2.116: Akses Permodalan bagi usaha bidang kelautan & perikanan

Kabupaten/Kota	PUMP	Jumlah Kelompok
Pulau Morotai	PUMP P. Tangkap	6 KUB (2012) 15 KUB (2013) 4 KUB (2014)
	PUMP P. Budidaya	11 Pokdakan (2013) 6 Pokdakan (2014)
	PUMP P2HP	8 Poklahsar (2013)
Ternate	PUMP P. Tangkap	14 KUB (2011) 15 KUB (2012)
	PUMP P2HP	6 Poklahsar (2013)
Tidore Kepulauan	PUMP P. Tangkap	10 KUB (2011) 4 KUB (2012)

Kabupaten/Kota	PUMP	Jumlah Kelompok
		7 KUB (2013)
	PUMP P2HP	7 Poklahsar (2013)
	PUMP P. Budidaya	8 Pokdakan (2013) 3 Pokdakan (2014)
Halmahera Timur	PUMP P. Tangkap	10 KUB (2012) 5 KUB (2013) 6 KUB (2014)
	PUMP P. Budidaya	6 Pokdakan (2013) 3 Pokdakan (2014)
Halmahera Barat	PUMP P. Tangkap	5 KUB (2012) 5 KUB (2013)
	PUMP P2HP	14 Poklahsar (2012)
Halmahera Tengah	PUMP P. Tangkap	5 KUB (2012) 6 KUB (2013) 7 KUB (2014)
	PUMP P. Budidaya	6 Pokdakan (2013) 8 Pokdakan (2014)
Halmahera Selatan	PUMP P. Tangkap	12 KUB (2012) 5 KUB (2013) 5 KUB (2014)
	PUMP P. Budidaya	6 Pokdakan (2013) 6 Pokdakan (2014)
Halmahera Utara	PUMP P. Tangkap	11 KUB (2012) 5 KUB (2013)
	PUMP P2HP	15 Poklahsar (2012) 10 Poklahsar (2013)
	PUMP P. Budidaya	8 Pokdakan (2013) 3 Pokdakan (2014)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2014

Tingkat konsumsi ikan 2009-2013 rata-rata naik sebesar 8,42 persen per tahun. Secara nasional Provinsi Maluku Utara telah melewati target nasional yaitu 35.14 Kg/perkapita.

Penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Jumlah nelayan tahun 2013 sebanyak 32.618 orang meningkat dibanding tahun 2012 yang hanya 19.564 orang, pembudidaya pada tahun 2013 sebanyak 5.214 orang, pengolah konsumsi sebanyak 7.871 orang, pengolah non konsumsi sebanyak 98 orang, pemasar konsumsi sebanyak 14.279 orang, pemasar non konsumsi sebanyak 20 orang. Selain itu, rata-rata pendapatan nelayan pada tahun 2013 sebesar Rp.2.115.300 per bulan. Rata-rata pendapatan nelayan buruh Rp.896.500 per bulan.

Tabel 2.117: Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Perikanan

URAIAN	JUMLAH (Orang)	
	2012	2013
Nelayan	19.564	32.618

Pembudidaya	5.896	5.214
Pengolah Konsumsi	7.890	7.871
Pengolah Non Konsumsi	108	98
Pemasar Konsumsi	15.290	14.279
Pemasar Non Konsumsi	20	20

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2014

Data Penyuluh perikanan PNS yang ada di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 berjumlah 109 orang, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2010 yang baru berjumlah 51 orang sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.118 : Data Penyuluh Perikanan PNS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Maluku Utara	-	12	7	7	7	33
2	Ternate	12	14	15	15	13	69
3	Tidore Kepulauan	13	10	11	11	11	56
4	Halmahera Barat	3	6	7	6	6	28
5	Halmahera Utara	-	1	1	11	1	14
6	Halmahera Tengah	6	8	7	7	7	35
7	Halmahera Selatan	14	14	13	14	14	69
8	Halmahera Timur	-	-	8	8	8	24
9	Kepulauan Sula	3	18	-	21	21	63
10	Pulau Morotai	-	-	4	5	5	14
11	Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	51	83	91	95	109	429

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2014

Berdasarkan data tahun 2013, dari 95 orang Penyuluh, sebanyak 3,15 persen berkualifikasi Terampil, 34,73 persen berkualifikasi Ahli dan 24,21 persen berkualifikasi Tenaga Teknis. Sementara sisanya belum mengikuti diklat kompetensi penyuluh perikanan.

Tabel 2.119: Data penyuluh perikanan PNS menurut Kompetensi yang telah mengikuti DIKLAT di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	Jlh Penyuluh Perikanan	Diklat					Keterangan
			Terampil	Ahli	Ahli Kelompok	Sertifikasi	Teknis	
1	Maluku Utara	7	-	7	-	-	6	Budidaya ikan
2	Ternate	15	1	8	-	-	3	ikan kerapu
3	Tidore Kepulauan	11	-	4	-	-	3	di banyuwangi
4	Halmahera Barat	6	1	3	-	-	2	Sda
5	Halmahera Utara	1	-	-	-	-	1	Sda

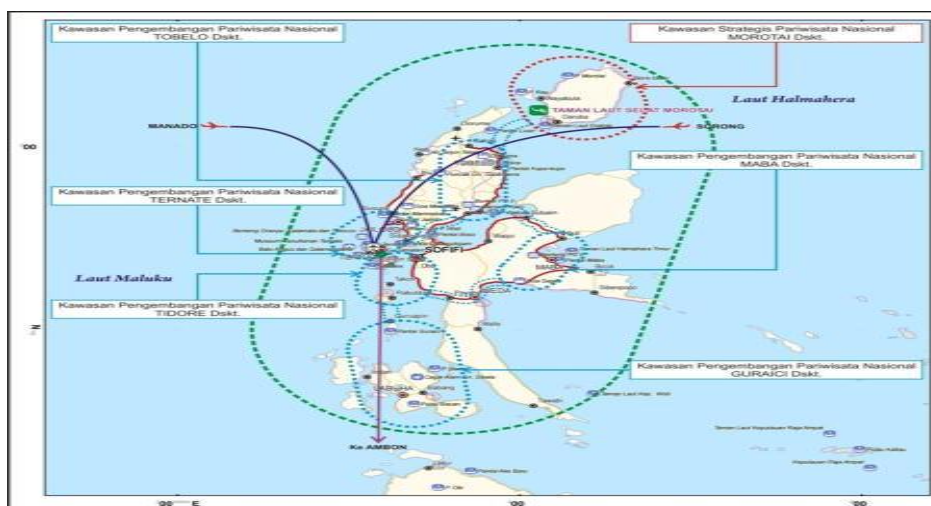
6	Halmahera Tengah	7	-	4	-	-	1	Sda
7	Halmahera Selatan	14	1	5	-	-	3	Sda
8	Halmahera Timur	8	-	3	-	-	-	Sda
9	Kepulauan Sula	21	-	3	-	-	2	Sda
10	Pulau Morotai	5	-	1	-	-	2	Sda
11	Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	Sda
	JUMLAH	95	3	38	-	-	23	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Maluku Utara, 2014

Pariwisata

Maluku Utara memiliki 809 buah pulau, terdiri dari 4 pulau besar dan 78 pulau-pulau kecil yang berpenghuni, 727 pulau-pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas lautan mencapai 79 persen dan pulau-pulau kecil tersebar membentang luas membentuk keindahan dan keragaman sumberdaya pesisir dan laut yaitu gugusan pulau-pulau kecil, pasir putih, terumbu karang, mangrove dan padang lamun. Kekayaan flora khususnya berkaitan dengan rempah-rempah dan flora khas lainnya di serta kekayaan fauna berupa beberapa spesies yang merupakan endemik di Maluku Utara seperti Cenderawasih Gagak (*Iycocorax pyrrhopterus*), Kakatua Putih (*kakatua alba*) dan burung yang termasuk langka di dunia yakni Burung Bidadari (*semioptera wallace*). Maluku Utara juga memiliki Taman Nasional, Cagar Alam dan Taman Laut serta sumber daya alam lainnya seperti gunung, danau/telaga, air terjun, air panas alami dan gua dll.

Sejarah kesultanan Moloku Kie Raha seperti kedaton, masjid kesultanan, museum, penyelenggaraan upacara adat, rumah adat dan peranannya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam perkembangan dan pembentukan bangsa Indonesia. Keragaman budaya, adat-istiadat dan bahasa daerah yang mencapai 30 bahasa daerah dan terdapat 1 bahasa daerah sudah punah dan 7 terancam punah. Terdapat juga peninggalan sejarah terkait perang dunia seperti benteng, bangkai kapal, meriam dan penyelenggaraan festival seperti Legu Gam, Festival Teluk Jailolo (FTJ) dan festival kuliner tapi dengan waktu penyelenggaraan yang terpaut jauh dan belum terkoordinasi.



Gambar 27:Maluku Utara Sebagai Destinasi Pariwisata Nasional Berdasarkan RIPPARNAS

Destinasi Halmahera – Morotai menjadi salah satu dari 50 Destinasi Kepariwisata Nasional, yang didalamnya memiliki 5 (Lima) Kawasan Pengembangan Pariwisata, yaitu:

1. Kawasan Ternate dan sekitarnya
2. Kawasan Tidore dan sekitarnya
3. Kawasan Guraici dan sekitarnya
4. Kawasan Tobelo dan sekitarnya
5. Kawasan Maba dan sekitarnya.

dan salah satunya merupakan kawasan strategis pariwisata, yaitu *Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai* dan sekitarnya.

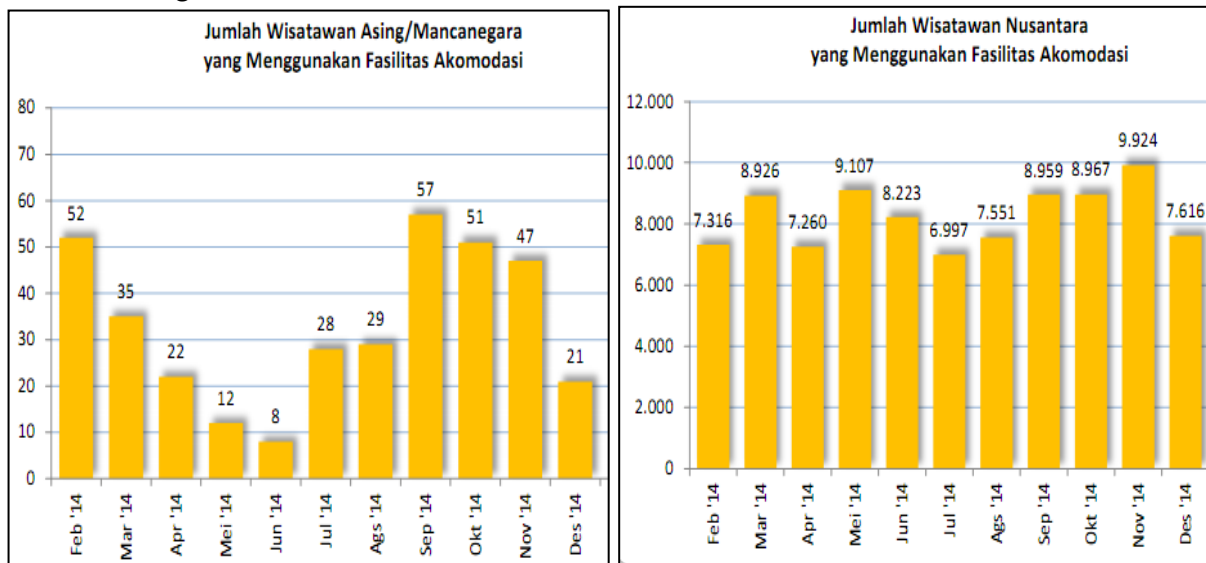
Perkembangan dunia wisata Maluku Utara tercermin dari banyaknya wisatawan yang mengunjungi daerah ini, baik domestik maupun mancanegara. Secara umum, terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Maluku Utara di tahun 2014 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 tercatat ada sebanyak 7.442 wisatawan, kemudian meningkat menjadi 8.277 wisatawan di tahun 2010, pada naik menjadi 10.557 wisatawan di tahun 2011, sementara pada tahun 2012 juga naik sebanyak 64,464 orang, hingga pada tahun 2014 sebanyak 91.208. Kunjungan wisatawan ke Maluku Utara di tahun 2014 masih didominasi wisatawan domestik.

Tabel 2.120: Banyaknya Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Maluku Utara 2008-2014

No	Tahun	Wisatawan		Jumlah
		mancanegara	domestik	
1.	2014	362	90.846	91.208
2.	2012	618	63.846	64.464
3.	2011	4.302	28.589	32.891
4.	2010	975	9.582	10.557
5.	2009	792	7.485	8.277
6.	2008	678	6.764	7.442

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2013

Pada tahun 2014, jumlah Wisatawan Mancanegara yang datang di Maluku Utara dan menggunakan fasilitas akomodasi mengalami puncaknya pada bulan Pebruari, September-Oktober-Nopember, sedangkan bulan Juni merupakan bulan kunjungan terendah bagi wisatawan mancanegara. Adapun untuk jumlah Wisatawan Nusantara yang datang dan menggunakan fasilitas akomodasi mengalami puncaknya pada bulan Mei dan Nopember, sedangkan bulan Juli merupakan bulan kunjungan terendah bagi wisatawan nusantara.



Gambar 28: Jumlah Wisatawan ke Maluku Utara pada Tahun 2014

Tingkat penghunian kamar sejak tahun 2012-2013 menunjukkan fluktuatif, baik untuk hotel berbintang maupun non bintang dan penginapan.

Tabel 2.121: Hunian Hotel Berbintang dan Non Bintang, Penginapan di Maluku Utara

Data Hunian	Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang dan Penginapan
-------------	------------------	----------------------------------

	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) (%)	30,49	29,24	33,88	28,45	24,12	27,99
Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (%)	37,82	39,85	53,32	28,54	27,15	34,6
Rata-rata Lama Menginap (hari)	1,95	1,68	2,19	2,02	1,82	2,25
Tamu Asing (hari)	1,96	1,96	3,07	2,33	3,69	4,3
Tamu Dalam Negeri (hari)	1,95	1,67	2,17	2,02	1,82	2,25
Jumlah Tamu (orang)	20.272	24.075	27.158	31.423	40.389	44.734
Tamu Asing (orang)	459	529	442	3	89	148
Tamu Dalam Negeri (orang)	19.813	23.546	26.716	31.420	40.300	44.586
Jumlah Malam Kamar Terpakai	27.659	25.799	32.349	49.359	52.854	66.426
Jumlah Malam Tamu Menginap	39.518	40.493	59.534	63.588	73.688	100.970
Rata-rata Tamu per Kamar (RTK) (orang)	1,84	1,57	1,43	1,28	1,39	1,52

Sumber www.bps.malut.go.id, 2014

Pertanian

Pembangunan Pertanian Provinsi Maluku Utara diimplementasikan dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni : **(1) Pendekatan Kawasan**, yang meliputi : Kawasan Pulau Halmahera, Kawasan Pulau Bacan - Obi, Kawasan Pulau Morotai, Kawasan Kepulauan Sula, dan Kawasan Pulau Ternate Tidore; **(2) Pendekatan Komoditas** yang meliputi : a. Prioritas sub sektor Tanaman Pangan adalah Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu dan Ubijalar; b. Prioritas sub sektor Hortikultura adalah Sukun, Pisang *Mulu Bebe*, Mangga Dodol, Jeruk, Durian, Bawang Merah dan Cabe; c. Prioritas sub sektor Perkebunan adalah Pala, Cengkeh, Kelapa, Kakao dan Jambu Mete; d. Prioritas sub sektor Peternakan adalah Daging Sapi Potong, Daging Kambing, Daging Ayam Buras, Daging Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, Telur Ayam Buras dan Telur Ayam Ras Petelur; **(3) Pendekatan Multigate System**, yang meliputi : Morotai – Tobelo; Jailolo – Sofifi; Labuha – Weda; Sanana – Mangoli; Ternate – Tidore.

Tabel 2.122: Lahan Potensial Provinsi Maluku Utara Pertanian Tanaman Pangan

No	Kabupaten/Kota	Lahan Potensial (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Basah/Sawah (Ha)	Perkebunan Rakyat (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)	Lain-Lain (Ha)
1	Halmahera Utara	602.388	590.103	12.285	68.008	457.675	96.207
2	Halmahera Selatan	991.056	982.506	8.550	41.683	40.879	110.133
3	Halmahera Timur	650.620	635.395	15.225	14.225	625.631	11.343
4	Halmahera Barat	159.308	150.938	8.370	22.253	89.796	45.716
5	Halmahera Tengah	227.665	221.065	6.600	18.911	190.719	15.506
6	Kepulauan Sula	389.232	385.732	3.500	79.503	275.776	33.742
7	Ternate	-	-	-	7.083	-	-

No	Kabupaten/Kota	Lahan Potensial (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Basah/Sawah (Ha)	Perkebunan Rakyat (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)	Lain-Lain (Ha)
8	Tidore Kepulauan	179.663	174.163	5.500	23.306	95.847	23.581
9	Morotai	-	4.360	4.360	-	-	-
Maluku Utara		3.199.932	3.144.262	64.390	274.972	1.776.323	336.228

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, 2013

Tanaman Pangan (Palawija)

Sub sektor tanaman pangan memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara, serta kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, walaupun tidak sebesar sub sektor perkebunan.

Tabel 2.123: Neraca NBM 2009 – 2011 (Ketersediaan Pangan dan Energi, Skor PPH)

No	Kelompok Pangan	2009			2010			2011		
		(Gr/kap/hr)	Kalori	Skor PPH	(Gr/kap/hr)	Kalori	Skor PPH	(Gr/kap/hr)	Kalori	Skor PPH
1	Padi-Padian	242,4	865	19,7	242,0	854,5	19,4	158,1	551,7	12,5
2	Umbi-Umbian	408,0	582	2,5	367,9	532,8	2,5	341,0	456,7	2,5
3	Pangan Hewani	374,8	263	23,9	552,4	391,1	24,0	436,9	376,1	24,0
4	Minyak dan Lemak	19,5	163	3,7	9,6	83,5	1,9	12,6	114,8	2,6
5	Buah/Biji Berminyak	598,5	1.139	1,0	595,9	1133,9	1,0	620,9	1181,4	1,0
6	Kacang-kacangan	22,1	94	8,5	23,9	100,4	9,1	15,4	66,1	6,0
7	Gula	8,1	30	0,7	6,7	24,4	0,6	5,9	21,6	0,5
8	Sayur dan Buah	45,8	14	3,2	45,6	14,2	3,2	85,1	33,6	7,6
9	Lain-Lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		1.719	3.148	63,2	1.844	3.135	61,7	1.676	2.802	56,8

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2012.

Luas panen dan produksi beberapa komoditas tanaman pangan (padi dan palawija) di Maluku Utara disajikan pada tabel berikut ini. Dimana terlihat bahwa luas panen tanaman pangan (terutama padi dan palawija) sejak tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif, kecuali Kedelai yang terus mengalami peningkatan. Demikian pula dari aspek produksi menunjukkan fluktuatif kecuali ubi kayu yang terus meningkat.

Tabel 2.124: Luas Panen Tanaman Palawija

Tahun	Luas Panen (Ha)						
	Padi	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Jagung	Kedele	Kacang Hijau	Kacang Tanah
2009	13,711	8,806	3,492	10,984	543	301	2,766
2010	16,251	9,011	3,180	10,813	787	272	3,682

2011	13.001	9.550	3.663	12.733	845	247	4.430
2012	17.794	9.407	3.836	11.074	978	251	4.824
2013	18.675	9.284	3.743	10.395	1.005	278	4.069

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2013 dan Maluku Utara Dalam Angka 2014. BPS

Tabel 2.125: Produksi Tanaman Palawija

Tahun	Produksi (Ton)						
	Padi	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Jagung	Kedele	Kacang Hijau	Kacang Tanah
2009	46.253	106.443	30.381	18.229	652	331	3.181
2010	55.401	109.033	27.666	20.546	944	299	4.235
2011	53.311	115.940	31.943	26.149	1.100	272	5.095
2012	65.687	116.515	34.660	25.543	1.303	275	5.745
2013	72.444	118.999	37.024	29.427	1.227	324	4.755

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2013 dan Maluku Utara Dalam Angka 2014. BPS

Perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang memberikan sumbangan PDRB terbesar bagi Provinsi Maluku Utara. Sub sektor ini banyak menghasilkan komoditas ekspor yang sudah dikenal sejak jaman penjajahan. Komoditas utama hasil perkebunan meliputi Kelapa/kopra, Kakao, Pala, Cengkeh dan Jambu Mete. Kelima komoditas utama ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Beberapa komoditas unggulan lain yang juga cukup banyak dijumpai : kopi, abaca/manila, gambir, gula aren/enau dan akar wangi.

Tabel 2.126: Ketersediaan Luas Areal Perkebunan

Tahun	Luas Areal (Ha)				
	Kelapa	Kakao	Pala	Cengkeh	Jambu Mete
2009	224,503	34,871	32,288	20,133	5,709
2010	224,431	35,846	35,419	20,130	5,668
2011	225,230	36,093	37,045	20,130	6,085
2012	227,574	32,273	39,691	20,348	6,320
2013	222,108	33,841	38,509	18,732	5,969

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2013 dan Maluku Utara Dalam Angka 2014. BPS

Tabel 2.127: Ketersediaan Produksi Perkebunan

Tahun	Produksi (Ton)				
	Kelapa	Kakao	Pala	Cengkeh	Jambu Mete
2009	220,623	12,232	4,412	5,515	1,311
2010	255,484	12,884	6,735	5,397	1,304

2011	255,095	13,325	7,179	5,158	1,324
2012	260,697	13,158	7,215	5,396	1,302
2013	251,265	14,047	6,495	4,504	1,317

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2013 dan Maluku Utara Dalam Angka 2014. BPS

Diketahui bahwa untuk berbagai komoditas perkebunan tersebut, luas areal pertanaman terbesar ada pada komoditi kelapa, diikuti kemudian oleh Pala, Kakao, Cengkeh dan Jambu Mete. Namun demikian, luas areal pertanaman komoditas perkebunan tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sementara itu dari aspek produksi, Kakao masih konsisten memperlihatkan peningkatan, sedangkan komoditas lainnya berkecenderungan fluktuatif.

Peternakan

Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.128: Populasi Ternak Provinsi Maluku Utara 2009-2013

Tahun	Populasi Ternak (ekor)					
	Sapi Potong	Kambing	Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2009	45.488	113.611	586.461	28.282	925.933	37.893
2010	105.345	87.987	487.797	32.311	79.458	41.765
2012	64.136	90.053	493.346	17.311	251.186	62.319
2013	69.136	104.243	613.801	34.360	428.766	52.056

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2013 dan Maluku Utara Dalam Angka 2014. BPS

Tabel 2.129: Produksi Ternak Provinsi Maluku Utara 2009-2013

Tahun	Produksi Ternak (Ton)					
	Sapi Potong	Kambing	Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2009	662.805	860.897	13.936.899	38.141	333.746	5.010
2010	273.573	29.183	818.303	11.231	1.021.161	2.222
2012	330.456	63.431	-	-	258.318	-
2013	331.156	63.431	916.990	26.570	338.831	41.900

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2013 dan Maluku Utara Dalam Angka 2014. BPS

Kehutanan

Potensi Kayu Maluku Utara di Hutan Negara, berdasarkan data Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, untuk kayu semua jenis sebesar 173.456.000 m³ dengan nilai Rp. 62,444,000,000,000 dan kayu jenis perdagangan sebesar 79.407.000 m³ dengan nilai Rp. 110,113,000,000,000,-.

Sedangkan Potensi hasil Hutan Non Kayu (Rotan) di Provinsi Maluku Utara menurut data Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Maluku Utara Tahun 2013 adalah sebesar 6.854.000 ton, dengan nilai Rp. 4.901.000.000,-. Hutan Produksi yang ada di Provinsi Maluku Utara sebagian besar merupakan areal eks HPH. Penutupan vegetasinya sebagian kecil berupa *virgin forest* dan sebagian besar areal bekas tebangan/*Log Over Area* (LOA) berupa hutan sekunder dan semak belukar akibat perladangan berpindah dan pencurian kayu serta kebun-kebun perambahan hutan.

Perizinan yang terkait produksi kayu antara lain Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) serta Hutan Tanaman. IUPHHK-HA pada Provinsi Maluku Utara yang masih aktif hingga 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.130: IUPHHK yang Aktif pada Tahun 2014

NO	NAMA IUPHHK	SK. IUPHHK		LUAS IZIN (Ha)	KABUPATEN
		No	Tanggal		
1	PT. BelaBerkatAnugrah	389/Menhut-II/06	12 Juli 2006	33,880	Halsel
2	PT. PolekoYubarsons	962/Kpts-II/99	14 Oktober 1999	86,599	Halsel
3	PT. Surya KiranaDutamas	630/Menhut-II/2009	15 Oktober 2009	66,230	Halsel
4	PT. Telaga Bhakti Persada	372/Menhut-II/09	23 Juni 2009	63,405	Halsel

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2015

Produksi Hasil Hutan Kayu di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 sebesar 90,337.22 m³ dan pada tahun 2014 sebesar 120,621.56 m³ yang di produksi oleh IUPHHK-HA dan IPK yang masih aktif sampai tahun 2014. Jumlah perizinan pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku saat ini ada 57 ijin dengan luas 24,321.49 Ha yang terdiri dari Ijin untuk operasi Produksi 32 ijin seluas 3,862.10 Ha dan ijin untuk eksplorasi 24 unit seluas 20,459.39 dan satu ijin untuk revisi jalan.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi yang digunakan di Provinsi Maluku Utara terutama adalah bahan bakar minyak (BBM), LPG dan listrik. Berdasarkan data Pertamina, penggunaan BBM meningkat dari 248 ribu kl pada tahun 2007 menjadi 263 ribu kl pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata 1,9 persen per tahun. Pada tahun 2010 pangsa terbesar

adalah penggunaan minyak solar dengan pangsa 52 persen, diikuti oleh premium (26 persen), minyak tanah (18 persen), dan avtur (4 persen). Konsumsi minyak bakar terus berkurang, pada tahun 2007 masih digunakan sebesar 600 kl dan tahun 2010 sudah tidak digunakan lagi.

Saat ini belum ada kewajiban untuk mengkonversikan minyak tanah ke LPG di sektor rumah tangga. Meskipun demikian penggunaan minyak tanah relatif tidak meningkat, sedangkan penggunaan LPG meningkat sangat pesat. Penggunaan LPG meningkat dari 57 ribu kg pada tahun 2007 menjadi 420 ribu kg pada tahun 2010, atau meningkat rata-rata sebesar 94,1 persen per tahun.

Distribusi BBM untuk Provinsi Maluku Utara dilayani oleh Pertamina UPMS VIII Jayapura. Pertamina UPMS VIII melayani penyediaan dan distribusi BBM yang meliputi 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Sistem kelistrikan di Provinsi Maluku Utara Di Maluku Utara pada Tahun 2012 terdapat 169 unit pembangkit dengan 57.866 Kwh Daya Terpasang dan 90.431 Kwh Daya Mampu yang terdiri dari 7 sistem kelistrikan yang cukup besar yaitu sistem Ternate, Tobelo, Jailolo-Sofifi (Halmahera Barat), Soa-Siu (Tidore), Bacan, Sanana dan Daruba. Selain itu juga terdapat 21 unit pusat pembangkit kecil tersebar. Beban puncak gabungan sistem-sistem kelistrikan di Provinsi Maluku Utara saat ini sekitar 42,7 MW, dipasok oleh PLTD tersebar yang terhubung langsung ke sistem distribusi 20 kV. Sistem terbesar di Maluku Utara adalah sistem Ternate dimana sistem ini memiliki pasokan pembangkit sekitar 35 MW kapasitas terpasang yang terdiri dari pembangkit sendiri 14,8 MW dan mesin sewa 20,3 MW.

Tabel 2.131: Kapasitas Pembangkit Terpasang di Maluku Utara

No	Sistem Isolasi	Jenis Pembangkit	Kapasitas (MW)		Beban Puncak (MW)
			Terpasang	Daya Mampu	
I	Sistem Ternate				
	1. Kayu Merah	PLTD	14,8	4,9	
	2. Sewa Mesin	PLTD	20,3	16,0	
	Total		35,1	20,9	16,0
II	Sistem Tobelo				
	1. Tobelo	PLTD	7,8	5,5	
	2. Sewa Mesin	PLTD	2,4	2,0	
	Total		10,2	7,5	5,0
III	Sistem Jailolo-Sidangoli-Sofifi				
	1. Jailolo-Sidangoli	PLTD	4,6	2,5	2,2
	2. sofifi	PLTD	1,2	0,4	2,1

No	Sistem Isolasi	Jenis Pembangkit	Kapasitas (MW)		Beban Puncak (MW)
			Terpasang	Daya Mampu	
	3. Sewa Mesin	PLTD	3,2	2,3	
	Total		9,0	5,2	4,3
IV	Sistem Soa Sio				
	1. Soa Sio	PLTD	4,9	2,8	
	2. Sewa Mesin	PLTD	3,2	1,5	
	Total		8,1	4,3	3,5
V	Sistem Bacan				
	1. Bacan	PLTD	3,0	0,8	
	2. Sewa Mesin	PLTD	2,8	2,0	
	Total		5,8	2,8	2,6
VI	Sistem Sanana				
	1. Sanana	PLTD	1,9	0,0	
	2. Sewa Mesin	PLTD	5,6	2,6	
	Total		7,5	2,6	1,9
VII	Sistem Daruba				
	Daruba	PLTD	2,9	1,5	1,2

Sumber: RUPTL PLN

PT PLN (Persero) disamping mengembangkan pembangkit listrik konvensional juga mengembangkan pembangkit menggunakan energi terbarukan, salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat di Kabupaten Pulau Morotai. PLTS Morotai mempunyai kapasitas 600 kilo Watt peak (kWp) dengan luas lahan untuk PLTS ini mencapai 3 Ha. Dengan pengoperasian PLTS ini mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) rata-rata sebesar 800 liter per hari atau setara dengan penghematan senilai Rp. 2,5 miliar per tahun.

Pada tahun 2013 jumlah pelanggan PLN adalah 159.931 yang berarti meningkat bila dibanding tahun 2012 yang sebanyak 141.246 pelanggan, dengan Power Terjual sejumlah 167.435.830 Kwh yang juga meningkat bila dibanding tahun 2012 yang sebesar 114.379.330 Kwh. Pengguna terbesar di tahun 2013 adalah pelanggan rumah tangga sebanyak 92,27 persen, selanjutnya bisnis 4,13 persen, sosial 2,37 persen, pemerintahan 1,22 persen dan industri hanya 0,01 persen.

PODES 2014 menggambarkan bahwa persentase desa/kelurahan/UPT yang telah ada keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN terdapat 65,64 persen, sementara persentase desa/kelurahan/UPT yang belum memiliki penerangan di jalan utama mencapai 62,12 persen. Data dari Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara bahwa tahun 2013 rasio elektrifikasi telah mencapai 72,34 persen.

Energi Air

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya (*resources*) penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dan instalasi. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Potensi energi air di Provinsi Maluku Utara terdapat di beberapa wilayah, seperti tercantum Tabel berikut ini:

Tabel 2.132: Potensi Energi Air di Provinsi Maluku Utara

Daerah Kabupaten	Lokasi	Asal Energi Air	Debit	Estimasi Head , M	Keterangan
Halmahera Utara	Desa Ngoali dan Popan , Kecamatan Kao	Sungai Kao	10 m ³ / detik	-	Skala mini-hidro, perlu studi lanjut
	Soato Baru, Kecamatan Galela	Sungai Ira	400 Liter / detik	6.4 m	Output 15 kW, Mini Hidro, perlu studi lanjut
	Desa Trans. SP II, Kecamatan Morotai Selatan	Sungai Mangere	150 Liter / detik	19.1 m	Output 29 kW
	Posi Posi, Kecamatan Morotai Selatan Barat	-	-	-	Skala mini-hidro, perlu studi lanjut
	Tj. Sopi dan Ciu, Kecamatan Morotai Utara	-	-	-	Skala mini-hidro, perlu studi lanjut
Halmahera Timur	Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan	Sungai Waci	2.200 liter/ detik	22 m	Output 343 kW, Mini Hidro , perlu studi lanjut
Kepulauan Sula	Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Barat	Sungai Kalimat	300 liter/ detik	9.6 m	Output 17 kW, Mini Hidro
	Desa Tabona, Taliabu Barat	Sungai Kilong	400 Liter / detik	13 m	Output 23.5 kW, Mini Hidro, (rencana)
Kota Tidore	Desa Payahe, Kecamatan Oba	Sungai Ruba-ruba	380 liter/ detik	18 m dan 124 m	Ouput 275 kW,Mini Hidro
Halamahera Selatan	Desa Bibinoi	Air terjun Gofto	350 Liter /detik	20 m	Ouput 2 X 50 KVA, Perlu studi lanjut

Sumber : Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Maluku Utara 2010-2030

Energi Biomassa

Biomassa adalah bahan bakar nabati atau organik baik berasal dari manusia dan aktivitasnya, hewan maupun tumbuhan. Teknologi Bioenergi memungkinkan biomasa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik dengan berbagai kapasitas. Teknologi bioenergi adalah teknologi yang menggunakan sumber daya biomasa terbarukan untuk menghasilkan sejumlah produk energi terkait, antara lain listrik, bahan bakar cair, padat dan gas, panas, material kimia dan sebagainya.

Tabel 2.133: Potensi Energi Biomass di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Lokasi	Sumber Bahan Baku	Potensi Energi	Keterangan
Halmahera Utara	Kecamatan Loloda Utara, Galela dan wilayah Pulau Morotai	Limbah Kelapa	Batok Kelapa : 4000 kCal/Kg Sabut Kelapa : 1750 kCal/Kg	Limbah Kelapa berupa batok dan sabut kelapa
Kepulauan Sula	Kecamatan Sanana, Taliabu Timur, Industri Taliabu Timber	Limbah Kelapa dan limbah pengolahan kayu	Batok Kelapa : 4000 kCal/Kg Sabut Kelapa : 1750 kCal/Kg	Limbah Kelapa berupa batok dan sabut kelapa, Limbah pengolahan kayu
Halmahera Timur	Kecamatan Maba dan Wasile	Limbah Kelapa dan limbah pengolahan kayu	Batok Kelapa : 4000 kCal/Kg Sabut Kelapa : 1750 kCal/Kg	Limbah Kelapa berupa batok dan sabut kelapa, Limbah pengolahan kayu
Tidore Kepulauan	Kecamatan Oba dan Oba Utara	Limbah Kelapa dan limbah pengolahan kayu	Batok Kelapa : 4000 kCal/Kg Sabut Kelapa : 1750 kCal/Kg	Limbah Kelapa berupa batok dan sabut kelapa, Limbah pengolahan kayu

Sumber : Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Maluku Utara 2010-2030

Energi Angin

Potensi energi angin di Maluku Utara secara umum masih kecil karena kecepatan angin masih rendah yaitu antara 3 m/detik pada ketinggian 20-30 m dari permukaan tanah. Walaupun kecepatan angin rendah, namun sudah memadai untuk pembangkit listrik skala kecil. Salah satu kendala utama pada pembangkit listrik tenaga angin adalah sulitnya mendapatkan kecepatan angin yang konstan sepanjang tahun.

Tabel 2.134: Daerah yang Berpotensi Terdapat Energi Angin di Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Lokasi	Keterangan
Pulau Morotai	Tanjung Gila dan Tanjung Sopi, Kecamatan Loloda Utara dan Galela	
Kepulauan Sula	Tersebar kecuali di daerah Taliabu Barat yang berbukit dan bergunung	Pada ketinggian 24 m kecepatan sekitar 3 m/detik
Halmahera Timur	Daerah pesisir pada musim angin timur	
Halmahera Barat	Daerah pesisir pada musim angin barat	

Sumber : Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Maluku Utara 2010-2030

Energi Panas Bumi

Potensi panas bumi di daerah Maluku Utara sebenarnya cukup besar, namun masih memerlukan studi lebih lanjut karena baru dalam proses pengukuran. Potensi energi panas bumi di Provinsi Maluku Utara tersebar di beberapa kabupaten/kota. Berikut data mengenai letak dan besar potensi energi panas bumi.

Tabel 2.135 : Potensi Panas Bumi di Maluku Utara

Lokasi	Deskripsi Panas Bumi	Tahap Penyelidikan	Lingkungan	Potensi dan Pemanfaatan
Mamuya Halmahera Utara	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 10 km ² , dengan T-reservoir = 260°C	Penyelidikan semi-rinci geologi, geokimia	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±5 Mwe untuk PLTP skala kecil
Ibu Halmahera Barat	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 2 km ² , dengan T-reservoir = 210°C	Penyelidikan pendahuluan geologi, geokimia	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±25 Mwe untuk PLTP
Akelamo Halmahera Utara	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 2 km ² , dengan T-reservoir = 210°C	Penyelidikan pendahuluan geologi, geokimia	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±25 Mwe untuk PLTP
Jailolo Halmahera Barat	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 10 km ² , dengan T-reservoir = 260°C	Penyelidikan Rinci geologi, geokimia dan geofisika	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±42 Mwe (terduga) untuk PLTP
Kie Besi Halmahera Selatan	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 10 km ² , dengan T-reservoir = 260°C	Penyelidikan pendahuluan geologi, geokimia dan geofisika	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±25 Mwe (spekulatif) untuk PLTP skala kecil
Akesahu Tidore Kepulauan	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 10 km ² , dengan T-reservoir = 260°C	Penyelidikan Rinci geologi, geokimia dan geofisika	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±15 Mwe (terduga) untuk PLTP skala kecil
Indari Halmahera Selatan	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 10 km ² , dengan T-reservoir = 260°C	Penyelidikan pendahuluan geologi, geokimia	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±25 Mwe (spekulatif) untuk PLTP skala kecil
Labuha Halmahera Selatan	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 10 km ² , dengan T-reservoir = 260°C	Penyelidikan pendahuluan geologi, geokimia	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±25 Mwe (spekulatif) untuk PLTP skala kecil
Songa Wayaua Halmahera Utara	Batuan ubahan dan mata air panas umumnya tipe asam sulfat bersuhu 38-40 °C sebagian bertipe klorida. luas daerah prospek (anomali tahanan jenis rendah dan Hg) sekitar 10 km ² , dengan T-reservoir = 260°C	Penyelidikan pendahuluan geologi, geokimia	Struktur kaldera, vulkanik kuartier, sesar normal dan kekar sangat intensif	Potensi energi ±110 Mwe (terduga) untuk PLTP

Sumber : Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Maluku Utara 2010-2030

Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian dapat dilihat pada indikator antara lain : capaian ekspor – import. Ekspor-Import Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Ekspor Import Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.136: Perkembangan Nilai Ekspor _Impor Provinsi Maluku Utara 2009 – 2013

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Ekspor	115,64 (Juta US\$)	293,54 (Juta US\$)	608,48 (Juta US\$)	551,19 (Juta US\$)	730,63 (Juta US\$)
Impor	251,28 (Ribuan US\$)	17,250 (Juta US\$)	45,97 (Juta US\$)	10,03 (Juta US\$)	4,67 (Juta US\$)

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Diketahui bahwa nilai ekspor pada tahun 2009 US\$ 115,64 Juta, Tahun 2010 sebesar US\$ 293,54 Juta, pada tahun 2011 sebesar US\$ 608,48 Juta, Tahun 2012 sebesar US\$ 551,19 Juta, dan tahun 2013 sebesar US\$ 730,63 Juta. Sedangkan Import pada tahun 2008 sebesar US\$ 36,582 juta, pada tahun 2009 sebesar US\$ 251, 28 ribu, tahun 2010 sebesar US\$ 17,250 Juta, tahun 2011 sebesar US\$ 45,97 Juta, tahun 2012 menurun menjadi US\$ 10,03 Juta, dan pada tahun 2013 sebesar US\$ 4,67 Juta.

Tabel 2.137: Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Provinsi Maluku Utara 2011-2013

Kode Industri	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja
15.Makanan dan Minuman	935	4.240	808	3.695	1205	4097
16.Tembakau	0	0	0	0	0	0
17.Tekstil	7	51	7	23	9	28
18.Pakaian Jadi	157	405	90	251	0	0
19.Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0	0	0	0	0	0
20.Kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture) dan barang-barang anyaman dari rotan bambu dan sejenisnya	207	634	143	634	364	1934
21.Kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya	0	0	0	0	0	0
22.Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman	99	378	74	231	74	231
23.Batu bara, pengilangan minyak bumi, pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir	0	0	0	0	0	0
24.Kimia dan bahan-bahan dari kimia	8	98	8	51	11	75
25.Karet, barang dari karet dan barang dari plastic	6	59	6	59	6	59
26.Barang galian bukan logam	113	382	113	382	113	382
27.Logam dasar	0	0	0	0	0	0
28.Barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya	8	21	8	21	16	48
29. Mesin dan perlengkapannya	261	704	253	676	219	668
30.Mesin dan Peralatan Kantor, akuntansi dan pengolahan data	0	0	0	0	0	0
31.Mesin Listrik lainnya dan perlengkapannya	0	0	0	0	0	0
32.Radio, televisi dan peralatan komunikasi, serta perlengkapannya	0	0	0	0	0	0
33.Peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng	0	0	0	0	0	0
34.Kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
35.Alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih	14	84	14	73	14	69
36.Furniture dan industri pengolahan	255	909	222	722	412	1290

Kode Industri	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja
lainnya						
37.Daur ulang	0	0	0	0	0	0
Maluku Utara	2.070	7.965	1.744	6.765	2443	8881

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Sektor industri di Provinsi Maluku Utara belum berkembang pesat seperti sektor pertanian serta sektor perdagangan hotel dan restoran. Meski demikian sektor industri diharapkan dapat berkembang pesat dengan digalakkannya program Kredit Usaha Rakyat yang dapat membantu memberikan modal usaha. Pada Tahun 2013 Provinsi Maluku Utara memiliki sebanyak 2.443 perusahaan industri dengan jumlah tenaga kerja produktif sebanyak 8.881 orang.

Tabel 2.138: Jumlah Pasar Tradisional & Pedagang di Provinsi Maluku Utara

Kab./Kota	Jumlah Pasar		Jumlah Pedagang		Jumlah Omzet (Rp)
	2013	2014	L	P	
Kota Ternate	10	9	828	1381	9,609,450,000
Tidore Kepulauan	11	10	519	532	4,486,050,000
Halmahera Tengah	14	13	133	182	1,038,200,009
Halmahera Timur	13	13	358	1530	380,000,000
Halmahera Barat	8	8	601	570	1,729,850,570
Halmahera Selatan	7	7	885	1643	3,665,600,000
Halmahera Utara	7	7	217	403	1,798,000,000
Pulau Morotai	3	10	73	83	891,740,000
Kepulauan Sula	8	8	289	528	1,540,045,000
Prov. Maluku Utara	81	85	3903	6852	6,138,935,579

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2014

Pasar merupakan salah satu indikator hidupnya perekonomian disuatu tempat/daerah, memiliki tiga fungsi utama, yaitu distribusi, fungsi pembentukan harga dan fungsi promosi. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Berikut data terkait pasar permanen dan semi permanen menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.139: Pasar Permanen dan Semi Permanen Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Pasar	Tahun Operasional	Status (P/S/D/A)	Jumlah Pedagang		Luas Area (M ²)	KOMODITI
					L	P		
1	Halmahera Barat	Guaemaadu	1994	P	155	100	2500	Hasil Pertanian & Sembako
		Akelamo	2003	P	101	179	12000	Hasil Pertanian & Sembako
		Ibu	1994	P	143	92	10000	Hasil Pertanian & Sembako
		Sidangoli	1994	P	101	78	15000	Hasil Pertanian & Sembako
		Kedi	1995	P	41	30	400	Hasil Pertanian & Sembako
		Susupu	1994	P	15	26	-	Hasil Pertanian & Sembako
		Akelamo Kao	1995	P	25	35	200	Hasil Pertanian & Sembako
		Bataka	0	P	20	30	100	Hasil Pertanian & Sembako
2	Halmahera Tengah	Patani	-	-	53	61	1000	Hasil Pertanian & Sembako

No.	Kabupaten/Kota	Pasar	Tahun Operasional	Status (P/S/D/A)	Jumlah Pedagang		Luas Area (Ha)	KOMODITI
		Malofo	2004	-	81	93	2500	Hasil Pertanian & Sembako
		Kapaleo	2004	-	83	97	3000	Hasil Pertanian & Sembako
		Weda	2005	-	99	105	4000	-
		Gebe	-	-				-
		Sagea	-	-				-
		Kipae	-	-	55	57	2365	-
		Gemia	-	-	21	35	560	-
		Wairoro	-	-				-
		Lelilef	-	-				-
		Banemo	-	-	39	47	550	-
		Kluting Jaya	-	-				-
3	Halmahera Selatan	Bobane Indah	-	-			266	-
		Labuha	2002	-	525	975	40000	Hasil pertanian & Sembako
		Babang	1980	-	266	493	500	Hasil pertanian & Sembako
		Saketa	1992	-	350	53	98	Hasil pertanian & Sembako
		Guruaping	1982	-	6	10	350	Hasil pertanian & Sembako
		Madopolo	1983	-	3	5	500	Hasil pertanian & Sembako
		Dukulamo	1999	-	16	29	100	Hasil pertanian & Sembako
4	Halmahera Utara	Mafa	1980	-	18	33	100	Hasil pertanian & Sembako
		Gurah	1980	-	53	98	8000	Hasil pertanian & Sembako
		Ikan Tobelo	1973	-	53	98	10000	Hasil pertanian & Sembako
		Kao	1997	-	35	65	2500	Hasil pertanian & Sembako
		Ngofa Kiaha	1995	-	7	13	6500	Hasil pertanian & Sembako
		Dukulamo	1980	-	11	20	1500	Hasil pertanian & Sembako
5	Kepulauan Sula	Tua (Dufa-dufa)	1980	-	14	26	1500	Hasil pertanian & Sembako
		Bambu	2000	D	14	26	1000	Hasil pertanian & Sembako
		Waitina	1981	P	35	65	5000	Hasil pertanian & Sembako
		Kabau	1980	P	53	98	5000	Hasil pertanian & Sembako
		Dofa	1980	P	70	130	10000	Hasil pertanian & Sembako
		Loseng	1981	P	53	98	8000	Hasil pertanian & Sembako
		Bobong	1985	P	49	91	6000	Hasil pertanian & Sembako
		Gela	2009	P				Hasil pertanian & Sembako
6	Kota Ternate	Fuata	2010	P				Hasil pertanian & Sembako
		Sayur Gamalama	2004	P	105	111	-	Sayur Mayur
		Kie Raha Gamalama	2003	P	56	85	-	Pakaian/Aksesoris
		Daging Waserda	2009	P	49	61	-	Daging
		Ikan Gamalama	2004	P	57	65	-	Ikan
		Dufa-Dufa	2003	P	102	112		Sayur Mayur/Ikan
		Bastiong	2009	P	117	129	1374.74	Sayur Mayur/Ikan
		Pasar Seribu Kios	2010	P	112	127		Campuran
7	Kota Tidore Kepulauan	Higienis Gamalama	2012	P	155	169		Campuran
		Sasa	2012	P	-	-		tidak dimanfaatkan
		Sarimalaha	2007	P	60	76	2500	Sembako/Sayur Mayur
		Gosalaha	2005	P	36	52	2000	Hasil pertanian & sembako
		Toloa	1970	P	-	-	-	Tidak digunakan
		Rum	-	P	15	45	2500	Sembako/Sayur Mayur
		Gita	-	P	5	15	10	Sembako/Sayur Mayur
		Payahe	1970	P	5	15	780	Sembako/Sayur Mayur
		Galala	2007	P	20	30	950	Sembako/Sayur Mayur
		Somahode	1984	P	-	-	770	Sembako/Sayur Mayur
		Loleo	2005	P	8	10	600	Sembako/Sayur Mayur
		Lola	2007	P	-	-	800	Sembako/Sayur Mayur
8	Halmahera Timur	Tului	2005	P	61	114	150	Sembako/Sayur Mayur
		Bicoli	2005	P	20	100	10000	Sembako/Sayur Mayur
		Soasangaji	2007	P	35	145	10000	Sembako/Sayur Mayur
		Mabapura	2008	D/A	10	25	2500	Sembako/Sayur Mayur
		Buli	2005	P	50	200	2500	Sembako/Sayur Mayur
		Ikan Buli	2005	P	30	20	200	Sayur Mayur/Ikan
		Akedaga	2011	P	40	260	10000	Sembako/Sayur Mayur
		Wayamli	2005	S	5	15	200	Sembako/Sayur Mayur
		Subaim	2009	S	18	70	10000	Sembako/Sayur Mayur
		Binagara	2006	D/A	20	65	2500	Sembako/Sayur Mayur
		Cemara Jaya	1986	P	25	200	2500	Sembako/Sayur Mayur
		Bumi Restu	1985	P	50	190	200	Sembako/Sayur Mayur
		Daka Ino	1987	P	30	180	10000	Sembako/Sayur Mayur
		Tutuling Jaya	1988	P	25	60	10000	Sembako/Sayur Mayur

No.	Kabupaten/Kota	Pasar	Tahun Operasional	Status (P/S/D/A)	Jumlah Pedagang		Luas Area (m ²)	KOMODITI
9	Pulau Morotai	Gotalamo	2011	P	64	36	-	Hasil pertanian & sembako
		Sayur 01 dan 02 Daruba	2012	P	4	32	-	Hasil pertanian & sembako
		Ikan Daruba	2011	P	0	0	-	Ikan

Sumber : Dinas Perindag Prov. Maluku Utara 2014

Selain pasar yang bersifat permanen dan semi permanen terdapat juga pedagang kaki lima, yaitu yang melakukan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain sebagainya. Berikut data terkait pedagang kaki lima menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.140: Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	TOTAL
Halmahera Barat	601	570	1,171
Halmahera Timur	358	1,530	1,888
Halmahera Utara	217	403	620
Halmahera Selatan	885	1,643	2,528
Tidore Kepulauan	217	365	582
Kepulauan Sula	273	507	780
Ternate	753	859	1,612
Halmahera Tengah	431	495	926
Pulau Morotai	68	68	136
Provinsi Maluku Utara	3,803	6,440	10,243

Sumber : Disperindagkop Prov. Maluku Utara, 2014

Transmigrasi

Transmigrasi telah memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan dan dukungan terhadap pengembangan wilayah, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Program transmigrasi di Provinsi Maluku Utara dimulai sejak Pelita III sejak saat itu, hingga tahun 2011 telah dibangun 51 UPT dengan 14.291 KK dan 55.238 jiwa. Kondisi hingga tahun 2014, sebanyak 8 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang dibina, berada di 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.025 KK yang membutuhkan pelayanan dan pembinaan, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.141: Penempatan Transmigrasi berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Hingga Tahun 2011 dan UPT BINA Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	KK	Jiwa	UPT	UPT BINA TAHUN 2014		
					Nama UPT	Tahun	KK
1	Halmahera Utara	3.315	12.798	1	-	-	-

2	Halmahera Timur	4.670	19.107	15	Patlian SP 4	2011/2012	169
3	Halmahera Selatan	2.320	8.390	7	Fida SP 6	2008/2009	108
4	Halmahera Barat	495	1.801	2	-	-	-
5	Halmahera Tengah	1.991	7.426	9	Sagea Waleh SP 1 Sagea Waleh SP 2	2008/2009 2011/2012	185 200
6	Kepulauan Sula	600	2.267	2	-	-	-
7	Ternate	-	-	-	-	-	-
8	Tidore Kepulauan	400	1.444	2	Kosa Sp 1 Maidi SP 1 Maidi SP 2	2013 2009/2010 2011/2012	- 200 200
9	Pulau Morotai	500	2.005	3	Daruba SP 3	2010/2011	148
Provinsi Maluku Utara		14.291	55.238	51	8 UPT		1.025

Sumber : Disnakertrans, 2011 dan 2014

Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Sekretariat Daerah

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya - upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inspektorat

Hingga tahun 2014 jumlah auditor di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut; Auditor Pertama (anggota Tim) sebanyak 19 Orang, Auditor Muda (Ketua Tim) sebanyak 21 orang dan Auditor Madya (Pengendali teknis) sebanyak 4 orang. Sedangkan hasil penilaian BPK atas kinerja Pemerintah Daerah terkait pelaporan Keuangan dan Aset daerah hingga saat ini masih *disclaimer*, sehingga memerlukan kerja keras guna memperoleh opini WDT (Wajar Dengan Pengecualian) bahkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam sistem perencanaan nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Utara 2005-2025 dituangkan dalam Perda nomor 3 tahun 2008. Dokumen jangka panjang tersebut telah dibagi dalam empat tahapan pembangunan yaitu tahap I dengan tema Penciptaan Iklim yang Kondusif, tahap II dengan tema Pemantapan, tahap III dengan tema pengembangan dan tahap IV merupakan tahap penciptaan daya saing yang berkelanjutan. RPJMD yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan III tersebut.

Lemahnya koordinasi, evaluasi, monitoring, pelaporan serta lemahnya penyediaan data dan informasi pembangunan baik di tingkat pencapaian dan penganggaran program perencanaan jangka menengah maupun pada tingkat kegiatan pada Renja dan Renstra SKPD memperlihatkan masih lemahnya kualitas perencanaan. Berdasarkan dokumen *Asia Competitiveness Institute* (ACI) yang dilansir tahun 2014, Peringkat Perencanaan Pemerintah dan Institusi Provinsi Maluku Utara berada di urutan terakhir atau 33 dari 33 Provinsi, di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perbedaan skor yang cukup besar sehingga penting bagi Maluku Utara untuk melakukan perbaikan yang signifikan.

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Aparatur yang maju dan mandiri, pengembangan aparatur Provinsi Maluku Utara diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang besar apalagi dengan kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta distribusi yang tidak merata, dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan di Provinsi Maluku Utara apabila tidak dimanajementi dengan baik. Berdasarkan besaran organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, terdapat sebanyak 791 jabatan struktural menurut jenjang eselonering.

Tabel 2.142: Jumlah Jabatan Organisasi Perangkat Daerah

No	Unit Kerja	Eselonering				Jumlah
			II	III	IV	

		I.b	A	B	A	B	A	B	
1.	Sekretariat Daerah	1	7	8	27	-	79	-	122
2.	Sekretariat Dewan	-	1	1	3	3	11	3	22
3.	Dinas Daerah	-	13	-	62	-	222	-	297
4.	Lembaga Teknis Daerah	-	13	2	55	4	147	6	227
5.	Lembaga Lain	-	1	-	3	-	6	-	10
6.	UPT Dinas	-	-	-	21	-	92	-	113
Jumlah		1	35	11	171	7	557	9	791

Sumber BKD Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

Pemerintah Provinsi Maluku Utara didukung sumber daya aparatur sebanyak 3.716 PNS. Berdasarkan golongan, jumlah PNS lebih dominan golongan III sebesar 59,98 persen dan golongan II sebesar 30.87 persen.

Tabel 2.143: Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur

No	Golongan	Jumlah	Presentase
1	I	9	0.24
2	II	1147	30.87
3	III	2229	59.98
4	IV	331	8.91
JUMLAH		3716	100

Sumber Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara menurut kualifikasi pendidikan menunjukkan bahwa sebanyak 50,78 persen berpendidikan S1, sedangkan S2 5.01 persen dan S3 hanya 0.05 persen.

Tabel 2.144: Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PNS	PERSENTASE
1	SD/MIN	2	0.05
2	SLTP	11	0.30
3	SLTA	1156	31.11
4	Diploma I	6	0.16
5	Diploma II	33	0.89
6	Diploma III	398	10.71
7	Diploma IV	35	0.94
8	S-1	1887	50.78
9	S-2	186	5.01
10	S-3	2	0.05
JUMLAH		3716	

Sumber Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

Dalam upaya peningkatan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara harus didukung oleh ketersediaan Tenaga Pengajar atau Widyaswara yang hingga saat ini tahun 2014 baru berjumlah 6, atau meningkat dari 2 orang di tahun 2011 dan 1 orang di tahun 2009.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Secara spesifik, daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia yang diuraikan sebagai berikut.

Kemampuan Ekonomi Daerah

Berdasarkan laporan *Asia Competitiveness Institute* (ACI) tahun 2014, Provinsi Maluku Utara berada di urutan 33 dari 33 Provinsi di Indonesia, yang berarti juga termasuk dalam kelompok 10 provinsi dengan daya saing terendah. Peringkat ini adalah peringatan bagi Maluku Utara untuk senantiasa berupaya lebih keras untuk naik ke peringkat lebih tinggi di masa yang akan datang.

Tabel 2.145: Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia

Peringkat	Provinsi	Skor	Peringkat	Provinsi	Skor
1	DKI Jakarta	0.2901	18	Kalimantan Barat	-0.2756
2	Jawa Timur	-0.0754	19	Sumatera Utara	1.8152
3	Kalimantan Timur	-0.5685	20	Kep.Bangka Belitung	0.3731
4	Jawa Tengah	-0.0109	21	Sulawesi Tengah	-0.587
5	Jawa Barat	0.1672	22	Nusa Tenggara Barat	-0.2234
6	DI. Yogyakarta	-0.0179	23	Maluku	-0.9576
7	Sulawesi Selatan	-0.7013	24	Lampung	0.4884
8	Kalimantan Selatan	-0.3733	25	Sulawesi Barat	-0.7833
9	Riau	1.326	26	Papua Barat	-1.5634
10	Kepulauan Riau	0.3109	27	Jambi	1.083
11	Sulawesi Utara	-0.5773	28	Gorontalo	-0.7549
12	Banten	-0.1676	29	Sulawesi Tenggara	-0.3739
13	Aceh	3.358	30	Bengkulu	0.6684
14	Bali	-0.2179	31	Papua	-1.7075
15	Kalimantan Tengah	-0.3553	32	Nusa Tenggara Timur	-0.2594
16	Sumatera Selatan	1.7047	33	Maluku Utara	-1.2268
17	Sumatera Barat	15566			

Sumber: *Asia Competitiveness Institute* (ACI) tahun 2014

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dari tahun 2009 hingga 2013 cenderung meningkat dari Rp. 479.704 dengan rasio pengeluaran per jumlah rumah tangga 2,3 di tahun 2009 naik menjadi 230.265 dengan poin 2,69 di tahun 2013, sebagaimana Tabel berikut ini.

**Tabel 2.146: Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Maluku Utara
Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	479,704.00	492,398.00	524,113.00	578,989.00	619,835.00
2	Jumlah Rumah Tangga	208,234	214,379	219,858	225,337	230,265
3	Rasio (1/2)	2.30	2.30	2.38	2.57	2.69

Sumber: BPS beberapa tahun, diolah

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka pengeluaran perkapita tertinggi di Kota Ternate, menyusul Halmahera Tengah, dengan rasio masing-masing kabupaten kota terinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.147: Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten Kota**

KABUPATEN/KOTA	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Jumlah Rumah Tangga	Rasio
Halmahera Barat	479,552	22,882	20.95
Halmahera Tengah	606,056	9,240	65.59
Kepulauan Sula	465,088	29,283	15.88
Halmahera Selatan	517,148	41,170	12.56
Halmahera Utara	508,611	35,813	14.20
Halmahera Timur	577,382	17,401	33.18
Pulau Morotai	442,422	11,447	38.64
Pulau Taliabu*			
Ternate	1,081,922	43,039	25.13
Tidore Kepulauan	597,524	19,990	29.89
Maluku Utara	619,835	230,265	2.69

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2014

*Keterangan : *) Masih tergabung dengan Kepulauan Sula*

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dari tahun 2009 hingga 2013 cenderung meningkat dari Rp. 204.391 dengan rasio pengeluaran non makanan per rumah tangga berada pada point 0,98 di tahun 2009 naik menjadi 230.265 dengan rasio 1,24 di tahun 2013, sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 2.148: Angka Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan Per Kapita Provinsi Maluku
Utara Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pengeluaran Konsumsi	204,391.00	213,131.00	248,053.00	274,795.00	286,614.00

	Rumah Tangga Non Makanan					
2	Jumlah Rumah Tangga	208,234	214,379	219,858	225,337	230,265
3	Rasio (1/2)	0.98	0.99	1.13	1.22	1.24

Tabel 2.149 : Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2013

KABUPATEN/KOTA	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non Pangan	Jumlah Rumah Tangga	Rasio
Halmahera Barat	188,912	22,882	8.26
Halmahera Tengah	242,959	9,240	26.29
Kepulauan Sula	192,544	29,283	6.58
Halmahera Selatan	209,305	41,170	5.08
Halmahera Utara	223,003	35,813	6.23
Halmahera Timur	225,193	17,401	12.94
Pulau Morotai	182,013	11,447	15.90
Pulau Taliabu*			
Ternate	613,396	43,039	14.25
Tidore Kepulauan	260,191	19,990	13.02
Maluku Utara	286,614	230,265	1.24

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2014

** Masih tergabung dengan Kepulauan Sula*

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara berdasarkan data BPS tiga tahun terakhir, terlihat fluktuatif. Pada tahun 2013 NTP mengalami penurunan, tetapi menunjukkan kenaikan pada tahun 2014. Kenaikan NTP pada tahun 2014 disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian, sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.150: Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 – 2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indeks harga yang diterima petani (It)	120.05	124.91	132.2	135.35	141.95	109.45
Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	120.07	126.44	130.8	134.47	141.45	108.45
Nilai Tukar Petani (NTP)	99.98	98.79	101.07	100.65	100.35	100.93

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Perbandingan NTP Provinsi Maluku Utara dengan Nasional dibandingkan dengan provinsi tetangga lainnya pada periode Agustus - September tahun 2012-2014 sebagaimana data tersedia, memperlihatkan bahwa NTP Maluku Utara sedikit lebih baik dibandingkan Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

Tabel 2.151: Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara dengan Nasional dan beberapa Provinsi

Provinsi	Tahun		
	2012	2013	2014
Sulawesi Utara	100.76	99.45	99.81
Sulawesi tengah	97.74	96.15	102.49
Sulawesi Selatan	108.61	106.06	105.22
Sulawesi Tenggara	106.42	104.96	101.61
Gorontalo	102.24	99.44	101.73
Sulawesi Barat	104.71	103.12	103.06
Maluku	104.90	105.25	100.76
Maluku Utara	100.65	100.35	100.93
Papua Barat	100.72	98.81	100.51
Papua	102.59	99.62	97.17
Nasional	105.305	104.44	102.21

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Produktifitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah Provinsi Maluku Utara dapat diukur melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan harga berlaku, Provinsi Maluku Utara berada pada urutan paling bawah, sementara untuk harga konstan tahun 2000, hanya berada sedikit di atas Gorontalo, yang rinciannya dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini.

Tabel 2.152: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013 dan Provinsi Tetangga (dalam Juta Rupiah)

Provinsi	ADHB				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sulawesi Utara	33,033,610.00	36,834,790.00	41,831,453.71	47,198,303.51	53,401,101.43
Gorontalo	7,069,000.00	8,056,000.00	9,153,669.04	10,368,799.47	11,752,198.97
Sulawesi Tengah	32,395,000.00	36,856,000.00	44,336,640.60	51,051,802.23	58,641,176.09
Sulawesi Selatan	99,954,000.00	117,830,000.00	137,519,771.93	159,859,931.38	184,783,059.05
Sulawesi Barat	9,403,000.00	10,986,000.00	12,883,957.04	14,407,643.06	16,184,012.69
Sulawesi Tenggara	30,103,000.00	33,269,000.00	32,113,037.29	36,600,745.70	40,773,199.10
Sulawesi	211,959,000.00	243,834,000.00	277,838,529.62	319,487,225.35	365,534,747.33

Maluku	7,069,000.00	8,084,000.00	9,599,089.82	11,468,769.26	13,245,347.34
Maluku Utara	4,690,000.00	5,387,000.00	6,038,664.81	6,918,433.00	7,725,420.01
Papua	77,728,000.00	89,451,000.00	76,501,341.08	77,396,091.70	93,136,604.41
Papua Barat	17,214,000.00	22,527,000.00	36,176,187.33	43,204,816.69	50,908,726.59
Maluku & Papua	173,292,000.00	202,523,000.00	128,315,283.04	138,988,110.65	165,016,098.35

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2014

Tabel 2.153: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013 dan Provinsi Tetangga (dalam Juta Rupiah)

Provinsi	ADHK				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sulawesi Utara	17,149,000.00	18,371,000.00	19,735,473.86	21,286,578.38	22,872,162.72
Gorontalo	2,710,000.00	2,917,000.00	3,141,458.12	3,383,819.28	3,646,550.61
Sulawesi Tengah	16,177,000.00	17,437,000.00	19,230,919.00	21,007,973.13	22,979,401.05
Sulawesi Selatan	47,326,000.00	51,197,000.00	55,093,741.42	59,718,497.08	64,284,430.52
Sulawesi Barat	4,239,000.00	4,744,000.00	5,233,064.81	5,704,327.17	6,112,645.40
Sulawesi Tenggara	11,301,000.00	12,226,000.00	12,698,120.77	14,020,349.91	15,040,855.84
Sulawesi	98,904,000.00	106,893,000.00	115,132,777.98	125,121,544.95	134,936,046.15
Maluku	3,993,000.00	4,251,000.00	4,509,168.60	4,861,349.96	5,111,309.39
Maluku Utara	2,811,000.00	3,035,000.00	3,230,050.34	3,445,501.25	3,656,304.12
Papua	23,237,000.00	22,620,000.00	21,207,818.39	21,436,173.85	24,616,649.43
Papua Barat	6,848,000.00	8,685,000.00	11,890,142.26	13,780,123.19	15,061,518.72
Maluku & Papua	67,679,000.00	71,180,000.00	40,837,179.60	43,523,148.24	48,445,781.66

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2014

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Maluku Utara tahun 2010 sebesar 13 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 11 persen. Ini menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.154: Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 - 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Total Panjang Jalan	5,348	5,348	6,414	7,205
Jumlah Kendaraan	39,756	42,619	61,207	67,653
Rasio	0.13	0.13	0.10	0.11

Sumber: Ditjen Hubda Kemenhub RI tahun 2014

Jumlah orang/barang melalui Pelabuhan dan Bandara

Jumlah penumpang dan barang Provinsi Maluku Utara pada tahun 2011 sampai dengan 2013, dilihat dari dermaga Ahmad Yani dan bandara Babullah sebagai dermaga dan pelabuhan utama di Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.155: Jumlah Penumpang dan Barang di Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Maluku Utara

Tahun	Uraian		Pelabuhan	Bandara
2011	Penumpang (orang)	Berangkat	379,462	266,132
		Datang	386,821	215,543
	Barang (Kg)	Bongkar	417,782	1,878,606
		Muat	19,984	2,170,634
2012	Penumpang (orang)	Berangkat	601,300	270,319
		Datang	590,190	298,947
	Barang (Kg)	Bongkar	486,030	2,196,287
		Muat	23,736	2,631,939
2013	Penumpang (orang)	Berangkat	147,730	286,821
		Datang	152,325	271,757
	Barang (Kg)	Bongkar	524,199	2,326,102
		Muat	24,745	2,753,838

Sumber : BPS 2012-2014

Luas Wilayah Produktif

Rasio luas wilayah produktif terhadap seluruh wilayah budidaya sebesar 0,945 pada tahun 2009 dan sebesar 0,939 pada tahun 2010 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi 1,154. Hal ini terjadi dikarenakan adanya aktifitas produktif diluar kawasan budidaya yang masuk pada kawasan hutan. Pada tahun 2012 dan 2013 rasio luas wilayah produktif terhadap seluruh wilayah budidaya mengalami penurunan menjadi 0,558 dan 0,542. Penurunan rasio dikarenakan adanya perubahan luasan kawasan budidaya sebagai bagian dari perubahan RTRW Provinsi Maluku Utara. Dengan persentase luas wilayah produktif terhadap lahan budidaya yang masih berada di kisaran 50 persen menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pengembangan wilayah produktif di masa yang akan datang.

Tabel 2.156: Persentase Luas Wilayah Produktif (Ha) Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Luas Wilayah Produktif	337617	335.463	412.427	349.162	339.037
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	357.409	357.409	357.409	625.689	625.689
3	Rasio (1/2)	0,945	0,939	1,154	0,558	0,542

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Jenis dan Jumlah Bank

Jasa perbankan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan jasa ini. Jumlah Bank di Maluku Utara pada tahun 2014 tercatat 89 buah atau meningkat sebesar 7,2 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 83 buah. Jumlah Bank di Maluku Utara meliputi kantor pusat, kantor cabang maupun cabang pembantu.

Tabel 2.157: Jumlah dan Jenis Bank menurut Status Kepemilikan di Provinsi Maluku Utara

No.	Jenis Bank	2013			2014		
		Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
1.	Bank Pemerintah	5	28	8	6	27	8
2.	Bank Pemerintah Daerah	6	7	4	6	7	4
3.	Bank Swasta Nasional	8	17	0	9	19	3
4.	Bank Asing dan Bank Campuran	0	0	0	0	0	0
Jumlah		19	52	12	21	53	15

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Jenis dan Jumlah Restoran

Jumlah restoran yang ada di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 17,43 persen. Tahun 2011 jumlah restoran sebanyak 109 buah, meningkat pada tahun 2012 menjadi 128 buah. Jumlah restoran terbanyak berada di Kabupaten Halmahera Selatan dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 4 buah.

Tabel 2.158: Jumlah Restoran di Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten	Jumlah Restoran
Halmahera Barat	9
Halmahera Tengah	10
Kepulauan Sula	5
Halmahera Selatan	42
Halmahera Utara	37
Halmahera Timur	4
Pulau Morotai	5

Kota/Kabupaten		Jumlah Restoran
Pulau Taliabu*		...
Ternate		9
Tidore Kepulauan		7
Maluku Utara	2012	128
	2011	109

Sumber : BPS Prov. Maluku 2014.

Keterangan : *) data Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula masih digabung

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel

Tabel 2.159: Jumlah Hotel Berbintang dan Non Bintang, Penginapan dan Kamar Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara Tahun 2009-2013

Kabupaten / Kota	Hotel					Kamar				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Halmahera Barat	8	8	9	12	11	76	96	96	159	155
Halmahera Tengah	2	2	2	7	9	29	29	34	100	111
Kepulauan Sula	6	6	12	14	19	51	117	117	146	200
Halmahera Selatan	20	20	19	31	27	253	249	249	405	343
Halmahera Utara	19	19	19	23	35	299	303	302	325	540
Halmahera Timur	8	8	4	18	19	108	51	51	237	306
Pulau Morotai	-	-	-	4	8	-	-	-	46	112
Pulau Taliabu*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ternate	48	48	50	53	55	1079	1109	1105	1247	1315
Tidore Kepulauan	7	7	9	10	7	69	95	95	130	96
Maluku Utara	118	118	124	172	190	1964	2049	2049	2795	3178

Sumber : BPS Prov. Maluku 2014

Fasilitas akomodasi bertambah dari Tahun 2012 sebanyak 172 unit penginapan, 2.795 kamar dan 3.409 tempat tidur menjadi 190 unit penginapan, 3.178 kamar dan 3.809 tempat tidur pada tahun 2013. Pada Tahun 2013 terjadi kunjungan 580 wisatawan mancanegara dan 71.000 wisatawan domestik.

Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas dapat mempengaruhi Iklim investasi. Berdasarkan data selama kurun waktu 2010 – 2012, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi. Sejalan dengan jumlah kejadian kejahatan, indikator selang waktu terjadinya kejahatan juga menunjukkan fluktuasi serupa. Pada tahun 2012, di Maluku Utara terjadi satu kejadian kejahatan setiap 7 jam 36 menit 15 detik. Sementara itu jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 106 orang.

Tabel 2.160: Tingkat Kriminalitas di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Indikator

No.	Indikator	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Jumlah Kejahatan	1.040	968	1.123
2.	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan	710	657	911
3.	Persentase penyelesaian Tindak Kejahatan	68,27%	67,87%	81,12%
4.	Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan	8.25'23"	9.02'59"	7.36'15"
5.	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk	100	91	106

Sumber : BPS Prov. Malut 2013

Dibandingkan tahun 2012, pada tahun 2013 resiko penduduk terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk meningkat menjadi 108, yang artinya dalam seratus ribu penduduk, 108 orang beresiko terkena tindak kejahatan.

Tabel 2.161 : Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Per 100.000 Penduduk) di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Tetangga Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2009-2013

Kepolisian Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
Sulawesi Utara	557	382	496	297	224
Gorontalo ¹	420	340	287	231	344
Sulawesi Tengah	303	493	265	303	286
Sulawesi Selatan ³	203	177	252	195	182
Sulawesi Tenggara	209	262	265	314	304
Maluku	202	292	110	109	135
Maluku Utara¹	121	198	91	87	108
Papua ³	242	181	250	196	219
INDONESIA	141	142	149	134	140

Sumber : www.BPS.go.id 2014

Namun bila dilihat dari indikator Presentase Penyelesaian Tindak Pidana, presentasi penyelesaian masih berada pada angka 33 persen, paling rendah dibawah nasional, bahkan beberapa provinsi tetangga. Semakin tinggi presentase akan semakin baik, karena menunjukkan adanya jaminan/kepastian hukum disuatu daerah. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari Pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya bila ingin menjadikan Provinsi Maluku Utara lebih menarik dimata investor baik lokal, domestik maupun asing.

Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan Nasional dan beberapa Provinsi Tetangga diperlihatkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.162: Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Tetangga Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2009-2013

Kepolisian Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
Sulawesi Utara	52,43	52,20	95,72	101,72	67,28
Corontalo ¹	65,41	51,72	55,30	65,66	43,59
Sulawesi Tengah	43,59	21,11	47,29	48,67	46,46
Sulawesi Selatan ³	72,39	59,70	64,55	66,72	64,35
Sulawesi Tenggara	65,00	65,15	69,44	69,03	65,31
Maluku	48,64	14,79	26,82	55,56	34,03
Maluku Utara ¹	18,63	17,48	54,90	70,95	33,22
Papua ³	51,27	50,05	45,69	49,38	48,89
INDONESIA	64,70	49,72	52,37	52,05	52,92

Sumber : www.BPS.go.id 2014

Demonstrasi

Demonstrasi turut mempengaruhi iklim investasi di suatu wilayah, karena terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Demonstrasi di provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2012 sebanyak 35 kali, tahun 2013 sebanyak 6 kali yang dilaporkan, umumnya terkait hasil PILKADA Gubernur, sedangkan tahun 2014 sebanyak 49 kali. Hal-hal menonjol berkaitan dengan ketertiban dan keamanan sepanjang tahun 2014 berkaitan dengan perkelahian antar warga pada triwulan I, sebanyak 8 (delapan) kasus, triwulan II sebanyak 6 (enam) kasus, triwulan III sebanyak 23 kasus, sedangkan sampai dengan triwulan IV sebanyak 8 kasus. Hal-hal menonjol yang berkaitan dengan sosial budaya terdapat 55 unjukrasa, triwulan II sebanyak 46 unjuk rasa, triwulan III sebanyak 24 kasu unjukrasa dan triwulan IV sebanyak 26 unjuk rasa.

Lamanya Perijinan

Kecepatan dan kemudahan usaha-usaha baru dalam memperoleh perijinan untuk beroperasi mencerminkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan laporan riset Balitbanda Provinsi Maluku Utara tahun 2013, rata-rata indeks perijinan investasi di wilayah Provinsi Maluku Utara sebesar 3,56. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan saat ini, waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin ivestasi atau membuka usaha baru di wilayah Maluku Utara adalah antara 2 sampai dengan 4 bulan. Hal ini mempengaruhi iklim berinvestasi yang perlu mendapat perhatian.

Sumber Daya Manusia

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009 hanya sebesar 0,002 atau 0,2% dari total jumlah penduduk, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 0,053 atau meningkat dua puluh satu kali lipat dari 5 tahun sebelumnya. Namun secara umum jika merujuk data Tahun 2012 rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dibanding rata-rata secara nasional sebesar 0,056.

Tabel 2.163: Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Maluku Utara

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	2.356	36.796	40.481	47.270	58.591
2.	Jumlah penduduk	959.048	1.043.336	1.067.212	1.091.075	1.114.897
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,002	0,035	0,038	0,043	0,053

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2014

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Jumlah penduduk usia kerja produktif di Maluku Utara yaitu usia antara 15 – 64 tahun dengan total 698.250 jiwa, angkatan kerjanya diperkirakan sekitar 463.243 jiwa atau 66,34 persen dari total penduduk usia kerja. Hal ini berarti setiap 1 jiwa penduduk usia produktif menanggung sekitar 2 jiwa penduduk non produktif. Daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dari angka ketergantungan, yaitu rasio usia penduduk <15 tahun dan >64 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Maluku Utara cukup tinggi, rata-rata 0,61, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.164: Rasio Ketergantungan Penduduk

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	337.896	369.45	378.34	380.957	382.662
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	32.884	29.889	30.531	31.304	33.985
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	370.780	399.339	408.871	412.261	416.647
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	604.211	638.748	654.246	678.814	

						698.250
	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,61	0,63	0,62	0,61	0,60

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Proses pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Maluku Utara tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 24.053,5 miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp 21,12 juta. Ekonomi Maluku Utara tahun 2014 tumbuh 5,49 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 6,37 persen.

Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 28,61 persen, diikuti oleh Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,19 persen dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 12,30 persen.

Struktur perekonomian Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,72 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (17,17 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (16,56 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2014, Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,03 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,69 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,68.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014 sebesar 5,49 persen terjadi pada sebagian besar komponen. Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,31 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 10,81 persen dan Impor Barang dan Jasa sebesar 9,26 persen. Struktur Ekonomi Maluku Utara tahun 2014 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (58,92 persen), diikuti Ekspor Barang dan Jasa (53,83 persen) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (33,20 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2014, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memberikan kontribusi terbesar (2,58 persen), diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (2,50 persen).

Dalam kurun waktu 2009 – 2014, struktur ekonomi Provinsi Maluku Utara tidak mengalami perubahan, masih didominasi oleh sektor Primer (Pertanian), disusul sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran) dan sektor sekunder (Industri Pengolahan). Peran setiap sektor ekonomi dalam menopang struktur ekonomi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165. Struktur Ekonomi Maluku Utara Tahun 2009-2014 (Tahun Dasar 2000)

Lapangan usaha		Peranan (Persen)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
PRIMER	1.Pertanian	37.34	36.37	36.03	34,91	33,78	33,16
	2.Pertambangan & Penggalian	5.09	5.16	4.99	4,65	4,39	3,43
SEKUNDER	3.Industri Pengolahan	13.02	13.05	12.73	12,50	12,46	12,57
	4.Listrik dan Air Bersih	0.59	0.58	0.57	0,56	0,56	0,58
	5.Bangunan	2.72	2.96	3.15	3,36	3,29	3,24
TERSIER	6.Perdagangan, Hotel & Restoran	22.79	23.44	24.20	25,57	26,92	28,15
	7.Pengangkutan & Komunikasi	8.00	7.83	7.65	7,65	7,65	7,77
	8.Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	3.69	3.78	3.84	3,81	3,84	3,84
	9.Jasa – jasa	6.74	6.87	6.85	7,00	7,11	7,25
PDRB		100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

Tabel 2.166. Struktur Ekonomi Maluku Utara Tahun 2010-2014 ADHB (Tahun Dasar 2010)

Lapangan usaha		Peranan (Persen)				
		2010	2011	2012	2013	2014
PRIMER	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	26,27	25,90	26,08	25,75	25,72
	Pertambangan & Penggalian	13,57	13,44	12,69	11,95	9,34
SEKUNDER	Industri Pengolahan	5,67	5,34	5,13	5,08	5,22
	Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05

	Pengadaan Air, pengelolaan sampah & daur ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
	Konstruksi	5,80	5,80	6,14	5,96	6,16
TERSIER	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,04	15,10	15,26	15,80	16,56
	Transportasi dan Pergudangan	5,38	5,15	5,24	5,60	5,98
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,43	0,43	0,43	0,45
	Informasi dan Komunikasi	3,74	3,63	3,54	3,54	3,72
	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,05	2,58	2,85	2,94	2,93
	Real Estate	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Jasa Perusahaan	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,15	15,91	16,11	16,37	17,17
	Jasa Pendidikan	3,46	3,40	3,30	3,29	3,33
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,00	1,96	1,93	1,99	2,11
	Jasa Lainnya	0,83	0,77	0,75	0,73	0,74
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun

2.2.2. PDRB Perkapita ADHK dan ADHB

Angka pendapatan perkapita setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Berikut ditampilkan progres tiga tahunan PDRB Perkapita Maluku Utara.

Tabel 2.167 : PDRB Perkapita Maluku Utara Tahun 2012-2014 (Tahun Dasar 2010)

Uraian	Tahun		
	2012	2013	2014
Tahun Dasar 2010			
PDRB Per kapita ADHB (Juta Rp.)	17,73	19,23	21,12
PDRB Per kapita ADHK (Juta Rp.)	15,69	16,33	16,87
Tahun Dasar 2000			
PDRB Per kapita ADHB (Juta Rp.)	6,34	6,93	7,65
PDRB Per kapita ADHK (Juta Rp.)	3,16	3,28	3,40

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun (diolah)

2.2.3. Volume Ekspor dan Impor

Nilai ekspor Maluku Utara pada tahun 2013 sebesar US\$ 730.632.279 atau meningkat dibandingkan tahun 2012 yang tercatat sebesar US\$ 551.193.932. Dengan volume ekspor pada tahun 2012 sebesar 12.676.392.418 Kg, dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 19.486.759.613 Kg. Adapun menurut negara tujuan, pada tahun 2013 sebagian besar ekspor Maluku Utara ditujukan ke dua negara yaitu, Jepang dan China. Ekspor ke China menempati urutan pertama dengan nilai US\$ 528.571.094, disusul Jepang dengan nilai US\$ 100.980.818.

Perkembangan volume dan nilai ekspor Provinsi Maluku Utara Selama tahun 2014 tersaji pada tabel berikut ini. Dimana nampak bahwa bulan Maret dan Oktober merupakan bulan dengan aktivitas ekspor tertinggi, sedangkan bulan Januari-Februari dan Agustus-September tanpa kegiatan ekspor.

Tabel 2.168. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor-Impor Maluku Utara Tahun 2014

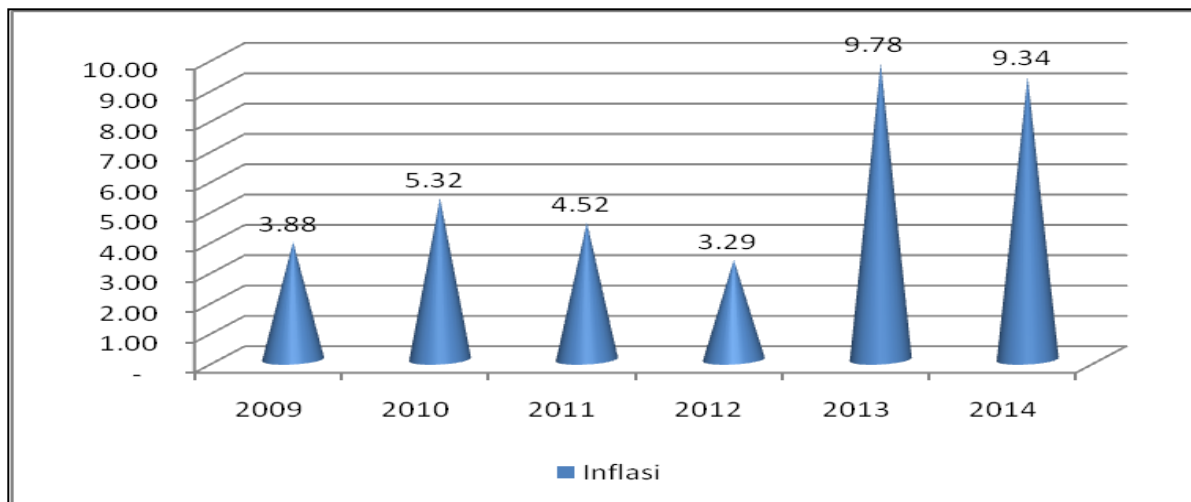
No	Bulan Tahun 2014	Ekspor		Impor	
		Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	3.076.075	1.908.229	-	-
4	April	1.515.614	954.837	1.199.968	782.547
5	Mei	1.526.416	961.642	999.922	664.088
6	Juni	2.206.533	1.347.093	-	-
7	Juli	2.493.855	1.296.805	1.676.638	1.916.842
8	Agustus	-	-	1.160.606	1.990.579
9	September	-	-	999.922	646.520
10	Oktober	3.039.960	1.428.781	1.000.005	629.070
11	Nopember	1.475.685	690.336	1.792.810	1.926.032
12	Desember	2.002.000	980.980	2.876.427	3.841.494
Jumlah		17.336.138	9.568.703	11.706.298	12.397.172

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2015

Nilai impor Maluku Utara dari tahun 2012 ke tahun 2013 menurun signifikan. Pada tahun 2012, nilai impor Maluku Utara tercatat sebesar US\$ 10.036.698, sedangkan tahun 2013 sebesar US\$ 4.668.502. Dengan volume impor pada tahun 2012 sebesar 6.412.213 Kg, dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 7.026.382 Kg. Perkembangan volume dan nilai impor Provinsi Maluku Utara Selama tahun 2014 menunjukkan bahwa bulan Desember merupakan bulan dengan aktivitas impor tertinggi, sedangkan bulan Januari-Maret dan Juni tanpa kegiatan impor.

2.2.4. Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009 inflasi tercatat sebesar 3,88 persen, tahun 2010 naik menjadi 5,32 persen, namun di tahun 2011 turun menjadi 4,52 persen, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 3,29 persen, sedangkan tahun 2013 naik menjadi 9,78 persen dan kemudian turun menjadi 9,34 persen pada tahun 2014. Laju inflasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, beberapa tahun (diolah)

Gambar 29. Laju Inflasi 2009-2014

Pada tahun 2013-2014 laju inflasi cukup tinggi, namun perekonomian Provinsi Maluku Utara masih mengalami peningkatan meskipun melambat. Hal ini dikarenakan konsumen Provinsi Maluku Utara menganggap bahwa inflasi yang tinggi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumsi mereka karena diikuti oleh kenaikan tingkat pendapatan. Kenaikan Inflasi pada tahun 2013 dimotori oleh pergerakan komoditas perikanan sebagai dampak terganggunya pasokan stok ikan segar karena faktor cuaca. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya tekanan inflasi secara tahunan di kota Ternate dimotori oleh meningkatnya tekanan pada kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak (*volatile foods*).

2.2.5. Tingkat Pengangguran

Keadaan ketenagakerjaan di Maluku Utara pada Februari 2014 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, pengurangan jumlah penduduk yang bekerja dan peningkatan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari bertambah sebanyak 20,4 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013, dan bertambah 1,0 ribu orang dibanding keadaan Februari 2013. Sementara jumlah penganggur pada Februari 2014 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 9,9 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2013 dan mengalami peningkatan sebanyak 1,2 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013. Dalam satu tahun terakhir terjadi penurunan TPAK sebesar 1,3 persen dan kenaikan TPT sebesar 0,22 persen.

Tabel 2.169 : Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2013–2014 (ribu orang)

Jenis Kegiatan Utama	Februari	Agustus	Februari
	2013	2013	2014
1. Penduduk 15+	727,0	735,0	742,7
2. Angkatan Kerja	492,3	473,0	493,4
Bekerja	465,6	455,0	465,5
Penganggur	26,7	18,0	27,9
3. Bukan Angkatan Kerja	234,7	262,0	249,4
4. TPAK (%)	67,72	64,35	66,43
5. TPT (%)	5,43	3,80	5,65
6. Pekerja tidak penuh	202,7	193,2	180,9
Setengah penganggur	66,4	54,7	61,9
Paruh waktu	136,3	138,5	119,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2015

Secara garis besar kinerja indikator makro pembangunan dan capaian tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.170 : Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Target Capaian Tahun Berjalan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja (Tahun)		TARGET CAPAIAN (TAHUN BERJALAN) 2015
		2013	2014	
Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah				
1.	Pertumbuhan PDRB (Persen) TD 2000 Pertumbuhan PDRB (Persen) TD 2010	6,12 6,37	5,72 5,49	6,26 -
2.	PDRB Perkapita ADHK (Jt. Rp) TD 2000 PDRB Perkapita ADHB (Jt. Rp) TD 2000 PDRB Perkapita ADHK (Jt. Rp) TD 2010 PDRB Perkapita ADHB (Jt. Rp) TD 2010	3,28 6,93 16,33 19,23	3,40 7,65 16,87 21,12	3,53
3.	Volume Ekspor (kg)	19,486,759,613	17,336,138	25,240,876,865
4.	Volume Impor (Kg)	7.026.382	11.706.298	16,386,214
5.	Laju Inflasi (Persen)	9,78	9,34	5,32
6.	Tingkat Pengangguran	5,51	5,65	5,05
7.	Persentase Penduduk Miskin*)	7,64	7,41	6,24

8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.63	70.85	71.15
----	----------------------------------	-------	-------	-------

Keterangan : *) kondisi pada bulan September tahun berjalan

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan di tahun sebelumnya diperlukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun lalu. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun lalu, secara garis besar dapat dilihat dari capaian kinerja bidang pembangunan sesuai dengan prioritas RKPD tahun lalu.

Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dirasa sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Maluku Utara. Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa.

Berdasarkan sarana transportasi antar desa, sebanyak 152 desa (12,71%) hanya dapat menggunakan sarana transportasi air, 610 desa (51,00%) hanya menggunakan sarana transportasi darat serta 434 desa (36,29%) dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air. Dari 1.044 desa yang dapat menggunakan sarana transportasi darat tersebut, 736 desa (70,50%) di antaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebanyak 154 desa (14,75%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, akan tetapi lalu lintasnya masih tergantung pada kondisi jalan dan cuaca, yang terdiri dari 108 desa (10,34%) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu dan 46 desa (4,41%) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan. Selain itu, masih terdapat 154 desa² (14,75%) yang memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hasil Podes 2014 mencatat sebanyak 58 kecamatan (50,43%) di Provinsi Maluku Utara telah memiliki pasar dengan bangunan, baik permanen maupun semi permanen. Sisanya, sebanyak 57 kecamatan tidak memiliki pasar dengan bangunan.

Untuk pembangunan kelistrikan, tercatat sebanyak 785 desa (65,64%) di Provinsi Maluku Utara telah ada keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN. Sisanya, menggunakan listrik non-PLN. Terkait keberadaan penerangan jalan utama desa, sebanyak 743 desa (62,12%) masih belum tersedia penerangan jalan, baik yang berasal pemerintah maupun non-pemerintah.

Sarana angkutan penyeberangan antar pulau dilayani oleh speedboat, kapal feri maupun kapal angkutan laut lainnya. Sedangkan pelayaran PELNI melayani angkutan laut lintas provinsi yang menghubungkan Maluku Utara, Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Hingga saat ini sedikitnya terdapat 16 pelabuhan penyeberangan kapal feri yang telah beroperasi diantaranya Bastiong, Sidangoli, Rum, Dowora, Sofifi, Subaim, Tobelo, Daruba, Babang, obi, Falabisahaya dan sanana.

Sarana dan Prasarana pemerintahan terus dibangun terutama di ibukota Provinsi Maluku Utara seperti perkantoran dan perumahan PNS (khusus perumahan PNS sementara tersedia 212 unit) untuk menunjang pelayanan publik. Sarana dan prasarana kesehatan dari tahun ke tahun senantiasa terus ditingkatkan untuk menunjang kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Saat ini terdapat 22 rumah sakit, 132 puskesmas, 1.248 posyandu, 9 klinik, dan 488 pos kesehatan desa yang tersebar di Maluku Utara.

Pendidikan dan kesehatan. Untuk menganalisa keberhasilan prioritas bidang ini bisa diukur dari pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku Utara. Hal ini karena angka IPM ditingkatkan melalui kinerja indikator komposit pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan serta kemampuan daya beli masyarakat. Capaian peningkatan kualitas Pembangunan Manusia di Maluku Utara berjalan lambat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara yang hanya meningkat 1,7 point dalam 5 tahun terakhir dan atau 0,65 point pada Tahun 2012-2013. Kondisi ini menempatkan

Maluku Utara di peringkat 30 dari 33 Provinsi di tahun 2013 dan menyebabkan tertinggalnya pembangunan manusia di Maluku Utara dibandingkan provinsi lainnya.

Bila dilihat menurut komponen pembentuk IPM tahun 2012-2013, Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah yang mencerminkan capaian di bidang pendidikan tercatat masing-masing bergerak meningkat dari sebesar 96,43 persen menjadi 97,45 persen dan dari sebesar 8,71 tahun menjadi 8,72 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup sebagai indikator keberhasilan di bidang kesehatan tercatat sebesar 66,65 tahun menjadi 66,97 tahun dan Pengeluaran rata-rata perkapita sebagai indikator kemampuan daya beli masyarakat tercatat sebesar Rp. 606.220 perbulan menjadi Rp. 609.260 per bulan.

Seluruh komponen IPM tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun IPM menurut kabupaten/kota tahun 2013 menunjukkan bahwa Ternate memiliki IPM tertinggi sedangkan terendah di Pulau Taliabu. Kondisi ini tentunya mengisyaratkan bahwa alokasi APBD Tahun 2014-2015 melalui program dan kegiatan intervensi disektor ini (peningkatan SDM) telah berorientasi *pro growth*. Kedepan, program/kegiatan ini hendaknya masih dilanjutkan akan tetapi dengan memprioritaskan Kabupaten/kota yang cakupan kinerja masih rendah. Artinya paket program, kegiatan dan anggaran pembangunan Provinsi Maluku Utara di Tahun 2016 untuk prioritas ini, hendaknya diarahkan di Kabupaten Pulau Taliabu, Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.

Namun demikian hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh untuk menjamin peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan alokasi 20 persen dari APBD untuk pendidikan dan 10 persen untuk Kesehatan, dalam kenyataannya masih rendah. Selain itu, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pengembangan rumah sakit dan sekolah (fisik), hanya sebagian kecil anggaran dialokasikan untuk upaya kesehatan masyarakat dan pendidikan berbasis kompetensi yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Langkah strategis ke depan yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak dasar atas layanan kesehatan adalah pusat pelayanan terpadu untuk kesehatan masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, dan pengembangan mekanisme jaminan kesehatan yang memadai untuk melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dari

goncangan akibat pengeluaran kesehatan. Upaya ini sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional 2012 dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Di sektor pendidikan, diperlukan tindakan afirmatif untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap sesuai tuntutan konstitusi, meningkatkan kesejahteraan, mutu, dan profesionalisme guru, meningkatkan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta memperluas peluang bagi anak dari keluarga miskin dan anak berprestasi untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih tinggi.

Ketahanan pangan. Kerja besar di sektor ini dapat tergambar dari capaian perekonomian Maluku Utara tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,49 persen. Struktur perekonomian Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,72 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (17,17 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (16,56 persen).

Cakupan lain keberhasilan sektor ini tergambar melalui capaian Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Januari 2015, NTP Provinsi Maluku Utara sebesar 102,83 atau mengalami peningkatan 0,41 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Desember 2014) yang sebesar 102,41. Menurut subsektornya, Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP) tercatat sebesar 104,03 (naik 1,19 persen); Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 108,06 (turun 0,47 persen); Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 97,33 (turun 0,04 persen); Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 109,21 (naik 1,26 persen); dan untuk Nilai Tukar Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan/NTNP) sebesar 102,49 (naik 1,51 persen) dimana untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 101,98 (naik 1,63 persen) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 107,91 (naik 0,27 persen). Secara Nasional, NTP mengalami peningkatan 0,53 persen yaitu dari 101,32 pada Desember 2014 menjadi 101,86 pada Januari 2015.

Sementara itu dari aspek produksi dan konsumsi pangan, dapat didiskripsikan bahwa terjadi peningkatan produksi dan konsumsi beras. Namun kenaikan produksi beras Maluku Utara masih belum mencukupi pergerakan kebutuhan konsumsinya. Angka kuantitatifnya yakni produksi beras Maluku Utara baru mencukupi 54,42

persen konsumsi beras saja, masih jauh dari kondisi swasembada sehingga harus dilakukan impor untuk memenuhi kondisi dalam provinsi ini. Wilayah yang tahan pangan adalah wilayah yang mampu menyediakan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Jumlah diterjemahkan melalui Angka Kecukupan Energi (AKE) sedangkan mutu dijelaskan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Saat ini, jumlah pangan yang dikonsumsi penduduk Maluku Utara masih dibawah AKE yang sebesar 2.000 kkalori/kapita/hari dan skor PPH masih lebih kecil dari 100.

Langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dan mengembangkan diversifikasi pangan, membenahi sistem tataniaga agar efisien dan merata, revitalisasi sistem ketahanan pangan rakyat, bahkan kalau perlu dapat dilakukan pemberian subsidi pangan bagi masyarakat secara tepat.

Porsi perhatian yang masih kurang di aspek ini juga terpapar melalui minimnya alokasi anggaran pembangunan di sektor Perikanan dan Kelautan. Kawasan pesisir yang merupakan kantong-kantong kemiskinan, perlu mendapatkan perhatian serius dalam peningkatan kemampuan masyarakatnya, sehingga mampu memanfaatkan potensi ekonomi kawasan pesisir secara optimal. Upaya menumbuhkan industri pengolahan berbasis potensi sumberdaya pesisir yang mampu menyerap tenaga kerja terus dilakukan.

Disadari bahwa, masyarakat pesisir masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi produktifnya. Selain itu, kebijakan dan program pengembangan kawasan pesisir belum berhasil memberikan perlindungan bagi nelayan dalam memenuhi hak dasar dan hak rasa amannya, yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing besar, mahalnya biaya pemanfaatan fasilitas pelayanan pelabuhan perikanan, tidak terpadunya rencana tata ruang di wilayah laut, kurang tegasnya penegakan hukum dan peraturan di laut, serta penyalahgunaan perizinan dan pengawasan kapal-kapal asing.

Oleh karenanya langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat di wilayah pesisir ditempuh melalui pengembangan ekonomi pesisir berbasis kawasan pengelolaan/pemanfaatan yang terkoordinasi,

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang di kawasan pesisir.

Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial. Menghadapi persoalan ketenagakerjaan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan. Permasalahan pengangguran yang dihadapi pada saat ini, menjadi semakin berat sejalan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, dan lambannya peningkatan kesempatan kerja. Program seperti pelatihan untuk menjadi pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologi tepat guna serta program-program padat pekerja lain perlu dilakukan penyempurnaan mendasar, agar sampai kepada sasaran yaitu mereka yang benar-benar tidak mempunyai akses ekonomi serta berada wilayah yang memang kegiatan ekonominya masih sangat tertinggal.

Langkah strategis yang dilakukan untuk menjamin hak atas pekerjaan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui langkah terpadu untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan peningkatan investasi yang padat pekerja, pengembangan usaha dan kerja diluar pertanian, dan peningkatan akses terhadap permodalan, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar, serta pengembangan lembaga keuangan mikro dan perlindungan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil; mengembangkan kelembagaan yang mampu memperjuangkan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, kesempatan mengembangkan usaha dan perlindungan pekerja; meningkatkan kemampuan pekerja; melindungi pekerja dan meningkatkan kerjasama nasional/internasional dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan melindungi tenaga kerja.

Sementara itu, kebijakan pengembangan usaha koperasi, mikro dan kecil menengah (Koperasi dan UMKM) telah dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses kepada sumberdaya produktif dan kewirausahaan termasuk penumbuhan wirausaha baru. Sementara dalam mendukung kebutuhan modal dilakukan skema dana bergulir melalui KSP/USP dan lembaga keuangan mikro (LKM), skema penjaminan melalui lembaga penjaminan, serta telah mulai diperkenalkan kredit perbankan tanpa agunan. Sedangkan upaya pengembangan manajemen dan pemasaran, telah diperkenalkan perluasan pendampingan usaha melalui penyedia jasa pengembangan usaha (BDS-provider) yang dilaksanakan oleh swasta dan masyarakat,

dan pengembangan sentra (klaster) UMKM yang dilakukan di berbagai daerah. Pelaksanaan kebijakan pengembangan KUMKM tersebut belum mampu menjangkau seluruh UMKM yang ada, dan sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan memperoleh layanan. Hal ini disebabkan oleh belum dipahaminya tata cara untuk mengakses, dan terbatasnya jumlah instansi penyedia.

Kebijakan perindustrian dan perdagangan umumnya dilakukan untuk merespon pasar, sekaligus menciptakan inovasi dan peluang baru bagi pengembangan usaha mikro yang banyak dilakukan masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya hambatan aliran barang dari daerah produksi ke daerah pemasaran telah menimbulkan distorsi cukup besar dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu perdagangan antardaerah tanpa hambatan perlu dilakukan untuk optimalisasi potensi sumberdaya alam di suatu daerah yang menjadi sentra produksi, memperluas kesempatan kerja dan pendapatan bagi petani/produsen, pedagang pengumpul, pedagang antardaerah, antarpulau dan pengecer di daerah.

Pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil, termasuk usaha pertanian dan perikanan skala kecil masih kurang mendapat dukungan penguatan teknologi, pemasaran dan permodalan. Kebijakan penelitian dan penyuluhan di sektor terkait seperti pertanian, perikanan, industri dan perdagangan belum menyediakan informasi dan teknologi yang dapat dijangkau masyarakat agar mereka mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Kelemahan lain adalah panjangnya jaringan pemasaran antara petani/nelayan sebagai produsen dengan konsumen akhir yang menyebabkan rendahnya harga di tingkat petani/nelayan.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Bahwa upaya menciptakan tatanan kehidupan birokrasi dan kelola pemerintahan yang reformis terus diagendakan. Sadar bahwa pada Tahun Anggaran 2014, BPK masih memberikan opini disclaimer kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka upaya intensif terkait pengelolaan administrasi keuangan terus dibenahi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Inspektorat Provinsi Maluku Utara telah membentuk Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang tugasnya menindaklanjuti setiap hasil temuan BPK, dilakukan penandatanganan pakta integritas untuk menjalankan pemerintahan sebaik mungkin dan terhindar dari KKN oleh pejabat eselon II; rencana pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Badan PTSP),

penataan pelaporan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mendorong Inspektorat Provinsi Maluku Utara mengembangkan e-audit internal Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan; disamping telah diakomodasi untuk pertama kalinya sistem rekrutmen PNS melalui metode CAT.

Untuk persentase kab/kota yang telah memiliki *e-procurement*, baru terdapat pada kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara yang telah menyiapkan sistem *e-procurement*, namun dalam implementasinya tidak satupun yang menerapkan sistem e-tender secara penuh. Saat ini baru sebatas pengumuman lelang pengadaan barang, sedangkan penilaian dan penetapan masih dilakukan secara manual. Penerapan *e-procurement* secara penuh hanya beberapa instansi vertikal, diantaranya Universitas Khairun dan BPK. Kondisi ini disebabkan masih adanya pemikiran bahwa kewajiban penerapan *e-procurement* secara penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan baru pada tahun 2014.

Provinsi Maluku Utara sampai saat ini baru terdapat 2 kab/kota dan Provinsi yang telah memiliki e-procurement dari 10 kab/kota yaitu Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2010, dan kota Ternate pada tahun 2011. Bila dilihat dari presentasi hanya terdapat 30 persen dari 10 kab/kota dan provinsi yang memiliki *e-procurement*. Hal ini selain kebijakan tersebut baru diberlakukan di Indonesia, juga disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, apalagi secara geografis provinsi di Wilayah Maluku Utara sebagai daerah kepulauan dan terdapat 8 kabupaten yang masuk kategori sebagai daerah tertinggal. Selain hambatan tersebut, juga disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah kabupaten pemekaran baru, tentunya memiliki keterbatasan sumberdaya manusia yang tersedia. Bila dilihat dari jumlah aparatur yang pernah mengikuti bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan pengadaan barang dan jasa, hampir setiap SKPD pada kab/kota pernah mengikuti, namun tidak semua yang mengikuti tersebut lulus dalam ujian untuk memperoleh sertifikat barang dan jasa. Akibat dari belum sepenuhnya dilakukan penerapan *e-procurement*, sehingga sampai saat ini pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang tentunya berkonsekuensi pada pembiayaan yang cenderung tidak sesuai aturan, juga memberikan peluang terjadinya persaingan yang tidak objektif dalam proses tersebut. Selain itu kendala penerapan e-

procurement juga menimbulkan kesulitan bagi pengusaha lokal, karena belum dapat bersaing dengan badan usaha dari luar Maluku Utara, faktor penyebabnya karena sumberdaya badan usaha yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi masih sangat rendah.

investasi dan iklim usaha. Membaiknya kondisi ekonomi makro, ternyata belum mampu mendorong sektor riil untuk menyerap kembali pengangguran akibat dampak ikutan dari pemberlakuan UU minerba dan tambahan tenaga kerja muda. Peningkatan investasi baru masih sangat lamban karena masih menghadapi iklim yang belum kondusif, diantaranya terkait dengan prosedur investasi yang berbelit, kebijakan pusat dan daerah yang tumpang tindih, kurangnya kepastian hukum, dan gangguan keamanan. Di sisi lain, program jangka pendek yang terfokus pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat hanya mampu menciptakan pasar kerja jangka pendek dengan cakupan yang sangat terbatas. Belum lagi, terkait kecepatan dan kemudahan usaha-usaha baru dalam memperoleh perijinan untuk beroperasi yang berdasarkan laporan riset Balitbanda Provinsi Maluku Utara tahun 2013, rata-rata indeks perijinan investasi di wilayah Provinsi Maluku Utara sebesar 3,56. Angka ini mengindikasikan bahwa, waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin investasi atau membuka usaha baru di wilayah Maluku Utara adalah antara 3 sampai dengan 4 bulan. Langkah strategis yang dilakukan diantaranya : koordinasi terpadu dalam rangka pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meningkatkan fasilitas infrastruktur, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, menata kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, serta konsistensi pengelolaan dan pemanfaatan ruang (status tanah usaha) dengan RTRW.

Sumberdaya energi, air dan mineral, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Energi listrik di Maluku Utara meningkat dengan penambahan jumlah pembangkit listrik sebanyak 15 unit dari tahun sebelumnya menjadi 167 unit di tahun 2013, dengan daya terpasang sebesar 131.453 KWH dan daya mampu sebesar 86.855 KWH. Produksi tenaga listrik yang dibangkitkan sebesar 296.739.395 kWh, dipakai sendiri sebesar 1.577.367 kWh, dan disalurkan sebesar 295.162.028 kWh. Tercatat jumlah pelanggan tahun 2012 sebanyak 141.246 pelanggan meningkat menjadi 159.931 pelanggan di tahun 2013 (BPS 2014).

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus-menerus di usahakan oleh pemerintah daerah. Rumahtangga di Maluku Utara yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, air leding sebagai sumber air minum baru mencapai 26,87 persen pada tahun 2012 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 31,28 persen.

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang kaya akan berbagai mineral. Bijih nikel dan emas merupakan sebagian kandungan mineral yang banyak terdapat di Maluku Utara. Potensi ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan dalam artian memaksimalkan eksplorasi tetapi memperbesar nilai tambah sektor pertambangan dalam perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM RI No. 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, harus didukung sepenuhnya dengan menerapkan pada pertambangan di Maluku Utara. Kontribusi pertambangan non migas terhadap perekonomian Maluku Utara yang tidak melebihi 5 persen dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dapat ditingkatkan melalui peningkatan nilai tambah dengan potensi yang jauh lebih besar.

Hal ini dikarenakan adanya batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang dengan nilai yang jauh lebih besar daripada menjual komoditas tambang dalam bentuk mentah (tanah). Melalui penerapan Peraturan Menteri ini, kontribusi saat ini dapat dijaga meskipun dengan pengurangan produksi pertambangan untuk fokus terhadap kualitas lingkungan di Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana, hal tersebut didasarkan pada kondisi geografis Provinsi Maluku Utara yang dilewati oleh dua lempeng dunia yaitu lempeng pasifik dan indo-australia sehingga Maluku Utara sangat rawan terhadap gempa tektonik, serta Maluku Utara dilewati oleh jalur *Pasific ring of fire* (cincin api pasifik) yang merupakan jalur rangkaian gunung berapi aktif di dunia sehingga Maluku Utara rawan terhadap gempa vulkanik. Disamping itu, Maluku Utara merupakan wilayah sabuk vulkanik tua yang dataran rendahnya sebagian besar didominasi oleh rawa-rawa sehingga sangat berpotensi

sekaligus rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Potensi bencana diantisipasi lebih awal melalui pemasangan alat deteksi dini pada kawasan tertentu terhadap isu gempa dan tsunami seperti di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Ternate Kota Ternate dan Morotai Kabupaten Halmahera Utara. Ancaman bencana yang dapat terjadi di Maluku Utara antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran permukiman, cuaca ekstrim, tanah longsor, gunung api dan abrasi. Selama tahun 2014 beberapa peristiwa bencana yang terjadi diantaranya di : (1) Kabupaten Halmahera Utara, meletus gunung Dukono pada bulan September dan bencana angin puting beliung di Kao pada bulan Oktober, yang menyebabkan kerusakan pada 118 rumah dan 1 fasilitas umum, (2) Kepulauan Sula tepatnya di Sanana, terjadinya gelombang pasang pada bulan September, yang menyebabkan 9 orang meninggal dan 11 orang hilang, (3) Kota Ternate, terjadi gempa bumi 7,3 SR pada bulan Nopember namun tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan, dan (4) Kabupaten Halmahera Barat, terjadi gempa bumi 7,3 SR pada bulan Desember yang juga tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan. Upaya kearah penanganan kebencanaan terus dilakukan melalui program/kegiatan pra, tanggap darurat dan pasca bencana

Sementara itu di aspek Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau. Di samping itu, terkait isu pemanasan global telah melakukan upaya dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca, serta melakukan upaya mencegah dan merehabilitasi kerusakan lingkungan hidup setempat. Sejalan dengan perkembangan paradigma dan tuntutan masyarakat terhadap praktek pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, maka langkah strategis yang dilakukan diantaranya : penguatan sistem pembinaan melalui penyusunan studi lingkungan hidup daerah (SLHD) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dalam upaya menekan meluasnya lahan kritis, pemberian dan pemantauan ijin pertambangan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, menjalin kerjasama antar stakeholder terkait, penegakan hukum secara adil dan konsisten terutama terhadap pemanfaatan SDA dan lingkungan secara ilegal dan perusakan ekosistem, pengelolaan SDA dan lingkungan yang lebih bersifat

bottom-up dan mengakui hukum adat/lokal, serta pengakuan terhadap lembaga adat/lokal dalam struktur pengelolaan SDA dan lingkungan. Di samping itu juga telah dilakukan koordinasi antarinstansi dan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih solid agar tidak terjadi konflik kepentingan dan inkonsistensi kebijakan yang merugikan masyarakat.

Pariwisata. Maluku Utara memiliki branding “*East Indonesia Paradise*” menyimpan berbagai potensi kepariwisataan yang beragam dan unik, baik wisata alam/bahari, sejarah, budaya, kuliner, maupun jenis wisata lain yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, diminati dan bernilai jual tinggi bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Keindahan wisata alam/bahari di pantai dan bawah laut yang memiliki beragam biodata dan jenis ikan hias langka, seperti terdapat di Kepulauan Guraici dan Pulau Widi (Halmahera Selatan), Pulau Dodola (Pulau Morotai), Tagalaya (Halmahera Utara), Tapalo (Halmahera Timur), Pulau Pagama (Kepulauan Sula), Pulau Mere (Halmahera Tengah) dan pulau-pulau lainnya. Wisata sejarah peninggalan Perang Dunia II di Pulau Morotai seperti lapangan terbang dan 7 landasan pacu, yang dapat difungsikan sebagai bandara internasional. Untuk menarik minat wisatawan mancanegara dan nusantara, Pemerintah Daerah dan tokoh adat menggelar berbagai *event* pariwisata yang diselenggarakan setiap tahunnya, seperti pesta rakyat (Legu Gam) di Ternate dan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di Halmahera Barat.

Akomodasi di Maluku Utara sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Ternate. Sehingga kunjungan wisatawan ke pulau-pulau lainnya agak terkendala fasilitas akomodasi yang tersedia. Dari total 190 hotel di Maluku Utara, 55 hotel diantaranya terdapat di Pulau Ternate.

Daerah perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal. Kawasan perbatasan merupakan manifestasi utama dari kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan negara, pemanfaatan sumberdaya alam, menjaga keamanan dan keutuhan negara. Kawasan perbatasan yang perlu segera mendapat perhatian yang terletak di garis batas wilayah salah satunya adalah pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Palau dan Philipina. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-pulau terluar telah ditetapkan pulau Jiuw di Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu pulau terluar. Oleh karena itu, kawasan ini

menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Selama tahun 2014 telah dilakukan pertemuan koordinasi sekaligus menyusun berbagai agenda aksi pembangunan untuk Morotai sebagai kawasan perbatasan dan Pulau Jiuw sebagai pulau kecil terluar.

Sementara itu, dari 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara masih terdapat 6 (enam) Kabupaten yang berstatus sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan penetapan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Oleh karena, evaluasi pada Tahun 2014 menghasilkan 3 (tiga) Kabupaten yakni Halmahera Utara dan Halmahera Tengah telah keluar dari status Daerah Tertinggal.

Pembangunan di Daerah perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal masih diperlukan keberpihakan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian terkait – kementerian daerah Tertinggal dan Kementerian P U - untuk memberikan program percepatan dalam rangka membangun infrastruktur, terutama jalan dan jembatan dalam rangka pembukaan akses terhadap daerah yang masih terisolir dan belum terjangkau. Dengan perencanaan yang terintegrasi antar pemerintah provinsi dan antara masing-masing Kabupaten dan Kota yang baik dan intervensi pemerintah pusat melalui kementerian terkait, diharapkan beberapa daerah lainnya dapat segera berubah status.

Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi. Muncul dan berkembangnya kreativitas, inovasi dan teknologi tidak lepas dari pengaruh kebudayaan serta pengaruh masyarakat dimana individu itu hidup dan berkarya. Budaya adalah akumulasi produk kreatif yang diabadikan dalam bentuk tertentu. Manusia tidak dapat hidup tanpa budaya. Dengan demikian, munculnya ekonomi kreatif saat ini, sebagai kegiatan ekonomi, pada dasarnya tumbuh dari budaya kreatif. Berbagai kegiatan sebagai wujud dukungan untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat terus dilakukan. Cakupan pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion(model), film-video-fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan serta kuliner.

Disamping itu juga telah dilakukan berbagai aspek lain diantaranya : upaya rekonsiliasi dikembangkan lebih intensif dengan menciptakan tatanan sosial baru yang mengedepankan penghormatan pada pluralisme, hubungan sosial yang inklusif, dan pengembangan kolaborasi lintas suku, daerah dan agama, serta upaya menciptakan sistem keamanan yang kondusif bagi masyarakat dan menjadi mitra bagi aparat kepolisian dalam menjaga dan mengatasi masalah keamanan daerah.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah, seperti aspek-aspek lingkungan strategis skala internasional, nasional dan regional serta permasalahan-permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan Provinsi Maluku Utara.

Permasalahan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan

URUSAN WAJIB

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

Bidang Pendidikan : Masalah mendasar yang dihadapi oleh pendidikan dasar dan menengah, terdapat beberapa masalah mendasar atau pokok pendidikan di Maluku Utara: (1) sediaan dan sebaran guru antar wilayah yang kurang dan tidak merata, (2) belum memadainya kualifikasi dan kompetensi guru (sertifikasi), (3) penyediaan fasilitas belajar antarwilayah yang timpang terutama untuk ruang kelas SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, (4) tingginya siswa putus sekolah yang berasosiasi dengan rendahnya APK dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, dan (5) Rendahnya jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan, (6) Rendahnya pengetahuan dan kemampuan orang tua murid terhadap pentingnya pendidikan (7) masih terdapat anak putus sekolah terutama pada tingkat pendidikan menengah, (8) sebaran Perguruan Tinggi yang belum merata di seluruh kabupaten/kota (10) masih terdapat Penduduk yang berusia diatas 15 Tahun melek huruf (11) rendahnya fasilitas dan tenaga pendidik pada PAUD.

Bidang Kesehatan, antara lain : (1) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu, alat kesehatan, tenaga kesehatan dan keperawatan, dan jaminan pembiayaan kesehatan; (2) Angka Kematian Bayi dan Balita, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yang masih relatif tinggi; (3) Kurangnya jumlah tenaga Bidan Desa dan layanan dasar bagi ibu hamil, serta pertolongan kelahiran secara tradisional yang masih relatif tinggi; (4) Minimnya tenaga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis di kabupaten/kota; (5) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Sofifi yang belum rampung; (6) Minimnya sarana prasarana dan obat-obatan; (7) Masih tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular; (8) Masih rendahnya cakupan *Universal Child Immunisation* (UCI) (9) Belum adanya Rumah Sakit Jiwa; (10) Kurangnya rumahsakit/puskesmas terapung dalam rangka pelayanan kesehatan antar pulau; (11) Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; (12) Masih terdapatnya gizi buruk dan gizi kurang pada balita, (13) rendahnya cakupan penanganan penyakit malaria, HIV/AIDS dan diare.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Pekerjaan Umum, Permasalahan pada aspek infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pemerintahan, serta sumber daya air dan irigasi. ***Infrastruktur Jalan dan Jembatan***, antara lain (1) Masih banyaknya jumlah desa yang belum dijangkau oleh akses jalan; (2) belum optimalnya pembangunan *Ring Road* Halmahera, *Ring Road* Morotai, Bacan, Obi, Taliabu, Sanana dan/atau trans Maluku Utara termasuk didalamnya akses jalan ke sentra-sentra ekonomi/produksi; ***Sarana Prasarana Pemerintahan***, antara lain : (1) Sarana Prasarana Pemerintahan di Ibu Kota Provinsi (Sofifi) dan Ibu Kota Kabupaten pemekaran yang masih relatif kurang; (2) Kantor Desa yang masih belum difungsikan secara optimal oleh aparat pemerintah desa, dan banyaknya desa-desa hasil pemekaran yang belum memiliki kantor desa yang representative; (3) Pembangunan Perumahan PNS di Kota Sofifi yang belum optimal. ***Permasalahan Sumber daya air dan Irigasi***, antara lain: (1) Potensi sumber daya air di Maluku Utara yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik; (2) Kondisi jaringan

irigasi juga belum memadai; (3) Belum optimalnya pengembangan sumber air baku dan konservasi SDA serta pengendalian daya rusak air.

Bidang Penataan Ruang. Permasalahan penyimpangan pemanfaatan ruang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif karena: (1) pengaruh kegiatan ekonomi, pemekaran wilayah, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya; (2) Sinergitas RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi Maluku Utara perlu terus ditingkatkan. (3) Implementasi pengembangan PKN secara fungsi dan peran belum optimal dilaksanakan sesuai RTRW terutama terkait dengan kegiatan ekonomi, pengembangan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruang, demikian juga terkait kondisi PKW, KSP dan PKL secara umum masih diperlukan perbaikan dan dukungan untuk peningkatan kinerjanya; (4) belum optimalnya fungsi BKPRD dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan (TURBINLAKWAS) dalam penyelenggaraan penataan ruang; (5) Belum adanya rencana rinci Sembilan Kawasan Strategi Provinsi (KSP) dan tataruang wilayah laut.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan antara lain: 1) Masih adanya rumah tidak layak huni; 2) Masih minimnya layanan air bersih dan air minum; 3) Masih rendahnya akses sanitasi layak ; 4) Masih adanya permukiman kumuh.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Permasalahan yang nampak antara lain (1) minimnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden; (2) Kecurangan dan konflik politik yang masih saja terjadi; (3) gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, dan berkembangnya modus-modus kejahatan baru; (4) rendahnya peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat.(5) masih tingginya rasio jumlah penduduk dengan aparat keamanan (6) masih tinggi potensi konflik sumberdaya alam, batas wilayah dan penyelenggaraan pemilu kada.

Bidang Sosial, Permasalahan yang ada, antara lain : (1) Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; (3) masih kurangnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat, penghuni panti jompo, panti asuhan anak, panti kusta; (4) kurangnya pemberdayaan terhadap kelompok

usaha kreatif, karang taruna dan tagana (taruna siaga bencana); (5) minimnya bantuan sosial kebencanaan; (6) minimnya penanganan anak terlantar;

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Bidang Tenaga Kerja, Problematika ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara, antara lain : (1) masih adanya pengangguran; (2) Kualitas dan skil tenaga kerja masih relatif rendah; (3) Lapangan kerja dan tenaga kerja yang sebarannya tidak merata; (4) masih perlu disesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). (5) masih terdapat sengketa dan perselisihan perburuhan/tenaga kerja (6) rendahnya lapangan kerja

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Permasalahan yang masih dijumpai terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah : (1) terbatasnya kesempatan usaha dan pendidikan bagi kaum perempuan; (2) masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan anak; (4) Belum optimalnya peran lembaga sosial di Maluku Utara terhadap perlindungan anak dan perempuan; (5) belum optimalnya integrasi Pengarusutamaan Gender ke dalam program dan kegiatan SKPD.

Bidang Ketahanan Pangan, Permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara adalah : (1) masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah; (2) Rendahnya akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan; (3) Belum efektifnya pola pendistribusian dan sistim informasi harga pangan; (4) Penganekaragaman/diversifikasi pangan yang masih terbatas; (5) Masih tingginya persentase daerah rawan pangan; (6) Kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah sebagai akibat kondisi kemiskinan. (7) masih rendahnya regulasi daerah yang mendorong terciptanya ketahanan pangan.

Bidang Lingkungan Hidup, permasalahan antara lain: Jumlah emisi Co2 di Indonesia tergolong tinggi. Jika tidak dilakukan mitigasi atau kegiatan berjalan seperti biasanya (*business as usual*), kondisi ini menjadi permasalahan dalam mengantisipasi perubahan iklim di Maluku Utara. Permasalahan lingkungan antara lain adalah (1) Kerusakan lingkungan pasca tambang seperti di Pulau Gebe dan beberapa tempat

aktifitas pertambangan di Maluku Utara harus menjadi perhatian; (2) belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan; (3) banyak wilayah resisten terhadap bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, angin puyuh, gunung meletus dan bencana kekeringan;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain (1) masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, (2) rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, (3) kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha, disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, (4) lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar, serta rendahnya tingkat kewirausahaan. (5) rendahnya kesadaran orang tua untuk membawahkan balita ke Posyandu, (6) terbatasnya lembaga swadaya masyarakat di kab/kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat (7) rendahnya peran LPM dalam pembangunan desa.

Bidang Perhubungan, Permasalahan Perhubungan, antara lain : (1) Perhubungan/transportasi darat; kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas, belum adanya terminal yang memadai di Kota Sofifi sebagai tempat pertukaran moda transportasi; Masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana. (2) Transportasi udara, antara lain: sarana prasarana bandara perintis yang belum memadai; belum adanya bandara perintis di Pulau Taliabu dan Pulau Obi, belum adanya bandara bertaraf internasional di Maluku Utara; pengelolaan Bandara Babullah dan fungsi komersial Bandara Leo Wattimena di Pulau Morotai belum optimal, serta permasalahan lahan Bandara Emalamo. (3) Transportasi Laut, antara lain : Kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kepelabuhanan kurang memadai; Permasalahan lain yang perlu mendapat dukungan pengembangan pelabuhan utama di Sofifi dan pengembangan pelabuhan Babang, Tobelo, Buli, Weda, Labuha, Obi, Sanana, Mangoli dan Taliabu; Pengembangan Pelabuhan Daruba sebagai penunjang Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Sebagai daerah kepulauan maka sejumlah pelabuhan harus dibangun dan dikembangkan secara optimal di beberapa titik di setiap kabupaten/kota untuk memudahkan akses dan konektivitas antar wilayah dan antar pulau, antara lain: *Kota Ternate* (Bastiong,

Dufa-dufa, Sulamadaha, Mayau, Tifure, Hiri, Moti, Tanjungpura Takofi), ***Kota Tidore Kepulauan*** (Soasio, Goto, Rum, Mare, Akelamo, Sofang, Payahe, Batulak), ***Halmahera Barat*** (Jailolo, Sidangoli, Talaga, Sahu, Kedi, Ibu), ***Halmahera Utara*** (Akelamo Kao, Kao, Pidiwang, Supu, Dama, Aru), ***Pulau Morotai*** (Daeo, Sangowo, Sopi, Bere-Bere, Wayabula, Posi-Posi Rao), ***Halmahera Timur*** (Maba, Ekor, Wasile, Subaim, Lolobata, Bololo, Patlean, Wayamli, Miaf, Waci, Bicoli), ***Halmahera Tengah*** (Sakam, Foya, Lilief, Sagea, Tapeleo, Mesa, Banemo, Patani, Gebe, Loleo), ***Halmahera Selatan*** (Mafa, Bisui, Gane Luar, Pasipalele, Tawa, Busua, Kotiti, Saketa, Doro, Pulau Sali, Fulai, Dolik, Indari, Yaba, Piga Raja, Bibinoi, Wayaua, Garung, Loleo Jaya, Loid, Muari, Tameti, Lelei, Laluin, Guruapin, Loromabati, Ngofakiaha, Tagono, Mailoa, Solihi, Laiwui, Wayaloar, Manok, Jikotamo, Madopolo), ***Kepulauan Sula*** (Dofa, Bobong, Malbufa, Kabau, Fuata, Manaf, Falabisahaya, Pas Ipa, Auponhia, Baruakol, Mangoli, Waitina, Wailoba, Samuya, Loseng, Bapenu, Nggele, Lede, Tikong, Gela, Jorjoga, Penu).

Bidang Komunikasi dan Informatika, Permasalahannya sebagai berikut : (1) masih terdapat wilayah yang belum dijangkau sinyal telepon seluler; (2) masih rendahnya sarana dan prasarana telekomunikasi; (3) terbatasnya sarana dan rendahnya pengguna layanan internet; (4) belum tersedianya teknologi informasi berbasis web di lingkungan pemerintah. (5) kurangnya kualitas pemberitaan media massa

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan disebabkan antara lain: (1) Belum maksimalnya manajemen usaha koperasi dan UMKM; (2) Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih rendah; (3) Terbatasnya akses permodalan; (4) Minimnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM yang handal; (5) Iklim usaha yang sepenuhnya belum mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Penanaman Modal, Permasalahan yang dihadapi di Provinsi Maluku Utara terkait dengan pengembangan investasi adalah : (1) proses perizinan yang masih birokratis, disebabkan karena belum terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP (Perda PTSP masih dalam proses di DPRD); (2) kurangnya kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta jaminan keamanan dalam bidang penanaman modal; (3) Kurangnya promosi potensi daerah. (4) rendahnya daya saing

Bidang Kepemudaan dan Olahraga, (1) Pembinaan olahraga yang belum tertata secara baik, terintergrasi dan sistimatis, antara pendidikan olah raga di lingkungan sekolah, masyarakat dengan olah raga prestasi; (2) masih minimnya sarana, prasarana olahraga; (3) kurang intensifnya upaya pembinaan atlit; (4) kurangnya insentif kepada para atlit yang berprestasi. (4) rendahnya pemberdayaan pemuda.

Bidang Kebudayaan, Permasalahan kebudayaan adalah ; (1) sebagian besar budaya Maluku Utara belum mendapat hak paten atau belum mendapat pengakuan HAKI sebagai budaya Maluku Utara; (2) Potensi budaya lokal Maluku Utara masih kurang mendapat perhatian dan masih kurang dipromosikan untuk sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan; (3) masih kurangnya perhatian terhadap aneka kuliner khas daerah, bahasa daerah, musik lokal dan kearifan lokal lainnya yang tumbuh di masyarakat. (4) rendahnya sarana dan parasaran serta media promosi seni dan budaya.

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Permasalahan dibidang perpustakaan dan kearsipan adalah ; (1) Sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan yang belum memadai; (2) Masih minimnya sumberdaya pengelola perpustakaan dan kearsipan yang handal; (3) Rendahnya kualitas tata-kearsipan daerah (4) Rendahnya minat baca masyarakat.

URUSAN PILIHAN

Bidang Kelautan dan Perikanan, Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan yang harus tertangani secara baik dan komprehensif, antara lain : (1) Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas; (2) Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal; (3) masih adanya *illegal fishing* dan *unreported*; (4) rendah jumlah nelayan bersertifikasi, jumlah dan jenis budidaya dan pengolah hasil perikanan (5) Kurangnya kapasitas kelembagaan dan penyuluh perikanan; (6) kurangnya kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan di daerah; (7) rendahnya kesadaran masyarakat/publik tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya perikanan dan kelautan masih rendah; (8) pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain).

Bidang Pariwisata, Potensi Priwisata di Provinsi Maluku Utara terbilang beraneka ragam, unik dan khas tetapi belum digarap dan dikembangkan secara

optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) lemahnya pengelolaan obyek dan daya tarik wisata di Maluku Utara; (2) Belum meratanya pembangunan pariwisata; (3) masih lemahnya koordinasi dan keterpaduan sektor dan pelaku usaha dalam membangun pariwisata; (4) Belum fokus perencanaan dan pembangunan pariwisata; (5) Terbatasnya infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata; (6) Sarana dan prasarana di tempat destinasi Pariwisata belum memadai; (7) Kesadaran masyarakat terhadap pembangunan pariwisata masih minim, terutama masyarakat sekitar tempat obyek wisata. (8) rendahnya promosi dibidang pariwisata.

Bidang Pertanian, Permasalahan bidang pertanian mencakup antara lain : (1) pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistim pertanian; (2) Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas; (3) Infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai; (4) tata niaga produk pertanian belum terkendali dengan baik; (5) tinginya alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan; (6) rendahnya tingkat pendidikan petani (7) Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan sarana produksi; (8) Minat generasi muda terhadap usaha pertanian yang semakin minim.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi dan sumber daya mineral adalah antara lain : (1) Rasio elektrifikasi rumah tangga belum memadai; (2) Ketersediaan sarana dan prasarana jaringan Listrik dan PLN belum maksimal dan belum menjangkau semua wilayah Maluku Utara; (3) Penyediaan sumber-sumber energi alternatif, seperti PLTU, dan PLTS, belum optimal (4) pengelolaan potensi Minyak Bumi (Blok Halmahera I, Halmahera II dan Blok Obi sampai saat ini masih tahap pelelangan/pasca pelelangan); (5) Penambangan sumberdaya mineral terutama yang tergolong galian C masih banyak dilakukan secara tradisional dan tidak terkontrol dengan baik; (6) pemberian izin pertambangan yang masih tumpang tindih.

Bidang Perdagangan, Permasalahan bidang perdagangan antara lain : (1) masih terbatasnya sarana prasarana perdagangan; (2) Belum adanya pusat distribusi lokal; (3) Masih adanya pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; (4) Lemahnya pengawasan ekspor-impor; (5) Infrastruktur pendukung aktifitas perdagangan belum memadai; (6) rendahnya pengolahan nilai tamba SDA; (7) Skala usaha tenaga kerja pada sektor pertanian sangat rendah yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian dan rendahnya ekspor.

Bidang Perindustrian, permasalahan bidang perindustrian antara lain: (1) Masih lemahnya penguasaan teknologi industri; (2) Daya saing mutu desain dan produk industri yang belum maksimal; (3) Masih rendahnya kemampuan SDM pelaku industri; (4) Belum memadainya sarana penunjang industri.

Bidang Transmigrasi, Permasalahan bidang ketransmigrasian, antara lain: (1) minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi; (2) Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan; (3) Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai; (4) Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian.

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah, Permasalahan antara lain : (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan secara efektif; (2) Perlunya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh aparat pemerintah secara berkesinambungan; (3) Perlunya penataan kelembagaan yang efisien dan tepat fungsi; (4) aspek ketatalaksanaan (SOP, SPM, standar belanja umum, SPI) belum terinci secara jelas; (5) rendahnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi; (6) belum terlaksananya pelayanan publik yang prima; (7) belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antar SKPD, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih; (8) Permasalahan tapal batas antar wilayah administratif;

Bidang Perencanaan Pembangunan, permasalahan antara lain: Permasalahan di bidang perencanaan pembangunan, antara lain; (1) Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya formasi jabatan fungsional perencana; (2) Belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang; (3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD; (4) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (5) Belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen penganggaran kabupaten/kota; (6) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Keuangan dan Inspektorat, pengelolaan keuangan dan aset masih *disclaimer* menurut opini BPK;

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, (1) Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan latihan aparatur yang representatif; (2) Terbatasnya tenaga widyaiswara;

Penelitian dan Pengembangan, minimnya fasilitasi penelitian pengembangan wilayah;

Permasalahan Pembangunan dari Lingkungan Strategis Eksternal.

Permasalahan-permasalahan pembangunan dari lingkungan strategis eksternal yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan Provinsi Maluku Utara, antara lain:

1. Lingkungan Strategis Internasional

- 1) Perubahan iklim global (*global warning/climate change*);
- 2) Demokratisasi dan penguatan tuntutan hak asasi manusia;
- 3) Pembangunan yang berorientasi MDGs;
- 4) Pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai antisipasi krisis energy;
- 5) Tuntutan kualitas produksi yang ramah lingkungan pada pasar global;
- 6) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mendorong interaksi jejaring ekonomi, sosial, politik dan IPTEK sangat terbuka;
- 7) Adanya penyakit endemic HIV dan AIDS dengan fenomena gunung es;
- 8) Adanya praktek perdagangan narkoba dan obat-obatan psikotropika;
- 9) Wilayah perbatasan Negara di Laut Pasifik sebagai daerah rawan perdagangan illegal, penyelundupan dan imigran gelap;
- 10) Tiga pusat pertumbuhan dunia (Sidney, Tokyo, Los Angeles) serta peluang Blok Perdagangan Internasional seperti AFTA, APEC, NAFTA, ACFTA, dan WTO serta MEA 2015 (*Asean Connectivity* dan *Asean Open SKY*).

2. Lingkungan Strategis Nasional

- 1) Tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Dinamika pelaksanaan otonomi daerah, dengan tuntutan pemekaran wilayah sejumlah daerah;

- 3) Gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum;
- 4) Rendahnya daya saing, produktivitas dan nilai tambah produksi nasional;
- 5) Masih rendahnya mutu tenaga kerja;
- 6) Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan MP3EI maupun KEK;
- 8) Ketimpangan pembangunan antara kawasan Indonesia bagian barat dan timur;
- 9) Pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih meng-global.
- 10) Menurunnya daya dukung lingkungan.

Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisa dan gambaran permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta mempertimbangkan permasalahan lingkungan strategis internasional maupun strategis nasional, selanjutnya dilakukan tahapan analisis guna mengidentifikasi isu-isu strategis. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, signifikan terhadap pembangunan daerah dan masyarakat, serta mempertimbangkan janji politik yang hendak diwujudkan. Maka hasil dari analisis tersebut, terumuskan 6 (enam) isu strategis, yakni sebagai berikut :

a. Isu Strategis 1 : Pendidikan dan Kesehatan

Belum memadainya sarana prasarana pendidikan, kualifikasi pendidikan, rendahnya angka partisipasi sekolah, penjaminan mutu pembelajaran serta tingginya angka putus sekolah; sarana prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan pelayanan dasar kesehatan; tingginya AKI, AKBA, AKB, serta revitalisasi dan promosi kesehatan. Penyebab dari hal tersebut antara lain faktor geografis yang berupa kepulauan dan daerah terisolir sehingga sulit dijangkau serta masih rendahnya kualitas SDM.

b. Isu Strategis 2 : Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi serta Pengembangan Investasi dan Iklim Usaha

Rendahnya budaya kerja dan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan

kesejahteraan. Selain itu belum tertata dengan baiknya regulasi dan pelayanan investasi yang memberi gairah pada tumbuhnya iklim usaha, stabilitas keamanan wilayah, dan tata kelola pemerintahan yang belum memudahkan investasi dan iklim usaha.

c. Isu Strategis 3 : Infrastruktur, Sarana Prasarana Pemerintahan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Infrastruktur dan moda transportasi intra dan antarpulau yang belum bisa menembus isolasi dan mengkoneksi wilayah kepulauan terutama *remote area* yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan serta kesehatan, tumbuh-kembangnya investasi, perdagangan dan pariwisata di Maluku Utara. Sarana dan prasarana Pemerintahan yang belum memadai mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik. Akibat dari aktivitas ekonomi masyarakat dan usaha-usaha pengelolaan sumberdaya alam dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup serta posisi geostrategis Maluku Utara yang rawan terhadap berbagai bencana.

d. Isu Strategis 4 : Kehidupan beragama dan Kebudayaan

Kehidupan beragama yang kondusif dan terjamin menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembangunan. Selain itu kebudayaan lokal perlu dipatenkan untuk pemertabatan masyarakat Maluku Utara yang majemuk.

e. Isu Strategis 5 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum optimal yang berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

f. Isu Strategis 6: Pembangunan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau, Daerah Perbatasan, Terpencil, Tertinggal dan Kawasan Khusus.

Pembangunan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau, Daerah Perbatasan, Terpencil, Tertinggal dan Kawasan Khusus terisolasi dikarenakan belum terbangunnya infrastruktur yang terintegrasi mengakibatkan rendahnya layanan pendidikan dan kesehatan serta lambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan sumberdaya manusia.



BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Kondisi dan perkiraan capaian ekonomi daerah Tahun 2013-2016 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1. Kondisi dan Target Ekonomi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2015

No	INDKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja (Tahun)		Perkiraan Tahun Berjalan (2015)*
		2013	2014	
1.	Pertumbuhan PDRB (Persen) TD 2000	6,12	5,72	6,26
	Pertumbuhan PDRB (Persen) TD 2010	6,37	5,49	-
2.	PDRB Perkapita ADHK (Jt. Rp) TD 2000	3,28	3,40	3,53
	PDRB Perkapita ADHB (Jt. Rp) TD 2000	6,93	7,65	
	PDRB Perkapita ADHK (Jt. Rp) TD 2010	16,33	16,87	
	PDRB Perkapita ADHB (Jt. Rp) TD 2010	19,23	21,12	
3.	Volume Ekspor (kg)	19,486,759,613	17,336,138	25,240,876,865
4.	Volume Impor (Kg)	7.026.382	11.706.298	16,386,214
5.	Laju Inflasi (Persen)	9,78	9,34	5,32
6.	Tingkat Pengangguran	3,80	5,29	5,05
7.	Persentase Penduduk Miskin	7,64	7,41	6,24
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.63	-	71.15

Sumber : - BPS Provinsi Maluku Utara (beberapa tahun, diolah)

Ket : *) sumber data : RPJMD Maluku Utara 2014-2019

3.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2016

3.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah

Dengan potensi sumber daya alamnya yang relatif belum berkembang, masih terbuka peluang bagi wilayah ini memacu pertumbuhan ekonomi lebih pesat. Kondisi ini apabila dikelola dengan baik, tidaklah berlebihan kemudian diprediksikan perkembangan perekonomian Maluku Utara tumbuh dengan laju moderat.

Tantangan dalam percepatan pertumbuhan Maluku Utara adalah pengelolaan sistem distribusi dan rantai pasokan wilayah khususnya bahan pangan dan energi, mengingat karakter wilayah Maluku Utara berupa kepulauan, rawan mengalami inflasi pada saat kondisi cuaca buruk (gelombang tinggi). Peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah sangat besar, baik dalam pembentukan output wilayah maupun penyerapan tenaga kerja. Pangsa sektor pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih dominan (25,72 persen di Tahun 2014), sementara dalam penyerapan tenaga kerja juga berkontribusi besar. Sektor berikutnya dengan peran berarti adalah perdagangan dan jasa-jasa. Sementara itu industri pengolahan mulai bergeliat, nampak dari sumbangannya dalam PDRB yang baru mencapai 5,22 persen.

Keunggulan Provinsi Maluku Utara di sektor pertanian khususnya yang berasal dari subsektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya laut, juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam PDRB. Penetapan wilayah Maluku-Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta memicu pengembangan industri pengolahan ikan.

Sementara itu, investasi swasta baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Maluku Utara masih sangat kecil. Kendala yang dihadapi terutama minimnya infrastruktur wilayah serta iklim investasi. Belum berkembangnya industri bernilai tambah tinggi dan rendahnya investasi tergambar pada rendahnya pendapatan per kapita.

Di bidang sosial, tingkat pengangguran terbuka di wilayah ini terus menunjukkan penurunan. Rendahnya pengangguran di satu sisi dan rendahnya tingkat pendapatan per kapita di sisi lain menunjukkan rendahnya kualitas pekerjaan dan produktivitas pekerja. Tingkat kemiskinan di Maluku Utara terus menurun dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, jika dilihat hingga ke kabupaten/kota masih terdapat beberapa kabupaten yang tingkat kemiskinan masih sangat tinggi bahkan diatas tingkat kemiskinan nasional.

Untuk mendorong perekonomian Maluku Utara, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan. Sedangkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pembangunan diarahkan

untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Tantangan perekonomian daerah lainnya menyangkut upaya pemantapan tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya pembangunan Maluku Utara diarahkan pada peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola yang akan dilakukan dengan strategi: meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah, meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disamping itu, pembangunan juga tetap diarahkan untuk penguatan kedaulatan wilayah melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan (terutama daerah perbatasan, terluar dan terpencil), peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan serta percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam.

Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Maluku Utara.

3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah

Prospek Pertumbuhan Ekonomi. Dengan melihat kecenderungan dan arah perekonomian daerah saat ini, dimana ekonomi Maluku Utara triwulan IV-2014 meningkat 1,38 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), serta triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya (triwulan IV-2014) tumbuh sebesar 0,10 persen

(q-to-q) maupun triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,27 persen, maka kedepan, dipredikasikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara 2015 diperkirakan tumbuh positif, berkisar pada angka 6,26 persen \pm 1% (y-o-y), atau meningkat 0,7 persen (qtq) jika dihitung secara triwulanan. Konsumsi masyarakat diperkirakan masih akan menjadi penggerak utama perekonomian dari sisi penggunaan. Hal ini sesuai perkiraan ekonomi konsumen pada Triwulan I-2015 yang terindikasi melalui nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) sebesar 108,31 persen atau diatas batas nilai optimis sebesar 100.

Dari sisi PMTB atau investasi, kelanjutan beberapa proyek pada tahun 2014 maupun proyek baru pada 2015 diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada pertumbuhan PDRB 2015.

Prospek Inflasi Daerah. Realisasi inflasi di Maluku Utara (Kota Ternate) pada Tahun 2014 tercatat sebesar 9,34 persen (y-o-y). Pada Tahun 2014, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Adapun perubahan indeks harga konsumen (IHK) dari tertinggi-terendah menurut kelompok pengeluaran yaitu: kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 18,59 persen; kelompok kesehatan 16,48 persen; kelompok sandang 16,20 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 10,93 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 7,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 6,74 persen; serta kelompok bahan makanan 4,32 persen.

Secara kumulatif tahun 2014, kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi masing-masing sebagai berikut: kelompok bahan makanan 0,95 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 2,50 persen; kelompok sandang 0,80 persen; kelompok kesehatan 0,56 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,31 persen; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 2,76 persen.

Namun demikian, dengan melihat kecenderungan ekonomi dan perkembangan harga kedepan, diprediksi inflasi daerah berada pada level pesimis yaitu 5,32 persen \pm 1% (y-o-y) di Tahun 2015. Tentunya dengan harapan terjadinya stabilisasi harga

dari masing-masing kelompok pengeluaran (terutama yang berkontribusi besar terhadap inflasi di 2014).

Prospek Perbankan. Sejalan dengan kondisi ekonomi Maluku Utara yang diperkirakan meningkat, kondisi sektor perbankan diperkirakan tumbuh positif. Hal ini didasarkan pada kecenderungan pertumbuhan perbankan yang meningkat seiring dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan jasa ini. Jumlah Bank di Maluku Utara pada tahun 2014 tercatat 89 buah atau meningkat sebesar 7,2 persen dari tahun sebelumnya (tahun 2013) yang meliputi kantor cabang maupun cabang pembantu dan kantor kas. Aset perbankan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 8,33 persen (y-o-y), kemudian DPK diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 8,07 persen (y-o-y), sedangkan kredit diperkirakan masih akan mencatatkan pertumbuhan tinggi yaitu sebesar 9,50 persen (y-o-y).

3.2.3. Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2016

Mencermati tantangan dan prospek perekonomian daerah, maka target kinerja makro pembangunan daerah Tahun 2016 diasumsi optimis dan tumbuh seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Target Kinerja Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja		TARGET CAPAIAN (TAHUN)
		≤ 2014 (tahun)	Prediksi 2015	2016
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1 <i>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>				
a.	Pertumbuhan PDRB (Persen)	5,72 (2014)	6,26	6.4
b.	Laju Inflasi (Persen)	9,34 (2014)	5,32	4,70
c.	Indeks Gini	0.33 (2013)	0,32	0.315
d.	Persentase Penduduk Miskin	7,41 (2014)	6,24	5,54
e.	Tingkat Pengangguran	5,29 (2014)	5,05	4,82
f.	PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp)	3.40 (2014)	3.53	3,64
h.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.63 (2013)	71,15	71.67
2 <i>Kesejahteraan Sosial</i>				
a.	Jumlah Penduduk	1,138,667 (2014)	1.162.300	1,185,900
a.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24 (2013)	2,19	2.14
b.	Angka Melek Huruf (Persen)	96,43 (2013)	96,91	97,15
c.	Angka Rata-rata lama Sekolah (persen)	8,71 (2013)	8,81	8,86

B. ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Pelayanan Urusan Wajib			
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Dasar :			
1.1.1	Angka Partisipasi Murni	95,46 (2013)	95,97	96,494
1.1.3	Rasio Guru/Murid	12.36 (2013)	meningkat (rata)	meningkat (rata)
1.2	Pendidikan Menengah :			
1.2.1	Angka Partisipasi Murni SMP	70,60 (2013)	71,15	71,67
1.2.2	Rasio Guru/Murid SMP	13.89 (2013)	meningkat (rata)	meningkat (rata)
1.2.3	Angka Partisipasi Murni SMA	59,21 (2013)	61,08	62,95
1.2.4	Rasio Guru/Murid SMA	15.2 (2013)	meningkat (rata)	meningkat (rata)
2	Kesehatan			
2.1	Meningkatkan PHBS pada RT (%)	13 (2014)	30	45
2.2	PKM Rawat Inap PONEK (%)	55 (2014)	63	70
2.3	RS Kab./Kota PONEK (%)	33 (2014)	40	55
2.4	Rasio Dokter Umum/100.000 Penduduk	12,6 (2014)	14	16
2.5	Desa UCI (%)	73 (2014)	75	80
2.6	Usia Harapan Hidup	66,97 (2013)	68,87	70,77
2.7	Jumlah Kematian Ibu/100.000 KH	319 (2014)	309	299
2.8	Jumlah Kematian Bayi/1.000 KH	52 (2014)	45	38
2.9	Prevalensi TB per 100.000 penduduk	143 (2014)	145	150
2.10	Malaria (API) per 1.000 penduduk	3,4 (2014)	3,2	3,0
	Pelayanan Urusan Pilihan			
	Pertanian			
1.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	33,77 (2013)	35,27	36,77
2.	Kehutanan			
2.1	Luas Hutan Lindung (Ha)	583,975.82 (2013)	Meningkat	Meningkat
C ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1.	Kemampuan Ekonomi			
1.1	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per bulan (Makanan)	333.220 (2013)	356.383	367,964
1.2	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per bulan (Non Makanan)	286.614 (2013)	319.503	335,948
1.3	Volume Ekspor (kg)	11.706.298 (2014)	25.240.876.865	28.117.935.490
2.	Pertanian			
2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,59 (2013)	102,61	103,62
2.2	Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat (Ton)	99.264,99 (2013)	131.851	148.144
	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur			
1.	Infrastruktur Wilayah			
1.1	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi / KSP yang terakses dengan kendaraan roda empat (KSP)	5 (2014)	6	7
1.2	Jumlah KSP yang terisolasi / terpencil yang terakses kendaraan roda empat	5 (2014)	6	7
1.3	Jumlah simpul interkoneksi sistem jaringan jalan yang terakses kendaraan roda empat (simpul)	14 (2014)	15	16
1.4	Jumlah Sumber air baku yang terbangun, terjaga kelestariannya dan yang direhabilitasi (lokasi)	0 (2014)	2	4

1.5	Pengamanan Pantai dan penanganan sungai berpotensi banjir (lokasi)	37 (2013)	47	57
1.6	Jumlah Terminal Penumpang (unit)	22 (2013)	23	24
1.7	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan/ Ferry (unit)	27 (2013)	28	29
1.8	Jumlah Pelabuhan Laut (unit)	32 (2013)	34	36
1.9	Jumlah Bandara (unit)	11 (2013)	11	11
1.10	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis (dokumen)	6 (2014)	10	10
1.11	Cakupan pelayanan air minum (%)	57,40 (2013)	58,5	59,5
1.12	Cakupan pelayanan Sanitani (%)	57,35 (2013)	59,85	60,85
1.13	Jumlah Rumah Kumuh (%)	13,03 (2013)	12,8	12,6
1.14	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) (%)	67,56 (2013)	70,47	73,47
1.15	Persentase rasio desa berlistrik (%)	58,29 (2013)	74,30	76,30
1.16	Rasio RT yang memiliki telepon Seluler (%)	76,78 (2013)	80	83
1.17	Jumlah Dokumen Rencana Umum Tata Ruang (dokumen)	10 (2014)	11	11
1.18	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	0 (2014)	1	5
1.19	Rasio Ketaatan Tata Ruang	BAD (2014)	60	62,5

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan tantangan dan prospek perekonomian daerah, maka arah kebijakan perekonomian daerah pada Tahun 2016 terutama kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pemantapan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah. Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan iklim usaha untuk mendorong investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur pajak dan retribusi serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Dalam kaitan itu beberapa kawasan strategis dan cepat tumbuh terutama di Ternate, Soasio, Sofifi dan Sidangoli yang kawasan segi empat pertumbuhan akan

dikembangkan dengan memberikan insentif yang tepat sasaran. Demikian pula kawasan tumbuh cepat Pulau Morotai, baik sebagai kawasan pertahanan keamanan maupun kawasan perbatasan yang posisinya sangat strategis dari sisi geopolitik maupun geostrategi akan dikembangkan dengan memberikan kemudahan investasi, oleh karena telah ditetapkan sebagai Kawasan ekonomi khusus (KEK).

Di samping itu, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja.

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi daerah dipertahankan melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah terutama dalam pemanfaatan keuangan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi sektor riil serta pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang mengarah pada ketahanan keuangan daerah dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, utamanya PAD. Stabilitas ekonomi dalam dua tahun mendatang didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui intermediasi lembaga-lembaga keuangan dan jaring pengaman sistem keuangan daerah.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, APBD Provinsi Maluku Utara yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dimana secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis: pertama, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan kedua, pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum dan pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara. Sedangkan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Maluku Utara.

3.4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

3.4.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan keuangan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai Penerimaan Provinsi Maluku Utara sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan cara :

- (a) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- (b) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota dan POLRI;
- (c) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kie Raha Mandiri dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- (d) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- (e) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan
- (f) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut: (a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN) dan PPh Pasal 21; (b) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Daerah; dan (c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan upaya peningkatan Dana Perimbangan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Hibah dilakukan melalui upaya meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah, serta memperluas jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui: (1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; (2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; (3) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; (4) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet; (5) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001- 2000; (6) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat; (7) Revitalisasi BUMD/Perusda melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar BUMD/Perusda berjalan sesuai dengan peraturan; (8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; (9) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah; dan (10) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil/penyumbang pendapatan.

Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui : (1) Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; (2) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan; (3) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim intensifikasi PBB dan memberikan intensif kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja baik; (4) Meningkatkan keterlibatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perhitungan lifting Migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan (5) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.

3.4.3 Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan.

3.4.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui : (a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan; (b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial; (c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari

Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

3.4.6 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah : (a) Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (hasil efisiensi dan penghematan), hasil penjualan aset daerah yang tidak produktif atau tidak memiliki kemanfaatan ekonomis. Penerimaan pinjaman sejauh mungkin diarahkan untuk kepentingan yang mendesak/urgen dan bersifat investasi; dan (b) Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk dana cadangan, penyertaan modal, dana bergulir, pengembalian atas pinjaman dan sisa lebih tahun berjalan sebagai potensi penerimaan tahun berikutnya.

3.4.7 Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Realisasi dan perkiraan kerangka pendanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2016 yang terdiri dari rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan disajikan dalam gambar berikut :

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Maluku Utara

NO.	URAIAN	REALISASI (Rupiah)			Proyeksi APBD (Rupiah)
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendapatan Daerah	1.318.585.971.322,39	1.737.758.776.000	1.827.927.649.000	2.077.275.000.000
2	Belanja Daerah	1.390.228.962.806,00	1.759.308.000.000	1.824.427.649.000	2.073.223.000.000
3	Pembiayaan Daerah	(96.876.523.829,64)	(21.549.224.000)	3.500.000.000	4.052.000.000

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Maluku Utara (beberapa tahun)
BAPPEDA Provinsi Maluku Utara (beberapa tahun)
) * Angka Proyeksi/estimasi



BAB 4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2016

Guna mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Maluku Utara serta sinkronisasi prioritas Daerah dan Prioritas Nasional, maka perlu dirumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016. Adapun Prioritas Nasional sebagaimana mengacu pada RPJMN 2015-2020 dikenal dengan NAWACITA yang memuat 9 (sembilan) Agenda Prioritas sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Dengan mengacu pada Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2014-2019,

maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 ini diarahkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang;
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya; serta
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Visi, Misi serta Slogan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Visi pembangunan daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014–2019 yakni :

“Maluku Utara CINTA 2019”

Untuk mewujudkan visi CINTA, ada 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri **(Misi Cerdas)**.
2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan **(Misi Indah)**.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah **(Misi Nikmat)**.
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara **(Misi Taqwa)**.
5. Memperbaiki tatakelola pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan berwibawa **(Misi Aman)**.

Moto/Slogan

"Dari Laut Membangun Maluku Utara"

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan pendekatan ‘Gugus Pulau’ dan ‘Laut Pulau’ dengan pembagian berdasarkan kesamaan ekosistem, sosial budaya (kependudukan), transportasi, potensi sumberdaya alam dan perekonomian. Pendekatan ‘Gugus Pulau’ didasarkan pada aspek-aspek yang terkait meliputi pola pengelompokan ruang, kondisi unsur fisik wilayah (kawasan lindung dan kawasan budidaya), jaringan transportasi, sistem pusat-pusat permukiman, serta interaksi antar wilayah dan sub wilayah (konektifitas). Sedangkan, pendekatan ‘Laut Pulau’ yaitu memadukan laut dan pulau-pulau. Laut dianggap sebagai wilayah potensial, untuk dapat dibudidayakan sebagai kawasan produksi. Kawasan ‘Laut Pulau’ dicirikan oleh adanya simpul pertumbuhan antar pulau yang terpisah oleh laut dengan berbagai potensi yang terdapat didalamnya. Pendekatan ini digunakan dengan maksud mengoptimalkan pengembangan wilayah-wilayah di Provinsi Maluku Utara. Pendekatan ‘Gugus Pulau’ dan ‘Laut Pulau’ ini sangat efektif untuk dilakukan dalam strategi pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dan diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

Agenda pembangunan strategis

Gebrakan CINTA Gosale Puncak merupakan agenda pembangunan strategis untuk mewujudkan visi CINTA, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) gebrakan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan), melalui :
 - Bantuan Operasional (BOP) bagi Perguruan Tinggi, peningkatan kualifikasi guru, dosen dan aparatur ke jenjang pendidikan S1, S2 dan S3;
 - Bantuan beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi;
 - Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya;
 - Penambahan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, keperawatan dan dokter/dokter spesialis;
 - Percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Sofifi.
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui:
 - Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kelembagaan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau;

- Pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap 10 - 30 GT dan >30 GT;
- Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pengolahan potensi kelautan dan perikanan (Pabrik pengalengan ikan, *coldstorage*, pembangkit listrik, dermaga pendaratan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan);
- Peningkatan promosi potensi daerah, kerjasama investasi serta perluasan akses pemasaran melalui kerjasama antar daerah dan negara;
- Pengembangan sarana prasarana destinasi pariwisata;
- Ekstensifikasi/intensifikasi areal pertanian dan penataan jaringan irigasi yang mendukung swasembada pangan dan membentuk kawasan *hiterland* sebagai penyangga (lumbung pangan) bagi pulau Ternate pulau Tidore, Sofifi, dan wilayah sekitarnya;
- Perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan masyarakat;

3. Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang melalui:

- Pembangunan jalan dan jembatan jalan lingkar (*ring road*) Halmahera, kawasan strategis, sentra produksi, dan simpul penyeberangan antar pulau;
 - Penambahan armada dan frekuensi perjalanan sarana transportasi laut;
 - Peningkatan rasio elektrifikasi atau desa teraliri listrik dan pengembangan energi baru terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik dan pemasangan PLTS;
 - Percepatan pembangunan rumah dinas pejabat eselon II, rumah dinas PNS, rumah dinas bagi anggota DPRD Provinsi di Sofifi, serta pengembangan perumahan tidak layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah;
 - Fasilitasi pengembangan sarana prasarana informasi dan telekomunikasi di seluruh wilayah;
 - Fasilitasi pengembangan bandara Leo Wattimena Morotai sebagai persiapan bandara embarkasi haji;
 - Percepatan pengembangan bandara Kuabang Kao sebagai Bandara Utama;
 - Percepatan pembangunan sanitasi permukiman dan air minum layak;
 - Percepatan pembangunan terminal Type B Kota Sofifi dan pembebasan lahan;
- dan

- Peningkatan pengawasan, pengendalian lingkungan hidup dan rehabilitasi hutan, lahan dan daerah aliran sungai (DAS) dan normalisasi/penataan Danau Galela.
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya, melalui:
- Fasilitasi pengiriman tenaga-tenaga pembina keagamaan dan bantuan sarana peribadatan;
 - Pengembangan pemondokan dan pelayanan haji;
 - Pengembangan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga adat/budaya guna mendukung kelestarian budaya lokal;
 - Pengembangan budaya lokal dan budaya kreatif melalui melalui penyusunan peta jalan (*road map*) pengembangan kebudayaan Maluku Utara yang berbasis dan berorientasi kemajemukan;
 - Pembangunan Masjid Raya Provinsi, Gereja Oikoumene, dan Percepatan Pembangunan GOR Sofifi.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, melalui:
- Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur;
 - Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - Penerapan *e-Government*;
 - Penataan manajemen aparatur;

Pendekatan yang digunakan dalam mewujudkan 33 Gebrakan CINTA Gosale Puncak adalah pendekatan koordinatif lintas-pemerintah daerah, lintas-sektor, serta kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta. Gebrakan ini merupakan bagian dari program dan kegiatan dalam alur skala prioritas.

4.2. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Dalam mengantisipasi isu-isu strategis serta sejalan dengan Visi dan Misi Provinsi Maluku Utara untuk periode 2014-2019, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Prioritas 1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Sasaran :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam **Prioritas 1** di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas SDM
2. Meningkatnya sarana dan prasarana di semua jenjang dan jenis pendidikan
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota

Strategi :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan dengan biaya yang terjangkau;
2. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan aparatur;
3. Penuntasan Buta Aksara;
4. Peningkatan peran pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
6. Peningkatan PUG, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan Anak;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas Kependudukan dan peserta KB;
8. Pembinaan dan pengembangan minat baca, perpustakaan dan kearsipan daerah
9. Pembinaan dan peningkatan peran, sarana prasarana dan kelembagaan pemuda dan olahraga;
10. Peningkatan jaminan perlindungan sosial;
11. Pembinaan kelembagaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial;

12. Peningkatan SDM dan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan serta pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
13. Peningkatan sarana prasarana pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SLB dan Pendidikan Tinggi;
14. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
15. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat;
16. Peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
17. Penurunan angka kematian ibu dan bayi/balita.
18. Pengembangan Sistem pembiayaan kesehatan skala provinsi;
19. Peningkatan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan;
20. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
21. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
22. Peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit;

Arah Kebijakan :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada :

1. Penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pemberian beasiswa miskin dan berprestasi;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan, dosen dan Aparatur ke jenjang pendidikan S1, S2 dan S3;
3. Peningkatan akreditasi pendidikan;
4. Peningkatan kesadaran minat baca tulis dan kejar paket A,B, dan C;
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
6. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan
7. Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah dan Antar Kerja Negara serta peningkatan penyerapan tenaga kerja ada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penyediaan lapangan pekerjaan kerjasama dengan pihak swasta

8. Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit serta peningkatan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh
9. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam berwirausaha.
10. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
11. Mewujudkan Pengarustamaan Hak-hak Anak (PUHA) melalui pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak serta pengembangan forum anak secara berjenjang.
12. Mencegah terjadinya praktek perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*) dan dari kekerasan dan pornografi;
13. Mewujudkan Pengarustamaan gender melalui penguatan data terpilah, perencanaan pembangunan yang responsif gender dan anggaran responsif gender;
14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB melalui promosi, peningkatan kesadaran dan penyediaan media KB;
15. Meningkatkan jejaring kerjasama serta meningkatkan peran pemangku kepentingan bidang kependudukan.
16. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan SDM di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah
17. Melaksanakan pelayanan dan kapasitas perpustakaan tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota
18. Meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat memanfaatkan Perpustakaan melalui pengadaan/ pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan bahan perpustakaan dan arsip daerah;
20. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas Perpustakaan di tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/ kota.
21. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan peran lembaga pemuda dan olahraga melalui keterlibatan dalam proses pembangunan;
22. Meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme atlit dan pelatih melalui pembinaan dan kompetisi secara berjenjang;

23. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang olahraga dan kepemudaan.
24. Peningkatan intensitas dan kualitas melalui perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum
25. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan serta jaminan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
26. Program Penanggulangan Korban Bencana
27. Meningkatkan pembinaan peran Lembaga Sosial;
28. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis individu/keluarga, komunitas, pemberdayaan ekonomi serta koordinasi lintas sektor dan dunia usaha;
29. Meningkatkan profesionalisme, fasilitas operasional dan kesejahteraan tenaga kesejahteraan sosial;
30. Meningkatkan kompetensi masyarakat dan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan;
31. Meningkatkan nilai tambah potensi dan kearifan lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
32. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan kualitas pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
33. Pembangunan dan rehabilitasi gedung serta pengadaan sarana pendidikan;
34. Peningkatan sarana dan mutu pendidikan Khusus;
35. Peningkatan sarana dan mutu pendidikan luar biasa (Disable);
36. Peningkatan akses pendidikan pada daerah terpencil dan terisolir;
37. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kebersihan/kesehatan lingkungan;
38. Meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat;
39. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
40. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
41. Meningkatkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin;

42. Meningkatkan akses informasi dan promosi kesehatan;
43. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidan, perawat, dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya;
44. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit;
45. Meningkatkan Kualitas pelayanan di Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit sesuai SOP, serta mewujudkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya;

Prioritas 2. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Sasaran :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam **Prioritas 2** di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta terwujudnya industri yang berbasis sumber daya alam;
2. Tercapainya usaha pertanian yang mampu mewujudkan Kemandirian pangan;
3. Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sumber pendanaan dan pasar;
4. Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja lokal dan membaiknya pendapatan per kapita.
5. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkualitas.

Strategi :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif;
2. Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian;
3. Pengembangan Kawasan Andalan, Kawasan Strategis, Kawasan Ekonomi Khusus dan Pusat Pertumbuhan baru.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian;
5. Pengembangan sentra pertanian sebagai *hinterland* yang melayani wilayah perkotaan;

6. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian;
7. Peningkatan ketersediaan dan penguatan cadangan pangan.
8. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui program industrialisasi;
9. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
10. Pengembangan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
11. Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal
12. Peningkatan koordinasi, promosi, kerjasama perdagangan dan investasi;
13. Peningkatan dukungan usaha bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Perbankan;
14. Peningkatan kinerja dan daya saing Perusda.
15. Pemetaan dan pengembangan potensi, teknologi dan jumlah industri dan peningkatan produksi;
16. Pengawasan terhadap dampak proses produksi pada industri;
17. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang;
18. Pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri;
19. Perlindungan konsumen dan pasar tradisional;
20. Peningkatan pengawasan dan pengujian barang, produk industri dan jasa;
21. Pengembangan program desa nelayan mandiri (DNM)
22. Peningkatan Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa;
23. Penyesuaian Upah Minimum Provinsi.
24. Penguatan SDM dan kelembagaan industri pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
25. Pembangunan dan pengembangan pemukiman transmigrasi pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal serta pembinaan dan pemberdayaan transmigrasi
26. Perlindungan dan pengawasan kawasan hutan serta Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar kawasan hutan;
27. Peningkatan produksi, pemanfaatan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
28. Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata, berbasis lingkungan dan tanggap bencana;

29. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pengelola lingkungan hidup;
30. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Arah Kebijakan :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada :

1. Meningkatkan upaya penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif melalui perbaikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur;
2. Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)
3. Peningkatan database penanaman modal melalui teknologi informasi
4. Konsolidasi dan sinkronisasi perencanaan penanaman modal di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota
5. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
6. Peningkatan capaian realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7. Memantapkan dan menumbuhkan semangat kewirausahaan;
8. Pengembangan sumber daya manusia petani dan penyuluh/petugas;
9. Mengembangkan Kawasan Andalan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai dan kawasan strategis maupun mendorong pembentukan pusat pertumbuhan baru lainnya.
10. Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas komidi unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan serta Mengendalikan gangguan hama dan penyakit tanaman, dan ternak;
11. Mengembangkan kawasan ekonomi produktif melalui pengelolaan komoditas unggulan secara terpadu (hulu-hilir).
12. Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan;
13. Meningkatkan kinerja sumber daya petani, pelaku usaha dan aparatur kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan;
14. Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
15. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan konsumsi pangan;
16. Meningkatkan upaya ketersediaan dan penguatan stok cadangan pangan;

17. Penguatan kelembagaan SDM dan IPTEK serta meningkatkan akses modal usaha perikanan
18. Mengembangkan industri perikanan secara terpadu pada sentra-sentra produksi
19. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
20. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
21. Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya.
22. Penciptaan iklim investasi yang sehat dan menarik melalui kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
23. Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan;
24. Meningkatkan pembinaan, dukungan akses terhadap modal dan pasar serta perlindungan bagi koperasi dan UMKM;
25. Meningkatkan kualitas SDM dan produk, akses teknologi dan pasar bagi koperasi dan UMKM;
26. Meningkatkan perhatian dan partisipasi lembaga keuangan non Perbankan terhadap koperasi dan UMKM;
27. Meningkatkan kinerja dan Daya Saing Perusda Kie Raha Mandiri.
28. Peningkatan promosi dan pemasaran produk industri;
29. Peningkatan pengendalian usaha industri.
30. Meningkatkan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan;
31. Meningkatkan distribusi dan tataniaga hasil produksi serta akses pangan masyarakat;
32. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien;
33. Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri;
34. Pengembangan wadah dan kelembagaan kemitraan;
35. Peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana pasar tradisional;
36. Meningkatkan kemampuan permodalan dan menerapkan SNI, *good manufacturing practices* (GMP), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), GKM dan ISO;

37. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kelautan
38. Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara penyedia lapangan pekerjaan dengan pekerja;
39. Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan kerjasama dengan pihak swasta;
40. Meningkatkan kualitas dan tertib usaha serta tertib tera dan tera ulang, monitoring, pengembangan laboratorium dan pengembangan kapasitas SDM pengawasan;
41. Meningkatkan dan menyesuaikan Upah Minimum Provinsi dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Upah Minimum Provinsi
42. Peningkatan kompetensi, kualitas, kreatifitas dan standar SDM;
43. Peningkatan inovasi produk, standar usaha dan sinergitas kelembagaan;
44. Meningkatkan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk/komoditi;
45. Peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, sinergitas pemasaran pariwisata antara pemerintah dengan dunia usaha yang berkelanjutan;
46. Pembangunan pemukiman transmigrasi pada kawasan strategis dan tertinggal melalui pemanfaatan potensi SDA untuk pembangunan kawasan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi
47. Meningkatkan SDM transmigrasi dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi serta pembinaan masyarakat transmigrasi
48. Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan termasuk masyarakat sekitar kawasan lindung;
49. Revitalisasi pelayanan perizinan kehutanan melalui pelayanan terpadu dan pengembangan sertifikasi hasil hutan;
50. Penegakan hukum dan pengamanan kawasan hutan secara konsisten.
51. Melaksanakan padu serasi, konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan;
52. Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif lainnya di sekitar hutan;
53. Mengembangkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata, berbasis lingkungan dan tanggap bencana;
54. Pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan pembangunan, penyusunan neraca SDA;

55. Pengembangan kompetensi SDM lingkungan hidup melalui pendidikan teknis dan sertifikasi serta penyiapan laboratorium lingkungan hidup;
56. Pelaksanakan evaluasi ijin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum oleh tim penegakan hukum terpadu serta Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Prioritas 3. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TATA RUANG

Sasaran :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam **Prioritas 3** di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pengembangan Jaringan Jalan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
2. Terlaksananya Pemanfaat dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SDA
3. Terlindunginya wilayah permukiman dari daya rusak air
4. Mewujudkan Sistem Transportasi Wilayah
5. Meningkatkan Pelayanan Air Minum dan Akses Terhadap Sanitasi Layak
6. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan pemukiman
7. Meningkatnya jangkauan layanan Listrik;
8. Meningkatnya layanan telekomunikasi;
9. Optimalisasi fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang;

Strategi :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Penyediaan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan
2. Pengembangan Jaringan Jalan untuk melayani Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
3. Peningkatan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air;
4. Peningkatan pengendalian daya rusak air;
5. Mengembangkan sistem transportasi darat, laut dan udara;
6. Peningkatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan transportasi;
7. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;

8. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana air minum
9. Pembangunan dan pengembangan akses sanitasi;
10. Pengembangan lingkungan permukiman;
11. Penyediaan rumah Pemda
12. Penyediaan bangunan gedung
13. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman
14. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
15. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
16. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pembangunan sektor ESDM;
17. Pengembangan dan pengelolaan energi baru terbarukan;
18. Pengembangan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi dan pengelolaan informasi dan komunikasi;
19. Peningkatan kinerja fungsi perencanaan penataan ruang
20. Peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang
21. meningkatkan pelayanan jasa konstruksi;
22. Pengembangan investasi sumberdaya mineral dan minyak bumi;

Arah Kebijakan :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada :

1. Menyusun dokumen Renstra dan Renja;
2. Menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas dengan database yang akurat sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik;
3. Menyiapkan dokumen pengawasan yang berkualitas;
4. Akselerasi pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktifitas pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
5. Meningkatkan konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air;
6. Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana irigasi melalui operasi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;

7. Meningkatkan Pembangunan talud/penahan ombak/bronjong pada wilayah yang rawan terhadap daya rusak air;
8. Mengembangkan sistem konektivitas transportasi darat, laut dan udara;
9. Meningkatkan Pengawasan Standar Pelayanan Perhubungan serta keamanan dan keselamatan transportasi;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara;
11. Meningkatkan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan;
12. peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, layanan persampahan dan ketersediaan drainase perkotaan
13. Penataan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh perkotaan;
14. Pembangunan dan perawatan rumah pemda
15. Pembangunan dan perawatan bangunan gedung;
16. pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman;
17. Renovasi perumahan bagi masyarakat MBR
18. Meningkatkan pembangunan jaringan supply dan distribusi energi dan ketenagalistrikan;
19. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi dan mineral;
20. Mengembangkan pengelolaan energi PLTS/PLTA/PLTMH/PLTPB dan energi baru terbarukan lainnya;
21. Meningkatkan kualitas dan layanan jaringan internet, telpon seluler serta sarana-prasarana telekomunikasi lainnya;
22. Meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
23. Peningkatan kualitas rencana rinci tata ruang Prov, kab / kota
24. Peningkatan kualitas rencana rinci tata ruang Prov, kab/kota;
25. Peningkatan koordinasi dan sumberdaya manusia pengendalian tata ruang;
26. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
27. Menyediakan alat berat dan sarana laboratorium konstruksi;
28. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif dan percepatan pengelolaan potensi minyak bumi dan sumber daya mineral lainnya.

Prioritas 4. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA

Sasaran :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam **Prioritas 4** pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang religius;
2. Meningkatnya kehidupan dan kepedulian sosial;
3. Terwujudnya kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga keagamaan;
4. Terwujudnya seni dan budaya yang religius, tangguh, disiplin, kuat, inovatif dan kreatif.

Strategi :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Penciptaan suasana kehidupan keagamaan;
2. Penguatan peran kelembagaan antar umat beragama;
3. Peningkatan pelayanan pelaksanaan ibadah Haji;
4. Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan;
5. Peningkatan pendidikan politik masyarakat dalam upaya mengantisipasi potensi konflik;
6. Peningkatan kemitraan wawasan kebangsaan;
7. Peningkatan prasarana dan sarana peribadatan;
8. Peningkatan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Maluku Utara;
9. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah;
10. Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah;
11. Peningkatan pengelolaan, pengakuan dan perlindungan atas seni dan budaya;
12. Peningkatan kepedulian seni dan budaya.

Arah Kebijakan :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada :

1. Meningkatkan suasana kehidupan keagamaan yang rukun, aman dan damai serta memberikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat;
2. Memberi peran kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan;
3. Meningkatkan koordinasi, pelayanan dan fasilitas pelaksanaan ibadah haji dari pemberangkatan hingga pemulangan (dari dan ke embarkasi).
4. Meningkatkan peran dan fungsi pembinaan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan kaum perempuan;
5. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pencegahan terjadinya konflik;
6. Meningkatkan pelaksanaan penguatan dan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah dan sarana sosial lainnya;
8. Mengelola potensi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah secara baik dan efektif;
9. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan rasa cinta masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah;
10. Meningkatkan pemanfaatan dan pengenalan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah;
11. Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya melalui identifikasi, dokumentasi dan perlindungan;
12. Meningkatkan apresiasi dan kepedulian seni budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta.

Prioritas 5. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam **Prioritas 5** pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*);
2. Tersedianya e-Database pada SKPD yang berbasis Geospasial

3. Meningkatnya sistem prosedur dan tatakerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
4. Meningkatnya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5. Meningkatnya pelayanan prima yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha;
6. Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
7. Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

Strategi :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Penataan struktur organisasi yang proporsional;
2. Pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan.
3. Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah;
4. Penguatan pelayanan prima;
5. Pembuatan produk hukum daerah;
6. Pengelolaan manajemen ASN berbasis kebutuhan, kompetensi, pengembangan karir dan kinerja
7. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur berbasis kompetensi;
8. Peningkatan budaya organisasi dan nilai profesi pegawai ASN
9. Peningkatan sarana parasarana untuk mendukung kinerja aparat;
10. Peningkatan kinerja aparatur desa/kelurahan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan;
12. Peningkatan hubungan kemitraan antar pemangku kepentingan;
13. Peningkatan penerimaan daerah;
14. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat terkait bencana;
15. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan hukum dan HAM;
16. Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
17. Peningkatan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik;

18. Fasilitasi upaya desa membangun.
19. Peningkatan tata kelola pertanahan;
20. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;
21. Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja;
22. Penataan batas dan kode wilayah;
23. Peningkatan kualitas sumberdaya perencana;
24. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
25. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dan Pengembangan Wilayah;
26. Peningkatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
27. Peningkatan peran dan fungsi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA);
28. Peningkatan peran serta masyarakat dan partai politik dalam pembangunan;
29. Peningkatan status opini atas Laporan Pertanggungjawaban APBD;
30. Peningkatan penataan dan pengelolaan keuangan daerah;
31. Peningkatan pengelolaan administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
32. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara;

Arah Kebijakan :

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada :

1. Mengembangkan dan menyesuaikan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang proporsional sesuai kebutuhan;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkup pemerintahan daerah dan mewujudkan E-Government;
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan daerah, sarana dan prasarana kearsipan yang berbasis elektronik
4. Penguatan peran pengelola informasi dan dokumentasi daerah (PPID);
5. Meningkatkan penyusunan dan penyelarasan produk hukum daerah (Perda/Pergub) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi;
7. Menganalisis/ menyusun kebutuhan formasi PNS; anjab/ABK, meningkatkan kualitas rekrutmen kader pemerintahan melalui seleksi system CAT: mengelola/

- menata jabatan pimpinan tinggi/ jabatan administrasi/ jabatan fungsional;
menata kenaikan pangkat PNS; menata system penilaian kompetensi PNS;
menata system pengembangan karir; menata penilaian kinerja PNS
8. Meningkatkan pemberian penghargaan dan insentif bagi aparatur berbasis kinerja;
 9. Membudayakan nilai profesi pegawai ASN melalui kelembagaan pembinaan etika profesi dan mental pegawai ASN, menyebarluaskan informasi tentang Nilai Dasar dan Kode Etik Pegawai ASN, pengelolaan kartu identitas ID Cards, KARPEG, KARSI, Kartu Pegawai ASN, system absensi sidik jari, meningkatkan disiplin PNS dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
 10. Meningkatkan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparat;
 11. Meningkatkan pembinaan aparatur desa/kelurahan;
 12. Mewujudkan pelayanan perijinan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
 13. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
 14. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi penerimaan daerah;
 15. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait bencana dan Penyediaan Dana On Call (Dana Tanggap Darurat).
 16. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum dan HAM melalui sosialisasi dan media informasi lainnya;
 17. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya;
 18. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik;
 19. Mengimplementasikan undang-undang desa dan mewujudkan/ memfasilitasi desa membangun.
 20. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan milik Pemerintah Daerah, koordinasi dan fasilitasi sertifikasi kepemilikan lahan masyarakat serta pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum;
 21. Meningkatkan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;

22. Meningkatkan pemberian penghargaan dan insentif bagi aparatur berbasis kinerja;
23. Melakukan fasilitasi penataan batas daerah dan kode wilayah secara komprehensif;
24. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Perencana;
25. Melaksanakan Perencanaan berbasis penelitian/riset
26. Mewujudkan kerjasama pembangunan dan Pengembangan Wilayah;
27. Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pusat dan daerah serta wilayah lainnya serta peran serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan mewujudkan E-Planning;
28. Melaksanakan penyiapan dan penguatan forum data dan informasi perencanaan pembangunan;
29. Memfasilitasi dan meningkatkan peran dan fungsi komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA);
30. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan partai politik dalam pembangunan politik dan pelaksanaan Pemilu;
31. Meningkatkan penataan dan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah secara baik dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan;
32. Meningkatkan penataan dan pengelolaan keuangan daerah serta penertiban aset-aset daerah;
33. Meningkatkan kompetensi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan jasa;
34. Meningkatkan semangat Nasionalisme dan memperkokoh NKRI;



BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Rencana program dan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 disesuaikan dengan 5 (lima) agenda prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Pembangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang;
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya; serta
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

Rencana program dan kegiatan prioritas tersebut, sebagaimana diuraikan dalam lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 ini.



BAB 6

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun dari partisipasi masyarakat dan swasta, yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran serta Strategi Pembiayaan Tahun 2016.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RKPD Tahun 2016 dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin dan transparansi dari para pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Keharmonisan segenap pelaku pembangunan masih tetap akan memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan pemahaman terhadap tugas masing-masing, untuk itu perlu terus dikembangkan secara profesional dan transparan agar anggaran tahun 2016 dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

l a m p i r a n

